
SOSIOHUMANIORA

Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora
Journal of Social Sciences and Humanities

Volume 21, No. 1, Maret 2019

Editor	: Asep Sumaryana
Editor Bagian	: Suwandi Sumartias Sulaeman Rahman Nidar Agus Nero Sofyan Munadjat Rd. Ahmad Buchari Yoga Bestari Anissa Lestari Kadiyono Nia Kurniati Asep Agus Handaka Suryana Ella Lesmanawaty Wargadinata Linda Sunarti
Manajer Jurnal	: Usep Sahrudin U. Santosa Kusumah
Sekretariat	: Trisatya Yono Yugiono Lala Adilla Nur Dodih Firmansyah

Alamat Penerbit / Redaksi:

Direktorat Sumberdaya Akademik dan Perpustakaan Universitas Padjadjaran
Graha Kandaga (Perpustakaan) Jatinangor Lt. 4
Jl. Raya Bandung - Sumedang KM. 21 Jatinangor
Telepon/Fax (022) 842 88806 ext. 3806 dan E-mail: sosiohumaniora@yahoo.co.id
website: <http://sosiohumaniora.unpad.ac.id/user>

(Terbit 3 Kali dalam Satu Tahun: Maret, Juli dan Nopember)

PERINGKAT AKREDITASI SINTA 2

**Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3/E/KPT/2019**

Terindeks di:



DAFTAR ISI
SOSIOHUMANIORA
Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora
Journal of Social Sciences and Humanities

Volume 21, No. 1, Maret 2019

Pengembangan Desa Wisata Pendidikan di Desa Cibodas, Kabupaten Bandung Barat (<i>Encang Saepudin, Agung Budiono, dan Mas Halimah</i>) DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i1.19016	1 - 10
Identifikasi Risiko Usahatani Mangga dalam Pengembangan Agrowisata di Kabupaten Cirebon (<i>Nur Syamsiyah, Lies Sulistyowati, Kuswarini Kusno, dan Sulistyodewi Nur Wiyono</i>) DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i1.11062	11 - 16
Efektivitas Otonomi Daerah dalam Membangun Pemberdayaan Sumber Daya Manusia pada Masyarakat Pedesaan (<i>Kantirina Rachaju</i>) DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i1.11974	17 - 21
Model Sinergi Unsur Pentaheliks Pariwisata dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Kota Parepare dan Kabupaten Bone (<i>Ilham Junaid</i>) DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i1.17016	22 - 33
Komunitas Jawa di Desa Wonoharjo sebagai Jejak Migrasi Etnis Jawa ke Kabupaten Pangandaran (<i>Dian Indira, Raden Muhammad Mulyadi, dan Riki Nasrullah</i>) DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i1.19024	34 - 39
The Role of Weavers Woman in Strengthening Nationalism: Case Study in Sajingan Besar Frontier, Indonesia (<i>Elyta and A. Razak</i>) DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i1.19285	40 - 45
Nuansa Makna Sinonim Verba Transitif Berimbuhan <i>meng-kan</i> Bermakna Inheren Perbuatan dalam Bahasa Indonesia (<i>Ranti Permatasari, Ngusman Abdul Manaf, dan Novia Juita</i>) DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i1.17947	46 - 51
Profil dan Karakteristik Penyuluh Pertanian Lulusan Pendidikan Jarak Jauh (<i>Diarsi Eka Yani, Nurul Huda, Ludivica E. Setijorini, dan Idha Farida</i>) DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i1.11454	52 - 57
Kesiapan Pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” di Provinsi Sumatera Barat (<i>Astika Ummy Athahirah, dan Rossy Lambelanova</i>) DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i1.14363	58 - 64
Relasi Gender Patriarki dan Dampaknya Terhadap Perempuan Hubula Suku Dani, Kabupaten Jayawijaya, Papua (<i>Yanuaris You, Enos H. Rusmansara, Johz Mansoben, dan Agustina Ivone Poli</i>) DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i1.19335	65 - 77
Analisis Hubungan Antara Budaya Organisasi dan Implementasi <i>Innovation Types</i> dan Dampaknya Pada Kinerja Manajer (<i>Muhammad Dahlan</i>) DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i1.18982	78 - 82
Representasi Perubahan Sosial dalam Desain Kaus Oblong Banyumasan (<i>Sulyana Dadan</i>) DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i1.14602	83 - 89
Tingkat-Tingkatan Bicara Bahasa Bali (Dampak Anggah-Ungguh Kruna) (<i>I Nyoman Stuwija, I Nyoman Rajeg Mulyawan dan Ida Ayu Iran Adhiti</i>) DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i1.19507	90 - 97
Sikap Bahasa dan Kemampuan Memahami Bacaan Bahasa Inggris Mahasiswa: Studi Kasus di FIB Unpad (<i>Ida Farida Sachmadi, Lestari Manggong, dan Lia Maulia Indrayani</i>) DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i1.14541	98 - 106
Potret Minat Lanjutan Sekolah: Analisis Dampak Rencana Penetapan Wilayah Garut Utara sebagai Kawasan Industri (<i>Kurnia Muhamad Ramdhan, RD. Ahmad Buchari dan D. Anisa Sunjia</i>) DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i1.14541	107 - 112

PENGANTAR REDAKSI

Alhamdulillah pada edisi ini, posisi Sosiohumaniora telah berada pada Sinta 2. Hal demikian pastilah berkat dukungan serta pengertian semuanya. Pada tampilan kali ini pula disajikan 15 tulisan yang terdiri dari tulisan tentang pariwisata yang ditulis oleh Saepudin, *dkk* serta Junaid. Bedanya, Saepudin mengupas pariwisata di Bandung Barat dan Junaid di Bone. Keduanya juga mengupas dari sisi yang berbeda. Saepudin membahasnya dari pengembangan wisata pendidikan, sedangkan Junaid membingkainya dengan model sinergi unsur *pentahelix* pariwisata. Boleh jadi keduanya saling menguatkan dan melengkapi satu dengan yang lain. Dengan demikian menjadi perlu dicermati oleh kita sekalian.

Tulisan yang tidak kalah menariknya adalah pemberdayaan sumberdaya manusia. Rachayu mengupas tentang SDM pedesaan yang dibingkai otonomi daerah. Sedangkan Elyta mengupas perempuan penun dalam kerangka penguatan nasionalisme. Ketiga, You yang mengupas relasi gender di perempuan Hubula Suku Dani. Ketiga terikat karena sama-sama mengkaji SDM perbatasan sedangkan satunya lagi pedesaan yang sama-sama harus dikuatkan. Tanpa penguatan yang bernas, boleh jadi menjadi media pelemahan bagi sendi-sendi kehidupan yang dimulai dari pinggiran. Oleh sebab itu, otonomi harus berperan penting agar potensi kerusakan tidak berkembang.

Salah satu yang patut diperhatikan dalam usaha tani adalah identifikasi resiko seperti dikupas Syamsiah. Dengan kemampuan melakukan hal seperti itu usahatani, dalam konteks ini Mangga di Cirebon dapat berkembang lebih baik. Tentu saja dalam upaya tersebut kehadiran penyuluh pertanian menjadi penting seperti ditulis Yani *dkk*. Dalam tulisan ini Yani mengupas mengenai penyuluh yang lulusan pendidikan jarak jauh. Perlu dicermati keefektifan pendidikan sejenis ini dalam membentuk penyuluh yang tangguh.

Tulisan Indira mengupas komunitas Jawa di Pangandaran. Kehadirannya menjadi menarik untuk ditelusuri seperti halnya budaya banyumasan yang ada di *design* kaos oblong tulisan Dadan. Bisa jadi semuanya memiliki ceritera menarik yang perlu diungkap. Dengan tulisan yang disajikan, kepenasaran pembaca dapat dijawab walaupun perlu penelusuran lanjutan agar dapat tuntas.

Dalam tulisan yang berbeda, Dahlan mengupas hubungan budaya organisasi dengan implementasi *innovation types* serta dampaknya pada kinerja manager. Bisa jadi ini juga menjadi tulisan menarik yang perlu dibaca. Tulisan lainnya yang berkenaan dengan bahasa Indonesia. Permatasari mengupas makna sinonim verbal yang bermakna *inheren*. Tingkat-tingkat bicara bali yang disampaikan oleh Suwija, Sikap bahasa dan kemampuan memahami bacaan bahasa Inggris oleh mahasiswa yang dikupas tuntas oleh Sachmadi, serta Potret minat lanjutan sekolah di wilayah Garut Utara sebagai dampak penetapan kawasan industri yang ditulis oleh Ramadhan. Seperti apakah itu ? dapat dibaca dengan seksama dan kritis agar dapat memberikan *feedback*, baik pada penulis maupun pada redaksi.

Semoga seluruh kontributor dan pembaca tetap mampu memberikan pemikiran kritis dan analitis dalam rangka pengembangan akademik kita semua. Selamat membaca dan bagi yang akan memasuki bulan Ramadhan, seluruh jajaran redaksi menghaturkan selamat menjalankannya dan mohon maaf atas segala khilaf dan salah.

Selamat membaca.

Hormat kami,

Dewan Redaktur

PENGEMBANGAN DESA WISATA PENDIDIKAN DI DESA CIBODAS, KABUPATEN BANDUNG BARAT

Encang Saepudin¹, Agung Budiono², dan Mas Halimah³

^{1,2}Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran

³Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

E-mail: encang@unpad.ac.id

ABSTRAK. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses pengembangan desa wisata pendidikan berdasarkan pada potensi produk wisata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Proses pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, *FGD*, dan studi pustaka. Teknik analisis data deskriptif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji Validitas dan reliabilitas melalui proses triangulasi sumber. Informan dalam penelitian ini adalah pihak pemerintah (3 orang), tokoh masyarakat dan agama (5 orang), dan pengelola desa wisata (5 orang). Jumlah responden 13 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pengembangan desa wisata pendidikan di Desa Cibodas memiliki enam strategi yaitu (a) peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan desa wisata (b) pengembangan desa wisata yang khas berdasarkan kepada potensi alam, sosial, dan budaya masyarakat setempat; (c) pengembangan kapasitas lembaga masyarakat sebagai lembaga pengelola desa wisata (d) pengembangan media promosi wisata; (e) peningkatan sumberdaya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan yang terstruktur dan terorganisasi; (f) pendampingan yang dilakukan secara terstruktur dari lembaga/ dinas terkait.

Kata Kunci: desa wisata; wisata pendidikan; pariwisata

DEVELOPMENT OF EDUCATION TOURISM IN CIBODAS VILLAGE IN WEST BANDUNG REGENCY.

ABSTRACT. The aim of the study was to find out the development strategy of the education tourism based on the potential of tourism products. This study uses qualitative methods with a case study approach. The data was gathered by interviews, observation, *FGD*, and literature studies. The data was analyzed with the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data validity and reliability were tested through the source triangulation process. The informants in this study were the government officers (3 people), community and religious leaders (5 people), and tourism village managers (5 people). The number of respondents is 13 people. The results of the study show that the model of rural tourism education development in Cibodas Village has six strategies, namely (a) developing the active participation of the community in the development of tourism villages (b) the development of a typical tourism village based on the natural, social and cultural potential of the local community; (c) developing the capacity of community institutions as tourism village management institutions (d) developing tourism promotion media; (e) improving human resources through structured and organized education and training programs; (f) mentoring which was conducted structurally by related institutions / agencies.

Keywords: village tourism; education tourism; tourism

PENDAHULUAN

Pengembangan agrowisata selain berfungsi sebagai peningkatan konservasi lingkungan, juga berfungsi sebagai pengembangan ekonomi masyarakat. Pengembangan wisata berbasis masyarakat merupakan upaya strategis untuk memberdayakan masyarakat. Sinergi antara keindahan alam, budaya masyarakat, dan kehidupan pertanian akan menjadi daya tarik wisata suatu daerah. Selain itu, dengan berkembangnya wisata pedesaan di suatu daerah akan memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan pemerintah (Aprilia, 2015). Apabila mengacu kepada pedoman desa wisata yang dikeluarkan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata pengembangan desa wisata ini harus disertai oleh wisata pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, desa wisata harus pula menjadi desa wisata pendidikan.

Perkembangan pariwisata yang cenderung mengarah ke wisata massal, seringkali menimbulkan beragam dampak negatif yang tidak disadari. Dampak wisata massal

dapat menimbulkan degradasi bahkan destruksi atas lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan budaya dan sosial. Berdasarkan dampak tersebut, sebagian orang berkeinginan untuk mencari alternatif wisata baru yang dirasa lebih *sustainable* dan minim dampak negatif. Oleh karena itu, sejak tahun 1980, terjadi pergeseran minat wisatawan yang mengarah pada pilihan wisata yang lebih ramah lingkungan. Seiring dengan perkembangan tersebut, minat terhadap wisata yang menawarkan pengalaman wisata edukasi juga ikut meningkat (Prastiwi, 2016).

Wisata pendidikan merupakan konsep wisata yang menyuguhkan perpaduan antara konsep pendidikan nonformal dengan wisata (hiburan) kepada wisatawan. Dalam konsep ini, ketika wisatawan berkunjung selain mendapatkan hiburan (rekreasi) juga memperoleh pengalaman/ belajar dengan metode yang menyenangkan. Melalui *edutainment* pembelajaran akan lebih cepat difahami oleh para pengunjung. Hal ini sejalan dengan pendapat Rodger, Ia menyatakan bahwa pariwisata pendidikan merupakan suatu program dimana peserta kegiatan

wisata melakukan perjalanan wisata pada suatu tempat tertentu dalam suatu kelompok dengan tujuan utama mendapatkan pengalaman belajar secara langsung terkait lokasi yang dikunjungi. (Rodger, 1998: 28)

Menurut Ritchie (2003) wisata edukasi adalah “*a tourist activity undertaken by those who are undertaking an overnight vacation and those who are undertaking an excursion for whom education and learning is a primary or secondary part of their trip*”. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa wisata edukasi adalah kegiatan wisata yang dilakukan oleh individu atau kelompok ke suatu tempat dengan tujuan mendapatkan pengalaman pembelajaran.

Ritchie (2003) dalam sumber yang sama melihat wisata edukasi sebagai sebuah produk, proses, dan fungsi. Sebagai sebuah produk, penekanannya adalah pada hasil dari pengalaman belajar, jika dilihat sebagai sebuah proses atau fungsi, fokusnya adalah pada cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Wisata edukasi juga dapat dilihat sebagai sebuah kategori dari wisata alternatif (alternatif dari wisata massal yang konvensional, terstandar dan berskala besar) dan merupakan subbagian dari wisata minat khusus (Saefulloh dan Darma, 2014). Wisata yang termasuk dalam wisata edukasi adalah ekowisata, wisata sejarah, wisata pedesaan/pertanian, pertukaran pelajar antar institusi pendidikan, wisata studi banding, kegiatan universitas dalam dan luar negeri, dan kegiatan *study tour* sekolah. Selain itu, ditambahkan oleh Yusuf (2016) bahwa destinasi wisata edukasi bisa berupa daerah dengan kekayaan alam ataupun keunikan hasil buatan manusia.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, wisata pendidikan merupakan perpaduan dari unsur *learning* dan *enriching*. Kedua unsur ini merupakan hal yang harus ada pada setiap kegiatan wisata. Dengan konsep ini para wisatawan memiliki kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru disamping kesenangan di objek wisata. Mendapatkan *Learning Experience* melalui pengetahuan baru adalah hal yang abadi dan mampu meningkatkan hidup seseorang atau *Expansion Life* (Hasanah, 2015).

Wisata edukasi akan bermanfaat apabila pengunjung/ wisatawan memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru disamping kesenangan di objek wisata. Oleh karenanya, dalam wisata edukasi, perlu diterapkan prinsip 3E sebagai berikut (Sharma, 2015);

a. Faktor lingkungan (*environmental factors*)

Faktor lingkungan dapat berupa suasana tempat tinggal atau lingkungan belajar. Lingkungan tersebut harus nyaman dan dapat mendukung kelancaran aktivitas wisata. Untuk menciptakan kenyamanan bagi wisatawan pada saat melakukan kegiatan wisata, harus didukung dari lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik adalah keadaan yang tampak di sekitar objek wisata, yang akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan wisata. Lingkungan fisik dapat berupa suasana alam

yang asri, lingkungan yang bersih, jauh dari polusi dan sampah. Sedangkan lingkungan sosial bisa berupa sikap masyarakat dalam menerima dan melayani kunjungan tamu, sikap ramah dan sopan-santun, serta sikap masyarakat yang menimbulkan rasa aman bagi wisatawan.

b. Keikutsertaan (*engagement*)

Tujuan utama seseorang melakukan wisata edukasi adalah untuk mendapatkan pengalaman pembelajaran. Oleh karena itu, dalam wisata edukasi wisatawan ikut berpartisipasi aktif dan dilibatkan dalam kegiatan wisata, namun tanpa mengganggu ketertarikan atau preferensi mereka. Wisatawan dilibatkan di dalam kegiatan agar mereka lebih mampu menyerap ilmu dan pesan yang disampaikan, sehingga mereka dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Proses belajar akan menjadi lebih mudah dengan keterlibatan wisatawan secara langsung didalamnya. Keikutsertaan atau keterlibatan wisatawan dalam setiap kegiatan merupakan inti dari proses pembelajaran.

c. Eksplorasi (*exploration*)

Eksplorasi memberikan pembelajaran secara langsung kepada wisatawan mengenai tempat tersebut. Dengan eksplorasi, wisatawan dapat lebih menggali informasi yang mereka butuhkan, dengan melihat langsung objek tersebut di lapangan. Namun, sebelum melakukan kegiatan eksplorasi, terlebih dahulu dilakukan kegiatan pengarahan terhadap wisatawan yang diberikan oleh pengelola desa wisata. Pengarahan dilakukan untuk memberikan pengetahuan dasar, sedangkan eksplorasi akan memberikan pengetahuan dan pemahaman lebih mendalam melalui pengalaman yang didapat di lapangan.

Dalam UU Kepariwisata nomor 10 Tahun 2009 pasal 23 ayat 1 C menjelaskan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali”. Potensi dan daya tarik wisata yang ada di Desa Cibodas merupakan aset potensial yang perlu dikembangkan. Sesuai dengan undang-undang tersebut, pemerintah setempat berkewajiban untuk mengembangkannya.

Pengembangan desa wisata sebagai aset kepariwisataan dan aset ekonomi perlu memegang prinsip (1) tidak bertentangan dengan budaya setempat, (2) pembangunan fasilitas ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, dan (3) pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan desa wisata Cibodas harus memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan sosial, budaya, dan mata pencaharian masyarakat. Berdasarkan kepada uraian di atas, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pengembangan desa wisata pendidikan di Desa Cibodas Kabupaten Bandung Barat.

METODE

Metode yang digunakan yaitu kualitatif (Travers, 2001). Pemilihan pendekatan ini dengan pertimbangan bahwa sifat data penelitian mampu mempertahankan keutuhan dari obyek, artinya berbagai data yang berkaitan dengan penelitian dipahami sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Melalui metode ini, pemaparan data hasil penelitian akan dilakukan secara deskriptif berdasarkan fakta secara kualitatif. Data yang diuraikan sesuai dengan fakta hasil kajian lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah 13 orang dengan rincian sebagai berikut pihak pemerintah 3 orang, tokoh masyarakat dan agama 5 orang, dan pengelola desa wisata 5 orang. Mereka berperan sebagai informan yang bertindak langsung sebagai pengelola pengembangan desa wisata. Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi secara langsung terhadap aktivitas masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Wawancara dilakukan secara tidak berstruktur; bentuknya bisa dialog, diskusi, bincang santai, atau tanya jawab. Data hasil penelitian lapangan selanjutnya diolah, disusun, dan dianalisis sehingga data memiliki nilai bagi kehidupan masyarakat.

Untuk menambah wawasan penelitian ini, dilakukan kajian pustaka terkait permasalahan pengembangan desa wisata terutama berkaitan dengan konteks strategi dan proses pengembangan desa wisata. Konsep dan teori tentang kriteria desa wisata akan dijadikan dasar dalam analisis dan pembahasan data penelitian. Konteks tersebut terkait dengan kenyataan yang terkait dengan produk dan daya tarik wisata, kesiapan dan penerimaan masyarakat, pengembangan sumberdaya manusia, dan ketersediaan ruang untuk pengembangan fasilitas pendukung wisata merupakan data primer yang diperoleh dan dijadikan dasar dalam pengolahan data hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi obyek dan daya tarik wisata merupakan modal dasar bagi pengembangan suatu kawasan pedesaan menjadi desa wisata. Potensi tersebut dapat berupa potensi fisik lingkungan alam dan potensi sosial budaya (Putra, 2012). Berdasarkan pada hal tersebut Desa Cibodas memiliki potensi besar sebagai desa wisata baik dari segi potensi fisik lingkungan alam maupun potensi sosial budaya. Berdasarkan data profil Desa Tahun 2016 luas Desa Cobodas 988,77 ha terdiri dari (1) daerah permukiman 113,50 ha, (2) tanah ladang 695,27 ha, dan (3) pekarangan 180 ha. Jumlah penduduk desa adalah 11,206 orang yang terdiri atas 5655 orang laki-laki dan perempuan 5551 orang. Beberapa jenis tanaman yang menjadi andalan para petani adalah tomat, cabe, kubis, dan lain-lain.

Selain bergerak dalam bidang pertanian, para penduduk desa juga bergerak dalam bidang peternakan.

Ternak yang menjadi unggulan penduduk desa adalah sapi, ayam kampung, dan domba. Tingkat kesejahteraan masyarakat desa Cibodas cukup tinggi. Hal ini terlihat dari data keluarga prasejahtera yang hanya mencapai 24.8 % atau 381 keluarga dari 1535 keluarga. Selain itu, tingkat kesejahteraan masyarakat ini terlihat dari penghasilan percapita dari setiap keluarga. Penghasilan percapita keluarga bisa dilihat dari sektor pertanian, peternakan, dan industri kecil menengah.

Berdasarkan peraturan daerah nomor 14 tahun 2012 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Bandung Barat, potensi pariwisata desa Cibodas dapat di gambarkan sebagai berikut;

1. Daya tarik wisata; Potensi utama desa Cibodas adalah agrowisata, berupa lahan dan hasil pertanian (Pertanian mulai dari pembibitan, penanaman, pemeliharaan, masa panen, dan pasca panen; Peternakan, pemeliharaan, budidaya, dan olahan hasil peternakan); wisata pendidikan khusus pertanian mulai dari pembibitan sampai pengolahan hasil pertanian;
2. Aksesibilitas; Jalur menuju desa wisata Cibodas sudah cukup memadai namun masih terdapat titik-titik yang perlu diperbaiki; rambu-rambu menuju desa wisata sudah tersedia namun masih terbatas.
3. Fasilitas; Tersedia *homestay* berjumlah 44 rumah. Masing-masing rumah memiliki daya tampung 8-10 orang; tersedia pusat oleh-oleh dan cinderamata, rumah makan, dan aula.
4. Pemberdayaan masyarakat; Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan desa wisata sudah cukup tinggi, namun masih terbatas pada beberapa sektor; sudah terbangun kesadaran masyarakat Desa Cibodas sebagai tuan rumah yang baik dalam menerima para wisatawan.
5. Pemasaran dan promosi; Promosi dilakukan hanya sebatas informasi dari orang ke orang.
6. Kelembagaan dan sumber daya manusia; Sudah ada peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Bandung Barat (Perda nomor 14 tahun 2012); sudah terbentuk lembaga kemasyarakatan yang mengelola desa wisata. Lembaga tersebut domotori oleh Kelompok tani Mekar Tani Jaya

Untuk menyusun strategi pengembangan desa wisata Cibodas, dilakukan analisis SWOT berdasarkan potensi pariwisata yang dimiliki oleh Desa Cibodas. Analisis ini dilakukan untuk menggambarkan strategi yang paling tepat di dalam perencanaan pengembangan desa wisata. Berikut ini adalah gambaran hasil analisis SWOT dan gambaran strateginya.

Berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah dilakukan terdapat enam strategi yang bisa dilakukan dalam pengembangan desa wisata yaitu;

1. peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembagan desa wisata mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pada tahap evaluasi program;

Tabel 1. Analisis SWOT pengembangan desa wisata pendidikan

Eksternal	Strength (S)	Weakness (W)
	1. Daya tarik objek wisata yang menarik dan alami 2. Sikap masyarakat cenderung ikut berpartisipasi 3. Terdapat kelompok pengelola desa wisata (kompepar) yang dimotori oleh SP4S 4. Keterbukaan masyarakat terhadap pengunjung 5. Fasilitas wisata sudah cukup	1. Keikutsertaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata masih bersifat pelaksana (Objek belum subjek) 2. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah yang berpengaruh pada keberhasilan pengembangan desa wisata 3. Belum maksimalnya upaya promosi
Opportunity (O)	Strategi SO	Strategi WO
1. Adanya regulasi dari pemerintah yang mendorong perkembangan pariwisata 2. Adanya kepedulian dari CSR perusahaan dan perguruan tinggi 3. Pasar wisata yang masih terbuka luas	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. (S1+S2+S3+S4+S5+O1+O2+O3) 2. Mengembangkan produk wisata yang khas berdasarkan kepada potensi alam, sosial, dan budaya masyarakat setempat (S1+S4+O1+O2+O3) 3. Pengembangan kapasitas lembaga masyarakat sebagai lembaga pengelola desa wisata (kompepar) (S2+S3+S4+S5+O1) 4. Pengembangan media promosi wisata melalui berbagai media (S1+S2+O2+O3)	1. Pendampingan kepada masyarakat untuk mengawal proses pengembangan desa wisata (W1+W2+W3+O1) 2. Peningkatan sumberdaya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan yang terstruktur (W1+W2+W3+O2+O3)
Threat (T)	Strategi ST	
1. Kurangnya koordinasi antar SKPD 2. Kurangnya koordinasi antar Pemerintah dengan masyarakat	1. Membangun alur komunikasi melalui peningkatan kapasitas kelompok pengembang desa wisata (S2+S3+T1+T2)	Memberi penyuluhan kepada masyarakat desa wisata mengenai pentingnya pengembangan desa wisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (W1+W2+W3+T1+T2)

2. pengembangan desa wisata yang khas berdasarkan kepada potensi alam, sosial, dan budaya masyarakat setempat;
3. pengembangan kapasitas lembaga masyarakat sebagai lembaga pengelola desa wisata (kompepar) untuk membangun koordinasi dan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga donor;
4. pengembangan promosi wisata melalui berbagai media;
5. peningkatan sumberdaya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan yang terstruktur dan terorganisasi;
6. pendampingan dilakukan secara terstruktur dari lembaga-lembaga/ dinas terkait

Strategi yang dikemukakan di atas sejalan dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang *Kepariwisata* terutama bab IV mengenai *Pembangunan Kepariwisata* pasal 7 menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan meliputi empat komponen utama yakni industri pariwisata, destinasi wisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan. Undang-undang nomor 10 tahun 2009 ini ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat dengan mengeluarkan peraturan daerah nomor 07 tahun 2013 tentang *Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah*. Dalam peraturan daerah tersebut disebutkan komponen-komponen utama dalam pengembangan pariwisata daerah yakni industri pariwisata, destinasi, promosi, dan kelembagaan kepariwisataan.

Hal tersebut ditegaskan pula di dalam peraturan daerah Kabupaten Bandung Barat nomor 04 tahun 2012 tentang *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bandung Barat terutama* pada bab

IV tentang strategi pembangunan kepariwisataan pasal 11 menyatakan bahwa strategi pembangunan kepariwisataan dilaksanakan melalui empat sektor pembangunan yaitu industri, destinasi, promosi, dan kelembagaan kepariwisataan.

Berikut ini akan digambarkan mengenai strategi pengembangan desa wisata sesuai dengan komponen-komponen pembangunan kepariwisataan daerah;

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa Wisata
Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata mutlak diperlukan. Keberhasilan pengembangan desa wisata tidak mungkin tercapai tanpa partisipasi masyarakat. Masyarakat setempat dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pengembangan desa wisata. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Batubara (2017) menyatakan bahwa partisipasi bukan hanya sekadar salah satu tujuan dari pembangunan sosial tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan sosial. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya.
Meningkatkan partisipasi dalam pengembangan desa wisata harus dilakukan dengan cara meningkatkan keterlibatan warga secara langsung dalam berbagai tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada tahapan evaluasi program. Untuk membangun keterlibatan masyarakat dalam sebuah program pembangunan diperlukan tiga unsur pokok yaitu adanya kemauan, kesempatan, dan kemampuan untuk berpartisipasi. Yuliasuti (2013) mengemukakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam sebuah program bergantung pada kemauan masyarakat untuk berpartisipasi, kesempatan yang

diperoleh untuk berpartisipasi, dan kemampuan untuk berpartisipasi.

Kemauan untuk berpartisipasi merupakan kunci utama bagi tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Kesempatan dan kemampuan yang cukup, tidak menjadi jaminan untuk tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat. Apabila masyarakat memiliki kemampuan dan sudah diberi kesempatan untuk berpartisipasi namun secara internal tidak memiliki kemauan maka partisipasinya akan rendah. Namun sebaliknya apabila kemampuan dan kesempatan terbatas tetapi memiliki kemauan akan mendorong seseorang untuk meningkatkan kemampuan dan aktif memburu serta memanfaatkan setiap kesempatan (Yustina dan Naria, 2008).

Partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan kegiatan pengembangan desa wisata dapat dilihat dari kehadiran masyarakat pada proses perencanaan program yang dilakukan oleh pengelola desa wisata. Kehadiran masyarakat dalam pertemuan yang dilakukan oleh pengelola desa wisata terkadang tidak sesuai dengan waktu luang dari para warga yang diundang. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat pada kegiatan fisik dan non fisik terutama dibidang ekonomi. Partisipasi masyarakat dalam penyediaan sarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengembangan desa wisata cukup bagus. Hal ini terlihat dari tingginya kesadaran masyarakat dalam membantu menyediakan fasilitas wisata seperti *homestay*. Pada tahap evaluasi partisipasi masyarakat dapat dilihat dari perhatian terhadap perawatan ataupun pemeliharannya secara berkala pada semua fasilitas yang ada. Partisipasi masyarakat dalam program ini dilihat dari seberapa aktif masyarakat dalam memelihara, menjaga, merawat seluruh sarana yang ada.

2. Pengembangan desa wisata yang khas berdasarkan kepada potensi alam, sosial, dan budaya masyarakat setempat

Potensi obyek dan daya tarik wisata merupakan modal dasar bagi pengembangan suatu kawasan pedesaan menjadi desa wisata. Potensi tersebut dapat berupa potensi fisik lingkungan alam dan potensi sosial budaya (Putra, 2012). Berdasarkan pada hal tersebut dapat digambarkan potensi desa Cibodas sebagai desa wisata dari segi potensi fisik lingkungan alam dan potensi sosial budaya sebagai berikut. Wilayah Cibodas merupakan daerah perbukitan di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dengan ketinggian 1260 meter di atas permukaan laut. Mayoritas penduduknya berpenghasilan dari pertanian. Komoditi di pasar Caringin Bandung dan pasar induk Tangerang merupakan produk hasil sayuran dari desa Cibodas yang mencapai sekitar 100 ton/ hari. Sekitar 695,27 ha ladang yang ada di Cibodas yang menghasilkan komoditas pertanian berupa sayuran, umbi-umbian,

dan buah-buahan. Selain itu, terdapat beberapa sumber mata air yang tidak pernah mengering, sekalipun musim kemarau.

Berdasarkan kepada potensi alam dan sosial budaya yang dimiliki desa Cibodas, pengembangan wisata pendidikan bidang pertanian memiliki peluang yang sangat besar. Keinginan masyarakat untuk memperoleh hiburan sekaligus mendapat pengetahuan baru merupakan peluang besar bagi pengembangan desa wisata pendidikan. Peluang ini terjadi karena adanya kejenuhan dalam pengembangan pendidikan di dalam ruangan. Proses pembelajaran didalam kelas bersifat kaku dan formal sehingga pendidikan di dalam kelas dapat menciptakan rasa bosan atau rasa jenuh. Oleh karena itu, *edutainment* dapat dijadikan suatu alternatif dalam meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan melalui proses hiburan (wisata). Proses kolaborasi unsur pendidikan dan wisata bisa dilakukan melalui kegiatan wisata pendidikan.

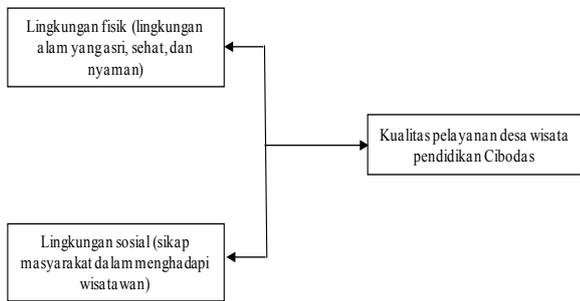
Seperti telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa wisata pendidikan merupakan konsep wisata yang menyuguhkan perpaduan antara konsep pendidikan nonformal dengan wisata (hiburan) kepada wisatawan. Dalam konsep ini, ketika wisatawan berkunjung selain mendapatkan hiburan (rekreasi) juga memperoleh pengalaman/ belajar dengan metode yang menyenangkan. Selain itu, wisata pendidikan merupakan perpaduan dari unsur *learning* dan *enriching*. Kedua unsur ini merupakan hal yang harus ada pada setiap kegiatan wisata pendidikan. Dengan konsep ini para wisatawan memiliki kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru disamping kesenangan di objek wisata. Mendapatkan *Learning Experience* melalui pengetahuan baru adalah hal yang abadi dan mampu meningkatkan hidup seseorang atau *Expansion Life* (Kwartolo, 2007).

Berdasarkan pada konsep tersebut maka didalam pengembangan desa wisata pendidikan di daerah Cibodas bisa berdasarkan kepada prinsip 3E yakni *environmental factors, engagement, dan exploration* (Sharma, 2015: 14-15).

a. Faktor lingkungan (*environmental factors*)

Faktor lingkungan dapat berupa suasana tempat tinggal atau lingkungan belajar. Lingkungan tersebut harus nyaman dan dapat mendukung kelancaran aktivitas wisata. Untuk menciptakan kenyamanan bagi wisatawan pada saat melakukan kegiatan wisata, harus didukung dari lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik adalah keadaan yang tampak di sekitar objek wisata. Lingkungan fisik dapat berupa suasana alam sekitar, kebersihan dan kesehatan lingkungan. Lingkungan sosial berasal dari masyarakat sekitar, antara lain sikap masyarakat dalam menerima dan melayani kunjungan tamu, sikap ramah dan sopan-santun, serta sikap masyarakat yang menimbulkan rasa

aman bagi wisatawan. Apabila lingkungan fisik dan sosial terbangun dengan baik maka pengembangan desa wisata akan mudah tercapai. Faktor lingkungan ini akan menjadi penentu kualitas pelayanan desa wisata pendidikan di Cibodas. Hal ini bisa dilihat pada bagan di bawah ini;



Gambar 1. Faktor Lingkungan Desa Cibodas

b. Keikutsertaan (*engagement*)

Tujuan utama seseorang melakukan wisata edukasi adalah untuk mendapatkan pengalaman pembelajaran. Oleh karena itu, dalam wisata edukasi wisatawan harus diikutsertakan secara aktif dalam kegiatan wisata. Keikutsertaan atau keterlibatan wisatawan dalam setiap kegiatan merupakan inti dari proses pembelajaran.

Upaya untuk melibatkan para wisatawan dalam proses pembelajaran yakni dengan membuat paket wisata. Paket wisata disusun didasarkan kepada kelompok target sasaran. Oleh karena itu, para pengelola harus secara rinci membuat paket wisata ini didasarkan kepada kelompok sasaran tersebut. Misalnya, paket wisata untuk tingkat pelajar akan berbeda dengan paket wisata untuk tingkat mahasiswa atau masyarakat umum. Pengemasan paket wisata harus didasarkan kepada unsur kekuatan/ keunggulan dari wisata pendidikan bidang pertanian.

Sebagai contoh berikut gambaran paket wisata yang bisa dibuat oleh para pengelola desa wisata Cibodas.

Tabel 2 Paket Wisata Cibodas

Hari	Waktu	Kegiatan	Penganggung jawab
1	08.00-10.00	Cek in Homestay	Panitia
	10.00-12.00	Pengenalan lingkungan desa Cibodas	Tour guide
	12.00-13.30	Istirahat, makan, solat	Panitia
	13.30-15.00	Pengenalan pembibitan	Tour guide, pengelola
	15.00-16.00	Istirahat	Panitia
	16.00-17.30	Pengenalan pemeliharaan tanaman	Tour guide, pengelola
	17.30-19.30	Intirahat, makan, dan solat	Panitia
	19.30-21.00	Api unggun (pengenalan seni budaya)	Tour guide, pengelola

21.00-....	Istirahat		
2	07.00-08.00	Sarapan pagi di Homestay	Panitia
	08.00.10.00	Pengenalan panen dan pasca panen	Tour guide, pengelola
10.00-12.00	Pengenalan pengolahan hasil pertanian	Tour guide, pengelola	
12.00-13.30	Istirahat, makan, solat	Panitia	
13.30-...	Cek out Homestay		

c. Eksplorasi (*exploration*)

Eksplorasi memberikan pembelajaran secara langsung kepada wisatawan mengenai objek wisata yang disuguhkan. Dengan eksplorasi, wisatawan dapat lebih menggali informasi yang mereka butuhkan, dengan melihat langsung objek tersebut di lapangan. Namun, sebelum melakukan kegiatan eksplorasi, terlebih dahulu dilakukan kegiatan pengarahan terhadap wisatawan. Pengarahan dilakukan untuk memberikan pengetahuan dasar, sedangkan eksplorasi akan memberikan pengetahuan dan pemahaman lebih mendalam melalui pengalaman yang didapat di lapangan.

Proses eksplorasi pada dasarnya sudah dirancang oleh pengelola desa wisata dengan menyuguhkan paket wisata pertanian mulai dari masa pembibitan sampai pada pengolahan hasil pertanian. Melalui pendampingan oleh *tour guide* dan pengelola desa wisata, para wisatawan disuguhkan berbagai kosnsep dan praktek berkaitan dengan proses bertani. Dalam hal ini, para wisatawan selain memperoleh pengetahuan dari para *tour guide* dan pengelola desa wisata, mereka pun memperoleh pengalaman langsung ketika ikut serta dalam praktek bertani.

3. Pengembangan kapasitas lembaga masyarakat sebagai lembaga pengelola desa wisata (kompepar) Untuk menjaga penerimaan dan komitmen masyarakat terhadap kegiatan kepariwisataan diperlukan kelembagaan yang kuat sebagai kontrol terhadap berjalannya proses pengembangan wisata di daerah tersebut. Dengan kata lain kelembagaan yang mendukung pengembangan dan pengelolaan desa wisata menjadi faktor pendukung keberhasilan pengembangan desa wisata. Kelembagaan merupakan wadah bagi masyarakat untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dalam pengembangan diri maupun kelompok. Hal ini terjadi karena pembangunan kelompok ini didasarkan kepada kebutuhan masyarakat dan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Pembentukan kelompok ini sejalan dengan pendapat Friedman (1993) dalam Prijono dan Pranarka (1996:138) yang menjelaskan bahwa proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif

(kelompok). Organisasi yang sudah dibangun dalam program pengembangan desa wisata adalah Pusat Pelatihan Pertanian & Pedesaan Swadaya (P4S) Mekar Tani Jaya.

4. Promosi wisata melalui berbagai media

Pengelola pariwisata harus melakukan promosi produk wisata agar produk ini dapat diketahui oleh masyarakat luas. Melalui promosi produk wisata akan lebih dikenal oleh masyarakat. Suryadana dan Octavia (2015) yang dikutip oleh Utama (2017) berpendapat bahwa promosi dalam pariwisata adalah “arus informasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan calon wisatawan atau lembaga usaha pariwisata kepada tindakan yang mampu menciptakan pertukaran (jual beli) dalam pemasaran produk pariwisata (Utama, 2017). Dengan demikian promosi dalam pemasaran produk pariwisata berperan sebagai pendukung transaksi dengan menginformasikan, membujuk, mengingatkan, dan membedakan produk pariwisata yang dipromosikan dengan pariwisata lainnya. Pada dasarnya pengelola wisata memiliki kewajiban untuk dapat menyampaikan informasi mengenai berbagai informasi yang dimiliki oleh desa wisata terutama potensi wisata. Oleh karena itu, pengelola desa wisata harus jeli dalam memilih komunikator sebagai penyampai pesan terhadap khalayak. Pemilihan komunikator harus didasarkan kepada kriteria dan standar tertentu. Adapun kriteria dan standar tersebut yakni kredibilitas sumber dan daya tarik sumber (Saepudin, Budiono, dan Rusmana, 2017).

Untuk melakukan proses promosi, pengelola desa wisata perlu melakukan langkah-langkah pemasaran produk wisata. Langkah-langkah tersebut yaitu mengidentifikasi produk wisata yang akan dipasarkan, merumuskan produk unggulan terutama produk yang paling menarik dan unik, menetapkan target pasar, perumuskan *positioning*, membangun identitas (*brand*), menetapkan harga, dan membangun saluran komunikasi pemasaran. Berikut gambaran langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan promosi desa wisata.

a. Mengidentifikasi produk wisata

Produk desa wisata merupakan pengalaman wisatawan selama melakukan aktivitas di desa wisata. Pengalaman diperoleh dari apa yang dilihat, apa yang dilakukan, dan apa yang dibeli oleh wisatawan. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan oleh pengelola desa wisata adalah mengidentifikasi apa yang bisa dilihat, dilakukan, dan dibeli oleh wisatawan di area wisata. Langkah-langkah mengidentifikasi produk wisata pedesaan yaitu;

- (1) mendata sebanyak-banyaknya potensi yang dimiliki. Dalam proses pendataan produk wisata, pengelola wisata tidak boleh menganggap

sederhana sebuah produk. Sekecil apapun potensi produk wisata harus tetap teridentifikasi. Hal ini dilakukan karena hal yang dianggap sederhana dan biasa di desa belum tentu dianggap biasa oleh para pengunjung. Mungkin saja hal yang biasa dan sederhana di desa justru menjadi hal yang luar biasa di mata para wisatawan. Misalnya, menanam padi mungkin hal yang biasa bagi masyarakat desa, tetapi bisa menjadi luar biasa bagi pengunjung dari kota.

- (2) Berfikir inovatif. Dalam proses berfikir inovatif harus mampu membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Oleh karena itu, pengelola desa wisata harus mampu melihat potensi yang bisa dikembangkan sesuai dengan minat dan motivasi para pengunjung desa wisata. Hal-hal yang dikembangkan (sesuatu yang baru) harus bisa memenuhi harapan para pengunjung. Misalnya membuat titik-titik untuk swafoto (*selfie*), membuat fasilitas istirahat dengan *hammock*, membuat panggung pertunjukan dll.
- b. Merumuskan dan membangun produk unggulan
- Keunikan produk wisata harus dirumuskan berdasarkan identifikasi produk yang telah kita lakukan. Produk wisata yang ditawarkan harus memberikan manfaat kepada para wisatawan yang menjadi target. Namun demikian didalam membangun produk wisata ini tetap harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan sosial supaya desa wisata dapat terus berkembang dan berkelanjutan. Keunikan yang bisa dijual di desa Cibodas adalah lingkungan pertanian dan budaya pertanian yang dimiliki, terutama pembelajaran mengenai pertanian dan olahan hasil pertanian.
- Komposisi produk wisata yang dapat dikemas oleh pengelola desa wisata yaitu produk fisik, paket wisata, dan program wisata. (a) Produk fisik terdiri atas atraksi (alam dan buatan) dan fasilitas wisata; (b) Paket wisata merupakan perpaduan dari beberapa tujuan kunjungan wisata dengan satu harga tertentu; dan (c) program merupakan acara-acara (*event*) yang dapat dibuat oleh pengelola desa wisata, baik secara terjadwal, maupun spontan, seperti acara perlombaan memasak dan olahan hasil pertanian.
- c. Menetapkan target pasar
- Penetapan target pasar harus disesuaikan dengan produk wisata yang dimiliki terutama produk unggulan yang telah ditetapkan. Dalam mencari segmen pasar, pengelola desa wisata dapat menggunakan berbagai teknik segmentasi seperti segmentasi berdasarkan tujuan wisata, geografis, demografis, psikografis, perilaku atau berbasis produk. Segmentasi yang dibidik harus melewati proses seleksi dan memenuhi kriteria (1) segmen yang dipilih harus yang mampu dilayani oleh pengelola desa wisata (*product-market matching*); (2) segmen yang

dipilih harus memperlihatkan pertumbuhan yang menjanjikan; (3) segmen yang dipilih harus lebih efisien dalam menjangkanya dibanding dengan segmen yang lain.

d. Perumusan *positioning*

Positioning adalah strategi dalam menanamkan citra desa wisata dibenak para calon wisatawan, agar dipersepsikan unik dibanding dengan desa wisata yang lain. Basis penetapan *positioning* adalah *Unique Selling Proposition* yang sudah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan pada *Unique Selling Proposition* Desa Cibodas mayoritas masyarakat petani sayuran dan olahan hasil pertanian, maka dapat dirumuskan *positioning* sebagai sentra/ pusat sayuran organik dan olahan hasil pertanian di wilayah Lembang.

e. Membangun identitas (*brand*)

Desa wisata harus memiliki identitas sebagai ciri khusus dan pembeda dengan produk wisata lainnya. Sebuah identitas desa wisata harus unik dan mudah diingat oleh pasar. Dalam membangun identitas, hal pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan merek (*brand*). Setelah memiliki merek selanjutnya dikampanyekan melalui komunikasi pemasaran. Menurut Keller (2013) dalam menetapkan merek, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu *memorability*, *meaningfulness*, *likability*, *transferability*, *adaptability*, *protectability*. (1) *Memorability*; artinya sebuah merek harus mudah diingat, dikenal, terbaca, dan menjadi pusat perhatian. (2) *Meaningfulness*; merek harus memiliki makna dan esensi dari produk (3) *Likability*; merek harus berkesan secara estetika (*eye-catching*). (4) *Transferability*; merek harus dapat disesuaikan dengan bahasa atau kebiasaan segmen pasar. (5) *Adaptability*; merek harus fleksibel atau cocok ditempatkan pada segala media, kondisi atau situasi. (6) *Protectability*; merek jangan sampai diimitasi atau diduplikasi, oleh karena itu harus didaftarkan secara legal.

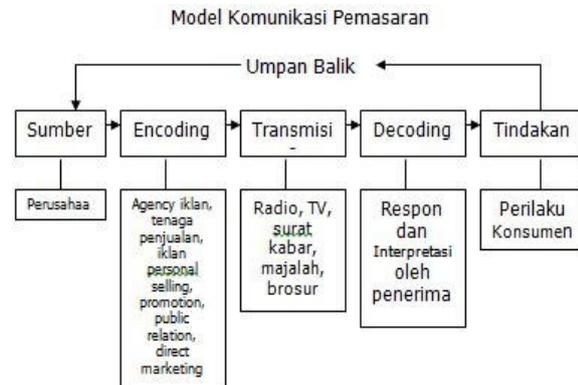
f. Menetapkan harga

Setelah produk wisata dikemas, pengelola desa wisata harus membuat perhitungan biaya pokok yang harus dikeluarkan dalam menyediakan produk wisata. Biaya pokok ini harus dihitung secara rinci dan cermat baik produk wisata berupa produk satuan, paket, atau pun *event*. Berdasarkan kepada hasil perhitungan biaya pokok ini pengelola desa wisata dapat menetapkan harga jual setiap produk. Ada beberapa teknik penetapan harga produk terhadap pasar yakni *penetrasi*, *psikologikal*, *variasi*. Berdasarkan kepada hasil pengamatan di lapangan teknik penetapan harga produk wisata yang paling tepat adalah teknik penetrasi. Teknik penetrasi merupakan penetapan harga rendah diawal untuk merangsang kunjungan, dan selanjutnya menaikkan

harga sampai pada posisi harga normal yang akan ditawarkan secara regular.

g. Membangun saluran komunikasi pemasaran

Saluran pemasaran merupakan perantara desa wisata dalam menawarkan produk wisata terhadap para calon wisatawan. Terdapat beberapa saluran yang dapat digunakan oleh pengelola desa wisata yaitu (1) tanpa perantara; artinya pengelola desa wisata mendatangkan para wisatawan tanpa bantuan pihak lain atau perantara. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengundang masyarakat, instansi, atau komunitas-komunitas tertentu untuk langsung datang ke lokasi desa wisata, (2) dengan bantuan perantara; artinya pengelola dalam mendatangkan pengunjung melewati perantara seperti agen perjalanan, biro perjalanan wisata, pramuwisata (*guide*) dan lain-lain. Perumusan pemasaran produk wisata bisa berpijak kepada model komunikasi pemsan (Sutisna , 2001)



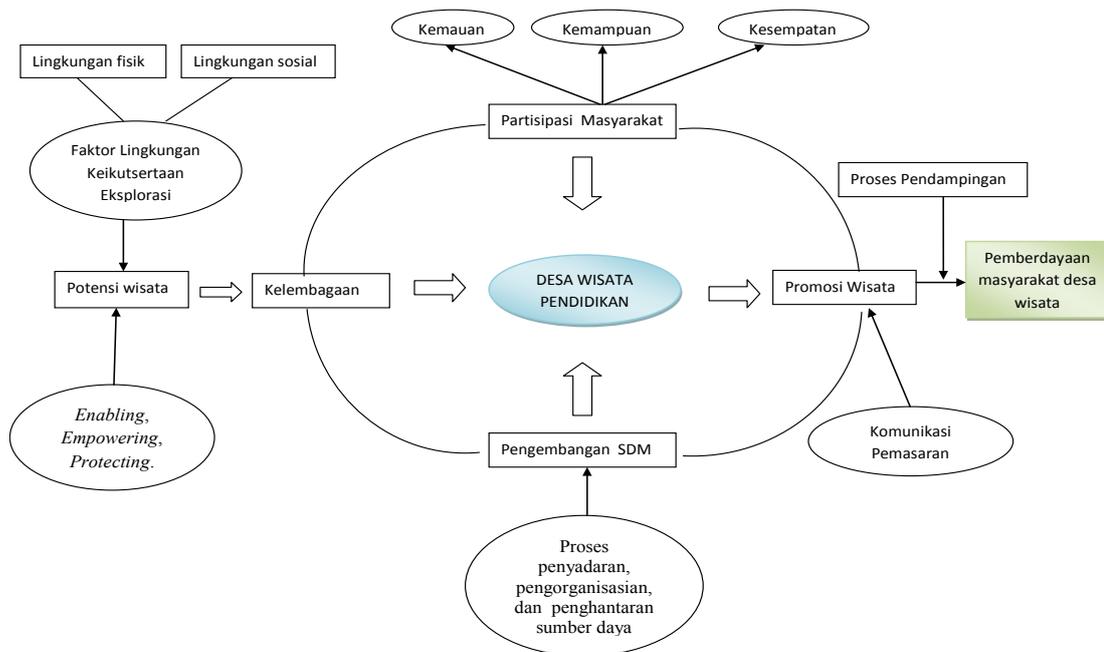
Sumber.: Sutisna, 2001 : 270

Gambar 2. Model Komunikasi Pemasaran

5. Peningkatan sumberdaya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan yang terstruktur dan terorganisasi;

Peningkatan kualitas sumber daya manusia para pengelola desa wisata merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata harus memperhatikan prinsip-prinsip *Enabling*, *Empowering*, *Protecting*. *Enabling* yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang; *Empowering* yaitu memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat; dan *Protecting* yaitu mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Prinsip-prinsip tersebut harus menjadi dasar dalam pengembangan desa wisata.

Untuk pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia dalam pengembangan desa wisata dapat melalui tahapan penyadaran, pengorganisasian, dan penghantaran sumber daya. Proses penyadaran sangat berkaitan dengan proses motivasi masyarakat dalam memahami potensi diri dan lingkungannya. Penghantaran sumberdaya yang dimaksudkan dalam program



Gambar 3. Strategi Pengembangan Desa Wisata

ini dapat berupa sumberdaya fisik, materi, atau sumberdaya manusia. Proses penghantaran sumber daya telah dilakukan oleh Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) Mekar Tani Jaya dengan program pembinaan terhadap para petani, para produsen olahan hasil pertanian, dan masyarakat yang mengembangkan ekonomi kreatif lainnya.

6. Pendampingan dilakukan secara terstruktur dari lembaga-lembaga/ dinas terkait

Pendampingan dalam program ini merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, motivator, dan dinamisator. Dengan demikian, proses pendampingan merupakan upaya untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan potensi diri dan lingkungannya yang selama ini sudah berjalan namun masih memiliki hambatan. Melalui proses pendampingan diharapkan terjadinya kemandirian baik secara individu maupun kelompok. Salah satu tolak ukur kemandirian adalah kemampuan masyarakat didalam mengambil keputusan.

Pelaksanaan pendampingan berpijak pada prinsip berkelompok, keberlanjutan, dan kemandirian. Prinsip ini menggambarkan kebersamaan didalam membangun kemandirian. Dengan menggunakan konsep “tumbuh dari, oleh, dan untuk kepentingan masyarakat” maka kebersamaan akan terbangun. Hal ini terjadi karena tumbuhnya rasa kepemilikan bersama terhadap berbagai program yang sedang dikembangkan.

Dengan demikian tujuan utama proses pendampingan adalah terwujudnya kemandirian dibidang material, intelektual, organisasi dan manajemen. Oleh karena itu, fokus pendampingan adalah penyadaran berfikir

kritis dan analitis yaitu membiasakan masyarakat untuk mampu mengidentifikasi masalah dan mampu memecahkan masalah secara mandiri. Berdasarkan kepada enam strategi yang telah dikemukakan, maka strategi pengembangan desa wisata pendidikan di desa Cibodas Kabupaten Bandung Barat dapat digambarkan sebagai berikut;

SIMPULAN

Strategi pengembangan desa wisata pendidikan di Desa Cibodas melalui enam strategi yaitu (a) peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengemabagan desa wisata mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pada tahap evaluasi program; (b) pengembangan desa wisata yang khas berdasarkan kepada potensi alam, sosial, dan budaya masyarakat setempat; (c) pengembangan kapasitas lembaga masyarakat sebagai lembaga pengelola desa wisata (kompepar) untuk membangun koordinasi dan komunikasi antara pemerintah, mesyarakat, dan lembaga donor; (d) pengembangan media promosi wisata melalui berbagai media; (e) Peningkatan sumberdaya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan yang terstruktur dan terorganisasi; (f) Pendampingan dilakukan secara terstruktur dari lembaga-lembaga/ dinas terkait.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Komunikasi Unpad, Direktur DRPMI Unpad, Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad, Pemerintah Kabupaten

Bandung Barat, dan Para pengelola Pusat Pelatihan Pertanian & Pedesaan Swadaya (P4S) Mekar Tani Jaya Desa Cibodas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, F. (2015). *Pengaruh Word Of Mouth terhadap Minat Berkunjung Serta Dampaknya Pada Keputusan Berkunjung* (Survei Pada Pengunjung Tempat Wisata "Jatim Park 2" Kota Batu). Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya: Malang. [http:// administrasibisnis. studentjournal.ub.ac.id](http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id), diakses pada April 2018.
- Batubara, B.M. (2017). Hubungan Komunikasi Badan Perwakilan Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. *Jppuma: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Uma (Journal Of Governance And Political Social Uma)*, 1, (1), 65-76.
- Hasanah, N. (2015). *Strategi Pengembangan Wisata Edukasi Di Desa Lebak Muncang Sebagai Desa Wisata Di Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung* (Doctoral dissertation). Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Keller, K.L. (2013). *Strategic Brand Management Building Measuring and Managing Brand Equity 4th edition*. USA: Pearson Education.
- Kwartolo, Y. (2007). Mengimplementasikan KTSP dengan pembelajaran partisipatif dan tematik menuju sukacita dalam belajar (Joy in Learning). *Jurnal Pendidikan Penabur*, 6, (9), 66-80.
- Prijono, O.S. & Pranarka, A.M.W. (1996 *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Center for Strategic and International Studies.
- Prastiwi, S. (2016). Manajemen Strategi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro Dalam Mengembangkan Potensi Objek Wisata Edukasi Little Teksas Wonocolo. *Publika*, 4, (11), 1-9.
- Putra, A.M. (2012). Konsep Desa Wisata. *Jurnal Manajemen dan Pariwisata II*, 5, (1), 1-9.
- Ritchie, J.B. & Crouch, G.I. (2003). *The competitive destination: A sustainable tourism perspective*. Trowbridge: CABI Publishing.
- Rodger (1998). *Leisure, Learning and Travel, Journal of Physical Education*, 69 (4), 28.
- Saefulloh, D.A. & Darma, G.S. (2014). Strategi Marketing Wisata Wedding Sebagai Destinasi Alternatif. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 11, (1), 17-34.
- Saepudin, E., Budiono, A., & Rusmana, A. (2017). Karakteristik Pramuwisata Dalam Pengembangan Desa Wisata Agro Di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6, (1), 51-59.
- Travers, M. (2001). *Qualitative Research Through Case Studies*, London: Sage Publications. hal. 9-10.
- Nomor, U. U. (10). tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- Utama, I.G.B.R. (2017). *Pemasaran Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Yusuf, M. (2016). *Pengembangan Kawasan Waduk Mulur Sebagai Kawasan Wisata Edukasi Dan Sport* (Doctoral dissertation,). Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Yuliastuti, I. A. N. (2013). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Badung. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 2 (6), 374-393.
- Yustina. I. & Naria. E. (2008) *Pengaruh Kesempatan, Kemauan, Dan Kemampuan Ibu Terhadap Partisipasi Dalam Pencegahan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh* (Master's thesis). Medan: Universitas Sumatera Utara.

IDENTIFIKASI RISIKO USAHATANI MANGGA DALAM PENGEMBANGAN AGROWISATA DI KABUPATEN CIREBON

Nur Syamsiyah, Lies Sulistyowati, Kuswarini Kusno, dan Sulistyodewi Nur Wiyono

Program Studi Agribisnis Departemen Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran

E-mail: nur.syamsiyah@unpad.ac.id

ABSTRAK. Masalah utama dalam pengembangan sektor pertanian adalah ketidakpastian. Ketidakpastian menjadikan banyak masyarakat yang tidak memiliki sektor pertanian sebagai pengembangan bisnis, utamanya ditingkat usahatani. Risiko ketidakpastian ini mempengaruhi petani dalam menjalankan usahatannya. Petani mangga di Kabupaten Cirebon juga tidak terlepas dari risiko ketidakpastian dalam usahatani mangga yang dilakukannya. Beberapa petani mangga memilih untuk membiarkan pohon mangganya tanpa proses pemeliharaan yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko usahatani mangga dalam pengembangan agrowisata di Kabupaten Cirebon. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuesioner, wawancara, *focus group discussion* dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan adalah *Mix method* yaitu menggunakan analisis deskriptif dan *Failure Mode and Effect Analysis* (FMEA). Hasil identifikasi risiko adalah risiko dalam usahatani mangga digolongkan dalam 4 kategori yaitu risiko suplai, risiko operasional, risiko keuangan dan risiko lingkungan. Dalam kegiatan usahatani yang dilakukan petani mangga risiko yang memiliki nilai RPN dan RSV yang paling tinggi adalah risiko alam/lingkungan.

Kata kunci: Identifikasi Risiko; Mangga; Agrowisata

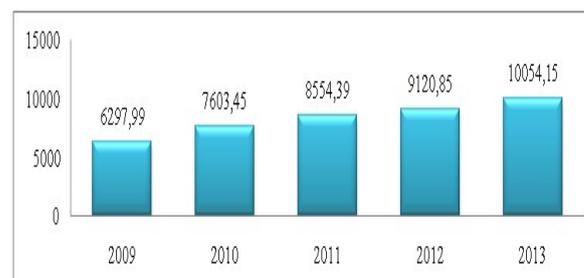
RISK IDENTIFICATION OF MANGO FARMING IN AGRO-TOURISM DEVELOPMENT IN CIREBON REGENCY

ABSTRACT. The main problem in the development of the agricultural sector is uncertainty. Uncertainty makes many people who do not have the agricultural sector as business development, especially at the level of farming. This uncertainty risk affects farmers in carrying out their farming. Mango farmers in Cirebon Regency are also inseparable from the risk of uncertainty in the mango farming that they do. Some mango farmers choose to leave their mangosteen trees without the maintenance process. This study aims to identify the risk of mango farming in developing agrotourism in Cirebon Regency. Data collection is done through interviews, questionnaires, interviews, focus group discussions (FGD) and documentation. The research method used is the Mix method using descriptive analysis and Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). The risk identified is the risk in mango farming. The risks identified are collected in 4 categories, namely supply risk, operational risk, financial risk and environmental risk. In farming activities carried out by risk mango farmers who have the highest RPN and RSV values are natural / environmental risks.

Key words: Risk identification; Mango; Agro-tourism.

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang mengalami perkembangan, salah satu yang mempengaruhi perkembangan tersebut adalah gaya hidup masyarakat yang mengalami perubahan, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Pada masyarakat perkotaan cenderung melakukan mobilitas keluar kota yang disebabkan oleh daya sentrifugal yang diakibatkan karena kemacetan, kebisingan, polusi udara dan kepadatan penduduk. Hal tersebut yang mendorong masyarakat di perkotaan menyebabkan banyak masyarakat perkotaan mencari kegiatan diluar kegiatan yang rutin mereka lakukan, Kegiatan itu biasanya berbasis perdesaan “*back to nature*” atau kembali ke alam untuk melepaskan diri dari aktivitas yang biasa lakukan sehari-hari. Perubahan gaya hidup ini menggeser hiburan/rekreasi bukan lagi menjadi kebutuhan tersier namun menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat. Sektor yang menyumbang devisa terbesar di Indonesia salah satunya adalah sektor pariwisata. Pertumbuhan devisa negara mengalami peningkatan yang signifikan beberapa tahun terakhir ini. Jumlah devisa Indonesia dari sektor pariwisata Tahun 2009-2013 digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Devisa Sektor Pariwisata di Indonesia Tahun 2009-2013.

Sektor pariwisata memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan devisa negara. Sektor pariwisata menjadi peluang Indonesia untuk dapat mengembangkan atau menciptakan sektor pariwisata dengan wisata baru yang dibuat untuk menarik minat wisatawan baik wisatawan lokal atau mancanegara. Kekayaan sumberdaya alam dan kekayaan alam lainnya menjadikan kebelihan bagi sektor pariwisata yang dapat diperbaharui. Sektor pariwisata biasanya mengandung konsep keindahan, seni, kebudayaan yang merupakan sumberdaya alam yang dimiliki suatu daerah. Sumberdaya manusia menjadi penting dalam pengembangan pariwisata karena dalam pengembangannya pariwisata memerlukan campur tangan

manusia untuk mampu memelihara keindahan alam yang ada dan menciptakan sesuatu yang menarik sehingga wisatawan memiliki minat untuk mengunjunginya.

Kabupaten Cirebon menjadi salah satu daerah sentra produksi untuk komoditas mangga di Jawa Barat. Pengembangan pembangunan di Kabupaten Cirebon dilakukan mengarah kepada penataan ruang wilayah yang telah ditetapkan pemerintah melalui kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah. Peraturan ditetapkan dalam Perda No 17/2011 tentang Rencana Tata Ruang atau Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon 2011-2031. Pengembangan wisata agro dan wisata religi menjadi salah satu pengembangan yang diprioritaskan dengan mengembangkan potensi yang dimiliki pada daerah pengembangan atau potensi lokal, serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya yang dimiliki sebagai pengembangan dari ekonomi lokal di Kabupaten Cirebon.

Mangga merupakan produk unggulan di Kabupaten Cirebon karena kekhasan karakteristik mangga dengan aroma yang tajam, warna buah merah menyala seperti gincu dan kandungan serat yang sangat banyak. Untuk rasa juga memiliki kekhasan yaitu adanya rasa sedikit asam manis sehingga menjadikan mangga dari Kabupaten Cirebon khas dibandingkan dengan mangga dari wilayah lain. Mangga sebagai komoditas hortikultura yang menjadi kegemaran masyarakat, berpotensi juga dalam memberikan peningkatan kesejahteraan keluarga petani mangga karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi (Karyani, Tuti et al. 2016). Pengembangan Agrowisata dilakukan di Kecamatan Sedong dengan keterlibatan dari berbagai pihak. Pengembangan kawasan agrowisata di Kabupaten Cirebon khususnya di Kecamatan Sedong tidak terlepas dari peran pertanian disana, salah satunya adalah petani mangga yang sudah lebih dulu mengembangkan usahatani mangga. Pelaksanaan pengembangan agrowisata juga tidak terlepas dari pelaksanaan agribisnis mangga. Oleh karena pengembangan agribisnis mangga sangat diperlukan untuk pengembangan agrowisata. Menurut Karyani, et al., 2015 saat ini agribisnis mangga masih memiliki risiko-risiko usaha yang masih belum bisa dihindari oleh para pelaku yang terlibat didalamnya terutama oleh petani. Pengembangan kawasan sedong Menjadi Kawasan Agrowisata akan sangat tergantung dari pelaksanaan agribisnis mangga yang dilakukan petani. Sehingga diperlukan identifikasi risiko dan strategi mitigasi risiko dalam pengembangan kawasan agrowisata di Kabupaten Cirebon.

METODE

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode *mix method*, lokasi penelitian ditentukan dengan sengaja didasarkan pada pertimbangan bahwa Kecamatan sedong Kabupaten Cirebon selain sebagai sentra produksi mangga

juga merupakan daerah yang direncanakan menjadi target pengembangan agrowisata di Kabupaten Cirebon berdasarkan RTRW Kabupaten Cirebon Ketersediaan sarana dan prasarana untuk pengembangan agrowisata misalnya keberadaan Setu Sedong, Agribisnis mangga, Keberadaan kelompok tani buah dan sarana lainnya. Usahatani mangga di Kabupaten Cirebon memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif (Syamsiyah, 2014). Menurut Sulistyowati, 2013 Potensi ekonomi agribisnis mangga masih banyak yang bisa digali, masih banyaknya hambatan baik teknis maupun non-teknis menyebabkan produksi mangga nasional tidak stabil dan kualitasnya rendah.

Metode penelitian menggunakan *mix method* dengan menggunakan analisis deskriptif dan FMEA melalui kegiatan wawancara semi terstruktur dengan menggunakan kuesioner dan panduan wawancara sebagai alat utama untuk mengumpulkan data. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, untuk data primer adalah responden yaitu petani mangga di Kecamatan sedong yaitu Gabungan Kelompok Tani Sami Mulya dan Instansi terkait dalam pengembangan agrowisata diantaranya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon (BAPPEDA), Dinas Perikanan, Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon, Dinas Kebudayaan Kabupaten Cirebon, Dinas Pariwisata Kabupaten Cirebon, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon. Data sekunder diperoleh dari berbagai lembaga terkait seperti Dirjen Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Kementerian Pertanian Jawa Barat, Biro Pusat Statistik Jawa Barat dan Nasional.

Data penelitian dan informasi penelitian diperoleh melalui wawancara dengan *key informan* dengan teknik wawancara mendalam (*indepth interviews*) dan pengisian kuesioner. *Key informan* dalam penelitian ini ialah ketua kelompok tani dan petani mangga di sentra produksi mangga di Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon, Petani yang dijadikan responden adalah petani mangga yang menjadi anggota dalam Gabungan Kelompok Tani Sami Mulya. Data dan informasi dikumpulkan melalui kegiatan observasi/pengamatan, studi kepustakaan dan menggunakan kuesioner melalui proses wawancara dianalisis dan dievaluasi risiko yang berpotensi timbul dalam pelaksanaan usahatani mangga sebagai upaya pengembangan kawasan agrowisata di Kabupaten Cirebon dengan menggunakan metode *Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)*. Penggunaan pendekatan *Failure Mode and Effect Analysis* didasarkan pada alasan bahwa metode ini merupakan suatu teknik yang dapat digunakan untuk melakukan analisa penyebab potensial timbulnya suatu gangguan, probabilitas kemunculannya dan bagaimana cara mencegah atau menanganinya (Christopher, 2003). Penggunaan metode *Failure Mode and Effect Analysis* karena metode ini merupakan pendekatan yang sederhana dan sistematis untuk mengidentifikasi dan menilai risiko,

Carbone dan Tippett, (2004). *Failure Mode and Effect Analysis* digunakan untuk mengidentifikasi bentuk potensi kegagalan, menentukan dampaknya terhadap produksi, dan mengidentifikasi tindakan untuk mengurangi kegagalan menurut Crow (2002).

Metodologi penelitian mengacu pada *framework* (kerangka kerja) penelitian, Kerangka kerja dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko usaha tani mangga dalam perkembangan agrowisata di Kabupaten Cirebon. Metode *FMEA* dilakukan untuk mengetahui nilai risiko yang dihadapi petani mangga dalam pengembangan agrowisata di Kabupaten Cirebon dilakukan agar dapat mewujudkan pengembangan agrowisata di Kabupaten Cirebon, diharapkan dengan mengetahui risiko-risiko dalam agribisnis khususnya risiko usahatani yang dihadapi petani akan membantu petani dalam mewujudkan pengembangan agrowisata sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal di kabupaten Cirebon. Penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan analisis, mulai dari pengumpulan data lapangan melalui wawancara semi terstruktur, menganalisis data yang terkumpul dengan teknik identifikasi dan penilaian risiko usahatani mangga dalam pengembangan kawasan agrowisata di Kabupaten Cirebon.

Identifikasi potensi risiko yang melekat dalam usahatani mangga dalam pengembangan agrowisata mangga di Kabupaten Cirebon menjadi tahap awal penelitian. Tahap ini untuk memastikan bahwa semua risiko tersebut diakui dan kemudian masing-masing risiko akan mencetak angka probabilitasnya, keparahan dan deteksi. Ritchie dan Brindley (2007), Identifikasi risiko dilakukan dengan mendata segala kemungkinan yang menjadi penyebab suatu kegagalan lalu diketahui efek kegagalan yang ditimbulkannya. Chopra dan Sodhi (2004), Manuj (2005) dan Peck (2005) risiko dalam rantai suplai dapat dikategorikan kedalam empat unsur yaitu risiko suplai, risiko permintaan, risiko operasional, risiko lingkungan. Tahap selanjutnya adalah penilaian atau pengukuran risiko yang digunakan untuk menghitung hasil identifikasi di tahap awal. Tahap kedua bertujuan untuk memperoleh nilai prioritas risiko atau *Risk Priority Number* dan *Risk Score Value* dengan rumus sebagai berikut :

$RPN = \text{angka kejadian (occurrence)} \times \text{angka keparahan (severity)} \times \text{angka deteksi (detection)}$

$RSV = \text{angka kejadian (occurrence)} \times \text{angka keparahan (severity)}$

Perhitungan nilai *Risk Priority Number* dan nilai *Risk Score Value* mengacu pada aturan skala yang dilihat tingkat keparahan, efek kegagalan yang kemungkinan terjadi dari suatu penyebab kegagalan, skala berapa frekuensi kejadian penyebab suatu kegagalan terjadi, dan skala kemampuan untuk mendeteksi suatu penyebab kegagalan. Menurut *Quality Associates Internasional* (1998) dalam *In House Training Failure Mode Effect Analysis* P2M Departemen Teknik Mesin, tabel nilai skala

tingkat keparahan dari penyebab kejadian, tabel frekuensi kejadian dan tabel kemampuan mendeteksi suatu akibat kegagalan dapat dilihat pada Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 1. Skala Tingkat Keparahannya (Severity)

Skala	Keterangan
10	efek bahaya yang ditimbulkan sangat tinggi sekali
9	efek yang ditimbulkan sangat tinggi sekali
8	efek yang ditimbulkan sangat tinggi
7	efek yang ditimbulkan tinggi
6	efek yang ditimbulkan sedang
5	efek yang ditimbulkan rendah
4	efek yang ditimbulkan sangat rendah
3	efek yang ditimbulkan kecil
2	efek yang ditimbulkan sangat kecil
1	tidak memiliki efek yang ditimbulkan dari penyebab kegagalan

Tabel 2. Skala Frekuensi Kejadian (Occurrence)

Skala	Keterangan
10	Terjadi lebih dari 1 kali dalam 1 hari
9	Terjadi tiap 3-4 hari
8	Terjadi tiap minggu
7	Terjadi tiap bulan
6	Terjadi per 3 bulan
5	Terjadi per 6 bulan
4	Terjadi tiap tahun
3	Terjadi 1-3 tahun
2	Terjadi 3-4 tahun
1	Terjadi lebih dari 4 tahun

Tabel 3. Skala Kemampuan Mendeteksi (Detection)

Skala	Keterangan
10	Ketidakpastian mutlak (penyebab kegagalan tidak terdeteksi)
9	Penyebab dari kegagalan sangat sulit terdeteksi
8	Penyebab dari kegagalan sulit terdeteksi
7	Penyebab dari kegagalan terdeteksi rendah sekali
6	Penyebab dari kegagalan terdeteksi rendah
5	Penyebab dari kegagalan terdeteksi sedang
4	Penyebab dari kegagalan cukup terdeteksi
3	Penyebab dari kegagalan terdeteksi tinggi
2	Penyebab dari kegagalan terdeteksi sangat tinggi
1	Penyebab dari kegagalan hampir pasti terdeteksi

Setelah memperoleh nilai *Risk Priority Number* dan nilai *Risk Score Value* setiap risiko dari hasil wawancara dihitung, selanjutnya akan dilakukan analisis risiko dengan menggunakan grafik pareto masing-masing *Risk Priority Number* dan *Risk Score Value* untuk memvalidasi dan pengelompokkan risiko menggunakan diagram pencar, maka akan diperoleh profil risiko mana yang diprioritaskan untuk segera diatasi. Langkah terakhir dalam proses penilaian risiko adalah mengetahui prioritas risiko yang terjadi dalam rantai suplai berdasarkan *Risk Priority Number* dan *Risk Score Value*. Prioritas risiko yang diperoleh digunakan untuk mengembangkan rencana mitigasi risiko untuk setiap peristiwa yang di plot dibagian

penting dalam diagram pencar, kadang-kadang dalam kasus yang ekstrim risiko tidak dapat dihindari, karena itu rencana deteksi dan rencana kemungkinan diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Agrowisata di Kabupaten Cirebon melibatkan banyak pihak, baik daerah yang termasuk dalam wilayah pengembangan maupun wilayah *hinterland* yang akan merasakan dampak pengembangan agrowisata di Kabupaten Cirebon. Pengembangan Agrowisata dengan melibatkan petani mangga, pengembangan agribisnis mangga mutlak diperlukan untuk dapat mewujudkan pengembangan agrowisata di Kabupaten Cirebon jika berbasis pada komoditas unggulan di Kabupaten Cirebon. Menurut Sulistyowati et al, 2016 dalam rantai suplai mangga keterlibatan setiap pelaku dalam rantai suplai mangga akan menentukan keberhasilan dan keberlanjutan usahatani mangga. Menurut Roekel *et al.* (2002) rantai suplai yang menghubungkan berbagai pelaku bisnis mulai dari petani di lahan pertanian (*on Farm*), dan rantai-rantai distribusi sampai barang ditangan konsumen

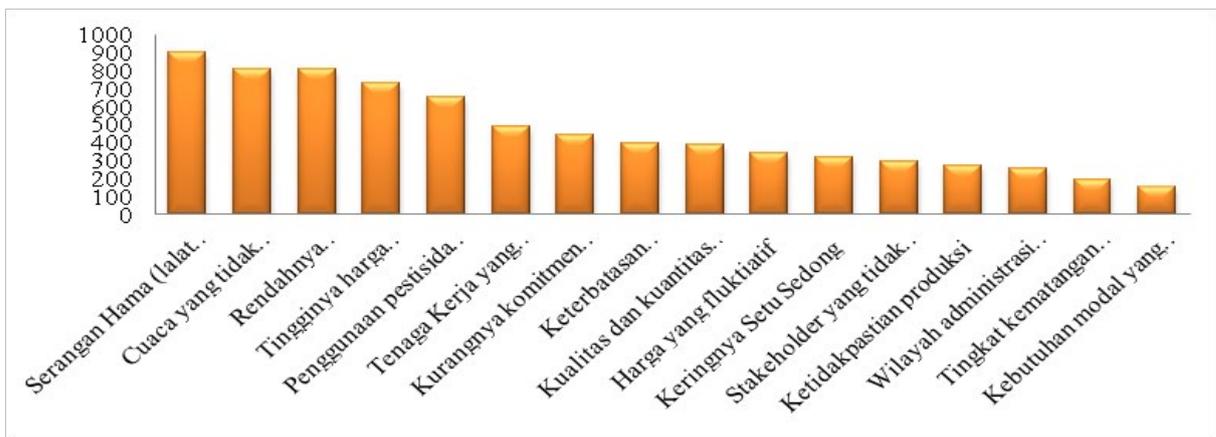
memiliki tujuan agar dapat mencapai efektifitas rantai suplai sehingga aliran barang berorientasi kepada konsumen. Dalam agribisnis mangga di Kabupaten Cirebon melibatkan beberapa pelaku diantaranya adalah penjual agroinput pertanian, petani mangga, kelompok tani, bandar, eksportir (Sumber Buah SAE) dan lembaga pendukung lain yang menjadi satu sistem agribisnis mangga di Kabupaten Cirebon.

Identifikasi Risiko

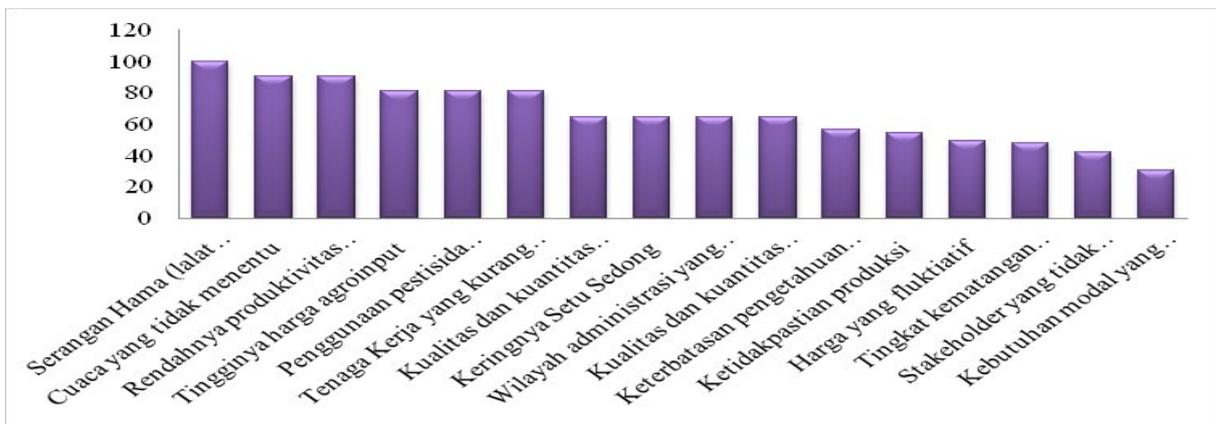
Risiko yang dihadapi petani mangga dalam usahatani mangga dalam pengembangan agrowisata di Kabupaten Cirebon sangat beragam. Risiko yang dihadapi masing-masing pelaku dikelompokkan menjadi beberapa kategori risiko yaitu risiko suplai Zsidisin dalam Sabine (2009) mendefinisikan risiko suplai sebagai probabilitas dari suatu kejadian yang berhubungan dengan kegagalan penawaran dari pemasok individu atau pasar suplai yang terjadi, yang mengakibatkan ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan, risiko operasional, risiko lingkungan dan risiko keuangan, secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Kategori Risiko pada Usahatani Mangga dalam Pengembangan Agrowisata di Kabupaten Cirebon

Kategori Risiko	Risiko suplai	Risiko operasional	Risiko Lingkungan	Risiko Keuangan
Industri Agroinput	Pasokan agroinput yang terbatas	Kebutuhan petani yang serentak	Cuaca yang tidak menentu	Periode Pembayaran
	kuantitas tidak sesuai dengan permintaan	Kebutuhan petani mulai dari pengolahan tahan hingga panen, pasca panen dan pemasaran	Faktor alam/lingkungan	Harga yang fluktuatif
Petani	Kualitas tidak sesuai dengan permintaan	Beragamnya merek dagang yang ada	Jarak yang jauh	Keterbatasan Permodalan
	Kualitas hasil yang tidak sesuai dengan permintaan	Jarak kebun yang jauh dari jalan utama	Serangan Hama (lalat buah dll)	Periode Pembayaran
	Kuantitas hasil tidak sesuai dengan permintaan	Tenaga Kerja yang kurang terampil	Penggunaan pestisida yang berlebih	Harga yang rendah pada saat panen raya
	Kualitas yang tidak sesuai dengan permintaan pasar	Tingginya upah tenaga kerja	Cuaca yang tidak menentu	Keterbatasan modal
	Ketersediaan agroinput yang sangat beragam	Keterbatasan pengetahuan petani	Jarak antar kebun petani jauh	Kesulitan dalam memperoleh bantuan permodalan
Kelompok Tani	Ketidakpastian produksi	Keterbatasan teknologi yang dimiliki petani	Ketidakpastian cuaca	Tingginya harga agroinput
	Rendahnya produktivitas petani	Kurangnya komitmen petani	Ketersediaan mangga yang <i>off season</i>	Periode Pembayaran
	Kualitas dan kuantitas pasokan tidak sesuai dengan permintaan pasar	Banyaknya jumlah petani sehingga mempersulit proses pengawasan	Kerusakan hasil pada saat diperjalanan	Harga kontrak yang tidak sesuai dengan harga pasar
	Kurangnya motivasi petani untuk melakukan <i>off season</i>	Tidak semua anggota mau menjalankan usahatani secara intensif	Pemeliharaan yang tidak dilakukan petani	Kebutuhan modal yang tinggi untuk <i>off season</i>
Lembaga Pendukung	Kurang meratanya subsidi agroinput	Kurangnya peran lembaga penyuluhan	Kurangnya dukungan pemerintah terhadap fasilitas budidaya (irigasi)	Rendahnya akses petani melalui perbankan
	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat	Keterbatasan personil pemerintahan yang terlibat	Keringnya Setu Sedong	Keterbatasan modal bagi masyarakat
	Hasil teknologi yang masih belum banyak disosialisasikan kepada petani	Stakeholder yang tidak bersinergi	Wilayah administrasi yang luas dan melibatkan beberapa wilayah administratif	Keterbatasan keuangan berdasarkan APBD
	Belum dilakukannya penyusunan bersama dengan seluruh pihak yang terkait	Keterlibatan masyarakat yang masih kurang optimal	Faktor Alam/ lingkungan yang masih belum mendukung	Mekanisme pembiayaan yang masih belum jelas



Gambar 2. Grafik Pareto Risiko Berdasarkan Risk Priority Number (RPN)



Gambar 3. Grafik Pareto Risiko Berdasarkan Risk Score Value (RSV)

Berdasarkan Tabel 4 risiko-risiko yang memiliki nilai prioritas risiko dan nilai risiko tertinggi adalah serangan hama dan penyakit tanaman, cuaca yang tidak menentu, rendahnya produktivitas petani, tingginya harga agroinput, penggunaan pestisida yang berlebihan, tenaga kerja yang kurang terampil, kurangnya komitmen petani, keterbatasan pengetahuan petani, kualitas dan kuantitas pasokan tidak sesuai dengan permintaan pasar, harga yang fluktuatif, keringnya Setu Sedong, Stakeholder yang tidak bersinergi, ketidakpastian produksi, wilayah administratif yang menyangkut beberapa wilayah, tingkat kematangan mangga yang tidak seragam, kebutuhan modal *off season* yang tinggi. Untuk lebih mudah jelas dapat dilihat pada Gambar 4 dan Gambar 5 untuk menggambarkan risiko-risiko berdasarkan nilai nomor prioritas risiko dan penilaian risiko tertinggi. Grafik ini dibuat untuk memberikan panduan perencanaan yang tanggap risiko mana yang menjadi prioritas dalam menanganannya. Pemilihan nilai kritis, tidak ada aturan yang jelas secara ilmiah menurut Carbone, (2004).

Penilaian risiko dilakukan hanya pada risiko yang terkait dalam usahatani mangga di Kabupaten Cirebon berkaitan dengan petani mangga. Risiko yang dirasakan secara umum menyangkut faktor alam/lingkungan yaitu cuaca yang tidak menentu, ketidakpastian cuaca bukan hanya dirasakan oleh petani saja. Namun memang

petani merupakan pelaku yang paling dirugikan terhadap faktor alam/lingkungan. Ketidakpastian cuaca akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas mangga yang dihasilkan petani. Risiko tenaga kerja ini berkaitan dengan proses pascapanen yang dilakukan oleh eksportir, karena biasanya eksportir menerima dalam bentuk curah, petani tidak melakukan grading, sehingga proses grading dilakukan oleh eksportir. Tenaga kerja dalam proses ini harus terampil dan dibekali pengetahuan tentang standar kualitas produk untuk masing-masing pasar. Karena beberapa pasar memiliki standar tersendiri. Jika terjadi kesalahan maka produk bisa ditolak di pasar.

SIMPULAN

Risiko-risiko yang dihadapi petani mangga dalam pengembangan agrowisata mangga di Kabupaten Cirebon meliputi risiko suplai, risiko operasional, risiko lingkungan dan risiko keuangan. Risiko tertinggi yang dihadapi pelaku dalam agribisnis mangga di Kabupaten Cirebon berdasarkan pengukuran risiko *Risk Priority Number (RPN)* dan *Risk Score Value (RSV)* tertinggi adalah Serangan Hama dan Penyakit Tanaman, Cuaca yang tidak menentu atau sulit di prediksi, rendahnya produktivitas petani, tingginya harga agroinput, penggunaan pestisida yang berlebihan, tenaga kerja yang kurang terampil.

DAFTAR PUSTAKA

- Barry.P. J. (1984). Risk Manajement in Agricultura. Iowa State University Press. Ames Iowa.
- Carbone, T.A. & Tippett, D.D (2004). Project Risk Management using the project risk FMEA. *Engineering Management Journal*, 16 (4), hal 25-35.
- Chopra, S. & Sodhi, S.M. (2004). Managing Risk to Avoid Supply Chain Breakdown. *Sloan Management Review*, 46, (1), 53-61.
- Christopher, M. & H. Lee. (2004). Mitigating Supply Chain Risk Through Improved Confidence. *International Journal Physics Distribution and Logistics Management*. 34 (5), 388-396.
- Karyani, Tuti., Utami, H. Sadeli, A., Rasmikayati, E., Sulistyodewi, Syamsiyah, Nur. (2016). Mango Agricultural Supply Chain: Actors, Business Process, And Financing Scheme. *Internasional Journal Of Applied Business and Economic Research*, 14, (11), 7751-7764
- Karyani, T., Utami, H. & Sadeli, A., (2013). Model Pembiayaan Pra Panen Pada Rantai Pasok Agribisnis Berdasarkan system Produksi Komoditas Cabai Merah Dengan Orientasi Pasar Terstruktur. *Sosiohumaniora*, 15,(3), 253-260
- Manuj, I. (2008). Global Supply Chain Risk Management Strategies. *International Journal Physics Distribution & Logistics Management* 38, (3), 192-223
- Peck, H. (2005). Drivers of Supply Chain vulnerability: an integrated Framework. *International Journal Physics Distribution and Logistics Management*, 35, (4), 210-232.
- P2M Departemen Teknik Mesin. (2009). In House Training Failure Mode Effect Analysis. Jakarta: Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- Ritchie, B. & C. Brindley, (2007). Supply Chain Risk Management and Perfomance. *International Journal of Operations and Production Management*, 27, (3), 303-322.
- Roekel JV, Willem S, Boselie DM. (2002). Agri-Supply Chain Management-To Stimulate Cross-Broder Trade in Developing Countries and Emerging Economics. World Bank Paper Cross-Border Agri Suply Chain Management
- Sabine M. (2009). Supplier Development with Benchmarking as part of a Comprehensive Supplier Risk Management *Framework. International Journal of Operations & Production Management*. 29, (3), 241-267.
- Sulistyowati, L., Natawidjaja, R.S, & Saidah, Z. (2013). Faktor Sosial-Ekonomi Yang Mempengaruhi Keputusan Petani Mangga Terlibat Dalam Sistem Informal Dengan Pedagang Pengumpul. *Sosiohumaniora*, 15, (3), 285-293
- Sulistyowati, L., Andayani, S.A., Rasmikayati, E. & Syamsiyah, N. (2016). The Development Of Business Partnership As An Effort To Increase The Mango Farmers Income. *Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development* . 16, (3), 331-339
- Syamsiyah, N. & Sulistyowati, L. (2014). Kemitraan Usaha dalam Peningkatan Dayaसाing dan Dampak Kebijakan Mangga di Kabupaten Cirebon Jawa, Barat. Bandung: Prosiding Seminar Nasional.

EFEKTIVITAS OTONOMI DAERAH DALAM MEMBANGUN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA MASYARAKAT PEDESAAN

Kantirina Rachaju

Prodi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Widyapuri Mandiri
E-mail: kantirina@gmail.com

ABSTRAK. Reformasi 1998 sebagai dasar pijakan untuk meninjau ulang kembali tatanan otonomi daerah baru dalam mewujudkan *good governance* (kepemerintahan yang baik), hakikatnya mereformasi landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sentralistik, yaitu: (1) Amandemen Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945; (2) Reformasi birokrasi Pemerintah/ Penyelenggara Negara, dan (3) Reformasi (membangun) Sumber Daya Manusia (masyarakat pedesaan). Dalam mewujudkan *good governance* sehingga sesuai dengan isi sila kelima dari ideologi Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang sentralisasi masih banyak ditemukannya berbagai macam ketimpangan sosial dalam masyarakat, karena hal ini dapat merusak atau melemahkan perekonomian di tingkat daerah atau bahkan tingkat nasional dalam rangka pemberdayaan sumber daya manusia pada masyarakat pedesaan. Reformasi yang bergulir harus berpijak sesuai dengan penyelenggaraan dan berkesinambungan kerjasama yang baik antara pemerintahan daerah dengan Pemerintah Pusat. Reformasi otonomi daerah dalam pelaksanaan *good governance*, maka Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai pemerintahan daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, Seiring dengan berjalannya waktu di era pemerintahan saat itu, lahirlah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Sebagai pengganti Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan No. 25 Tahun 1999 yang lebih menekankan pada reformasi manajemen sumber daya manusia dalam mewujudkan pemberdayaan sumber daya manusia pada masyarakat pedesaan yang lebih adil, merata, dan berdaya guna untuk pembangunan daerahnya.

Kata Kunci: Reformasi; Pemerintahan Daerah; Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

EFFECTIVENESS OF REGIONAL AUTONOMY IN BUILDING EMPOWERMENT OF HUMAN RESOURCES IN RURAL COMMUNITIES

ABSTRACT. The 1998 Reformation was the basis for revisiting the new regional autonomy system in realizing good governance, the essence of reforming the basis of a centralized society, nation and state, namely: (1) Amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia ; (2) Government / State Administration bureaucratic reform, and (3) Reformation (building) Human Resources (rural communities). In realizing good governance so that it is in accordance with the fifth principle content of the Pancasila ideology and the Opening of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely to educate the life of the nation and promote public welfare. In the process of implementing governance which is centralized there are still many kinds of social inequality in society, because this can damage or weaken the economy at the regional or even national level in the context of empowering human resources in rural communities. Revolving reforms must be based on the implementation and continuity of good cooperation between the regional government and the Central Government. In the framework of reforming regional autonomy in the implementation of good governance, the Government has issued Law No. 22 of 1999 concerning regional governance, and Law No. 25 of 1999 concerning financial balance between the center and the regions, along with the passage of time in the government era, Law No. 32 of 2004 concerning regional government and Law Number 33 of 2004 concerning Balance of Central and Regional Finance was born. In lieu of Law No. 22 of 1999 and No. 25 of 1999 which places more emphasis on reforming human resource management in realizing the empowerment of human resources in rural communities that are more just, equitable, and efficient for their regional development.

Key words: Reformation; Local government; Empowerment of Human Resources

PENDAHULUAN

Presiden B.J. Habibie mengeluarkan kebijakan otonomi daerah dengan tujuan untuk mengganti UU No. 5 Tahun 1974, ke arah yang lebih demokratis dan transparan. Habibie berpendapat bahwa untuk pembangunan/membangun sumber daya manusia jauh lebih penting atau bermanfaat dari pada mengeksplorasi potensi daerah, yaitu memberdayakan potensi manusia untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berbasis pada kemajuan pembangunan daerah.

Kebijakan otonomi daerah harus memenuhi kriteria demokrasi dan pembangunan daerah yang riil

dan transparan, oleh karena itu maka keluarlah UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 dinilai sudah tidak relevan untuk tuntutan membangun sumber daya manusia, maka dengan seiring perjalanan waktu dan proses pembangunan maka diganti oleh UU No. 32/2004, dan UU No. 33/2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sebab hal ini agar dapat memiliki daya saing yang kuat terhadap era globalisasi saat ini, pada tahun 2005 saat itu mulai terjadi perubahan secara mendasar yang menjadikan pemerintahan daerah diberi kebebasan untuk mengurus sendiri roda pemerintahan dan pembangunan sebagai titik sentral dalam mendahulukan otonomi yang lebih luas, lebih nyata dan lebih bertanggungjawab tidak

hanya pada bidang, sosial, ekonomi, politik, tetapi harus merata ke semua bidang, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan layanan publik.

Dengan demikian berbagai perubahan telah dilakukan dalam pelaksanaan Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 bertujuan meningkatkan akuntabilitas publik dan pelayanan publik, hal ini komponen system perbaikan secara berkelanjutan serta sesuai dengan asas demokrasi, khususnya menyangkut hubungan pemerintah pusat dan daerah, dalam mewujudkan pembangunan daerahnya harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang telah dibuat, sehingga sejalan dengan tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu: 1. meningkatkan pelayanan publik (*public service*) secara profesional, efektif dan efisien; 2. mengembangkan kehidupan berdemokrasi; 3. berkeadilan; 4. pemerataan pembangunan setiap wilayah daerah; 5. lebih dipeliharanya komunikasi yang serasi 6. lebih berpihak pada pemberdayaan terhadap masyarakat, dan 7. membangun kepercayaan diri dan kreativitas untuk meningkatkan peran serta masyarakat, dan untuk lebih berperan aktif dan memberdayakan dewan perwakilan rakyat daerah

Masalah kepemimpinan birokrasi dan membangun budaya kepemimpinan profesional birokrasi di Indonesia sangat berpengaruh kepada efektivitas otonomi daerah dalam membangun pemberdayaan sumber daya manusia. Dalam banyak tulisan telah dikemukakan mengenai bagaimana mengembangkan budaya profesionalisme kepemimpinan, kemudian banyak diatur dalam berbagai macam literatur manajemen bahwa kepemimpinan pegang peranan penting dalam mendukung suatu keberhasilan untuk pencapaian tujuan organisasi, dalam berorganisasi apapun jenis organisasinya pasti memiliki dan memerlukan seorang pemimpin (*leader*, pimpinan puncak/*top manager*) yang harus siap bertanggungjawab dalam menjalankan kegiatan bagi organisasi sebagai suatu kesatuan, lebih jauh dikemukakan (Owens 1995) kepemimpinan di sini merupakan suatu bentuk interaksi yang dijalankan dengan profesional, efektif dan efisien antara pemimpin dan yang dipimpin.

Pemimpin yang baik dapat melihat dan memberikan apresiasi terhadap bawahannya dengan cara menghargai bawahannya atas dasar mengembangkan kemampuan diri mereka dalam pencapaian visi yang telah dirumuskan guna mewujudkan tujuan organisasi. Agar dapat memotivasi bawahannya seorang pemimpin dapat memberikan beberapa hal yang dapat memacu semangat bawahan yaitu sebagai berikut:

1. lebih meyakinkan peran bawahannya bahwa suatu visi organisasi penting untuk dicapai;
2. memotivasi atau memberikan suatu tantangan kepada bawahan dengan tujuan agar semua tanggungjawab dan kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan dapat lebih cermat dan teliti dan hal ini juga harus memperhitungkan perasaan diri bawahan yang dipimpin

akan tingkat kesuksesan atas prestasi kinerja, dan kecakapan dalam bekerja.

3. Memberikan *reward* (penghargaan) yang layak kepada bawahan yang memiliki kinerja baik dengan memberikan *reward* (penghargaan), baik berupa bonus atau bahkan memberikan promosi.

Ada suatu pepatah Jawa yaitu "*Jer basuki mawa bae*": ini merupakan suatu pepatah yang sangat populer dan akrab dalam masyarakat kita, yang menunjukkan pada efek konsekuensi finansial atas perolehan prestasi kinerja. Saat ini, pendidikan yang berkualitas tinggi sering diidentikkan dengan mahalnya biaya. Banyak kalangan bahkan sebagian masyarakat dan *stakeholders* memandang bahwa gejala pembiaran pada kapitalisasi sekolah telah merebak dan merusak tujuan tatanan pendidikan itu sendiri, sehingga mengakibatkan pendidikan yang semula diharapkan mampu untuk membangun potensi diri dan derajat hidup masyarakat miskin untuk meraih keberhasilan di masa akan datang, hal ini menunjukkan semakin menjauh terhadap harapan dan kenyataan yang diperolehnya. Sungguh ironis dan bertolak belakang dari pendapat ahli pendidikan bahwa dunia pendidikan saat ini cara untuk menurunkan garis kemiskinan dan kebodohan, justru malah semakin menghambat bagi perubahan masyarakat miskin di negeri ini dalam menurunkan jumlah garis kemiskinan. Semua kejadian dan keadaan ini terus berlangsung hingga saat ini karena disebabkan oleh kurangnya atau minimnya keberpihakan pemerintah kepada dunia pendidikan nasional, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk jalan masuk yang lebih besar kepada golongan masyarakat yang tidak mampu sehingga terjangkau untuk mendapatkan jenjang pendidikan lebih tinggi yang relatif murah tapi berkualitas dan berkarakter.

Mengingat pada keinginan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Mukadimah UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang diimplementasikan melalui UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003 mengenai berbagai macam diantaranya "Pengembangan potensi peserta didik supaya menjadi insan kamil yang beriman dan bertaqwa akhlakul karimah, sehat jasmani dan rohani, berilmu pengetahuan, terampil, kreatif dan inovatif, berdikari, dan sebagai warganegara yang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan baik dan taat aturan". (Abdul Wahid, 2011: 105).

Para ahli pendidikan telah sepakat bahwa membangun manajemen sumber daya manusia harus melalui proses pembelajaran dan pendidikan yang dilakukan di sekolah. Menurut Sinaga (2016:219). Peningkatan dan pengembangan manajemen potensi manusia bisa didapat melalui proses belajar dan mengajar secara terus menerus melalui badan penyelenggara pendidikan, baik secara formal maupun informal dengan berbagai bentuk macam pendidikan dan pelatihan sesuai bakat dan kemampuan.

Manusia harus bersosialisasi dengan manusia lainnya, misal, proses pembelajaran melibatkan guru dan peserta didik sebagai faktor manusianya, adapun tugas dari pendidik itu sendiri adalah berusaha untuk men-
cerdaskan dan membangun karakter peserta didiknya, membangun dan mengembangkan pengetahuan atau menjauhi kebodohan. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 30 membahas mengenai pengembangan potensi kemampuan, membentuk potensi yang berkarakter, serta peradaban bangsa yang berharkat dan bermartabat untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

Menghadapi era kompetitif sekarang ini setiap negara mulai mengarahkan kepada masyarakatnya mulai menuntut atau mengarahkan setiap orang tidak harus cerdas saja, akan tetapi juga harus memiliki kreativitas, inisiatif, dan inovatif untuk menggagas dan menemukan pemikiran-pemikiran baru yang terbaru, melakukan riset dan pengembangan teknologi modern yang berkualitas yang memiliki daya saing dengan negara-negara maju, untuk pencapaian hal tersebut diperlukan suatu pola pikir dan sikap, serta perilaku kreatif yang dibangun dan dikembangkan sejak usia dini agar siswa kelak nantinya menjadi pencipta dan pencetus gagasan pengetahuan baru, yang memiliki kompetensi untuk menciptakan lapangan kerja baru (wiraswasta) yang luas. Telah dijelaskan pengembangan potensi kreativitas dalam sistem pendidikan nasional. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003 Bab III pada Pasal 4 menekankan bahwa: "Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran". (Solihat, 2010).

Begitu pula dengan efektivitas otonomi daerah dalam membangun pemberdayaan sumber daya manusia pada masyarakat pedesaan harus dilandasi oleh pendidikan yang efektif dan kuat agar melahirkan peserta didik yang memiliki kepemimpinan yang bertanggung-jawab, dinamis, dan inovatif guna mencapai tujuan-tujuan otonomi daerah.

METODE

Penulis melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bersifat mendeskripsikan tentang masalah yang akan diteliti kemudian ditelaah, dikaji, dan dianalisis berdasarkan teori. Penelitian deskriptif memberikan suatu gambaran yang terinci mengenai hal satu situasi khusus, tatanan sosial, atau hubungan yang terkait dengan hal-hal yang akan dikemukakan. Seringkali temuan penelitian sosial dalam jurnal digunakan untuk membuat putusan kebijakan adalah deskriptif (Neuman, 2000).

Adapun untuk memperoleh data yang *updated* dan akurat atau informasi yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: Penelitian Kepustakaan (*library research*), merupakan

metode penelusuran terhadap sumber-sumber tertulis atau deskriptif tentang suatu pemikiran atau fenomena (Hadi, 1995:5). Metode ini penulis gunakan untuk menggali pemikiran yang terdapat dalam buku primer maupun sekunder yaitu dengan cara mengumpulkan dan menelaah, mengkaji serta menganalisis data kepustakaan dari berbagai literatur seperti buku, *website* atau internet, makalah, jurnal, artikel, dan laporan dokumen-dokumen penelitian sosial yang terbaru serta sarana informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tuntutan perluasan otonomi daerah di Indonesia makin meluas dan hal ini merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat luas yang ada di daerah setempat atau pedesaan sejalan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Suparmoko (2006:61) otonomi daerah sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi otonomi daerah di Indonesia terdapat dua nilai dasar sebagai mana diamanatkan dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) yaitu:

1. Nilai Unitaris yang diwujudkan dalam pemikiran bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara ("Eenheidstaat"), hanya satu yaitu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Sebagaimana telah dijelaskan di atas maka jelaslah bahwa Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan yang lebih berperikemanusiaan dan berperikeadilan.

Untuk diketahui juga bahwa awalnya diberlakukan Undang-undang tentang otonomi daerah yang berdasarkan kebijakan otonomi daerah, adalah sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah di Indonesia yang pertama mengatur terhadap arah dan tujuan wewenang agar pelaksanaan daerah otonom di provinsi, kota, kabupaten memiliki tujuan yang sama yakni dalam menetapkan dan mewujudkan kemakmuran masyarakat daerah dan nasional.
2. undang-undang Nomor 32/2004 juga mengatur tentang pemerintahan daerah. Dalam kebijakan ini secara komprehensif membahas mengenai pemerintah daerah otonom sebagai penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-undang tersebut dapat dengan mudah mempertimbangkan dan memutuskan suatu kebijakan pendukung yang lebih ringkas sehingga lebih efektif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Secara umum otonomi diartikan sebagai “mandiri”, sedangkan dalam arti yang lebih menekankan pada otonomi daerah yaitu “memberdayakan”. Jadi yang dimaksud daerah otonom di sini adalah memberikan otoritas agar berdikari sesuai dengan kebijakan atau keputusan mengenai pembangunan daerah setempat.

Krisis multikrisis yang terjadi pada 1997 dalam kehidupan politik berdampak pada tatanan ekonomi masyarakat di negeri ini yang dibangun sudah puluhan tahun lamanya. hal itu menyebabkan untuk mengelola dan mengatur potensi daerahnya masing-masing menjadi kesulitan. Para intelektual Muslim menyatakan bahwa otonomi daerah ini sesuai keinginan bersama, yang disebut dengan masyarakat madani yang dibangun dengan nilai-nilai akhlak dan moral.

Para pendiri republik sudah memberikan suatu dasar pijakan yang kuat kepada bangsa dan negara Indonesia untuk membangun masyarakat madani yang berfalsafah Pancasila dan UUD 1945. Sebagai tanggapan atau respon terhadap multikrisis tersebut, pada masa reformasi disosialisasikan dalam suatu kebijakan yang terstruktur secara sistematis terhadap pemerintah yang bijaksana dan adil, yaitu dengan penerapan otonomi daerah, hakikatnya adalah suatu bentuk pelaksanaan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), untuk mengefektifkan otonomi daerah dalam rangka membangun pemberdayaan sumber daya manusia pada masyarakat pedesaan sehingga memberikan makna bahwa dalam mewujudkan efektivitas otonomi daerah dalam membangun pemberdayaan sumber daya manusia pada masyarakat pedesaan, intinya adalah melalui pelayanan publik. Sarana pendidikan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik kepada masyarakat agar masyarakat pedesaan menjadi berkemampuan untuk “mandiri” atau “berdaya”.

Membangun pemberdayaan sumber daya manusia, kuncinya ada pada diri manusia. Karena, membangun manajemen sumber daya manusia itu harus melalui proses pembelajaran dan pendidikan yang melibatkan guru dan peserta didik sebagai sumber daya manusia. Menurut Dahlan dan Sumaryana (2017:46-47), salah satu tata kelola pemerintahan yang akuntabel, dan bersih harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik ini sebagai tanda terwujudnya *Good Governance*. Dalam pelaksanaan *good governance* dapat terwujud dengan adanya kerjasama yang baik sesuai dengan kemampuan pemerintah, masyarakat madani, dan kebutuhan publik.

Pelayanan publik yang menekankan pada proses pembelajaran dan pendidikan kepada masyarakat pedesaan harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, tatanan sosial-politik masyarakat, dan perundang-undangan hasil lembaga legislatif masih jauh dari pembangunan masyarakat yang adil merata. Untuk terwujudnya pelayanan publik yang baik dan bersih, maka yang harus diperhatikan adalah terselenggaranya otonomi daerah profesional, efektif dan

efisien, yang dapat dilakukan melalui pengembangan sistem manajemen pemerintahan yang efektif, obyektif, rasional, modern, dan berperadaban.

Perkembangan teknologi informasi terus berkembang dengan pesat. Jika pemerintahan daerah dengan wewenang otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah, harus memperhatikan, mengikuti, dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi tersebut untuk membangun pemberdayaan sumber daya manusia pada masyarakat pedesaan yang adil dan merata. Menurut Buchari (2016:225) perkembangan teknologi dan informasi yang berkembang semakin hari semakin canggih atau modern, mau tidak mau pemerintah harus mengikuti dan mengikuti perkembangan teknologi dan informasi, kebutuhan teknologi dan informasi sudah berkembang dan berakar didalam masyarakat saat ini, di mana teknologi dan informasi menjadi keharusan yang mendasar dari kebutuhan bagi pelayanan publik sehingga dalam pelayanan terhadap publik di rasakan dan didapatkan secara efektif dan efisien, hal ini seiring dengan yang di inginkan oleh masyarakat menjadi pemerintah yang dinamis dengan memperhatikan dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi modern. Oleh karenanya pelayanan publik dengan menggunakan teknologi informasi dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam mewujudkan persyaratan sebagai *good governance*, sehingga didapat peningkatan secara akuntabilitas, transparansi, efektif dan efisien.

SIMPULAN

Pada tulisan artikel ini penulis dapat menarik suatu simpulan bahwa kepemimpinan adalah merupakan suatu kemampuan dari seseorang untuk mempengaruhi pikiran dan perilaku agar orang-orang/individu mau dengan ikhlas bekerja untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Efektivitas otonomi daerah dalam membangun pemberdayaan sumber daya manusia pada masyarakat pedesaan perlu pemimpin yang memiliki kepemimpinan (*leadership*) yang cerdas, dinamis, inovatif, dan bertanggung-jawab kepada dirinya sendiri maupun kepada masyarakat (orang-orang) yang dibawah kepemimpinannya. Pemimpin yang cerdas adalah pemimpin yang amanah.

Dengan demikian, maka efektivitas otonomi daerah dalam membangun pemberdayaan sumber daya manusia pada masyarakat pedesaan, intinya terletak pada diri manusia itu sendiri, identik dengan kunci pendidikan itu terletak pada manusianya.

DAFTAR PUSTAKA

- Buchari, R.A. (2016). Implementasi E-Service Pada Organisasi Publik di Bidang Pelayanan Publik Di Kelurahan Cibangkong Kecamatan Batununggal Kota Bandung. *Sosiohumaniora*, 18, (3), 235-239.

- Collins, J. (2001). *Good to Great: Why Some Companies Make the Leap and Others Don't?*, Harper Collins Publication, New York.
- Dahlan, M & Sumaryana, A. (2017). Pengaruh Penerapan *Good Governance* Terhadap Kinerja Pelayanan Publik, Budaya Organisasi Dan Lingkungan Eksternal Sebagai Pemoderasi. *Sosiohumaniora*, 19, (1), 45-51.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah_di_Indonesia. Diakses pada 02 Oktober 2018 pukul 12.30 wib.
- <https://gurupkn.com/peraturan-perundang-undangan-otonomi-daerah>. Diakses pada 02 Oktober 2018 pukul 12.54 wib.
- Sinaga, D. (2016). Hubungan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Senembah Tanjung Muda Hulu Kabupaten Deli Serdang, *Sosiohumaniora*, 18, (3) 218 - 226
- Wahid, A. (2011) *Isu-Isu Kontemporer Pendidikan Islam*, Semarang : Walisongo Press, Cetakan I.
- Suparmoko, M. (2002). *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Andi. Yogyakarta
- Owens, Robert G. *Organizational Behaviour in Education*, (Boston: Allyn and Bacon, 1995).
- Neuman, W.L. (2000). *Social Reseach Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, Boston: 4th Edition, Allyn & Bacon.
- Hadi, S. (1995). *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, hal. 5
- Solihat, E. (2010). Pengaruh Pendekatan Open-ended Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa dalam Belajar Matematika. (Penelitian Quasi Eksperimen di MTsN Model Babakan Sima). Jakarta: Skripsi, Jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah.

MODEL SINERGI UNSUR PENTAHELIKS PARIWISATA DALAM PENGELOLAAN DESTINASI WISATA KOTA PAREPARE DAN KABUPATEN BONE

Ilham Junaid

Manajemen Pariwisata, Politeknik Pariwisata Makassar

E-mail: illank77@yahoo.co.id

ABSTRAK. Menteri Pariwisata Republik Indonesia menggunakan istilah pentaheliks pariwisata yang terdiri dari *academics, business, government, community, media* (ABGCM) untuk mendorong keterlibatan *stakeholder* dalam program pengembangan destinasi wisata. Namun, belum terdapat data empiris mengenai bagaimana sinergi yang terbangun antara unsur pentaheliks pariwisata di Sulawesi Selatan. Karena itu, dibutuhkan model sinergi yang dapat menjadi panduan dalam mengelola potensi pariwisata daerah dalam menunjang tercapainya destinasi unggulan. Tujuan penelitian ini adalah 1) mengidentifikasi kondisi faktual sinergi yang terbangun dan faktor-faktor yang menghambat sinergi unsur pentaheliks pariwisata; 2) mengusulkan model yang dapat diterapkan dalam pengelolaan destinasi wisata dalam perspektif sinergi pentaheliks pariwisata. Penelitian dilaksanakan di Kota Parepare dan Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan pada 2017 dengan metode pengumpulan data kualitatif melalui wawancara dan *participant observation*. Penelitian ini memanfaatkan konsep *stakeholder* dalam menganalisis data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi pentaheliks pariwisata telah terbangun meskipun program kerja bidang pariwisata lebih didominasi oleh pemerintah daerah. Keterlibatan pentaheliks pariwisata sangat dibutuhkan untuk mendukung program pengembangan pariwisata daerah. Faktor-faktor seperti implementasi otonomi daerah, kurangnya pemahaman teknologi dan pariwisata oleh beberapa pentaheliks pariwisata serta lemahnya upaya kreatif dan inovatif di bidang pariwisata menjadi tantangan dalam pengelolaan destinasi wisata. Penelitian ini merekomendasikan tiga model manajemen destinasi wisata yakni implementasi tata kelola destinasi wisata (DMO) model pemerintah, model kawasan pariwisata percontohan dan strategi atau model *go digital*.

Kata kunci: Kota Parepare; Kabupaten Bone; sinergi; pentaheliks pariwisata; manajemen destinasi

MODELS OF SINERGY FOR DESTINATION MANAGEMENT: A STUDY AT PAREPARE CITY AND BONE REGENCY

ABSTRACT. The Minister of Tourism, Republic of Indonesia uses the term 'pentaheliks of tourism' (*academics, business, government, community and media*) to encourage the involvement of *stakeholders* in tourism. However, there is not any empirical data on the synergy among the tourism stakeholders in South Sulawesi Province, Indonesia. Hence, model of synergy is required to strengthen relationship among the stakeholders and to support the management of tourism resources for superior tourism destination. The aims of this research are 1) to identify the actual condition of synergy among the 'pentaheliks pariwisata' and factors that constraint the synergy; 2) recommend models that may be implemented in the management of tourism destination under the framework of stakeholder synergy. This research employed qualitative methods through interviews, participant observation which was done in 2017 in Parepare city and Bone regency. This research utilises the concept of stakeholders in examining the conduct of tourism in the research area. The research reveals that synergy among the 'pentaheliks of tourism' has been implemented although the tourism programs are mostly managed by the local board of tourism. Efforts have been done by tourism pentaheliks, however, factors such as the implementation of regional autonomy, lack of understanding on tourism and information technology as well as lack of innovative efforts by the staff at the local board of tourism potentially constraint the development of tourism destination. This paper recommends three models for destination management including the implementation of destination management organisation on the government-based approach, tourism zone as a model of tourism attraction and *go digital* approach.

Key words: Parepare city; Bone regency; synergy; pentaheliks; destination management

PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pariwisata menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor utama pengembangan nasional melalui target kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara pada 2019. Pariwisata menjadi sektor unggulan yang diharapkan diikuti oleh pemerintah di daerah di seluruh wilayah Indonesia. Daerah-daerah di Indonesia memiliki potensi pariwisata yang diharapkan mampu memberikan manfaat positif bagi masyarakat melalui kegiatan pariwisata.

Target pemerintah tersebut tidak hanya menjadi tugas sekelompok anggota masyarakat, tetapi melibatkan

berbagai unsur sehingga dibutuhkan sinergi antara berbagai kelompok masyarakat yang ada di suatu wilayah geografis atau destinasi wisata. Menteri Pariwisata Republik Indonesia menekankan pentingnya target pariwisata dalam lima tahun ke depan yakni kenaikan dua kali lipat dengan kontribusi PDB nasional sebesar 8% dengan devisa sebesar Rp. 280 triliun. Kunjungan wisatawan yang meningkat sebagaimana yang ditargetkan tersebut diharapkan mampu mendorong ketersediaan lapangan kerja bidang pariwisata sebanyak 13 juta orang. Hal ini dimaknai sebagai pentingnya melibatkan berbagai unsur yang ada untuk membantu tercapainya sasaran pengembangan pariwisata nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Menteri Pariwisata menggunakan istilah Pentaheliks pariwisata yang terdiri dari akademisi (*Academics*), pelaku bisnis (*Business*), pemerintah (*Government*), komunitas atau masyarakat (*Community*) dan Media yang disingkat dengan ABGCM. Pentaheliks merupakan bagian dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) atau mereka yang terkait dalam mengembangkan pariwisata daerah. Pentaheliks pariwisata tersebut dipandang memiliki pengaruh dan peran dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia. Dengan kata lain, unsur-unsur pentaheliks pariwisata tersebut diharapkan memperkuat sinergi untuk mendorong program pemerintah pusat melalui pengelolaan (manajemen) destinasi wisata.

Namun demikian, peran unsur pentaheliks dalam mempersiapkan sumber daya manusia bidang pariwisata dan mendukung pengembangan pariwisata masih menyisakan pertanyaan. Idealnya, kebijakan pemerintah yang menyangkut sinergitas unsur pentaheliks dalam pengelolaan destinasi wisata khususnya yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata daerah harusnya diimplementasikan di tingkat kabupaten/kota. Kenyataannya, unsur pentaheliks nampaknya belum membangun sinergi. Di Provinsi Sulawesi Selatan misalnya, pemerintah daerah telah menjadikan pariwisata sebagai sektor utama pengembangan potensi daerah. Namun, sinergi dari berbagai elemen atau unsur tidak menjadi prioritas utama. Program kepariwisataan cenderung direncanakan dan dijalankan oleh pemerintah serta pelaku usaha pariwisata yang berjalan secara sendiri-sendiri. Sinergitas pentaheliks di daerah nampaknya perlu diidentifikasi khususnya karena keberadaan mereka di tingkat daerah dihalangi oleh keterbatasan informasi dan keterlibatan *stakeholder* yang belum maksimal.

Pengembangan pariwisata suatu destinasi perlu melibatkan berbagai elemen atau kelompok masyarakat yang ada di suatu destinasi (Cooper dan Hall, 2008:149; Currie, Seaton dan Wesley, 2009: 47; Haugland, *et al.* 2011: 269). Pengelolaan daya tarik wisata misalnya, tidak dapat dikembangkan jika hanya dikelola oleh satu kelompok masyarakat saja. Dalam hal ini, diperlukan kerjasama yang aktif dan efektif dari berbagai elemen masyarakat mengingat potensi alam dan budaya yang dikelola sebagai aset wisata tergantung kerjasama yang baik dari *stakeholder* tersebut (Byrd, 2007: 6; Getz dan Timur, 2005:235; Jamal dan Stronza, 2009: 169; Kayat, 2008: 95; Presenza dan Cipollina, 2010: 18).

Kenyataannya, belum terdapat data empiris yang menjelaskan hubungan atau sinergitas yang terbangun antara berbagai kelompok masyarakat dalam konteks pentaheliks pariwisata khususnya di Sulawesi Selatan. Kerjasama antara masyarakat dan pemerintah mungkin saja terbangun secara informal di destinasi wisata, namun keterkaitan kelima elemen pentaheliks tersebut perlu dikaji. Kerjasama yang dimaksud adalah kemampuan

setiap unsur pentaheliks pariwisata untuk terlibat dalam mengoptimalkan potensi daerah untuk dikembangkan sebagai aset wisata. Penelitian ini memandang bahwa sinergitas pentaheliks dapat menjadi data empiris mengenai kerjasama yang terbangun antara berbagai unsur pentaheliks. Tujuan penelitian ini adalah 1) mengidentifikasi kondisi faktual sinergi yang terbangun dan faktor-faktor yang menghambat sinergi unsur pentaheliks pariwisata dalam pengelolaan destinasi wisata dan pengembangan pariwisata daerah; 2) menguraikan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh unsur pentaheliks dalam mengembangkan potensi pariwisata daerah. Langkah-langkah ini berkaitan dengan model sinergi pentaheliks pariwisata dalam rangka manajemen destinasi wisata di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Kota Parepare dan Kab. Bone.

Sinergi dalam kepariwisataan adalah hal penting dalam mengembangkan potensi pariwisata suatu destinasi. Model sinergi menjadi suatu kebutuhan untuk menuntun *stakeholder* pariwisata dalam membangun destinasi. Sinergi di Sulawesi Selatan perlu dibangun dengan dua alasan utama, pertama pemerintah daerah memerlukan petunjuk bagaimana mengelola potensi daerah tanpa mengabaikan kepentingan dan harapan para *stakeholder* pariwisata. Kedua, pemerintah daerah perlu melibatkan para *stakeholder* dalam mengembangkan potensi pariwisata daerah. Rumusan masalah penelitian ini adalah 1) bagaimana kondisi faktual sinergi *stakeholder* pariwisata di Provinsi Sulawesi Selatan? 2) bagaimana model sinergi unsur- pentaheliks pariwisata dalam mengembangkan potensi pariwisata daerah.

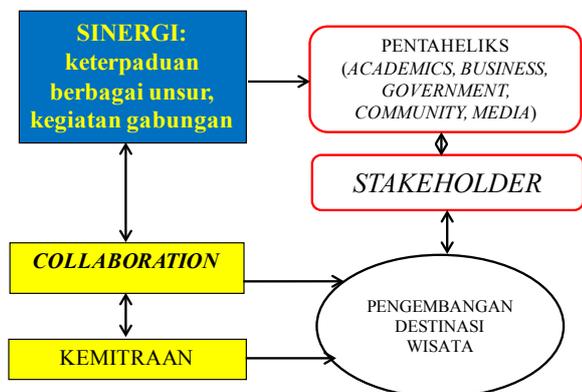
Sinergi atau sinergitas adalah dua istilah yang memiliki makna yang sama, yang berarti kombinasi atau keterpaduan dari berbagai unsur (misalnya unsur pemangku kepentingan) untuk menghasilkan sesuatu yang positif. Dalam pengembangan suatu destinasi, sinergi dapat diartikan sebagai keterpaduan berbagai elemen atau kelompok masyarakat untuk menghasilkan keluaran (*output*) yang lebih besar. Pemahaman akan tugas dan tanggung jawab masing-masing perlu diwujudkan dengan kerja nyata setiap unsur yang terlibat. Sinergi dapat juga diartikan sebagai upaya mencapai sasaran usaha atau organisasi dalam memenangkan persaingan dengan prinsip kebersamaan (*togetherness*). Sinergi berkaitan juga dengan istilah kolaborasi atau kemitraan. Dengan demikian, sinergi, kolaborasi ataupun kemitraan dapat menjadi wadah untuk mencapai tujuan suatu organisasi (Jamal dan Getz, 1995).

Pentaheliks adalah kolaborasi lima unsur pemangku kepentingan (*stakeholder*) pariwisata di destinasi wisata. *Stakeholder* memegang peranan penting dalam pengembangan suatu destinasi wisata (Bramwell dan Lane, 2000:4; Esu dan Ebitu, 2010: 24). Mereka yang dikategorikan sebagai *stakeholder* dapat berasal dari elemen masyarakat. Kelompok masyarakat ini dapat berupa mereka yang duduk di pemerintahan, organisasi swasta, industri

pariwisata, dan masyarakat. Menurut Tuohino dan Konu (2014: 204), *stakeholder* dapat dikategorikan sebagai anggota masyarakat dari kelompok pemerintahan, kantor atau organisasi pemerintah, pihak swasta dan masyarakat ataupun publik serta lembaga pendidikan yang di dalamnya terdapat kelompok akademisi yang melakukan penelitian (*research*) untuk kepentingan berbagai kelompok masyarakat.

Teori atau konsep *stakeholder* memandang atau memfokuskan pentingnya hubungan antara sesama kelompok *stakeholder* dalam pengelolaan daya tarik wisata atau destinasi wisata (Tuohina dan Konu, 2014: 204). *Stakeholder* adalah mereka yang memiliki ketertarikan (interest) terhadap pengembangan pariwisata suatu daerah. *Stakeholder* juga dapat diartikan sebagai mereka yang mendapatkan dampak (*effect*) dari pelaksanaan suatu kebijakan kepariwisataan dalam suatu lingkup daerah wisata atau destinasi wisata.

Kolaborasi atau kemitraan telah menjadi salah satu strategi dalam melibatkan berbagai kelompok masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan. Shaw (2007:190) memberi contoh bagaimana kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat (khususnya kelompok minoritas) dan pengusaha bidang pariwisata (business) bekerja bersama membangun pariwisata di Inggris dan Kanada. Menurut Shaw, pelaksanaan festival dan pembuatan perkampungan kelompok masyarakat dilaksanakan melalui keterlibatan berbagai elemen masyarakat. Gambaran kajian teoretis penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Sumber: Penulis, 2017

Gambar 1. Gambaran Kajian Teoretis Penelitian

METODE

Penelitian ini menerapkan metodologi kualitatif dalam melihat realitas yang ada di lokasi penelitian (Kota Parepare dan Kabupaten Bone). Menurut Flick (2007: ix), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami, menguraikan dan menjelaskan fenomena sosial suatu wilayah geografis. Penelitian ini mengkaji sinergi yang terbangun antar unsur pentaheliks yang ada di destinasi wisata dengan menganalisis informasi yang diperoleh melalui pengumpulan data penelitian. Pengalaman

dan pengetahuan yang dimiliki oleh unsur pentaheliks pariwisata menjadi data atau informasi penting dalam manajemen destinasi wisata melalui pendekatan sinergitas.

Uraian yang dihasilkan oleh penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mampu menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan. Eksplanasi hasil penelitian merupakan proses ilmiah yang dilakukan peneliti dengan memahami atau menelaah proses dan makna dari data yang diperoleh peneliti (Flick, *et al.* 2004; Hatch, 2002:151). Belsky (2004:273) berpendapat bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat melihat atau mengamati kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata serta makna yang ada dalam proses komunikasi antara peneliti dan subjek peneliti. Sinergitas pentaheliks dapat dipahami secara kritis melalui pendekatan kualitatif.

Penelitian ini memanfaatkan data primer dan sekunder. Data yang diperoleh dari hasil wawancara (*interview*) dan observasi partisipatori (*participant observation*) merupakan data primer penelitian ini. Selanjutnya, data sekunder adalah dokumen atau arsip baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun swasta serta publikasi ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Informasi yang diperoleh dari website atau internet juga menjadi bahan penting dalam penulisan hasil penelitian.

Penulis telah mendapatkan informasi atau data penelitian melalui wawancara kepada 11 (sebelas) informan yang terdiri dari 6 (enam) orang di kabupaten Bone dan 5 (lima) orang di kota Parepare. Mereka yang terlibat dalam wawancara penelitian ini adalah kalangan atau kelompok masyarakat dari pemerintahan, sektor swasta atau industri pariwisata dan kalangan akademisi di perguruan tinggi. *Participant observation* ini dilakukan dengan berkunjung ke lokasi penelitian dan berperan sebagai wisatawan. *Participant observation* ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui secara langsung kondisi faktual khususnya yang menyangkut sinergitas pentaheliks. Penentuan informan dalam wawancara memanfaatkan teknik *purposive sampling* mengingat informan diharapkan dapat memberikan informasi sesuai konteks penelitian (Altinay dan Paraskevas, 2008:101). Data yang telah diperoleh dianalisis dengan menerapkan prinsip analisis data kualitatif yang terdiri dari fase reduksi data, pengorganisasian dan interpretasi dengan melihat tema-tema (*thematic*) yang muncul (Arikunto, 2002; Babbie, 2007:375; Ritchie, Spenser dan William, 2003:220).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran pariwisata dan kondisi faktual sinergi pentaheliks pariwisata

Pemerintah Kota Parepare (melalui Kepala Dinas, Bapak Ir. Syukur Razak, M.Si.) berupaya mengembangkan Kota Parepare sebagai destinasi utama di provinsi Sulawesi Selatan. Bapak Iqbal (staf pada bagian pariwisata) mengemukakan bahwa Pemerintah daerah melalui peran

Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata melaksanakan berbagai kegiatan atau *event* yang berkaitan dengan olahraga, kepemudaan dan kepariwisataan. Berbagai event dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah tersebut. Secara khusus, pemerintah merencanakan dan menjalankan *event* atau festival kedaerahan yakni festival Mallipa yang pelaksanaannya sekitar Maret. Festival Lovely Habibie-Ainun menjadi ikon utama daerah ini dengan menjadikan ikon cinta sejati Habibie-Ainun sebagai *tagline* utama daerah.



Sumber: Penulis, 2017

Gambar 2. Patung Habibie-Ainun di Kota Parepare

Penyelenggaraan festival atau pemilihan duta pariwisata menjadi aktifitas utama daerah ini yang dilaksanakan setiap tahun. Periode pelaksanaan kegiatan ini adalah antara pada April hingga Mei setiap tahun. Pemilihan duta pariwisata ini menjadi salah satu event utama mengingat masyarakat secara langsung akan terlibat, baik sebagai peserta maupun sebagai pelaksana kegiatan. Destinasi Parepare telah memiliki dan mengelola daya tarik wisata, baik yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat setempat. Kebun Raya Jompie adalah contoh daya tarik wisata alam (juga merupakan buatan) yang dikelola secara bersama oleh pemerintah pusat dan Dinas Pariwisata di tingkat daerah. oleh pemerintah daerah.

Alam kota Parepare juga menawarkan daya tarik wisata alam lainnya, misalnya pantai Mattirotasi dan pantai Lumpue yang berlokasi tidak jauh dari kota Parepare. Bagi wisatawan yang mengharapkan aktifitas berenang di pantai, maka pantai Lumpue menjadi pilihan. Pantai ini banyak dikunjungi oleh masyarakat dan wisatawan yang ingin memanfaatkan alam pantai untuk berenang. Pengelolaan pantai ini umumnya masih dikelola masyarakat dengan peran pemerintah yang masih terbatas. Masyarakat yang tinggal di sekitar pantai Lumpue memanfaatkan kunjungan masyarakat dan wisatawan untuk mencari keuntungan ekonomis, misalnya berjualan, menyewakan gazebo, memungut parkir dari kendaraan pengunjung serta menjual makanan dan minuman. Bagi masyarakat setempat, mereka memiliki kewenangan untuk mengelola pantai tersebut karena mereka telah mendiami wilayah tersebut.

Kabupaten Bone sebagai daerah otonom dikenal sebagai wilayah yang juga sangat strategis, lokasi yang

dibatasi oleh kabupaten Wajo di bagian utara, kabupaten Maros di bagian barat, kabupaten Sinjai di bagian selatan dan teluk Bone di bagian timur. Lokasi strategis kabupaten Bone dapat dilihat dari posisinya sebagai lokasi perdagangan barang dan jasa yang memungkinkan para pedagang di wilayah Indonesia dan Sulawesi secara khusus bertemu dan melakukan transaksi perdagangan. Ibukota Kabupaten Bone adalah Watampone, pusat aktifitas masyarakat baik dari segi perdagangan maupun dari segi layanan jasa.

Kabupaten Bone dikenal dengan budaya atau adat istiadat Bugis yang masih dipertahankan. Jika pengunjung atau wisatawan berkunjung ke kabupaten Bone, maka pengunjung akan disuguhkan kalimat penyambutan dengan “Bone Beradat”, suatu simbol yang mengisyaratkan bahwa Bone menjadi eksis karena kebudayaan yang masih dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Bone melalui peran dan kedudukan Dinas Pariwisata ber-upaya mengoptimalkan atau mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan pemerintah daerah. Pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan pengembangan tiga daya tarik wisata utama daerah, yakni daya tarik wisata Tanjung Pallette dan daya tarik wisata Lanca dan Gua Mampu.

Tanjung Pallette menjadi semakin menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan karena pemerintah bersama masyarakat membenahi eksistensi daya tarik wisata tersebut. Selain menawarkan daya tarik wisata alam Tanjung Pallette dengan pemandangan yang indah, pengunjung juga dapat merasakan aktifitas budaya berupa pembelajaran Bahasa Inggris yang dirangkaikan dengan pembelajaran sejarah dan budaya Bone. Selain itu, Goa Mampu menjadi pilihan pengunjung jika ingin merasakan suasana eksplorasi alam dengan nuansa cerita mitos mengenai Goa Mampu tersebut. Ketika melakukan kunjungan, penulis mendapat penjelasan mengenai bebatuan yang memiliki bentuk dan memberikan kisah yang didasarkan oleh pemandu setempat.

Salah satu kelompok *stakeholder* yang ada di kabupaten Bone adalah kalangan atau kelompok media di mana penduduk memanfaatkannya sebagai salah satu sektor untuk mendapatkan manfaat ekonomis. Media harian *Tribun Bone* dan *Radar Bone* adalah contoh media yang saat ini memberikan peluang ke masyarakatnya untuk mengelola dan memberikan informasi ke publik dalam bentuk media cetak. Radio juga menjadi media utama daerah dengan berbagai kelompok radio khususnya cabang dari radio Republik Indonesia (RRI). Media televisi lokal juga telah berjalan dengan ciri khas kedaerahan selain media televisi nasional sebagai bagian tak terpisahkan dari pemberian informasi ke khalayak publik.

Industri pariwisata telah mulai berkembang di Kabupaten Bone. Industri akomodasi misalnya, nampaknya mulai berkembang dengan semakin banyaknya jumlah tamu yang mengisi akomodasi yang ada di kabupaten Bone. Usaha cafe atau restoran adalah industri atau usaha pariwisata yang banyak mengalami peningkatan dalam

hal jumlah. Ketika melakukan eksplorasi, penulis melihat jumlah kafe di pinggiran jalan di kota Watampone. Hal ini menjadi angin segar bagi destinasi Bone bahwa kehadiran cafe tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk bekerja di sektor jasa, salah satunya melalui usaha makan dan minum. Resto cafe yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman adalah contoh cafe yang banyak dikunjungi oleh pengunjung.



Sumber: Penulis, 2017

Gambar 3. Tanjung Pallete di Kabupaten Bone

Kota Parepare dan Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan telah memiliki kelima unsur pentaheliks pariwisata daerah yang terdiri dari akademisi (*academics*), pengusaha (*business*), pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata Daerah (*government*), masyarakat (*community*) dan media. Kelima unsur tersebut pada dasarnya memiliki peran dalam mengembangkan pariwisata meskipun dalam realita, belum terdapat data secara kuantitatif persentasi keterlibatan unsur pentaheliks dalam mengembangkan potensi pariwisata daerah. Kelima unsur pentaheliks tersebut telah terlibat dalam pengembangan potensi pariwisata daerah meskipun tingkat keterlibatan mereka bervariasi tergantung pada perannya sebagai stakeholder pariwisata.

Peran akademisi di daerah sangat tergantung pada bagaimana pemerintah daerah memanfaatkan eksistensi mereka sebagai pihak yang secara akademis memberikan solusi pengelolaan destinasi wisata. Di Kota Parepare misalnya, akademisi bidang pariwisata dapat dilihat dari kedudukan dan peran pengajar atau guru-guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pariwisata (misalnya Ibu Salasiah dan Bapak Arqam, pengajar di STAIN Parepare). Sesungguhnya, konektifitas antara akademisi bidang pariwisata pada sekolah menengah dengan pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan. Hal ini penting dilakukan mengingat pemerintah daerah memerlukan pembantuan dari para akademisi di tingkat daerah dalam hal rekomendasi program pengembangan potensi pariwisata daerah. Demikian pula eksistensi perguruan tinggi melalui para akademisinya di Kota Parepare nampaknya masih perlu ditingkatkan mengingat belum terdapat studi kajian pariwisata yang secara khusus membidangi pariwisata atau kepariwisataan.

Pemerintah daerah Kota Parepare pada dasarnya telah memanfaatkan eksistensi akademisi di Sulawesi

Selatan untuk mengelola dan mengembangkan potensi pariwisata daerah. Kemitraan dan kerjasama yang dibangun antara Dinas Pariwisata dengan institusi pendidikan tinggi bidang pariwisata adalah bukti bahwa para akademisi telah menjalankan langkah pembimbingan kepariwisataan ke masyarakat di Kota Parepare. Selain itu, kegiatan sosialisasi kepariwisataan serta aktifitas akademik lain yang dilaksanakan institusi pendidikan tinggi yang berasal dari Kota Makassar menjadi salah satu indikasi adanya peran dan fungsi akademisi dalam mengembangkan potensi daerah baik yang berkaitan dengan kepariwisataan maupun bidang lain yang diperuntukkan untuk pengembangan potensi kewilayahan demi kepentingan masyarakat.

Di Kabupaten Bone, eksistensi akademisi di tingkat daerah telah mulai dilirik pemerintah daerah. Pengelolaan Tanjung Pallete sebagai kawasan wisata misalnya, telah melibatkan kelompok atau individu dari perguruan tinggi daerah untuk terlibat dalam mengelola dan memaksimalkan program pemerintah daerah melalui aktifitas bahasa dan kepariwisataan. Sinergi antara pemerintah daerah dan akademisi di daerah ini ditunjukkan dengan peran alumni perguruan tinggi dalam menjalankan program yang difasilitasi oleh pemerintah daerah (Dinas Pariwisata) dengan sasaran utama generasi muda Kabupaten Bone dan staf pemerintah daerah yang berperan sebagai pemberi informasi kepariwisataan ke wisatawan.

Langkah pemberian sosialisasi kepariwisataan oleh akademisi dari luar kabupaten Bone adalah indikasi bahwa pemerintah daerah masih mengandalkan akademisi dari luar untuk berkontribusi dalam merekomendasikan strategi pengembangan destinasi wisata. Dengan kata lain, peran pendampingan oleh perguruan tinggi dari luar Kabupaten Bone masih menjadi pilihan pemerintah daerah. Sementara itu, keterbatasan akademisi di tingkat daerah khususnya bidang pariwisata masih terbatas. Namun demikian, Kabupaten Bone memiliki akademisi bidang lain (misalnya kebudayaan) yang memerhatikan hal-hal yang bersifat potensi kebudayaan sehingga memungkinkan pengembangan daerah melalui aspek pariwisata budaya. Kabupaten Bone memiliki sanggar-sanggar budaya yang dirintis oleh akademisi yang mencintai kebudayaan daerah.

Kebudayaan menjadi salah satu aset penting di Kabupaten Bone. Karya-karya ilmiah yang ditulis oleh budayawan daerah menungkinkan adanya upaya melestarikan potensi budaya sebagai aset pariwisata budaya. Sebagai contoh, Andi Makmur Makka menulis buku dengan judul 'Rumpa'na Bone' dan Asmat Riyadi yang menulis buku 'Kamus Lengkap Bahasa Bugis-Indonesia'. Pada umumnya, penelitian-penelitian yang dilakukan oleh banyak peneliti di Kabupaten Bone banyak difokuskan pada kebudayaan dalam berbagai perspektif. Dengan demikian, selain potensi alam yang dimiliki daerah, potensi pariwisata budaya juga sangat berpeluang

untuk dikelola dan dikembangkan dengan peran dan fungsi akademisi dalam memberikan usulan strategi pengembangan.

Pengusaha (misalnya, Haji Carlos, pengusaha pantai pasir putih, café dan industri kreatif; Ibu Mardiah, pengusaha bidang café/resto, dll) di daerah-daerah di Sulawesi Selatan juga telah memberikan atau melakukan langkah-langkah dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata daerah. Kota Parepare menjadi salah satu destinasi yang telah sukses mengembangkan pariwisata dengan peran pengusaha bidang pariwisata. Jika dibandingkan dengan Kota Makassar, Kota Parepare mungkin masih jauh dari segi peran dan fungsi pengusaha untuk terlibat dalam aktifitas pariwisata. Namun demikian, jumlah hotel dan restaurant (termasuk cafe) menjadi salah satu pendorong majunya atau meningkatnya pariwisata di Kota Parepare. Eksistensi hotel di beberapa lokasi di Kota Parepare menjadi kekuatan utama bahwa pengusaha atau pebisnis telah mulai melirik pariwisata sebagai salah satu peluang usaha.

Meskipun pengusaha di daerah telah bekerja mengembangkan usahanya sesuai dengan bidang yang mereka geluti (industri pariwisata), namun tidak sedikit pengusaha yang belum memahami makna sertifikasi usaha pariwisata. Pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata telah bekerja menyampaikan ke industri pariwisata tujuan sertifikasi usaha pariwisata. Namun demikian, jumlah industri pariwisata atau pengusaha bidang pariwisata yang memperhatikan sertifikasi usaha pariwisata cenderung masih sangat kurang. Dalam hal penerimaan karyawan yang kompeten dalam usaha pariwisata misalnya, pengusaha pariwisata cenderung merekrut karyawan tanpa memerhatikan aspek kompetensi karyawan yang akan bekerja di usaha mereka. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa langkah unsur pengusaha dalam mengembangkan potensi pariwisata masih tergantung pada program yang dijalankan oleh Dinas Pariwisata.

Kabupaten Bone juga menjadi destinasi wisata yang melibatkan peran pengusaha dalam memajukan pariwisata daerah. Dibandingkan Kota Parepare, pengusaha bidang pariwisata di Kabupaten Bone lebih kurang dalam hal keterlibatan dalam usaha akomodasi. Usaha akomodasi juga telah ada meskipun jumlahnya tidak sebanyak di Kota Parepare. Namun, eksistensi cafe ataupun restoran yang cenderung meningkat di Kabupaten Bone menunjukkan bahwa peran pengusaha di daerah ini sudah menunjukkan hasil yang memuaskan. Penulis memanfaatkan kunjungan penelitian di Kabupaten Bone dengan menikmati hidangan di sebuah cafe. Deretan cafe ataupun restoran di destinasi ini dapat dilihat oleh wisatawan ataupun mereka yang mengunjungi Kabupaten Bone. Hal ini memungkinkan adanya beberapa pilihan bagi wisatawan untuk menikmati suasana rileks atau santai ketika mengunjungi daya tarik wisata ataupun usaha pariwisata di Kabupaten Bone.

Pemilihan karyawan di Kabupaten Bone tidak terlalu berbeda dengan kondisi faktual di Kota Parepare. Pemilihan karyawan yang tidak memerhatikan prinsip

kompetensi sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata masih menjadi realita di Kabupaten Bone. Ini berarti bahwa langkah pengusaha lokal dalam mengembangkan pelayanan wisatawan dalam bentuk sistem karyawan yang memiliki kualifikasi kompetensi belum menjadi prioritas utama pengusaha. Kecenderungan di daerah menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja di industri pariwisata belum memerhatikan sistem kompetensi karyawan. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas pemberian layanan mengingat sistem kompetensi memiliki standar kualifikasi pelayanan sesuai dengan tugas pokok setiap pemberi layanan di bidang industri pariwisata.

Langkah pengusaha dalam mengembangkan potensi pariwisata daerah di dua destinasi di Sulawesi Selatan (Kota Parepare dan Kabupaten Bone) ditunjukkan dalam tiga tahap atau usaha. Pertama, industri pariwisata atau pengusaha akan sangat tergantung pada instruksi atau arahan pemerintah. Hal ini berarti bahwa langkah pengusaha dalam memajukan pariwisata daerah akan sangat tergantung pada bagaimana pemerintah meng-upayakan sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan kepariwisataan serta hal-hal yang berkaitan dengan sistem kepariwisataan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang maksimal oleh pemerintah dalam memberikan instruksi kepada para pengusaha untuk memerhatikan peraturan-peraturan serta sosialisasi kepada pihak pengusaha.

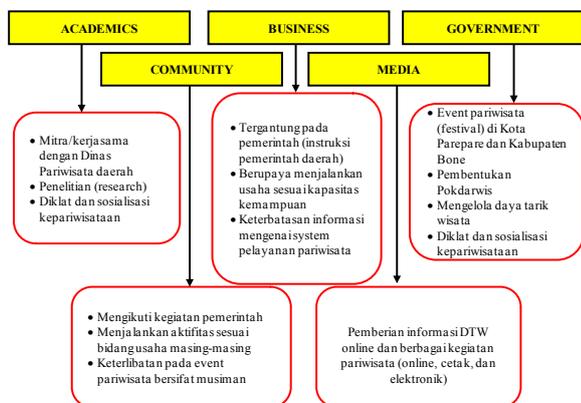
Kedua, industri pariwisata telah berupaya melakukan langkah pengelolaan destinasi wisata melalui usaha yang mereka kembangkan, baik berupa akomodasi, layanan makan dan minum maupun usaha lainnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mereka (pengusaha) telah menjalankan usaha pariwisata sesuai dengan kapasitas kemampuan mereka. Ketiga, pemahaman tentang sistem pelayanan pariwisata yang maksimal masih menjadi kendala bagi kebanyakan pengusaha di tingkat daerah. Salah satu penyebabnya adalah karena keterbatasan informasi mengenai bagaimana seharusnya mereka mengembangkan usaha melalui prinsip pelayanan yang maksimal. Kekuatan modal atau investasi juga menjadi persoalan bagi pengusaha daerah. Karena itu, langkah para pengusaha untuk membuka usaha bidang pariwisata perlu dukungan dengan kemudahan membuka dan mengembangkan usaha bidang pariwisata dan hospitaliti, misalnya akomodasi atau hotel, restoran, usaha perjalanan, katering, dll.

Pemerintah (melalui Dinas Pariwisata daerah) di dua destinasi wisata telah menjalankan peran sebagai *stakeholder* utama pengelolaan destinasi wisata. Pemerintah daerah telah melaksanakan langkah-langkah pengembangan pariwisata dengan merencanakan dan menjalankan program yang berkaitan dengan pariwisata. Kegiatan festival adalah salah satu program yang dijalankan sebagai upaya untuk menarik wisatawan berkunjung ke destinasi mereka. Masyarakat sebagai salah satu unsur pentaheliks pariwisata menjadi salah satu bagian penting

dalam mengembangkan potensi pariwisata daerah. Masyarakat (community) dalam konteks penelitian ini dapat dilihat khususnya mereka yang tinggal di sekitar daya tarik wisata.

Dalam mengelola destinasi wisata daerah, terdapat beberapa faktor, tantangan atau kendala yang dihadapi pemerintah daerah dan unsur-unsur pentaheliks pariwisata. Faktor-faktor tersebut sesungguhnya terjadi karena berbagai hal, baik yang berhubungan dengan sistem yang diterapkan di suatu daerah ataupun faktor yang terjadi karena dari unsur pentaheliks itu sendiri. Kota Parepare dan Kabupaten Bone tidak terlepas dari faktor atau tantangan yang akan diuraikan sebagai berikut.

Otonomi daerah telah diterapkan di Indonesia sebagai sebuah sistem yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya dengan prinsip-prinsip memerhatikan kepentingan masyarakat serta dengan melihat potensi yang ada. Otonomi daerah juga mengatur pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan aset pariwisata sesuai dengan potensi kedaerahan masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari hak pemerintah daerah untuk mengatur nama atau nomenklatur Dinas Pariwisata yang mengaitkan dengan dinas lain, misalnya pariwisata dan kebudayaan atau pariwisata dan pemuda, dll. Hal ini diartikan bahwa pemerintah daerah telah menggunakan hal atau peluang mengatur daerah sesuai dengan kepentingan daerah masing-masing.



Sumber: Penulis, 2017

Gambar 4. Kondisi Faktual Sinergi Pentaheliks Pariwisata Di Kota Parepare dan Kabupaten Bone Model Sinergi Pentaheliks Pariwisata

Di Kota Parepare, pemerintah daerah telah menjalankan fungsi dan peran pengembangan pariwisata melalui peran Dinas Pariwisata setempat. Otonomi daerah telah memungkinkan daerah Kota Parepare untuk mengatur strategi pengembangan pariwisata. Penerapan otonomi daerah sesungguhnya memberikan kesempatan yang baik kepada daerah untuk berkembang dan kreatif mengelola sumber daya alam termasuk bidang pariwisata. Kota Parepare termasuk daerah yang mencoba menerapkan langkah-langkah kreatif melalui program atau ikon Habibie-Ainun. Dengan otonomi daerah ini, daerah

akan berupaya menciptakan peluang dan inovasi baru yang berkaitan dengan program kerja bidang pariwisata.

Akan tetapi, otonomi daerah dapat menjadi tantangan atau hambatan dalam membangun sinergi dari berbagai unsur pentaheliks. Hambatan tersebut khususnya terjadi ketika daerah kurang memerhatikan sinergi dengan unsur pemerintahan pada tingkat regional dan nasional. Hal ini dapat terjadi termasuk di Kota Parepare jika pemerintah daerah kurang memiliki koordinasi ataupun sinergi dengan pemerintah provinsi (melalui Dinas pariwisata tingkat provinsi) dan pemerintah pusat (Kementerian Pariwisata). Meskipun komitmen untuk melakukan sinergi antara berbagai unsur pentaheliks pariwisata menjadi harapan pemerintah daerah, namun otonomi daerah dapat menjadi alasan lemahnya sinergi yang akan dibangun oleh pemerintah daerah. Gambaran sinergi yang terbangun dan bagaimana pentaheliks pariwisata terlibat dalam aktifitas pariwisata dapat dilihat pada Gambar 4.

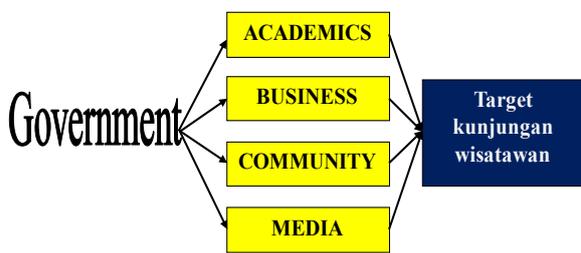
Otonomi daerah juga menuntun pemerintah Kabupaten Bone dengan prinsip bahwa pemerintah daerah berhak untuk mengelola aset pariwisata sesuai dengan kebijakan daerah. Sebagaimana halnya dengan di Kota Parepare, Kabupaten Bone, kewenangan pemerintah daerah dapat dimaknai (disalah artikan) sebagai hak untuk mengelola sesuai dengan kebijakan daerah tanpa melihat pentingnya sinergi dengan unsur pentaheliks lainnya. Kebijakan dalam menentukan mitra atau kerjasama misalnya, menjadi hak Dinas pariwisata sehingga tidak ada panduan atau rambu yang digunakan untuk menjalin mitra kerjasama. Jika mitra kerjasama dibangun tanpa memperhatikan prinsip kepentingan sinergi pentaheliks pariwisata, maka dapat dikatakan bahwa otonomi daerah cenderung diimplementasikan secara tidak tepat. Kewenangan daerah adalah untuk membantu pemerintah daerah mengembangkan aset pariwisata dengan harapan sinergi antar unsur pentaheliks semakin dibangun di bawah peran dan fungsi pemerintah daerah setempat. Koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat dan provinsi menjadi keharusan agar otonomi daerah tidak menjadi pemanfaatan kewenangan semata, tetapi sebagai alat atau media untuk mendorong daerah menciptakan langkah-langkah kreatif menjalankan program yang lebih kreatif di bidang pariwisata oleh Dinas Pariwisata.

Pengelolaan destinasi wisata masih terkendala dengan kemampuan staf dalam membuat atau merencanakan program-program pariwisata yang kreatif dan inovatif. Salah satu penyebabnya adalah karena terdapat staf di Dinas Pariwisata yang tidak atau bukan dari latar belakang pariwisata. Idealnya, staf yang ditempatkan memiliki keilmuan atau berasal dari latar belakang pariwisata untuk menunjang pengelolaan destinasi wisata. Namun, daerah nampaknya membutuhkan staf yang memiliki keilmuan dan pengalaman di bidang pariwisata untuk mendorong penciptaan program kerja yang inovatif. Rendahnya kesadaran masyarakat akan makna dan pentingnya pariwisata juga perlu diantisipasi dengan

memberikan pelatihan atau sosialisasi kepariwisataan. Peningkatan kesadaran masyarakat juga menjadi salah satu prasyarat untuk membangun destinasi wisata. Kesadaran juga menjadi kendala atau tantangan dalam pengelolaan destinasi. Karena itu, dibutuhkan sinergi yang berkelanjutan (*sustainable*) dari berbagai kelompok pentaheliks untuk membantu pemerintah mewujudkan pengembangan destinasi wisata.

Tantangan, hambatan ataupun faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan destinasi wisata serta daya tarik wisata perlu ditindaklanjuti dengan model ataupun strategi pengelolaan aset pariwisata maupun program pengembangan pariwisata. Motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi ditindaklanjuti dengan pengelolaan daya tarik wisata yang profesional (Indira, Ismanto dan Santoso, 2013). Pariwisata diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat sehingga strategi yang diterapkan selanjutnya memerhatikan kepentingan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis atau model membangun sinergi antara unsur Pentaheliks yang ada di daerah yang diuraikan sebagai berikut:

Strategi pertama yang dapat menjadi pilihan dalam mengelola destinasi wisata adalah pentingnya menerapkan atau mengimplementasikan tata kelola destinasi atau *destination management organisation* (DMO). Tata kelola destinasi ini merupakan konsep baru yang telah diadopsi beberapa negara di dunia dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata daerah. Di Indonesia, tata kelola destinasi menjadi perhatian dari berbagai kelompok masyarakat khususnya mereka yang aktif di dunia pariwisata (misalnya Swiss Contact). Tata kelola destinasi menjadi salah satu pilihan karena implementasinya menghendaki adanya kerjasama, kolaborasi ataupun kemitraan yang dibangun oleh berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) di suatu destinasi wisata (Park, Lehto dan Morrison, 2008; 396; Junaid, 2015:35; Bornhorst, Ritchie and Sheehan, 2010:573).



Sumber: Penulis, 2017

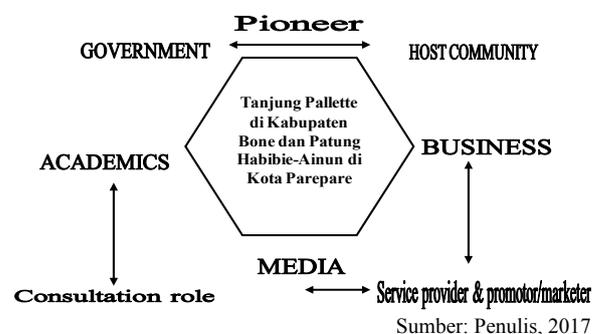
Gambar 5. Model implementasi DMO dalam sinergi unsur pentaheliks pariwisata

Tata kelola destinasi (DMO) dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda. Salah satu prinsip DMO adalah adanya satu kelompok ataupun individu yang bertanggung jawab atau diberikan amanah untuk melakukan peran koordinasi dan kerjasama dengan berbagai kelompok atau elemen masyarakat yang tergabung dalam unsur tata kelola destinasi (Morrison, 2012:5). Secara khusus, penelitian

ini merekomendasikan pengelolaan pariwisata daerah berdasarkan konsep DMO dengan pendekatan pemerintah sebagai aktor utama baik dalam hal peran kepemimpinan (*leadership*) maupun dalam hal pemasaran (*marketing*) (Junaid, 2015:30). *Leadership* dan *marketing* adalah bagian dari tugas pemerintah yang harus dijalankan jika konsep DMO akan diterapkan berdasarkan pendekatan tersebut.

Kota Parepare dan Kabupaten Bone dapat menerapkan pendekatan tersebut dengan menjadikan Dinas Pariwisata tingkat kabupaten dan kota sebagai pemimpin (*leader*) dalam hal koordinasi dengan unsur pentaheliks lainnya. Dalam implementasinya, Dinas pariwisata daerah selanjutnya melakukan indentifikasi awal pihak-pihak yang terlibat ataupun mereka yang merupakan representatif dari kelompok akademisi (*academics*), pengusaha (*business*), masyarakat (*community*), dan media. Identifikasi awal ini akan membantu pemerintah dalam memasukkan atau melibatkan mereka dalam satu payung organisasi atau tata kelola destinasi (DMO) tingkat kabupaten dan kota. Selanjutnya, mereka akan diundang untuk duduk sebagai anggota ataupun perwakilan dari kelompok pentaheliks yang ada di daerah. Sinergi akan mulai dijalankan ketika proses identifikasi telah dilaksanakan. Selanjutnya, dibutuhkan peran setiap unsur pentaheliks khususnya pemerintah dalam membangun sinergi serta mendukung program kerja setiap bidang Dinas Pariwisata.

Model kedua yang dapat menjadi alternatif membangun sinergi antara berbagai unsur pentaheliks di Kota Parepare dan Kabupaten Bone adalah pentingnya memaksimalkan kawasan wisata yang telah dibuat atau dirintis untuk menjadi kawasan wisata percontohan. Di Kabupaten Bone, terdapat satu kawasan wisata yakni Tanjung Palette. Keberadaan Tanjung Palette pada tiga tahun terakhir menjadi kurang diperhatikan mengingat adanya daya tarik wisata lain yang lebih menonjol dan menjadi pilihan masyarakat. Daya tarik wisata berupa pemandian alam buatan menjadi pematik wisatawan atau pengunjung yang datang ke Tanjung Palette, namun kawasan wisata yang dikelola oleh pemerintah setempat cenderung kurang mendapat kunjungan.



Sumber: Penulis, 2017

Gambar 6. Model Optimalisasi Kawasan dan Ikon Wisata Dalam Manajemen Destinasi Wisata

Tanjung Palette saat ini telah dilirik oleh pemerintah setempat (melalui Dinas Pariwisata) dan mulai mendapat perhatian baik dari masyarakat setempat maupun dari

wisatawan. Penulis melakukan eksplorasi Tanjung Pallette dan mendapatkan kesan positif dengan aktifitas masyarakat di dalam kawasan wisata tersebut berupa pembelajaran Bahasa Inggris. Kegiatan ini telah mendapat dukungan dari pemerintah setempat dan masyarakat yang memanfaatkan rumah mereka sebagai tempat penginapan (*homestay*) maupun sebagai tempat pengunjung memanfaatkan waktu istirahat sambil menikmati alam Tanjung Pallette.

Tanjung Pallette dapat menjadi contoh pengelolaan kawasan wisata alam yang berbasis masyarakat (*community based tourism*). Contoh dalam konteks penelitian ini adalah model atau acuan bagi wilayah atau destinasi lain baik yang ada di Sulawesi Selatan maupun di Indonesia untuk mengadopsi upaya yang dilakukan masyarakat di sekitar daya tarik wisata Kabupaten Bone. Rumah-rumah masyarakat yang ada di sekitar Tanjung Pallette disulap menjadi rumah tinggal (penginapan) yang representatif untuk dimanfaatkan pengunjung. Rumah-rumah mereka diberi penanda berupa nama-nama raja atau istilah-istilah bugis dimana pengunjung akan belajar atau memperoleh informasi yang berkaitan dengan kebudayaan Bone.

Kegiatan tersebut didukung oleh pemerintah setempat dan dijalankan oleh alumni suatu perguruan tinggi di Kabupaten Bone. Dari hasil wawancara penulis, kegiatan tersebut baru dimulai di tahun 2017 dengan dukungan dari pemerintah setempat. Pegawai atau staf Dinas Pariwisata juga diharapkan ikut pada kegiatan pembelajaran Bahasa Inggris di lokasi wisata tersebut dengan harapan memberikan keterampilan dan kemampuan berbahasa asing bagi staf Dinas Pariwisata daerah. Dukungan dan komitmen pemerintah menjadi kekuatan pada program ini selain keikutsertaan dan kesediaan masyarakat memanfaatkan kawasan tersebut dan rumah mereka sebagai pondok yang representatif.

Di Kota Parepare, pemerintah daerah telah mengupayakan strategi untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi Parepare. Upaya yang paling signifikan adalah dibangunnya patung Habibie-Ainun di tengah-tengah kota Parepare atau di sudut lapangan Andi Makkasau. Patung ini telah menjadi perhatian banyak wisatawan ketika berkunjung ke kota Parepare. Berdasarkan observasi penulis, wisatawan banyak memanfaatkan atau menghabiskan waktu mereka untuk mengambil gambar dengan latar belakang patung Parepare. Para wisatawan atau pengunjung umumnya menjadikan patung Habibie-Ainun sebagai titik point pengambilan gambar bersama keluarga mereka. Aktifitas pengambilan gambar ini dapat dikatakan berjalan sepanjang waktu dari pagi hingga malam hari. Pada malam hari, pengambilan gambar nampaknya sangat baik mengingat cahaya yang dipancarkan memungkinkan wisatawan melihat keunikan dan kekhasan patung dari sudut pandang cahaya yang variatif.

Sinergi pentaheliks pariwisata dapat dilihat dari peran pemerintah dan masyarakat di destinasi khususnya sekitar daya tarik wisata sebagai pencetus (*pioneer*) dalam

membuat program percontohan atau kawasan wisata. Peran akademisi adalah memberikan bantuan pembimbingan atau konsultasi kepada pemerintah dan masyarakat sesuai kebutuhan pengembangan destinasi wisata. Tugas utama pengusaha pariwisata dan masyarakat adalah memberikan pelayanan yang maksimal kepada consumer (*customer*) serta memberikan dan menyebarkan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat dan wisatawan. Dengan kata lain, peran sebagai *service provider* dan promotor/marketir menjadi suatu kekuatan yang dijalankan oleh pengusaha dan media. Gambaran sinergi tersebut dapat dilihat pada Gambar 6.

Pemilihan ikon Habibie-Ainun menjadi strategi menarik dari pemerintah daerah kota Parepare. Strategi ini dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, misalnya, karena Bapak Habibie adalah mantan presiden Republik Indonesia dengan kota Parepare sebagai kota kelahiran. Pemilihan ikon cinta sejati Habibie-Ainun menjadi daya tarik bagi kebanyakan wisatawan atau pengunjung yang datang ke kota Parepare. Cinta sejati Habibie-Ainun dijadikan sebagai ikon dengan maksud untuk memastikan bahwa Parepare memiliki cerita yang unik dan menarik yang diambil dari kisah mantan presiden Republik Indonesia (Junaid dan Hanafi, 2016: 134). Untuk semakin mendukung program pemerintah bidang pariwisata melalui ikon cinta sejati Habibie-Ainun, pemerintah daerah menyelenggarakan *event* festival Habibie-Ainun atau festival cinta sejati Habibie-Ainun.

Strategi *go digital* menjadi salah satu alternatif dalam mengelola aset wisata daerah dalam meningkatkan tingkat kunjungan ke destinasi wisata. *Go digital* telah menjadi program pemerintah pusat yang diprakarsai oleh Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Dr. Arief Yahya. Strategi ini diartikan sebagai suatu langkah memudahkan pemberian dan pelayanan informasi kepada wisatawan dengan memanfaatkan teknologi modern yang bersifat digital. *Go digital* dijalankan dengan penggunaan perangkat teknologi yang variatif yang memungkinkan wisatawan memperoleh informasi dengan mudah sehingga akan berpengaruh pula pada kemudahan wisatawan dalam melakukan perjalanan. *Go digital* ini juga memberikan kemudahan bagi pengelola atau pemberi layanan pariwisata melalui teknologi untuk kemudahan wisatawan.

Dinas Pariwisata kota Parepare telah berupaya memanfaatkan teknologi dalam mempromosikan daya tarik wisata ataupun destinasi Parepare ke dunia internasional. Hal yang sama pula telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bone dengan memanfaatkan internet (*website*) yang memungkinkan calon wisatawan mengakses informasi yang dibutuhkan. Namun demikian, penerapan perangkat lunak (*software*) yang berkaitan dengan sistem informasi pariwisata nampaknya masih kurang menjadi perhatian kedua daerah ini. Di provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pariwisata Kota Makassar dan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan adalah pihak atau pengelola daerah yang telah memiliki *software*

yang berfungsi sebagai pemberi layanan informasi kepariwisataan. Hal ini dapat ditiru oleh pemerintah Kota Parepare dan Kabupaten Bone dalam memanfaatkan teknologi untuk strategi pengembangan pariwisata daerah. Pattanaro (2014:222) berpandangan bahwa kesuksesan pemasaran destinasi wisata tidak terlepas dari bagaimana suatu *stakeholder* menjalankan kolaborasi atau bekerja secara bersama mencapai tujuan yang diharapkan.

Strategi pengembangan pariwisata berbasis *go digital* dapat dijalankan oleh kelima unsur pentaheliks pariwisata di daerah. Pertama, akademisi (baik mereka dari kalangan atau ahli teknologi maupun keahlian lain) dapat berperan dalam membuat suatu *software* atau perangkat lunak sistem informasi kepariwisataan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah setempat. Akademisi adalah kelompok masyarakat yang mengkaji berbagai isu baik yang berkaitan dengan teknologi, informasi maupun kepariwisataan. Pemerintah daerah Kota Parepare dan Kabupaten Bone dapat bekerja bersama akademisi dalam menjalankan suatu proyek teknologi informasi yang berkaitan dengan kepariwisataan. Dengan kata lain, peran akademisi adalah mengusulkan suatu program yang merupakan hasil kajian mereka yang bertujuan untuk memberikan pelayanan informasi kepariwisataan kepada publik khususnya wisatawan yang dijalankan oleh pemerintah sebagai *stakeholder* utama pengembangan pariwisata daerah.

Peran akademisi dalam konteks penelitian ini dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni menciptakan atau membuat program atau *software* secara *online* dan menciptakan atau membuat *software offline*. Program *go digital* secara *online* yakni sistem yang dijalankan dengan memanfaatkan sistem teknologi berbasis internet atau website. Menurut Priyambodo (2013:B19), pemberian layanan bidang pariwisata selayaknya memanfaatkan teknologi *web-service*, sistem yang memudahkan pengguna atau wisatawan melaksanakan aktifitas pariwisata di destinasi wisata. Sistem digital dan *connectivity* dapat memberikan peluang peningkatan perekonomian baik yang berdampak pada masyarakat maupun kepada suatu wilayah atau destinasi (Arman, *et al.*, 2016:98). Selanjutnya, sistem secara *offline* yakni pemanfaatan teknologi tanpa memanfaatkan sistem teknologi berbasis internet. Dalam hal ini, pembuatan sistem *touch screen* dapat menjadi contoh alternatif media *offline* dimana wisatawan ataupun publik dapat memanfaatkan sistem teknologi tersebut. Sebagai contoh, sistem pelayanan transportasi yang bersifat *offline* dimanfaatkan oleh wisatawan atau masyarakat di bandara Sultan Hasanuddin dengan fitur *touch screen* dan pilihan jenis moda transportasi taksi yang dipilih.

Pengusaha (business) juga dapat membuat atau menciptakan perangkat lunak (*software*) yang bersifat *online* dan *offline*. Pengusaha sebagai pihak swasta adalah mereka yang bekerja untuk kepentingan profit atau keuntungan. Karena sifat kegiatan mereka adalah

profit, maka pemerintah di suatu destinasi seharusnya mendorong para pengusaha untuk berfikir inovatif dan kreatif untuk menciptakan sistem pelayanan informasi wisatawan berbasis *online*. Sistem pelayanan informasi akomodasi yang disediakan traveloka misalnya, adalah contoh perangkat lunak (*software*) yang bersifat kreatif. Para pengusaha juga perlu menciptakan berbagai bentuk pelayanan informasi pariwisata dalam berbagai bentuk yang bersifat *online*. Suatu perusahaan ataupun pengusaha bidang pariwisata dapat menciptakan sistem teknologi yang bersifat *offline* yang diletakkan di kantor dimana wisatawan ataupun pelanggan (*customer*) dapat memanfaatkan sistem tersebut untuk kemudahan pelayanan mereka. Selain itu, sistem teknologi yang bersifat *online* dapat pula ditempatkan di daya tarik wisata dimana wisatawan akan langsung memanfaatkan informasi mengenai daya tarik wisata tersebut.

Pemerintah harus berperan aktif untuk mendorong berbagai kelompok masyarakat untuk menciptakan suatu sistem layanan informasi kepariwisataan berbasis *online* dan *offline*. Berbagai upaya dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan perangkat lunak yang berbasis teknologi tersebut, misalnya pemerintah mencanangkan program atau lomba kreatifitas teknologi atau *software* di bidang pariwisata. Penghargaan kepada kelompok masyarakat akan hasil cipta tersebut menjadi penting untuk mendorong masyarakat lebih inovatif atau kreatif. Selain itu, lomba kreatifitas teknologi yang berbasis *offline* juga perlu didorong karena program ini memungkinkan pemerintah mendapatkan hasil secara langsung dari karya anak bangsa yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah seharusnya tidak semata-mata bergantung pada inovasi dan kreasi masyarakat di bidang teknologi. Pemerintah dengan kemampuan dana atau ketersediaan dana yang diberikan seharusnya menganggarkan atau merencanakan program teknologi berbasis teknologi *online* dan *offline*. Di beberapa kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, program ini telah dijalankan. Pemerintah Kota Makassar misalnya, telah membuat suatu *software* atau sistem berbasis *online* dimana wisatawan dapat melihat berbagai kegiatan kepariwisataan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas pariwisata telah membuat suatu sistem *software* berbasis *offline* yang memungkinkan masyarakat atau pengunjung menggunakan informasi tersebut secara *offline*. Meskipun hal ini nampaknya kurang efektif secara penggunaan, sistem ini seharusnya dimanfaatkan secara nyata karena menggunakan dana dari pemerintah.

Terdapat beberapa cara atau pendekatan yang dapat dijalankan oleh pemerintah untuk mendukung pariwisata berbasis *go digital* yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pemerintah menisiasi program teknologi informasi berbasis *online* dan *offline* yang akan dikerjakan atau dijalankan oleh pemerintah itu sendiri. Kemampuan

staf yang mengetahui teknologi dapat diperbantukan untuk memaksimalkan program tersebut.

2. Kerjasama antara pemerintah dan industri pariwisata (pengusaha) merupakan strategi penting untuk mendapatkan informasi mengenai kebutuhan wisatawan dalam perspektif wisatawan dan industri pariwisata. Industri pariwisata adalah mereka yang bersentuhan langsung dengan pengguna atau pelanggan (user) sehingga mereka mengetahui secara mendalam kebutuhan wisatawan dan bagaimana sistem tersebut dikembangkan berdasarkan prinsip kerjasama dengan industri pariwisata. Industri pariwisata (pengusaha) perlu memberikan informasi kepada pemerintah mengenai usaha mereka dan bagaimana mereka bekerja. Hal ini akan memudahkan pemerintah menginput informasi yang akan disimpan dalam sisten berbasis *online* dan *offline*.
3. Pemerintah bersama berbagai elemen atau kelompok masyarakat dapat menciptakan program tersebut. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa kompetisi yang sifatnya melibatkan masyarakat akan mendorong masyarakat akan makna dan arti penting pariwisata. Masyarakat di sekitar daya tarik wisata dapat dimanfaatkan atau didorong sebagai pelaku atau fasilitator pemanfaatana teknologi berbasis *online* dan *offline*.

SIMPULAN

Pemerintah Kota Parepare dan Kabupaten Bone (melalui Dinas Pariwisata) telah mengupayakan dan melaksanakan berbagai program kerja dalam mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan pengelolaan destinasi wisata. Sinergi pentaheliks pariwisata yang terdiri dari akademisi, pengusaha, pemerintah, masyarakat dan media juga telah dibangun meskipun program kerja bidang pariwisata lebih dominan didesain dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Akademisi di tingkat daerah sangat dibutuhkan dalam membantu pemerintah daerah mengelola dan mengembangkan destinasi wisata. Melalui tugas penelitian dan pembimbingan kepariwisataan, mereka akan berkontribusi dalam pariwisata daerah serta membangun sinergi dengan pemerintah dan kelompok masyarakat lainnya.

Pengusaha bidang pariwisata telah mulai bermunculan meskipun dalam realita, pemahaman akan pentingnya karyawan dengan sistem kompetensi belum sepenuhnya dijalankan. Sinergi antara pemerintah dan pengusaha perlu dikembangkan melalui pemberian regulasi dan kesadaran pengusaha menjalankan usaha yang berpihak ke masyarakat dan taat pada regulasi yang ada. Masyarakat (khususnya mereka yang tinggal di sekitar daya tarik wisata) perlu diajak memahami arti pariwisata dan bagaimana menciptakan usaha kreatif bidang pariwisata. Hal ini juga perlu ditunjang dengan kesiapan media bersinergi dengan berbagai unsur pentaheliks melalui peran promosi dan edukasi ke masyarakat.

Sinergi pentaheliks pariwisata di dua destinasi tersebut tidak terlepas dari tantangan/hambatan atau faktor-faktor. Di satu sisi, otonomi daerah menjadi pendorong bagi daerah untuk kreatif dan inovatif dalam mengembangkan destinasi. Di sisi lain, otonomi daerah dapat melemahkan sinergi atau koordinasi jika dipahami sebagai hak atau otoritas daerah mengatur wilayahnya tanpa koordinasi dengan berbagai tingkatan pemerintahan. Penempatan staf yang tidak sesuai bidangnya (misalnya pariwisata) menjadi contoh konsekuensi dari otonomi daerah karena ada unsur politik. Selanjutnya, kesadaran masyarakat mengenai pariwisata masih lemah sehingga sinergi dibutuhkan upaya yang maksimal dalam hal koordinasi. Penguasaan teknologi dan kreatifitas staf di lingkungan Dinas Pariwisata daerah dalam manajemen destinasi wisata masih menjadi kendala dalam membangun sinergi pentaheliks pariwisata.

Penelitian ini merekomendasikan tiga model alternatif yang dapat diterapkan di Kota Parepare dan Kabupaten Bone. Model pertama menekankan pentingnya implementasi tata kelola destinasi (DMO) model pemerintah. Pemerintah menjadi pemimpin (leader) dalam membangun sinergi berbagai unsur pentaheliks pariwisata. Kedua, kawasan wisata dan ikon unggulan dapat menjadi model percontohan pengelolaan destinasi wisata. Ketiga, model pengelolaan pariwisata berbasis *go digital* adalah langkah strategis penting yang perlu diimplementasikan oleh pentaheliks pariwisata di destinasi wisata. Strategi *go digital* ini dapat melibatkan berbagai unsur pentaheliks pariwisata melalui sinergi yang terbangun. Strategi ini pula dapat mendukung terciptanya sistem *connectivity* yang memungkinkan penguatan sinergi antar lembaga

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada Politeknik Pariwisata Makassar atas dana penelitian tahun 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Altinay, L. & Paraskevas, A. (2008), *Planning Research in Hospitality and Tourism*, Burlington: Butterworth-Heinemann.
- Arikunto, S. (2002), *Metode Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arman, H.S., Achsani, N.A., & Fauzi, A. (2016). Analisis Sektor Strategis Pulau Sulawesi, Jawa Timur dan Kalimantan Timur. *Sosiohumaniora*, 18, (2) 97-107.
- Babbie, E.R. (2007). *The Practice of Social Research*, Belmont: Thomson.
- Belsky, J. (2004). Contributions of Qualitative Research to Understanding the Politics of Community Ecotourism. Dalam Phillimore, J. dan Goodson,

- L. Editor. *Qualitative Research in Tourism: Ontologies, Epistemologies and Methodologies*. New York: Routledge. 273-291.
- Bornhorst, T., Ritchie J.R. & Sheehan, L. (2010). Determinants of Tourism Success for DMOS & Destinations: An Empirical Examination of Stakeholders' Perspectives. *Tourism Management* (31): 572-589. doi:10.1016/j.tourman.2009.06.008
- Bramwell, B. & Lane, B. (2000). *Collaboration and Partnership in Tourism Planning*. Dalam Bramwell, B. dan Lane, B. Editor. *Tourism Collaboration and Partnerships: Politics, Practice and Sustainability*. Clevedon: Channel View Publications. 1-19.
- Byrd, E.T. (2007). Stakeholders in Sustainable Tourism Development and Their Roles: *Applying Stakeholder Theory to Sustainable Tourism Development*, *Tourism Review*, 62, (2), 6-13.
- Cooper, C. & Hall, C.M. 2008, *Contemporary Tourism: An International Approach*, Oxford: Elsevier.
- Currie, R.R. (2009). Determining Stakeholders for Feasibility Analysis. *Annals of Tourism Research* 36, (1): 41-63. doi:10.1016/j.annals.2008.10.002
- Esu, B.B. & Ebitu, E. (2010). Promoting an Emerging Tourism Destination. *Global Journal of Management and Business Research*. 10, (1), 21-28.
- Flick, U. (2004). What is Qualitative Research? An Introduction to the Field. Dalam Flick, U. Kardorff, E.v. dan Ines, S. Editor. *A Companion to Qualitative Research*. London: SAGE. 3-12.
- Flick, U. (2007), *Designing Qualitative Research*, London: SAGE.
- Getz, D. & Timur, S. (2005). Stakeholder Involvement in Sustainable Tourism: Balancing the Voices. Dalam Theobald, W. F. Editor. *Global Tourism*. Amsterdam: Elsevier. 230-247.
- Hatch, J.A. (2002), *Doing Qualitative Research in Education Settings*, New York: State University of New York.
- Haugland, S.A. (2011). Development of Tourism Destinations: *An Integrated Multilevel Perspective*. *Annals of Tourism Research*. 38, (1), 268-290. doi:10.1016/j.annals.2010.08.008
- Indira, D., Ismanto, S.U. & Santoso, M.B. (2013). Pencitraan Bandung Sebagai Daerah Tujuan Wisata: Model Menemukanali Ikon Bandung Masa Kini. *Sosiohumaniora*, 15, (1), 45-54.
- Jamal, T. & Stronza, A. (2009). *Collaboration Theory and Tourism Practice in Protected Areas: Stakeholders, Structuring and Sustainability*. *Journal of Sustainable Tourism*. (17) 2: 169-189. <http://dx.doi.org/10.1080/09669580802495741>
- Jamal, T. & Getz, D. 1995. *Collaboration Theory and Community Tourism Planning*. *Annals of Tourism Research*. 22: 186-204.
- Junaid, I & Hanafi, H. (2016). Ikon Habibie-Ainun, Strategi Inovatif Dalam Mengembangkan Pariwisata Di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. *JUMPA* 3, (1), 127-142. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jumpa/article/view/23048>
- Junaid, 2015. Model Implementasi *Destination Management Organization (DMO)* Di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Kepariwisataaan*, 9, (2), 29-47. <https://jurnal.poltekipar-makassar.ac.id/index.php/tourism/article/view/3>
- Kayat, K. (2008). Stakeholders' Perspectives Toward a Community-Based Rural Tourism Development. *European Journal of Tourism Research*. 1, (2): 94-111.
- Morrison, A. (2012). Destination Management and Destination Marketing: The Platform for Excellence in Tourism Destinations.
- Pattanaro, G. (2014). Success Factors for Collaborative Destination Marketing. Dalam Mariani, et al. Editor. *Tourism Management, Marketing, and Development: The Importance of Networks and ICTS*. New York: Palgrave Macmillan. 1, 221-238.
- Park, O.J., Lehto, X.Y. & Morrison, A.M. (2008). Collaboration Between CVB and Local Community in Destination Marketing: *CVB Executives' Perspective*. *Journal of Hospitality & Leisure Marketing*. 17, 3-4. doi:10.1080/10507050801985047
- Prezenza, A. & Cipollina, M. (2010). *Analysing Tourism Stakeholders Networks*. *Tourism Review*, 65, (4), 17-30. DOI 10.1108/16605371011093845
- Priyambodo, T.K. (2005). Implementasi *Web-Service* Untuk Pengembangan Sistem Layanan Pariwisata Terpadu. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2005. <http://journal.uii.ac.id/Snati/article/view/1311>
- Ritchie, J., Spencer, L. & O'Connor, W. (2003). Carrying out qualitative analysis. Dalam Ritchie, Jane dan Lewis, Jane. Editor. *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers*. London: SAGE. 219-262.
- Shaw, S. (2007). Ethnic quarters in the cosmopolitan-creative city. Dalam Richards, G., dan Wilson, J. Editor. *Tourism, creativity and development*. New York: Routledge. 189-200.
- Tuohino, A. & Konu, H. (2014). *Local Stakeholders' View About Destination Management: Who are Leading Tourism Development?* *Tourism Review*. 69, (3), 202-215. <http://dx.doi.org/10.1108/TR-06-2013-0033>

KOMUNITAS JAWA DI DESA WONO HARJO SEBAGAI JEJAK MIGRASI ETNIS JAWA KE KABUPATEN PANGANDARAN

Dian Indira, Raden Muhammad Mulyadi, dan Riki Nasrullah

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran

E-mail: dian.indira@unpad.ac.id ; r.m.mulyadi@unpad.ac.id ; rikinasrullah5@gmail.com

ABSTRAK. Terjadinya kontak budaya antara satu budaya dengan budaya di lingkungan masyarakat Indonesia yang multikultural berlangsung secara alami. Akulturasi budaya berupa perpaduan antara budaya-budaya yang hidup di dalam masyarakat tidak terhindarkan dan hal yang menarik budaya asli masing-masing tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari pemilik budaya. Di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran komunitas masyarakat Jawa hidup berdampingan dengan masyarakat Sunda. Masyarakat yang hidup dalam komunitas ini tetap mempertahankan nilai-nilai dan pranata Jawa yang mereka miliki. Komunikasi sehari-hari yang terjalin antar-penduduk Desa Wonoharjo dilakukan di dalam bahasa Jawa. Saat mereka berkomunikasi dengan masyarakat Sunda mereka menggunakan bahasa Sunda, yang dikenal dengan istilah bahasa Jawa Reang. Di wilayah Pangandaran sendiri pertunjukan 'Kuda Lumping', yang sesungguhnya seni yang hidup dalam komunitas masyarakat Jawa di mana pun, dikenal oleh masyarakat Pangandaran pada umumnya salah satunya berasal dari Desa Wonoharjo. Metode yang digunakan adalah metode historis, yang digunakan untuk merekonstruksi masa lalu. Tahapan metode historis terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi jejak migrasi masyarakat Jawa ke wilayah Pangandaran dan mengkaji kehidupan mereka sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat Sunda. Hasil penelitian ini memperlihatkan adanya akulturasi dan asimilasi dalam seni dan bahasa Jawa dengan seni budaya dan bahasa Sunda di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran.

Kata kunci: migrasi; Etnis Jawa; Pangandaran; Desa Wonoharjo; akulturasi budaya

JAVANESE COMMUNITY IN WONO HARJO VILLAGE AS MIGRATION PATH OF JAVANESE ETHNIC TO PANGANDARAN REGENCY

ABSTRACT. The occurrence of cultural contact between one culture and the other culture in a multicultural Indonesian society take place naturally. Cultural acculturation in the form of a combination of cultures that live in society is unavoidable. The interesting thing is that each cultural community lives in its own culture in the daily life. In Wonoharjo village, Pangandaran Regency, the Javanese community lives side by side with the Sundanese people. People in this community still maintain their Javanese values and institutions. Daily communication between the residents of Wonoharjo village is Javanese, including Friday sermons. When they communicate with the Sundanese people, they use Sundanese, which is known as the Reang Javanese language. In Pangandaran region the performance of 'Kuda Lumping' is known generally by the Pangandaran people, one of whom comes from Wonoharjo village. 'Kuda Lumping' is exactly the real art that lives in the Javanese community everywhere. The method used is the historical method, which is used to reconstruct the past. The stages of the historical method consist of heuristics, criticism, interpretation and historiography. This study aims to reconstruct the traces of Javanese migration to Pangandaran and examine their daily lives in the Sundanese community. The results of this study found some acculturation between Java and Sunda ethnic. The acculturation showed in language and art performance of Kuda Lumping in Wonoharjo, district of Pangandaran.

Key words: migration; Javanese society; Pangandaran; Wonoharjo Village; acculturation.

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan tingkat keanekaragaman yang sangat kompleks. Indonesia disebut negara kepulauan karena banyaknya pulau yang berada di dalam kawasan negara Indonesia. dan pada 2012 tercatat di PBB terdapat 13.466 pulau. Kondisi geografis satu wilayah dengan wilayah yang lain pun tidaklah sama, oleh karena itu tidak mengherankan apabila di Indonesia tercatat terdapat 746 bahasa daerah yang mencerminkan budaya dan juga adat istiadat pemilik bahasa daerah tersebut (Djajasudarma, et.al.; 2016:1-3). Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat multikultural, yang dipahami sebagai suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai elemen, baik itu suku, ras, dan lain-lain yang hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang memiliki satu pemerintahan tetapi dalam masyarakat itu masing-masing masih terdapat segmen-segmen yang

tidak bisa disatukan. Oleh karena itu, dengan jumlah penduduk sekitar 270 juta jiwa, bangsa Indonesia patut berbangga memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.

Meskipun berada di pulau yang sama, misalnya Pulau Jawa, kelompok masyarakat suku Jawa, belum tentu memahami bahasa lainnya yang terdapat di Pulau Jawa seperti bahasa Sunda atau Baduy (Banten). Di wilayah Jawa Barat sendiri terdapat dua bahasa daerah lainnya yang digunakan oleh tiga suku asli Jawa Barat, yaitu Melayu Betawi, dan Cirebon. Suku Sunda adalah penutur bahasa daerah kedua terbesar di wilayah Pulau Jawa dengan jumlah penutur sebanyak 27 juta jiwa (Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, Dan Aksara Daerah), Masyarakat etnis Jawa, yang biasa disebut dengan orang Jawa memang merupakan jumlah tertinggi,

yaitu mencapai 44% dari seluruh masyarakat Indonesia. Identitas atau jati diri orang Jawa dapat segera dikenali karena bahasa Jawa merupakan bahasa yang hidup dan aktif dipergunakan oleh etnis Jawa sebagai sarana komunikasi di antara mereka di mana pun mereka berada.

Selain bahasa, keberadaan etnis Jawa dalam suatu wilayah ditandai juga dengan keberadaan keseniannya, salah satunya adalah seni pertunjukkan ‘Kuda Lumping’. Kesenian tersebut sering dipertunjukkan dalam acara perhelatan masyarakat Jawa seperti khitanan atau perkawinan. Seni pertunjukkan ini dikenal tidak saja di Indonesia tetapi juga di luar negeri, seperti di Malaysia, Singapura, dan Suriname yang merupakan negara-negara tempat komunitas orang Jawa tersebar. Bahkan di negara bagian Johor di Malaysia kuda lumping digunakan sebagai ikon pariwisata. Sementara di Jawa Barat keberadaan seni Kuda Lumping hidup di wilayah-wilayah komunitas orang Jawa seperti di Desa Jaringao Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi dan beberapa desa di Kecamatan Pangandaran seperti halnya di Desa Wonoharjo. Kesenian Kuda Lumping adalah salah satu seni budaya yang hidup di Kabupaten Pangandaran, yang sampai saat ini masih dipertunjukkan pada acara peringatan hari kemerdekaan, hajatan laut, acara khitanan, dan acaran-acara lainnya, khususnya di komunitas etnis Jawa. Begitu eratnya kehidupan masyarakat Jawa dengan Kuda Lumping, maka keberadaan etnis Jawa pada umumnya juga ditandai dengan kehadiran Kuda Lumping.

Tidak ada literatur yang dapat dijadikan dasar tentang asal mula seni pertunjukkan Kuda Lumping, tetapi dengan melihat bahasa Jawa yang digunakan dalam *kawih*, tidak diragukan lagi bahwa seni tersebut milik etnis Jawa dan telah terjadi migrasi dari Jawa ke berbagai tempat di dunia dalam kutipan berikut Freeland (2008: 35) mendefinisikan “Kuda Lumping” sebagai berikut:

“A popular folk dance in Java is horse dance, known as jathilan, kuda lumping, kuda kepeng or jaranan. These highly dramatic forms are associated with animist cults that originate in Javanese villages, where they are performed as part of annualvillage festivals that take place after the harvest in order to give thanks and to secure fortune and well being for the coming year”.

Berbicara mengenai budaya berarti berbicara pula tentang bahasa masyarakat pemilik bahasa tersebut. Di Desa Wonoharjo komunikasi antar-penduduk desa ini berlangsung di dalam bahasa Jawa dan Sunda. Sebagai mana terjadi di sekitar kita bahwa masyarakat berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, namun ternyata masyarakat Desa Wonoharjo yang saat ini merupakan generasi ketiga masih tetap dapat mempertahankan bahasa dan budaya asli mereka, meskipun terjadinya kontak budaya Jawa dengan budaya Sunda tidak terhindarkan.

Keberadaan komunitas etnis Jawa di Desa Wonoharjo merupakan bukti telah terjadi imigrasi

masuk etnis Jawa ke Pangandaran. Bagaimana komunitas ini hidup berdampingan secara *guyub* di tengah-tengah masyarakat Sunda menarik untuk dikaji. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meneliti jejak migrasi masyarakat Jawa ke wilayah Pangandaran dan mengkaji akulturasi yang terjadi antara etnis Jawa dan etnis Sunda dalam bidang seni dan bahasa di Desa Wonoharjo.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yaitu sebuah proses menguji serta menganalisis sumber secara kritis, baik itu rekaman dan peninggalan masa lampau juga rekonstruksi imajinatif berdasarkan data yang telah diperoleh melalui tahapan-tahapan metode sejarah (Gottschalk. 1986: 32). Metode ini mencakup empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Tahapan pertama dalam metode sejarah adalah heuristik. Heuristik merupakan tahapan atau kegiatan menemukan dan menghimpun sumber, informasi, jejak sejarah. Adapun sumber sejarah yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sumber tertulis berupa buku-buku maupun surat kabar dan majalah dan kegiatan heuristik yang peneliti lakukan adalah dengan cara mengunjungi beberapa perpustakaan seperti Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya dan Perpustakaan Cisaral, keduanya berada di Universitas Padjadjaran kampus Jatinangor. Perpustakaan lainnya yang dikunjungi adalah Perpustakaan Provinsi Jawa Barat di jalan Kawalayaan Bandung. Heuristik yang paling penting dalam studi ini adalah dengan mewawancarai beberapa narasumber di lapangan yang dipandang mempunyai pengetahuan mengenai objek penelitian.

Untuk tahap kedua yaitu kritik, berupa kegiatan meneliti sumber, informasi, jejak secara kritis, baik bersifat eksternal maupun internal. Kritik internal bertujuan untuk menguji kredibilitas isi sumber, dan kritik eksternal untuk menguji keotentikan sumber seperti umur sumber, waktu dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian mengenai asli atau tidaknya suatu sumber.

Interpretasi merupakan tahap ketiga yaitu kegiatan menafsirkan fakta-fakta serta menetapkan makna dan adanya keterkaitan dari fakta-fakta yang diperoleh. Fakta yang diperoleh selanjutnya dirangkaikan ke dalam satu kesatuan yang utuh. Tahap ini berupa upaya rekonstruksi imajinatif terhadap objek penelitian sehingga data-data yang terhimpun menjadi satu kesatuan yang harmonis dan dapat dipahami sebagai sebuah kisah sejarah. Hal inilah yang dalam terminologi ilmu sejarah sebagai rekonstruksi masa lalu.

Sebagai tahap terakhir adalah tahap historiografi, yaitu tahapan atau kegiatan menyampaikan hasil-hasil rekonstruksi imajinatif masa lampau sesuai dengan jejak-jejaknya, yang dapat dikatakan sebagai kegiatan penulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Wilayah Pangandaran

Desa Wonoharjo termasuk wilayah Kecamatan Pangandaran yang secara geografis, berada di bagian timur Kabupaten Pangandaran dengan batas-batas sebagai berikut yaitu di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Cilacap (Jawa Tengah), di sebelah utara dan barat berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Kabupaten Pangandaran secara administratif termasuk ke dalam bagian Provinsi Jawa Barat, wilayahnya berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Letak geografis Pangandaran yang berbatasan dengan Jawa Tengah yang mayoritas penduduknya beretnis Jawa memungkinkan adanya daerah enklave di kedua wilayah tersebut. Enklave yaitu: "daerah (wilayah) budaya yang terdapat di wilayah budaya lain" (Kamus Besar Bahasa Indonesia; 2011:375). Di Wilayah Jawa Tengah yang berbatasan dengan Jawa Barat terdapat *enclave* etnis Sunda, seperti halnya di Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Demikian pula di wilayah Jawa Barat yang berbatasan dengan Jawa Tengah terdapat enklave masyarakat etnis Jawa seperti halnya beberapa desa di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

Oleh karena itu, kondisi di atas secara tidak langsung membawa dampak terhadap adat istiadat dan budaya, bahasa, dan lain-lain, yang mempunyai andil dalam kultur masyarakat Pangandaran. Dengan terjadinya kontak budaya antara orang Sunda dengan orang Jawa, maka masing-masing pihak tidak hanya belajar tentang sistem kebahasaannya saja, tetapi sekaligus tentang adat istiadat, kebiasaan, nilai-nilai budaya, pola pikir, dan cara berperilaku. Djajasudarma (2016: 3) menyatakan bahwa: "Bahasa dan budaya tidak bisa dipilah-pilah tetapi merupakan satu kesatuan yang padu". Bahasa merupakan alat budaya yang dapat diamati dan/atau diteliti". Hal ini tidak dapat dimungkiri, sebab bila seseorang berbicara tentang kebudayaan, maka ia pun akan berbicara tentang bahasa karena keduanya memiliki hubungan erat dan berjalan beriringan.

Mayoritas penduduk Kabupaten Pangandaran adalah etnis Sunda, meskipun demikian di Pangandaran, terutama di Kecamatan Pangandaran terdapat beberapa desa yang banyak dihuni oleh mayoritas etnis Jawa, seperti desa Wonoharjo, Sidamulyo, Babakan dan Purbahurip. Pada umumnya di daerah enklave terjadinya kontak antara budaya yang satu dengan yang lain tidak dapat dielakkan, sejalan dengan sifat masyarakat yang terus berkembang dan dinamis, tetapi komunitas etnis Jawa di Desa Wonoharjo mampu memertahankan kearifan lokal leluhurnya hingga saat ini.

2. Jejak Migrasi Masyarakat Jawa di Desa Wonoharjo

Dari catatan sejarah Kerajaan Sunda berkembang di Jawa Barat sekitar tahun 669-1579. Ketika Kesultanan

Mataram mencapai kejayaan di bawah pimpinan Sultan Agung Kusumo Hanyokro (1613-1645) seluruh wilayah Jawa Tengah di bawah kekuasaannya, tetapi juga sebagian dari Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Meskipun demikian, dikuasainya wilayah Jawa Barat tidak otomatis terjadinya migrasi orang Jawa ke Pangandaran, sampai saat ini belum ditemukan hasil penelitian yang dapat memberikan gambaran bahwa migrasi etnis Jawa ke Pangandaran dalam jumlah yang besar terjadi sebelum awal abad ke XX.

Suatu gambaran keberadaan etnis di Pangandaran muncul dari folklor yang berkembang pada etnis Jawa di Pangandaran adalah mengenai Embah Bungkus, seorang etnis Jawa yang dianggap orang sakti yang berjasa untuk membuka daerah Pangandaran yang masih hutan belantara. Dalam folklor tersebut dikisahkan bahwa Bupati Sukapura yang menguasai wilayah itu sebelumnya meminta bantuan masyarakat sekitar untuk membuka hutan di daerah tersebut, tetapi tidak ada yang sanggup melakukannya. Bupati Sukapura kemudian meminta bantuan beberapa Bupati di Jawa untuk membuka wilayah Pangandaran. Bupati-bupati di Jawa tersebut kemudian meminta bantuan Embah Bungkus yang dikenal sebagai orang sakti. Dengan kesaktiannya Embah Bungkus berhasil membuka daerah Cikembulan (nama asal Pangandaran). Cikembulan sendiri berasal dari kata *kembulan*, yang artinya menyatu atau berkumpul karena di Cikembulan ini etnis Jawa dan etnis Sunda pertamakali hidup berdampingan. Nama Pangandaran menurut folklor tersebut lahir dari orang Sunda yang pada saat itu membawakan makanan untuk orang-orang Jawa, yang hidupnya bertani atau berladang. Orang Jawa menyebut makanan dengan istilah *pangan* dan etnis Sunda menyebutnya sebagai *daharan*, kemudian muncul nama Pangandaran, tempat di mana orang Sunda dan orang Jawa hidup. Nilai moral yang positif dari folklor tersebut adalah adanya sikap saling tolong-menolong antara etnis Sunda dan etnis Jawa (Dirman, Wawancara 24 November 2017).

Apabila dikaitkan dengan sejarah yang memerlukan dukungan fakta-fakta sejarah, gambaran yang dikisahkan oleh folklor di atas bukan merupakan suatu sejarah. Gambaran historis yang realistik mengenai migrasi etnis Jawa ke Pangandaran adalah terjadi pada awal abad ke XX. Dari segi historis Pangandaran memiliki daya tarik alam, kesuburan tanah, tersedianya lapangan pekerjaan dan keterbukaan masyarakatnya terhadap pendatang dari etnis lain telah mengundang masyarakat dari wilayah lain untuk bermigrasi ke wilayah Pangandaran. Alasan tersebut merupakan terjadinya migrasi etnis Jawa ke Pangandaran yang dikemukakan oleh dua orang informan yaitu Wito dan Dirman, mereka adalah generasi kedua migran asal Jawa di Pangandaran. Kedua orang tua mereka meninggalkan tempat kelahirannya Kebumen, Jawa Tengah karena di tempat kelahiran mereka tanahnya kurang subur atau tidak mempunyai tanah sama sekali. Mereka diajak saudaranya untuk mendapat penghidupan

yang lebih baik ke Pangandaran dengan membuka lahan untuk pertanian. Selain itu, kedatangan etnis Jawa pada awal abad ke XX dimungkinkan dengan adanya kesempatan kerja di perkebunan kelapa. Dibukanya jalur kereta api ke Pangandaran pada awal abad ke XX juga telah menjadi faktor pendorong laju migrasi etnis Jawa ke Pangandaran. Baik sebagai pekerja di perusahaan kereta api maupun sebagai alat transportasi ke Pangandaran. Menjelang paruh ketiga awal abad ke XX migrasi etnis Jawa memang terjadi kecenderungan migrasi etnis Jawa dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur ke beberapa wilayah lain di Indonesia, termasuk ke wilayah terdekatnya yaitu wilayah yang saat ini menjadi propinsi Jawa Barat. Migrasi etnis Jawa untuk mencari kehidupan yang lebih baik juga pada awal abad ke XX terjadi ke Malaya (saat ini Malaysia dan Singapura). Hal tersebut disebabkan adanya krisis ekonomi di Hindia Belanda pada paruh ketiga awal abad ke XX yang dikenal sebagai *malaise*.

Berdasarkan hasil penelitian Tim Peneliti Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran berdasarkan keterangan informan yang tidak disebutkan namanya dikatakan bahwa nama Pangandaran berasal dari kata *andar-andar*. Dahulu disebut dengan nama Bojong Kalalar, artinya tempat yang hanya dilalui begitu saja, terutama oleh musuh-musuh. Tempat ini terhindar dari konflik-konflik yang terjadi dalam konteks nasional seperti pada jaman kolonial Belanda maupun Jepang. Pada tahun 1950-an tempat ini kemudian lebih dikenal oleh masyarakat luas maupun masyarakat setempat sebagai Pangandaran. Hal ini disebabkan oleh banyaknya orang yang *andar-andar* berdatangan dari berbagai tempat ke Bojong Kalaar, *andar-andar* mengandung arti pendatang. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa *andar-andar* tersebut berdatangan untuk mencari penghidupan, atau makanan (Abdulwahid, 1998; 28 dan 83).

3. Akulturasi Budaya di Desa Wonoharjo

Koentjaraningrat (2005:155) menyatakan bahwa akulturasi merupakan istilah yang dalam antropologi mempunyai beberapa makna (*Acculturation*, atau *Culture Contact*). Hal ini semua menyangkut konsep mengenai proses sosial yang timbul apabila sekelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing sehingga unsur-unsur asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu. Menurut Koentjaraningrat, Akulturasi lebih ke sebuah proses terjadinya perubahan budaya dari hasil kontak antar kelompok masyarakat dengan kebudayaan tertentu dan asing dengan tahapan secara bertahap dan terus menerus tanpa menghilangkan unsur budaya sendiri atau kepribadian dari kebudayaan tersebut. Hal yang hampir sama dinyatakan oleh Liliweri (2009: 273) bahwa akulturasi merupakan suatu proses pertemuan unsur-unsur budaya yang berbeda yang diikuti dengan percampuran kedua unsur-unsur budaya tersebut,

tetapi perbedaan di antara dua unsur budaya tersebut masih terlihat.

Dengan melihat kondisi di lapangan bahwa masyarakat Jawa di Desa Wonoharjo hidup *guyub* dengan masyarakat Sunda tanpa melepaskan budaya yang mereka miliki secara turun temurun, maka akulturasi budaya terjadi di desa ini. Kontak budaya antara penduduk asli dan penduduk pendatang dapat berjalan berdampingan karena masing-masing pihak memiliki toleransi dan saling menghargai terhadap orang-orang dan budaya mereka. Hal lain yang menjadi faktor terjadinya relasi sosial yang terbina dengan baik karena adanya persamaan unsur-unsur di antara dua kebudayaan, dalam arti kebudayaan Jawa berterima oleh masyarakat di lingkungannya karena dianggap tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan pranata yang telah ada di dalam masyarakat Sunda.

Dalam kesehariannya masyarakat dalam komunitas Jawa tersebut hidup di dalam budaya Jawa dan berkomunikasi di antara mereka dengan menggunakan bahasa Jawa. Justru bahasa lokal inilah yang menguatkan budaya Jawa mampu bertahan terhadap guncangan era milenial, meskipun komunitas Jawa di Desa Wonoharjo saat ini sudah merupakan generasi ketiga. Nilai-nilai kehidupan dan berbagai kebiasaan hidup di tempat asal, tetap terpelihara dan berkembang di tengah masyarakat. Hal ini dikarenakan masih adanya kontak dengan tempat asalnya. Sampai saat ini, mereka masih mengunjungi sanak keluarganya pada saat Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, pada saat ini masalah jarak dapat diatasi dengan sarana transportasi dan keuangan yang memadai sehingga kontak dengan saudara-saudaranya di Jawa Tengah masih tetap berjalan.

Komunitas etnis Jawa di Desa Wonoharjo tetap menjunjung nilai-nilai budaya tradisi mereka, tetapi keharmonisan yang terjalin antara etnis Jawa dengan etnis Sunda di sekitarnya tetap terjaga. Dalam berkomunikasi di lingkungan keluarga dan juga dengan masyarakat sesama etnis Jawa di Desa Wonoharjo mereka menggunakan bahasa Jawa. tetapi saat berada di lingkungan luar mereka, seperti di sekolah atau berkomunikasi dengan tetangga yang bukan etnis Jawa mereka menggunakan bahasa Sunda atau Indonesia. mayoritas etnis Jawa di Pangandaran mampu menggunakan bahasa Jawa dan Sunda sehingga mereka dapat dikatakan bilingual bahkan trilingual dengan bahasa Indonesia. Artinya mampu menggunakan dua bahasa atau lebih dengan penguasaan bahasa yang sama baiknya atau bahkan sama buruknya. Hal inilah yang menyebabkan munculnya istilah bahasa Sunda Reang atau Jawa Reang. Kedua jenis bahasa tersebut mengandung arti rusak, setengah-setengah atau tidak benar.

Salah satu sebab mengapa etnis Jawa mayoritas memiliki kemampuan berbahasa Sunda dikarenakan mayoritas etnis Sunda di Desa Wonoharjo dapat memahami bahasa Jawa tetapi sedikit yang dapat berbicara dalam bahasa Jawa sehingga etnis Jawa “mengalah”

untuk menggunakan bahasa Sunda ketika berbicara dengan etnis Sunda. Dalam khotbah Jumat atau acara pengajian di mesjid bahasa Sunda dan Jawa kadang digunakan secara bergantian, terkadang penceramah yang merupakan etnis Sunda menggunakan bahasa Sunda. Sementara penceramah yang beretnis Jawa dapat menggunakan bahasa Sunda ataupun bahasa Jawa, dengan mempertimbangkan mayoritas etnis pendengar. Terkadang penceramah dari etnis Jawa juga tetap menggunakan bahasa Jawa dalam ceramahnya dengan pertimbangan etnis Sunda yang menghadiri ceramahnya akan tetap mengerti makna ceramah meskipun dengan menggunakan bahasa Jawa.

Terjadinya kontak antara budaya Sunda dan Jawa menyebabkan terjadinya pengaruh budaya. Hal yang paling jelas terlihat bahwa bahasa Sunda yang pada awal mulanya bersifat egaliter, tetapi setelah masuknya budaya Jawa di dalam bahasa Sunda diterapkan pula *undak-unduk basa*, yaitu saat berbicara etnis Jawa atau etnis Sunda harus memerhatikan kosa kata yang dipakai dengan melihat status sosial, umur, serta hubungan kekerabatan lawan bicara (Lubis, 2011: 404-405). Menurut Wardiani (2017: 572) dalam penelitiannya ditemukan 44 homonimi leksem bahasa Sunda dan Jawa di dalam kamus bahasa Sunda karangan Danadibrata (2006), antara lain: *sangu* = (di dalam BS nasi, BJ bekal); *gedang* (BS papaya, BJ pisang); *bagong* (BS babi, BJ nama tokoh wayang); atos (BS sudah, BJ keras).

Selain segi bahasa, akulturasi budaya Jawa dan Sunda dapat dilihat dari seni pertunjukkan Kuda Lumping. Seni Kuda Lumping di Jawa Timur dikenal dengan nama Jaranan atau Jaran Kepang sedangkan di Jawa Tengah dikenal dengan Jathilan. Penamaan jenis kesenian tersebut mengacu kepada properti berupa kuda rekaan yang digunakan dalam pertunjukkan, Jaran Kepang merupakan bambu yang dianyam (dalam bahasa Jawa Kepang) sementara Kuda Lumping berasal dari kulit sapi (dalam bahasa Jawa adalah lumping). Properti rekaan kuda dalam Kuda Lumping tersebut pada umumnya diberi tempelan dari ijuk di bagian kepala dan ekornya sehingga mirip dengan kuda. Cara bermainnya adalah dengan menjepit kuda rekaan tersebut di pangkal paha.

Pada saat ini, jenis kuda rekaan yang terbuat dari kulit sapi semakin jarang, lebih banyak kuda rekaan yang terbuat dari bambu tetapi jenis kuda rekaan yang terbuat dari anyaman bambu pun sering disebut sebagai lumping. sementara di wilayah Karesidenan Banyumas seperti Purbalingga, Cilacap, Purwokerto, Kebumen dan Banjarnegara pada umumnya dikenal dengan nama Ebeg. Hal ini tidak mengacu kepada bahan properti kuda rekaan. Demikian pula di Kabupaten Pangandaran seni Kuda Lumping dikenal dengan nama Ebeg. Pada saat ini di Kecamatan Pangandaran dimana terletak Desa Wonoharjo, terdapat lima kelompok sanggar Kuda Lumping (Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis, 2019: 212). Salah satu grup kesenian Ebeg yang tumbuh di Desa Wonoharjo

dipimpin oleh Wito yang juga merupakan salah seorang penggagas dan pelestari seni pertunjukkan Ebeg di wilayah ini. Ebeg sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Pangandaran, tanpa mempersoalkan asal usul kesenian tersebut (Wito, Wawancara 23 November 2017).

Unsur musik dalam Ebeg berperan penting sebagai pengiring tari-tarian. Dengan menggunakan gamelan pelog dan salendro, musik pada kesenian Ebeg ini sudah berkembang, dilihat dari repertoar musik yang dimainkannya. Di antaranya dalam pertunjukkan Ebeg selain memainkan lagu-lagu yang berbahasa Jawa, sering juga dimainkan lagu-lagu yang berbahasa Sunda ataupun lagu-lagu berbahasa Indonesia. Hal tersebut dilakukan karena penghormatan terhadap etnis Sunda yang turut menyaksikan juga sebagai perkembangan dunia hiburan. Ebeg tidak hanya berfungsi sebagai acara-acara ritual tetapi juga hiburan, oleh karena itulah lagu-lagu pop atau dangdut Sunda dan Indonesia yang tengah populer sering diperdengarkan di dalam pertunjukkan. Biasanya ditampilkan dalam pembukaan menjelang pertunjukkan atau di tengah-tengah waktu istirahat. Akulturasi kebudayaan Jawa dan Sunda dalam Ebeg juga terlihat dalam bentuk panggung untuk para nayaga dan sinden. Bentuk panggung seperti itu merupakan adaptasi dari seni Ronggeng Gunung yang merupakan kesenian Sunda yang hidup di wilayah Kabupaten Pangandaran dan Ciamis. Seni tersebut telah lebih dahulu menggunakan panggung untuk nayaga dan sindennya daripada Ebeg.

SIMPULAN

Migrasi orang Jawa ke Desa Wonoharjo secara historis telah berlangsung sejak awal abad ke XX dengan berbagai alasan tertentu. Kedatangan etnis Jawa ke Desa Wonoharjo didorong oleh beberapa kondisi di tempat asalnya, seperti lahan yang gersang, terbatasnya lahan pertanian dan kesempatan kerja di daerah asal. Kehadiran mereka ke Desa Wonoharjo bertujuan untuk mendapat kehidupan yang layak dan di desa tersebut, mereka mendapatkan apa yang mereka harapkan. Mereka datang tidak secara bersamaan dalam jumlah yang besar sekaligus, melainkan dengan berkelompok kecil dari waktu ke waktu.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan tidak dapat disanggah lagi bahwa di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran hidup komunitas etnis Jawa yang tetap mempertahankan bahasa, budaya, dan seni tradisi yang diwariskan turun temurun, sehingga identitas budaya Jawa-nya masih hidup di tengah masyarakat Sunda. Dengan memelihara budayanya tersebut komunitas etnis Jawa telah mewariskan nilai-nilai kearifan lokal *indigenous knowledge* kepada generasi berikutnya. Pada sisi lainnya mereka mampu beradaptasi dengan budaya setempat yang merupakan etnis Sunda dengan cara berakulturasi budaya dalam bidang bahasa dan seni. Dengan demikian, mereka sebagai migran mampu

membentuk satu komunitas untuk menjaga keharmonisan, persatuan, persaudaraan dalam hidup bermasyarakat.

Dalam konteks akulturasi menurut Koentjaraningrat maka etnis Jawa di Pangandaran termasuk dalam apa yang dimaksud dengan akulturasi tersebut karena mereka masih tetap mempertahankan ciri-ciri budaya mereka dan telah mengolah unsur budaya asing ke dalam budayanya tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tulisan merupakan hasil penelitian yang dibiayai dengan hibah penelitian Riset Kompetensi Dosen Unpad (RKDU). Penelitian dilakukan oleh dosen-dosen dengan latar bidang keilmuan yang berbeda, sehingga buah pikiran yang dihasilkan dapat saling melengkapi. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Padjadjaran, Direktur Riset, PkM dan Inovasi Universitas Padjadjaran beserta staf, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran, Manager Riset, Inovasi, dan Kerja Sama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran beserta staf. Ucapan terima kasih inipun ingin kami sampaikan kepada sesepuh dan masyarakat Desa Wonoharjo yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas bantuan dan dukungan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulwahid, I., Rukmini, M. & Kalsum. (1998). *Kodifikasi Cerita Rakyat: Daerah Wisata Pangandaran*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ardiani, S.R. (2017). Homonimi Leksem Bahasa Sunda dan Jawa. *Seminar Nasional Kearifan Lokal (SNKL)* Jatinangor: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran, 572.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis. (2019). *Pangandaran dalam Angka 2018*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis.
- Danadibrata, R.A. (2006). *Kamus Basa Sunda*. Bandung: Kiblat Buku Utama.
- Djajasudarma, F., Wahya., Heriyanto., Indira. D., Citraresmana, E. & Muhtadin, T. (2016). *Monograf Diksi Kesantunan dalam Ranah Sociolinguistik Pembentukan Karakter : Analisis Bahasa Budaya Sunda di Jawa Barat*. Jatinangor : Unpad Press
- Gottschalk, L. (1975). *Mengerti Sejarah* (Terjemahan). Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia
- Indira, D. & Mulyadi, R.M. (2017). *Wilayah Geopark Pangandara Bahasa, Seni, dan Budaya*. Jatinangor: Unpad Press
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 4th ed. (2008). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Liliwari, A. (2009). *Dasar-dasar Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lubis, N.H., Muhsin, M., & Dienaputra, R. (2011). *Sejarah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat
- Wardiani, S.R. (2017) "Homonimi Leksem Bahasa Sunda dan Jawa". *Prosiding Seminar Nasional: Kearifan Lokal dalam Pemertahanan Integrasi Bangsa Indonesia*. Program Studi Sastra Sunda dan Kantor Riset, PPM, Inovasi dan Kerja Sama FIB Unpad. Halaman 572- 577.
- Wawancara
- Dirman (70 tahun), tokoh masyarakat Wonoharjo. Tanggal 24 November 2017.
- Wito (63 tahun), pelaku seni Ebeg di Wonoharjo. Tanggal 23 November 2017.

THE ROLE OF WEAVERS WOMAN IN STRENGTHENING NATIONALISM Case Study in Sajingan Besar Frontier, Indonesia

Elyta¹ and A. Razak²

¹Faculty of Social and Political Science, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

²Politeknik Negeri Pontianak, Pontianak, Indonesia

E-mail: elyta.elyta79@gmail.com

ABSTRACT. Woven crafts made by women at the Sajingan Besar frontier, besides that it also has economic value, historical value, cultural values that show the identity of the population at the national boundary. The aims of the study were to describe the role of weavers' women in strengthening nationalism, woven is a culture that is typical of the society in Sajingan Besar frontier, Sambas District. There are two data used in this paper, i.e primary data is field studies, and secondary data is literature studies. The result of research shown that there is an important role from weavers' women in Sajingan Besar, namely: (1) Utilization of Natural Resources is to strengthen nationalism by utilizing the availability of natural resources in managing them into woven crafts which are a form of expansion of nationalism because woven crafts are a cultural heritage and has local characteristics of Sajingan Besar, (2) The Role of weavers' women in Sajingan Besar is able to realize a harmonious life with the Malaysian community to strengthen nationalism has become a role model on the frontier whose territory is inhabited by a variety of different tribes, religions and cultures but unity is maintained.

Key words: Weavers' Woman; Nationalism; Frontier

PERAN PEREMPUAN PENGANYAM DALAM MEMPERKUAT NASIONALISME Studi di Perbatasan Sajingan Besar, Indonesia

ABSTRAK. Kerajinan anyaman yang dibuat oleh perempuan-perempuan di perbatasan Sajingan Besar disamping memiliki nilai ekonomis juga memiliki nilai sejarah, nilai budaya yang menunjukkan identitas penduduk di batas negara. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran perempuan penganyam dalam memperkuat nasionalisme, anyaman merupakan kebudayaan yang khas masyarakat di perbatasan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. Data yang digunakan pada tulisan ini berupa data primer melalui studi lapangan, dan data sekunder berupa studi literatur. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada peranan penting dari perempuan penganyam Sajingan Besar Melalui: (1) Pemanfaatan Sumber Alam Untuk Memperkuat nasionalisme yaitu dengan memanfaatkan ketersediaan sumber daya alam dengan cara mengelolanya menjadi kerajinan anyaman yang merupakan bentuk perluasan nasionalisme di perbatasan karena kerajinan anyaman adalah kebudayaan warisan leluhur dan memiliki ciri khas lokal Sajingan Besar, (2) Peran Perempuan Penganyam Sajingan Besar dalam mewujudkan kehidupan harmonis dengan masyarakat malaysia untuk memperkuat nasionalisme telah menjadi *role model* di perbatasan yang wilayahnya didiami berbagai macam suku, agama maupun kebudayaan berbeda namun persatuan dan kesatuan tetap terjaga.

Kata kunci: Perempuan Penganyam; Nasionalisme; Perbatasan

INTRODUCTION

Nationalism consists of political activities that aim to show national identity (Siekmeyer 2015, 69). Specifically, national identity is described as the strongest social flow in the 20th century (Bashevkin 2000, 116). Studying about nationalism cannot be separated from the frontier. The area frontier has proven to be the frontline for the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia (Warsilah & Wardiat 2017, 21). Thus, there has been a paradigm shift that initially underdeveloped areas became the front area. Paradigm changing aims to strengthen sovereignty, the economy and frontier community nationalism. In reality, frontier areas are more vulnerable to foreign influences, which is proven by frontier conditions are presumed to be a general description for other countries to see the condition of a country. Therefore, the frontier area has become an important area regarding development and construction, especially in the context of nationalism.

However, a paradigm shift towards the development of frontier areas is as a manifestation of regional sovereignty has not yet shown significant changes, it

means that frontier areas are still inherent in the poverty status (Elyta 2011, 12). This is also supported by reality. It states that rural areas of Indonesia, especially in frontier areas are still concerned with welfare issues (Sutopo 2017, 268). Of course, this welfare problem refers to the issue of poverty which is allegedly able to influence the nationalism of each individual from the frontier community.

Nationalism of each individual society is described by the emergence of awareness to create groups based on the same culture and region to take control of themselves (Guibernau 1996, 47). Communities welfare in a frontier area that is still disadvantages region has an attitude of dependence on neighbouring countries in various ways, one of them is the fulfilment of life needs (Elyta, et al. 2018, 312-313). This is alleged to be a threat to nationalism on the frontier, where the people's helplessness in fulfilling their daily needs raises a movement of change to support the welfare of society. It cannot be denied that the problem of nationalism is a phenomenon which is directly related to society in the frontier environment.

On the other hand, the Sajingan Besar frontier has economic potential through the development of natural

resources, such as the development of natural resources by processing pandanus, bamboo and rattan into woven crafts (Razak & Elyta 2017, 215). Thus, woven crafts are one of the local potentials on the Sajingan Besar Sambas frontier that can be developed massively, both by the local government, and the community engaged in the creative industries. The sources of nationalism problems that are indicated from community economic problems are considered to be overcome through the woven craft.

In fact, making woven is not the main livelihood for the people in Sajingan Besar. The society majority fulfil their daily needs by farming. Woven which is an ancestral inheritance is only used as a side business to obtain additional income and is generally done more by women.

Handwoven crafts produced by weavers in Sajingan Besar have great attractive opportunities in the international market, by elevating Indonesian local culture (Razak & Elyta 2017, 214). It concluded that there is the increasing interest of foreign and local tourists on waves craft who often visit the Sarawak region, Malaysia.

Indonesia is a multicultural nation consisting of various tribes, religions, groups, and beliefs, these differences should be realized and become reinforcement of nationalism (Sundawa 2017, 203). Therefore, it can be interpreted that weaver's women have an important role in developing the spirit of nationalism by introducing culture to children and future generations, in addition, it is to preserve the ancestral heritage.

The development of nationalism is important to create social cohesion in a country (Maliki 2010, 63). Thus, in addition, it is to have a selling value for peculiarities, weaver's women craft in Sajingan Besar are indicated as media of strengthening community nationalism in the frontier region. Thus, women become important actors in the introduction of nationalism based on the locality in Sajingan Besar. Woven crafts are presumed to be a distinctive culture of the society in the frontier of Sajingan Besar Sambas District. It creates a cultural identity as an Indonesian society, but the nationalism of residents that is lived in the frontier region is often questioned and it gives the impression of weak about nationalism in the communities of frontier Sajingan Besar, Sambas district. This paper aims to analyze the role of weavers' women in strengthening nationalism in the Sajingan Besar frontier, Sambas District.

METHOD

The research method is a qualitative method. It is the results of research conducted by the author on the frontier of Sajingan Besar, Sambas District. The data are presented in the form of description-analysis based on field data and literature. Researchers analyzed the role of weavers' women in strengthening nationalism through the creation of craft is as a typical society in the frontier of Sajingan Besar, Sambas District. The research was conducted from

February 7, 2018, to October 18, 2018. The informants of this study were the Head of the State Cross-border Post in Sajingan Besar, 4 weavers' women are lived in the frontier area of Sajingan Besar, and 2 public figure in the frontier area of Sajingan Besar. The researcher conducts in-depth interviews and observations to obtain the desired data. The main tool of this research is the researchers themselves are assisted by interview and recorder guidelines from Handphones, the data is obtained processed and analyzed in narrative form, after that the researchers interpret the data to obtain meaning clearer and deeper.

RESULT AND DISCUSSION

The Role of Weaver Women Sajingan Besar Through Utilization of Natural Resource in Strengthening Nationalism

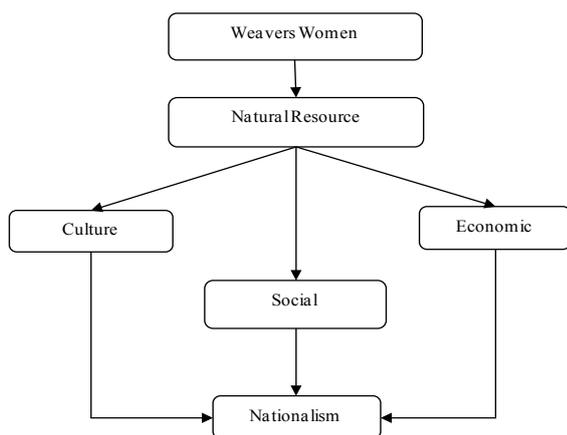
Issues are concerning economy and socio-culture are problematic in frontier areas for various reasons, such as the quality and quantity of human resources, regional infrastructure, low productivity of women and the utilization of natural resources that are not optimal (Warsilah & Wardiat 2017, 33). The connection to the weaver women at the frontier allegedly gave rise to involve themselves in illegal economic activities with the aim of fulfilling daily necessities of life. The poverty that afflicts frontier women also results in the utilization of opportunities to become illegal migrant workers in Malaysia.

Basically, the role is a concept of what can be done by individuals or institutions in society as a social organization (Soekanto 2017, 268). Furthermore, humans, both women and men in social life, have the same status and role (Lotulung & Mulyana 2018, 139). Based on the researchers' observations, it was seen that the role of making plaits on the Sajingan Besar frontier in Sambas District was women, weaver women on the Sajingan Besar frontier in Sambas District were women who were 30 years old and above. Residents who are still weaving mats, bags, typically believe that the plants they make are inherited from their ancestor's hundreds of years ago. But along with the changes that occur in women, these crafts then have a fairly high selling value. These craft practitioners are mostly from the Sarawak region of Malaysia, while in the Sambas District, this craft is rarely in demand.

The following is the correlation between the role of weavers women in various aspects that strengthen nationalism:

Picture 1 shown that weaver women still preserve the woven fabric which is the ancestral heritage since hundreds of years ago. But along with the changes that occur in social and economic activities at the frontier, woven crafts show selling value to be a solution to the problems of nationalism due to the welfare of the people who are still weak. As woven crafts have attracted

interested people from the international community, especially from Sarawak Malaysia, while interest in the local area the production of woven crafts is very minimal.



Source: Primer Data, processed 2018

Picture 1. The Role of Weavers Women Through Natural Resources in Various Aspects Strengthening Nationalism

The results of the study also revealed that the price of wicker produced by these weaving women has its own variations according to the accuracy of the model, motif, size and difficulty of the production process. The highest price of one wicker craft measuring 7x10 feet is sold at a price of Rp. 600,000, based on policies or intermediary sellers from Sarawak Malaysia. The pricing is based on the high interest and competitive price in the Malaysian market. In other words, if this woven craft continues to be developed and managed well, it certainly can have a positive impact on the economy of the people of Sajingan Besar and automatically lead to a sense of pride in the culture of the Indonesian nation and thus strengthen nationalism.

There are slogans for women who are quite well-known among frontier communities; namely “even though our stomachs are Malaysian, our hearts remain Indonesia”, which means weaver women realize and do not deny the fact that either to make a living or to buy daily necessities is indeed obtained from Malaysia because of easy market access and no cost large, therefore frontier women have bought more thing in Malaysia. From the interviews of researchers with weaver women who found many woven crafts marketed at low prices through collectors to be marketed back in Malaysia, according to informants as well as woven collectors in Sajingan Besar sub-district stated that it was more profitable to sell the wicker to Malaysia than to sell in Indonesia, however, it will not change and their love for Indonesia

While, on the other hand, women who use natural resources by managing it into woven crafts are engaged by Sajingan Besar frontier women still do not master the technology for marketing. It is undeniable that the mastery of technology for marketing today is very important in the modern economy. So that they are only limited to weavers,

which are deposited to the container, and they are not market participants. The limited knowledge of women in Sajingan Besar in mastering information technology is caused by several factors including, lack of internet literacy, limited communication technology owned by woven craftsmen, inequality of development from the government and limited signal and internet access in various regions at the Sajingan Besar Sambas frontier. Then, lack of experience in entrepreneurship and the lack of courage of the actors of woven crafts is to innovate. The weaver women of the Sajingan Besar Sambas frontier get lacks information to obtain capital.

The limited access of weaving women in obtaining information related to the new policies imposed by the Bank followed by the difficulty of the process, the stages and the lack of access of women to get loans is one of the difficulties in developing woven crafts. Then, the construction of facilities is still very minimal and is only centred in big cities, causing woven craftsmen is hesitate to develop their businesses because it is difficult to fulfil the required production factors. In addition, road infrastructure that is inadequate or damaged, as well as inadequate transportation equipment, becomes another problem for woven craftsmen to obtain production materials and difficult to distribute their products.

Problems related to labour issues in the frontier region are also focused on the phenomenon of women who become unskilled labourers in oil palm plantations in the Sarawak region of Malaysia. The statement can show that some women become oil workers (Indonesian female workers) in Malaysia. The fact that female workers in the Sajingan Besar frontier area have not been organized to manage local resources in the region. One that inhibits the management of local resources is the determination of border residents to be workers must have a cross-border postcard from the village office, in order to enter Malaysia.

Furthermore, natural resources that are used to fulfil the needs of life are not only by exploiting on a large scale, because it will damage the function of the forest and have a negative impact on the environment. The population in Sajingan Besar uses nature as a necessity of life in a way that has rooted in culture, is still traditional and takes care of the sustainability of nature. They took the basic woven ingredients from bamboo, rattan and pandanus to make woven crafts that had selling value, but they also did not forget to replant bamboo, rattan and pandanus to maintain a natural balance.

While to meet household consumption needs, residents in Sajingan Besar still use traditional methods by utilizing nature, such as fishing with simple fishing gear such as fishing rods, trawls, or nets. Then, the community also uses vacant land for gardening and the results for household consumption are not for sale. The natural potential in agriculture and plantations is the land available for cultivation and has relatively good fertility.

International trade in the form of export and import activities has occurred in the frontier region (Elyta 2017, 59). It is evidenced by the existence of inter-state trade cooperation between Indonesia and Malaysia conducted at the Cross-frontier State Post, Sajingan Besar where women boost the economy, it means that local women take advantage of opportunities to open businesses in order to improve the household economy. Women who were oriented to household needs developed into a market opportunity. The garden products in the form of vegetables and spices, they had were then sold to agents in Sarawak Malaysia. Later, woven crafts that had only been used for domestic use turned into a fairly high market selling value in Malaysia.

Although basically the main economic resources of the people in the Sajingan Besar frontier region come from the agricultural sector, the existence of weaver women as creative industries has created new opportunities and is targeted by the Malaysian market. Based on Sambas Regency Central Bureau of Statistics data, there are two active woven industry businesses since 2008 to the present (Sambas in the Central Bureau of Statistics (Razak & Elyta 2017, 215). The creative woven industry business in Sajingan Besar accommodate local weaving women. However, the constraints faced are limited knowledge of marketing of local residents so that the production of woven crafts is sold with relatively cheap prices using ringgit. This is due to the weak bargaining position of handicrafts produced to be marketed globally.

Another obstacle is the still difficult access road and the location of some remote villages in Sajingan Besar, which compared to Sarawak Malaysia is somewhat left behind. This is also one of the factors that have not yet advanced the woven crafts industry in Sajingan Besar. While the woven craft comes from Sajingan Besar has been marketed in the international market by entrepreneurs from Sarawak, Malaysia.

The construction of facilities and infrastructure, human resources until the management of the resulting webbing can be a force that supports woven crafts. It is to be marketed in international markets without having intermediaries at discounted prices so that it can help the economy of frontier communities and create a sense of pride in national culture. The results of the study also found that the economy of the population in Sajingan Besar was influenced by the economy of women in the Sarawak frontier region, Malaysia. Women in Sajingan Besar use two currencies, namely Rupiah and Ringgit. In daily transactions, local women often use Ringgit, because they buy more goods from neighbouring countries. This also affects the economy of women in the Sajingan Besar frontier, which is more oriented to the Ringgit because the exchange rate of Ringgit is greater than the Rupiah.

In addition, the attitude of tribal sentiments and religion is rarely heard in this region because the people have had the spirit of nationalism by working together

to preserve the sovereignty of the Indonesian people and improve their welfare through woven crafts. For this reason, the role of weaver women is very important to develop and expand nationalism through the culture and creative industries of woven crafts, where weaver women have acted as the front guard in introducing, delivering, socializing, and strengthening nationalism in the national frontier. It is not only in the family sphere but also in the international community, especially in Sarawak, Malaysia. Woven handicrafts that are used as an economic value product are one of the cultures in Sajingan Besar, through woven crafts also women woven crafts support the local economy as well as nationalism by preserving local culture, namely woven crafts.

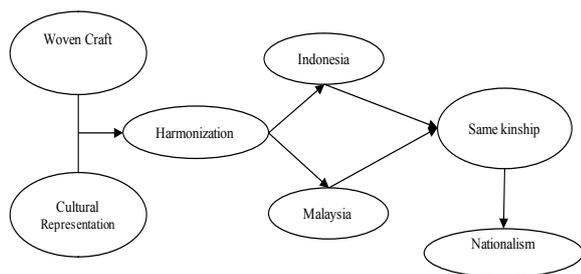
The Role of Weavers Women Sajingan Besar in Realizing Harmonious Life with Malaysian Communities to Strengthen Nationalism

Women empowering is through education while providing political rights (Thomas 2004, 212). In this case, weaver women become actors of nationalism reinforcement at Sajingan Besar frontier through woven crafts, frontier women have given the influences on nationalism, the role of exploring nationalism or strengthening the sense of frontier nationalism is empowered through education. It is done by providing strength in the form of expanding insight and mindset creative and economical for weaving women to manage weavers into an economic value is woven handicraft product that fosters pride, ownership of local and national special works. One effort that is quite effective in exploring and growing nationalism can be done by applying education in the field of entrepreneurship empowered to weaving women.

Culture and ancestry are used as tools to foster nationalism. Although later nationalists will emerge who create classes, especially for women namely middle-class women and workers (Rosenberg 2010, 52). Woven handicrafts in Sajingan Besar are one of the manifestations of their ancestral heritage in the past. Through the plaits of their ancestors, they show their thoughts, expressed feelings to respond to every historical event in the area where they lived. The woven craft is a historical witness about the civilization of women in Sajingan Besar.

Promoting culture and fostering awareness is the attitude of nationalism (Thomas 2004, 213), the existence of the nation is inseparable from the existence of culture created and guarded by a human, it is by elevating cultural values in terms of management, promotion and marketing is a symbol based on nationalism. Various cultural symbols are manifested as human expressions in conveying their personal meanings that are different from others (Tampubolon & Darmawan 2016, 22-23). These values are presented in various patterns of attitudes, knowledge and results of creativity that produce cultural products. It includes woven crafts as a product of the creativity of Sajingan Besar women, which is also a cultural

representation of the region. In showing this phenomenon, the picture attachments are as follows:



Source: Primer Data, processed 2018

Figure 2. The Role of Weavers Women in Sajingan Besar Indonesia in realizing Harmonious Life with Malaysian Society

Figure 2 can be explained that weaving contains the value of art which has an important meaning as the adhesive of women's unity in Sajingan Besar. Women are consisting of various tribes and also religions live side by side in Sajingan Besar. There are Dayaks, Sambas Malay tribes, Javanese, and Batak tribes, they also become woven craftsmen such as bags and mats. However, more Dayaks and Malay tribes are weaving this craft. Then, the religion found in the Sajingan Besar is Catholicism, Protestantism and Islam. Tribal and religious communities in this region live harmoniously and embrace together with help. This means that women can be empowered and empower themselves through woven crafts. Women can expand and strengthen nationalism while remaining united despite having differences, in other words, that the existence of multiculturalism in the group of weaving women from various customs and cultures is together in producing woven crafts that they wicker.

Next is the individual rational achievement as rationally which is a way of maintaining the unity of oneself from the potential multi or the pressure of structure, it is also a symbol of the social membership of a particular group (Williams 2000, 321). There are women craftsmen who are craftsmen in fixed industrial centres and some are home-made craftsmen, whose results sell in fixed industries or directly to collectors in Sarawak, Malaysia.

Nationalism awareness reflects identity and character that is able to respect the existence of other communities, respect rationality and have a strong moral awareness (Poespowardojo 2003, 4). The craft itself has a meaning for women in Sajingan Besar to attach harmony between indigenous communities in Sajingan Besar, including indigenous Dayak communities, indigenous Malay communities and other tribes who also live on the frontier. It is not only establishing good relations between communities within the country, but also the frontier women of Sajingan Besar. They also have close and good relations with the Dayak and Malay communities in the Sarawak Malaysia.

Women in Sajingan Besar believe that the philosophy of life loves each other which has been embedded since

the time of their ancestors. Then caring and tolerance value becomes a way of life for women and is taught to their future generations. Woven crafts that exist today show that women in Sajingan Besar who have different cultures, races and religions are able to live in harmony and coexist well.

The craft which is the local wisdom of Sajingan Besar women is a persuasive medium in interpreting differences and diversity, it gives the positive impact, example there are rarely divisions and conflicts between women in the region. Learning from past history in Sambas District which was once the centre of ethnic conflict in 1998, women have become increasingly able to be wise in addressing issues such as differences in women aspect.

An understanding of feminists which was initially ignored by historians has been increasingly influential since the 19th century (Chatterjee in (Rosenberg 2010, 49), one of the active roles of border weaving women who socialize with residents in Sarawak Malaysia, making woven crafts is not only done by people in Sajingan Besar. Many people in Sarawak also make woven crafts for their household needs. Because the population of Sajingan Besar, Indonesia has many relatives or families who have lived in Sarawak Malaysia, so they often go back and forth to visit their families in Malaysia. This means that between the population of Sajingan Besar and residents in the Sarawak region have a strong bond of brotherhood. Life at the national frontier is not a problem for them to love Indonesia, maintain their culture and nationalism but it becomes an advantage and pride for weaving women to show their existence. The role of women in expanding nationalism need not be doubted even though they are in frontier areas and vulnerable to foreign influences. There are mosques and church in one village, they remain harmonious, respect each other and have a high sense of tolerance. Differences are necessities that should be managed so that the differences become a media of unification and not division. The development of nationalism and the love of the homeland has begun since the Indonesian nation fought for independence until now weaver women also fight for their nationalism by continuing to preserve the woven craft culture based on national unity and integrity both in political, social, cultural, economic and national tenacity and security aspects Indonesia.

CONCLUSION

The role of Sajingan weavers' women in utilizing natural resources has strengthened nationalism by preserving economically valuable cultures, namely woven crafts. The existence of frontier weaving women plays an important role considering the low welfare of frontier communities and conditions that are synonymous with the word 'lagging' which means that they do not have the modern infrastructure to support the fulfilment of daily

needs so that it influences social behaviour patterns and thinking. They are vulnerable to exploitation. Indonesian Workers (TKI) illegally go to Malaysia at low wages.

The role in strengthening nationalism has been realized through the independence of weaver women, so it is to strengthen frontier nationalism. The differences in ethnicity, language, religion and culture at the Sajingan Besar frontier describe the unity of the Indonesian society to Malaysian society through the role of preserving the culture of woven crafts together, so that people feel proud to be part of Indonesia, upholding the values of unity and nationalism. Weavers women also become role models. How difficult it is for women's lives at the national frontier, they still love the homeland and do not leave the ancestral cultural heritage by preserving it into a variety of creativity and high cultural awareness.

REFERENCES

- Bashevkin. (2000). In the shadow of free trade: Nationalism, feminism and identity politics in contemporary English. *Sylvia Journal of Canadian Studies*, 35, (2), 109-204. <http://doi/abs/10.3138/jcs.35.2.109>
- Elyta. (2011). *Penanganan Ancaman Keamanan Manusia: Penanganan Keterbelakangan Pembangunan Melalui Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Wilayah Perbatasan*. Pontianak: Bulan Sabit Press.
- Elyta. (2017). Perdagangan Gula Ilegal di Wilayah Perbatasan Entikong Indonesia Dan Malaysia. *Sosiohumaniora*, 19, (1), 59-63.
- Elyta, Sofyan, A. Rahman, I. & Nuzulian, U. (2018). Nasionalisme Masyarakat Perbatasan di Kalimantan Barat Indonesia. *MANDALA Jurnal Hubungan Internasional*, 1, (2), 311-322.
- Guibernau, M. (1996). *Nationalisms: the nation-state and nationalism in the twentieth century*. UK: Cambridge University Press.
- Lotulung, L.J.H. & Mulyana, D. (2018). Perempuan Dalam Politik di Sulawesi Utara. *Sosiohumaniora*, 20, (2), 138-144.
- Maliki, Z. (2010). *Sosiologi Politik: Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Poespowardojo, S. (2003). Dinamika dan Impikasi Etis Wawasan Kebangsaan dalam Mengnyongsong Hri Depan Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 8, (2), 1-6.
- Razak, & Elyta. (2017). Faktor Penghambat Kerajinan Anyaman Tangan di perbatasan Sajingan Besar dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. *Sosiohumaniora*, 19, (3), 213-217.
- Rosenberg, L. (2010). The new woman and 'the dusky strand: the place of feminism and women's literature in early Jamaican nationalism. *Feminist Review*, 95, 46-63.
- Siekmeier, J. (2015). Nationalism and Globalization in Latin America. *Current History*, 114, (769), 68-72.
- Soekanto, Soerjono. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sundawa, D. (2017). Penguatan Karakter Mahasiswa yang Berwawasan Kebangsaan dalam Menghadapi Tantangan Disintegrasi Bangsa. *Seminar Nasional Tahunan*, 1, (1), 202-205.
- Sutopo, D.S. (2017). Kemiskinan di Perdesaan Dalam Tinjauan Morfologi Sosial (Studi Kasus Kemiskinan di Desa Sumber Salak Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso Jawa Timur). *Sosiohumaniora*, 19,(3), 268-273.
- Tampubolon, A, & Darmawan, C. (2016). Fashion Budaya Nasional dalam Konteks Wawasan Kebangsaan: Studi Kasus pada Jember Fashion Carnaval. *Journal of Urban Society's Art*, 3, (1), 19-26.
- Thomas, D A. (2004). *Modern Blackness: Nationalism, Globalization and the Politics of Culture in Jamaica*. Durham: Duke University Press.
- Warsilah, H, & Wardiat, D. (2017). *Pembangunan Sosial di Wilayah Perbatasan Kapuas Hulu Kalimantan Barat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Williams, R. (2000). *Making Identity Matter: Identity Society and Social Interaction*. Durham: sociologypress.

NUANSA MAKNA SINONIM VERBA TRANSITIF BERIMBUHAN *meng-kan* BERMAKNA INHEREN PERBUATAN DALAM BAHASA INDONESIA

Ranti Permatasari, Ngusman Abdul Manaf, dan Novia Juita

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang

E-mail: ngusman@fbs.unp.ac.id

ABSTRAK. Beberapa penelitian tentang sinonim sudah pernah dilakukan, namun belum memberikan penjelasan secara tuntas tentang nuansa makna sinonim verba transitif berimbuhan *meng-kan* bermakna inheren perbuatan dalam bahasa Indonesia. Artikel ini ditulis untuk menjelaskan nuansa makna sinonim verba transitif berimbuhan *meng-kan* bermakna inheren perbuatan dalam bahasa Indonesia. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Data penelitian ini berupa kalimat bahasa Indonesia yang berisi sinonim verba transitif berimbuhan *meng-kan* yang bermakna inheren perbuatan. Sumber data penelitian ini adalah koran nasional *Padang Ekspres*, majalah *Femina*, surat undangan pernikahan, dan acara talkshow *Mata Najwa* di Metro TV tahun 2017. Peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian dan dibantu dengan alat berupa format penelitian untuk pencatatan dan penganalisisan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pencatatan dokumen, teknik sadap, dan teknik introspeksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 27 data yang diperoleh, secara keseluruhan pasangan sinonim verba transitif berimbuhan *meng-kan* bermakna inheren perbuatan dalam bahasa Indonesia adalah bermakna makna. Oleh karena itu, sinonim tersebut hanya dapat menggantikan dalam konteks tertentu saja. Sehubungan dengan itu, disarankan kepada penutur bahasa Indonesia memperdalam pemahaman tentang nuansa makna pasangan sinonim verba transitif berimbuhan *meng-kan* bermakna inheren perbuatan agar dapat menggunakan verba tersebut secara tepat dalam kegiatan berbahasa.

Kata kunci: bahasa Indonesia; makna inheren perbuatan; nuansa makna; sinonim; verba transitif

NUANCES OF MEANING OF SYNONYM TRANSITIF VERB AFFIXED *meng-kan* WITH THE INHERENTLY MEANING OF DEEDS IN INDONESIAN

ABSTRACT. Several studies on synonyms have been done, but they have not provided an explanation thoroughly about the nuances of the synonyms of transitive action verb affixed *meng-kan* inherently meaningful deeds in Indonesian. This article is written to explain the nuances of synonyms of transitive verbs affixed *meng-kan* with the inherently meaning of deeds in Indonesian. This type of research is qualitative by using descriptive method. The data taken are Indonesia sentences which contain the synonym of transitive verb affixed *meng-kan* with the inherently meaning of deeds. The data sources of this research are national newspaper *Padang Ekspres*, *Femina* magazines, wedding invitation letters, and talk show of *Mata Najwa* in Metro TV. Researcher acts as a research instrument and is assisted by tool in the form of research for recording and analyzing data. The technique used in this study are document recording, tapping techniques, and introspection techniques. The results showed that of the 27 data obtained, the overall partner synonym transitive verb affixed *meng-kan* with the inherently meaning of deeds in Indonesian is nuanced meaning. Therefore, the synonym can only be replaced in a certain context. Accordingly, it is suggested that Indonesian speakers deepen the understanding of the meaning of partner synonymous transitive verbs affixed *meng-kan* with the inherently meaning of deeds in order to use these verbs appropriately in language activities.

Key words: Indonesian; inherent meanings of deeds; nuances of meaning; synonyms; transitive verb

PENDAHULUAN

Fenomena linguistik tentang sinonim kadang-kadang cenderung disederhanakan oleh pengguna bahasa. Ada yang mempertimbangkan dua atau lebih sinonim sebagai kata-kata dengan arti yang sama dapat dipertukarkan dalam konteks tertentu sehingga mengabaikan nuansa makna. Padahal sesungguhnya, pengkajian makna merupakan hal penting untuk diketahui (Danglli & Abazaj, 2014:628). Makna dapat berfungsi sebagai wakil pikiran dan perasaan manusia. Untuk itu, makna dalam sebuah bahasa dapat ditentukan oleh pengguna bahasa berdasarkan kesepakatan yang bersifat konvensional dan sesuai dengan perkembangan pikiran pemakainya (Arifin, 2015:1; Asmani, 2016:2).

Makna kata yang tepat menentukan hubungan sosial terjalin di masyarakat (Herlina, 2016:386). Agar terlaksananya ketepatan penggunaan bahasa dalam berkomunikasi, penutur bahasa perlu mengetahui pembeda

antarkata yang bersinonim. Salah satu faktor tersebut adalah nuansa makna (Chaer, 2009:83). Nuansa makna dijelaskan sebagai perbedaan makna yang sangat halus antar pasangan kata yang bersinonim (Puspitasari, 2013:18; Nandi, 2016:111).

Pengkajian tentang analisis makna khususnya dibidang sinonim telah banyak dilakukan, diantaranya adalah Taylor (2001) di New Zealand meneliti *near synonyms as co-extensive categories; 'high' and 'tall' revisited*, Edmonds & Hirst (2002) di Toronoto meneliti *near-synonymy and lexical choice*, Utami (2010) di Surakarta meneliti tentang *kajian sinonim nomina dalam bahasa Indonesia*, Ginanjar, Subroto, Sumarlam (2013) di Surakarta meneliti *dimensi dan komponen makna medan leksikal verba bahasa Indonesia yang berciri (+TINDAKAN +KEPALA +MANUSIA)*, Imelda (2013) di Medan meneliti *analisis perbedaan nuansa makna kata "toutou dan yatto" dalam kalimat bahasa Jepang*, Suryatin (2014) di Kalimantan Selatan meneliti *analisis semantik*

verba bermakna 'menyakiti' dalam bahasa Banjar, Danglii (2014) di Italy meneliti *units of synonymy and lexical relations*, Rahmati (2015) di Iran meneliti *semantic shift, homonyms, synonyms and auto-antonyms*, Junianto (2015) di Padang meneliti *nuansa makna verba aktivitas tangan dalam bahasa Indonesia*, Arifin (2015) di Jakarta meneliti *kesinoniman dalam bahasa Indonesia*, Herlina (2016) di Surakarta meneliti *variasi dan nuansa makna verba melayu Sanggau Kalimantan Barat*, Anggraini (2016) di Surakarta meneliti *kesinoniman verba insani dalam bahasa Indonesia*. Secara umum, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesinoniman mutlak sangat jarang ditemui dan terdapat nuansa makna pada pasangan kata yang bersinonim.

Terdapat sejumlah pandangan tentang sinonim. Sinonim didefinisikan sebagai item leksikal yang memiliki arti yang sama atau serupa (Maly, 2009; Sugono, 2008). Sinonim memiliki bentuk berbeda tetapi memiliki makna yang hampir sama (Omego, 2014; Hassan, 2014). Beberapa ahli memandang kata yang bersinonim dapat digunakan untuk menggambarkan satu sama lain. Namun, tidak ada dua kata yang benar-benar memiliki arti yang sama (Stanojevic, 2009; Hassan, 2014). Al-Shaye (1993) menolak gagasan sinonim lengkap dan absolut. Menurutnya, kata-kata yang berbeda memerlukan makna berbeda. Setiap kata dapat memberikan makna tertentu (Rahmati, 2015). Secara semantik, dua buah ujaran yang bersinonim tidak akan sama persis. Sinonim sempurna atau mutlak adalah mustahil (Carapic, 2014).

Penggunaan verba tidak pernah terlepas dalam kehidupan sehari-hari. Verba merupakan unsur yang sangat penting dalam kalimat karena berpengaruh besar terhadap unsur-unsur lain yang boleh ada dalam kalimat tersebut (Alwi, Dardjowidjodo, Lapoliwa & Moeliono, 2000). Verba transitif memerlukan nomina sebagai objek dalam kalimat aktif dan berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif (Mulyono, 2013). Lebih khusus, Alwi, Dardjowidjodo, Lapoliwa & Moeliono (2000) menjelaskan bahwa setiap kata memiliki makna inheren (makna yang terkandung di dalamnya). Berdasarkan ciri perilaku semantisnya, verba diidentifikasi mengandung makna inheren perbuatan, keadaan, dan proses (Mulyono, 2013). Verba *makan* atau *mandi*, misalnya secara inheren mengandung makna perbuatan. Makna yang terdapat dalam verba dapat pula muncul karena adanya afiksasi. Akibatnya, verba tersebut mendapat makna tambahan. Verba *membeli* misalnya adalah verba perbuatan. Apabila ditambahkan dengan sufiks *-kan* sehingga menjadi *membelikan*, maka muncullah makna tambahan yakni perbuatan itu dilakukan untuk orang lain (Alwi, Dardjowidjodo, Lapoliwa & Moeliono, 2000).

Berdasarkan hasil penelusuran yang sejauh penulis lakukan menunjukkan bahwa nuansa makna sinonim verba transitif berimbuhan *meng-kan* bermakna inheren perbuatan belum dijelaskan secara tuntas. Padahal, studi ini penting karena memberikan pengetahuan bagi pengguna

bahasa agar dapat menghindarkan kesalahan dalam berkomunikasi. Selain itu, pengujian kesinoniman yang dilakukan dalam penelitian ini lebih rinci dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, yakni menggunakan dua tahap pengujian (uji komponen makna dan uji substitusi). Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan nuansa makna sinonim verba transitif berimbuhan *meng-kan* bermakna inheren perbuatan dalam bahasa Indonesia.

METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Data penelitian ini berupa kalimat bahasa Indonesia yang berisi sinonim verba transitif berimbuhan *meng-kan* bermakna inheren perbuatan yang digunakan pada ragam standar baik secara lisan maupun tulis yang digunakan pada situasi resmi dan tidak resmi. Sumber data penelitian ini adalah bahan bacaan berupa koran nasional *Padang Ekspres*, majalah *Femina*, surat undangan pernikahan, dan tuturan di acara *talkshow Mata Najwa* di Metro TV. Peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian yang menggunakan alat berupa format pengumpulan dan penganalisisan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pencatatan dokumen, teknik sadap, dan teknik instrospeksi. Analisis data dilakukan dengan cara mengidentifikasi makna kognitif dan emotif pada setiap verba transitif berimbuhan *meng-kan* bermakna inheren perbuatan. Identifikasi makna dilakukan dengan tujuan untuk menentukan pasangan verba transitif yang bersinonim dengan dua tahap pengujian yaitu uji analisis komponen makna dan uji substitusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasangan Sinonim Verba Transitif Imbuhan *meng-kan* Bermakna Inheren Perbuatan dalam Bahasa Indonesia

Pengujian kesinoniman verba transitif berimbuhan *meng-kan* bermakna inheren perbuatan dilakukan dengan menggunakan dua teknik, yaitu (1) uji analisis komponen makna, dan (2) uji substitusi.

Pasangan Sinonim Verba Transitif Berimbuhan meng-kan Bermakna Inheren Perbuatan Berdasarkan Hasil Uji Analisis Komponen Makna

Berdasarkan hasil inventarisasi data, diperoleh 27 pasang verba transitif berimbuhan *meng-kan* bermakna inheren perbuatan yang diduga bersinonim. Semua pasangan verba transitif itu diuji kesinonimannya dengan teknik analisis komponen makna seperti yang dicontohkan pada verba *mempertemukan* dan *menyatukan* dijelaskan pada tabel 1.

Berdasarkan komponen makna pada tabel 1, diketahui pasangan verba *mempertemukan* dan *menyatukan* adalah bersinonim karena sebagian besar (lebih dari 50%), yaitu

83% dari enam unsur makna adalah sama. Unsur makna yang sama itu adalah + MENYATUKAN KEMBALI, + AWALNYA TERPISAH, + DENGAN USAHA, + ADA PERAN ORANG LAIN, dan +HALUS. Berdasarkan hasil uji kesinoniman pada unsur komponen makna tersebut, verba transitif *mempertemukan* dan *menyatukan* adalah bersinonim.

Tabel 1. Analisis Kesinoniman Verba Transitif *Mempertemukan* dan *Menyatukan* Berdasarkan Analisis Komponen Makna

No	Komponen Makna mempertemukan	Pasangan Verba Transitif menyatukan	
1.	Makna Kognitif MENYATUKAN KEMBALI MANUSIA AWALNYA TERPISAH DENGAN USAHA ADA PERAN ORANG LAIN	+	+
		+	±
		+	+
		+	+
		+	+
		+	+
	Makna Emotif HALUS	+	+

Pasangan Sinonim Verba Transitif Berimbuhan meng-kan Bermakna Inheren Perbuatan Berdasarkan Hasil Uji Substitusi

Tabel 2. Pasangan Sinonim Verba Transitif Berimbuhan *meng-kan*. Bermakna Inheren Perbuatan Berdasarkan Hasil Uji Analisis Komponen Makna

No	Pasangan Sinonim Verba Transitif		Persamaan Makna
	A	B	
1	melakukan	melaksanakan	'melakukan sesuatu berkenaan dengan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh insan dengan nilai rasa halus'.
2	melakukan	menyelenggarakan	'melakukan sesuatu berkenaan dengan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh insan dengan nilai rasa halus'.
3	melaksanakan	menyelenggarakan	'melakukan sesuatu berkenaan dengan kegiatan resmi dilakukan oleh insan dengan nilai rasa halus'.
4	mempertemukan	menyatukan	'menyatukan kembali yang awalnya terpisah dengan usaha dan ada peran orang lain dengan nilai rasa halus'.
5	mempertemukan	mengumpulkan	'menyatukan kembali yang awalnya terpisah dengan usaha dan peran orang lain dengan nilai rasa halus'.
6	menyatukan	mengumpulkan	'menyatukan manusia kembali yang awalnya terpisah dengan usaha dan peran orang lain dengan nilai rasa halus'.
7	menjelaskan	menyatakan	'menguraikan secara rinci tentang isi pikiran dengan cara dilisankan dengan nilai rasa halus'.
8	menjelaskan	mengatakan	'menguraikan secara rinci tentang isi pikiran dengan cara dilisanka dengan nilai rasa halus'.
9	menjelaskan	menerangkan	'menguraikan secara rinci tentang isi pikiran sehingga menjadi jela dengan cara dilisankan dan bernilai rasa halus'.
10	menyatakan	mengatakan	'menguraikan secara rinci tentang isi pikiran secara tegas dengan cara dilisankan serta bernilai rasa halus'.
11	menyatakan	menerangkan	'menguraikan secara rinci tentang isi pikiran secara jelas dengan cara dilisankan yang bernilai rasa halus'.
12	mengatakan	menerangkan	'menguraikan secara rinci tentang isi pikiran dan perasaan secara jelas dengan cara dilisankan yang bernilai rasa halus'.
13	memberikan	menyerahkan	'menyerahkan sesuatu yang berwujud berkenaan dengan kewajiban dengan nilai rasa halus'.
14	mengucapkan	menuturkan	'mengggunakan kata-kata dalam berkomunikasi yang bernilai rasa halus'.
15	mengucapkan	menyebutkan	'mengggunakan kata-kata dalam berkomunikasi yang bernilai rasa halus'.
16	menuturkan	menyebutkan	'mengggunakan kata-kata dalam berkomunikasi yang bernilai rasa halus'.
17	menunjukkan	memperlihatkan	'menunjukkan objek atau benda secara visual dengan nilai rasa halus'.

Pasangan verba transitif yang terbukti bersinonim berdasarkan uji analisis komponen makna kemudian dilakukan uji kesinoniman yang kedua, yaitu uji substitusi. Apabila kata dalam konteks apapun dapat saling menyulih dan makna kata dalam koteks itu relatif sama, maka kedua kata itu bersinonim (Djadjasudarma, 1993). Semua pasangan verba transitif berimbuhan *meng-kan* bermakna inheren perbuatan diuji kesinonimannya dengan menggunakan uji substitusi seperti yang dicontohkan pada verba *mempertemukan* dan *menyatukan* berikut ini.

- (1) Akan tiba saatnya untuk *mempertemukan* dua insan yang sudah lama tidak bertemu.
- (2) Akan tiba saatnya untuk *menyatukan* dua insan yang sudah lama tidak bertemu.

Pasangan verba transitif *mempertemukan* dan *menyatukan* pada kalimat (1) dan (2) diketahui dapat saling menggantikan pada suatu konteks tertentu dan maknanya relatif sama. Berdasarkan hasil uji substitusi itu, verba transitif *mempertemukan* dan *menyatukan* adalah bersinonim.

Berdasarkan hasil pengujian kesinoniman verba transitif berimbuhan *meng-kan* bermakna inheren perbuatan dengan menggunakan uji analisis komponen makna dan uji substitusi seperti yang dicontohkan tersebut, diperoleh pasangan sinonim yang tercantum dalam tabel 2.

18	mengantarkan	membawakan	'memindahkan sesuatu dengan cara dipegang dengan nilai rasa halus'.
19	menghentikan	menyelesaikan	'usaha untuk mengakhiri sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan atau perkara sehingga menja didamai dengan nilai rasa halus'.
20	membuktikan	meyakinkan	'usaha untuk membuktikan kebenaran dengan cara ikut menyaksikan dengan nilai rasa halus'.
21	membicarakan	mendiskusikan	'membahas suatu perkara dalam forum resmi dengan nilai rasa halus'.
22	membicarakan	memperbincangkan	'membahas suatu perkara dalam suasana santai dengan nilai rasa halus'.
23	mendiskusikan	memperbincangkan	'membahas suatu perkara dengan nilai rasa halus'.
24	menginstruksikan	memerintahakan	'perintah dari orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah untuk melakukan sesuatu dengan nilai rasa halus'.
25	mengisahkan	menceritakan	'menyampaikan peristiwa atau cerita kepada orang lain yang bernilai rasa halus'.
26	memperlihatkan	menampilkan	'menunjukkan objek atau benda secara visual dengan nilai rasa halus'.
27	mengungkapkan	membocorkan	'menyampaikan informasi kepada orang lain yang awalnya tidak diketahui tentang suatu hal'.

Nuansa Makna Pasangan Sinonim Verba Transitif Berimbuhan *meng-kan* Bermakna Inheren Perbuatan dalam Bahasa Indonesia

Dalam penelitian ini, analisis nuansa makna dilakukan dengan cara membandingkan unsur makna kognitif, unsur makna emotif, dan kemampuan pasangan sinonim verba transitif berimbuhan *meng-kan* bermakna inheren perbuatan untuk dapat saling menggantikan pada suatu konteks. Semua pasangan verba transitif berimbuhan *meng-kan* bermakna inheren perbuatan ditentukan nuansa maknanya berdasarkan analisis komponen makna seperti yang dicontohkan pada pasangan sinonim verba transitif *mengungkapkan* dan *membocorkan* berikut ini.

Tabel 3. Analisis Komponen Makna Pasangan Verba Transitif *Mengungkapkan* dan *Membocorkan*

No	Komponen Makna mengungkapkan	Pasangan Verba Transitif yang Bersinonim	
		membocorkan	
2.	Makna Kognitif	MENYAMPAIKAN INFORMASI	+ +
		AWALNYA TIDAK DIKETAHUI	+ +
		BERSIFAT RAHASIA	± +
	Makna Emotif	HALUS	+ -

Pada tabel 3, diketahui adanya perbedaan komponen makna, yakni terdapat satu perbedaan dari empat unsur makna yang dibandingkan. Verba *mengungkapkan* memiliki komponen makna ± BERSIFAT RAHASIA artinya dapat digunakan untuk menyatakan hal yang bersifat rahasia ataupun yang tidak rahasia sedangkan verba *membocorkan* dapat memiliki komponen makna itu. Verba *mengungkapkan* memiliki komponen makna + HALUS artinya verba *mengungkapkan* bernilai rasa halus sedangkan verba *membocorkan* bernilai rasa tidak halus (kasar). Verba *mengungkapkan* dan *membocorkan* tidak hanya bernuansa makna pada makna kognitif tetapi juga memiliki nuansa makna pada konteks gramatikal, yakni

tidak dapat saling menggantikan pada konteks tertentu. Nuansa makna pasangan verba transitif berimbuhan *meng-kan* bermakna inheren perbuatan dalam sinonim *mengungkapkan* dan *membocorkan* pada konteks gramatikal dapat dilihat pada kalimat (3) dan (4) berikut.
 (3) Lelaki itu dengan sengaja *membocorkan* ember Bu Sur dengan cara memukulnya dengan batu.
 (4) *Lelaki itu dengan sengaja *mengungkapkan* ember Bu Sur dengan cara memukulnya dengan batu.

Verba *mengungkapkan* tidak dapat digunakan dalam konteks kalimat *lelaki itu dengan sengaja ... ember Bu Sur dengan cara memukulnya dengan batu* seperti pada contoh kalimat (4). Sebaliknya, verba *membocorkan* dapat digunakan dalam konteks kalimat *lelaki itu dengan sengaja ... ember Bu Sur dengan batu* seperti pada contoh kalimat (3). Berdasarkan hasil analisis komponen makna dan substitusi tersebut, pasangan sinonim verba transitif *mengungkapkan* dan *membocorkan* adalah bernuansa makna.

Dari hasil analisis komponen makna terhadap 27 pasang sinonim verba transitif berimbuhan *meng-kan* bermakna inheren perbuatan dalam bahasa Indonesia menunjukkan hasil bahwa semua pasangan sinonim verba transitif tersebut adalah bernuansa makna seperti yang tertulis dalam tabel 4.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua pasangan sinonim verba transitif berimbuhan *meng-kan* bermakna inheren perbuatan adalah bernuansa makna. Jadi, tidak ditemukan pasangan sinonim yang memiliki unsur makna yang sama secara sempurna. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami (2010) yang meneliti tentang kajian sinonim nomina dalam bahasa Indonesia, Imelda (2013) yang meneliti tentang analisis nuansa makna kata *toutou* dan *yatto* dalam kalimat bahasa Jepang, dan Junianto (2015) yang meneliti tentang nuansa makna verba aktivitas tangan dalam bahasa Indonesia.

Kebaruan hasil penelitian ini dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Utami (2010), Imelda (2013), dan Junianto (2015) adalah hasil penelitian

Tabel 4. Nuansa Makna Pasangan Sinonim Verba Transitif Berimbuhan *meng-kan*. Bermakna Inheren Perbuatan Berdasarkan Analisis Komponen Makna

Nuansa Makna Pasangan Verba Transitif Berimbuhan <i>meng-kan</i> Bermakna Inheren Perbuatan dalam Bahasa Indonesia				
No	A	Makna	B	Makna
1	melakukan	'digunakan untuk kegiatan resmi dan tidak resmi'	melaksanakan	'digunakan untuk kegiatan resmi saja'
2	melakukan	'digunakan untuk kegiatan resmi dan tidak resmi'.	menyelenggarakan	'digunakan untuk acara resmi saja'
3	melaksanakan	'digunakan untuk kegiatan resmi saja atau bukan acara'	menyelenggarakan	'digunaka nuntuk acara resmi saja'
4	mempertemukan	'insan (bernyawa) yang terpisah'	menyatukan	'insan/benda yang terpisah'
5	mempertemukan	'insan (bernyawa) yang terpisah'	mengumpulkan	'insan/benda (dana)'
6	menyatukan	'insan/benda (nondana)'	mengumpulkan	'insan/benda (dana)'
7	menjelaskan	'secara panjang'	menyatakan	'secara pendek'
8	menjelaskan	'secara objektif'	mengatakan	'secara subjektif'
9	menjelaskan	'bersifat teknis'	menerangkan	'bersifat umum'
10	menyatakan	'dengan tegas'	mengatakan	'dengan lunak'
11	menyatakan	'tuturan pendek'	menerangkan	'tuturan panjang'
12	mengatakan	'tuturan pendek'	menerangkan	'tuturan panjang'
13	memberikan	'menyerahkan dengan kepercayaan yang biasa (normal)'	menyerahkan	'menyampaikan dengan kepercayaan penuh'
14	mengucapkan	'dapat digunakan pada ragam tulis'	menuturkan	'menyampaikan sesuatu dengan kata-kata secara lisan'
15	mengucapkan	'bersifat formal'.	menyebutkan	'bersifat informal'
16	menuturkan	'menyatakan tentang diri sendiri'	menyebutkan	'menyatakan tentang orang lain'
17	menunjukkan	'bersifat kognitif maupun visual'	memperlihatkan	'bersifat visual'
18	mengantarkan	'insan (manusia) dan benda'	membawakan	'benda'
19	menghentikan	'bersifat visual dan kognitif'	menyelesaikan	'bersifat kognitif'
20	membuktikan	'bersifat argumentatif'	meyakinkan	'bersifat persuasif'
21	membicarakan	'bersifat umum'	mendiskusikan	'bersifat akademis'
22	membicarakan	'bersifat formal'	memperbincangkan	'bersifat informal'
23	mendiskusikan	'bersifat akademis'	memperbincangkan	'bersifat kurang akademis'
24	menginstruksikan	'bersifat teknis'	memerintahakan	'bersifat umum'
25	mengisahkan	'dibidang sastra'	menceritakan	'umum'
26	memperlihatkan	'bersifat umum'	menampilkan	'seni pementasan'
27	mengungkapkan	'bersifat rahasia dan tidak rahasia'	membocorkan	'bersifat rahasia'

ini menunjukkan bahwa nuansa makna pasangan-pasangan sinonim verba transitif berimbuhan *meng-kan* bermakna inheren perbuatan berupa perbedaan unsur makna kognitif. Hasil penelitian yang relevan tersebut tidak menjelaskan aspek penentu nuansa makna tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap sinonim verba transitif berimbuhan *meng-kan* bermakna inheren perbuatan dalam bahasa Indonesia, diperoleh dua simpulan sebagai berikut. Pertama, terdapat sebanyak 27 pasang sinonim verba transitif berimbuhan *meng-kan* bermakna inheren perbuatan dalam bahasa Indonesia. Kedua, semua

pasangan sinonim verba transitif berimbuhan *meng-kan* bermakna inheren perbuatan adalah bermakna makna. Hal itu menunjukkan bahwa pasangan sinonim verba transitif berimbuhan *meng-kan* bermakna inheren perbuatan hanya dapat saling menggantikan dalam konteks kalimat tertentu saja. Oleh karena itu, penutur bahasa Indonesia harus tetap memperhatikan nuansa makna pasangan sinonim verba transitif berimbuhan *meng-kan* bermakna inheren perbuatan dalam bahasa Indonesia.

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk penyempurnaan kamus sinonim bahasa Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber materi pembelajaran diksi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih peneliti ucapkan kepada Kemenristek DIKTI yang telah membantu pendanaan penelitian melalui program penelitian tim pascasarjana. Terimakasih peneliti ucapkan kepada Rektor Universitas Negeri Padang, yaitu Prof. Ganefri, Ph.D yang telah memberikan berbagai fasilitas penelitian serta terima kasih peneliti ucapkan kepada Pembimbing Dr. Ngusman Abdul Manaf, M.Hum. selaku pembimbing I dan Dr. Novia Juita, M.Hum. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaga serta memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Terimakasih kepada informan penelitian ini, yaitu penutur bahasa Indonesia di Padang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Shaye, M.bin.A. (1993). *Al-Foroq Al- Lughawyyah wa Atharuha fi tafseer:Al-Qur'an*. 1st ed. MaktabetAl-Obaykan.
- Alwi, H., Dardjowidjodo, S., Lapoliwa, H., & Moeliono, A.M. (2000). *Tata bahasa baku bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Anggraini. (2016). *Afiksasi pembentukan verba dalam teks berita siswa kelas vii di smp darul muttaqien Jakarta tahun pelajaran 2013/2014*. Skripsi: Universitas Islam Negeri.
- Arifin, E. Z. (2015). Kesinoniman dalam bahasa Indonesia. *Pujangga*, 1, (1), 1-13.
- Asmani, N. (2016). Medan makna rasa dalam bahasa Bajo. *Bastra*, 1, (1).
- Carapic, D. (2014). Near-synonymy analysis of the descriptive adjectives beautiful in english and lep, -a,-o in Serbian in contrast. *Linguistics and Literature*, 12, (1), 11-24.
- Chaer, A. (2009). *Pengantar semantik bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Danglli, L. (2014). Units of synonymy and lexical relations. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5, (13), 522-525.
- Danglli, L. & Abazaj, G. (2014). Lexical cohesion, word choice and synonymy in academic writing. *Mediterranean journal of social sciences*, 5, (14), 628-632.
- Edmonds, P & Hirst, G. (2002). Near synonymy and lexical choice. *Computational Linguistics*, 28, (2), 105-144.
- Ginanjar, B., Subroto, D. E. & Sumarlam. (2013). Dimensi dan komponen makna medan leksikal verba bahasa indonesia yang berciri (+tindakan +kepala +manusia). *Transling journal: translation and linguistics*, 1, (1) 65-75.
- Hassan, A. E. (2014). Readdressing the translation of near synonymy in the glorious Qur'an. *European Scientific Journal*, 10, (8), 165-191.
- Herlina, H. (2016). Variasi dan nuansa makna verba melayu sanggau Kalimantan Barat. *Prosiding PRASASTI*, 386-390.
- Imelda. (2013). *Analisis perbedaan nuansa makna kata toutou dan yatto dalam kalimat bahasa Jepang*. Skripsi: Universitas Sumatera Utara.
- Junianto. (2015). Nuansa makna verba aktivitas tangan dalam bahasa Indonesia. *Tesis*: Universitas Negeri Padang.
- Maly, J. (2009). *On collocational restrictions*. Thesis: Masaryk University.
- Mulyono. I. (2013). *Ilmu bahasa Indonesia morfologi teori dan sejempit problematik terapannya*. Bandung: Yrama Widya.
- Nandi, (2016). Ungkapan makna verba shikaru dan okoru sebagai sinonim. *Jurnal Bahasa FBS-UNIMED*. 110-118.
- Omego, C. U. (2014). Does absolute synonymy exist in owere-igbo?. *An International Journal Of Art And Humanities (IAH)*, 3, (3), 178-194.
- Puspitasari, L. (2013). *Sinonim antonim dan padanan kata*. Jakarta: Infra Pustaka.
- Rahmati, F. (2015). Semantic shift, homonyms, synonyms and auto-antonyms. *WALLA journal*, 31, (S3), 81-85.
- Stanojevic, M. (2009). Cognitive synonymy: a general overview. *Linguistics and Literature*, 7, (2), 193-200.
- Sugono, D. (2008). *Kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa edisi keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suryatin, E. (2014). Analisis semantik verba bermakna 'menyakiti' dalam bahasa Banjar. *Metalingua*, 2, (1), 43-56.
- Utami, R. (2010). *Kajian sinonim nomina dalam bahasa Indonesia*. Tesis: Universitas Sebelas Maret.

PROFIL DAN KARAKTERISTIK PENYULUH PERTANIAN LULUSAN PENDIDIKAN JARAK JAUH

Diarsi Eka Yani, Nurul Huda, Ludivica E. Setijorini, dan Idha Farida

Program Studi Agribisnis, Fakultas MIPA, Universitas Terbuka, Tangerang, Indonesia

E-mail: diarsi@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK. Universitas Terbuka (UT) sebagai perguruan tinggi (PT) negeri di Indonesia yang menerapkan sistem belajar Terbuka dan Jarak Jauh, dengan karakteristik mahasiswa yang berbeda dengan PT konvensional. Belajar di UT tidak dibatasi oleh umur, pekerjaan ataupun tempat tinggalnya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji profil dan karakteristik individu penyuluh lulusan pendidikan jarak jauh. Profil penyuluh ditinjau dari segi asal UPBJJ-UT, bidang minat, status pekerjaan, dan tahun lulus. Sedangkan karakteristik individu dilihat dari umur, pengalaman kerja, jenis kelamin, dan motivasi belajar. Sampel penelitian ini adalah penyuluh alumni UT yang berjumlah 206 lulusan, berasal dari wilayah Bengkulu, Bogor, Jakarta, Jambi, Pontianak, Samarinda, dan Serang. Semua wilayah tersebut dipilih dengan pertimbangan merupakan daerah dengan jumlah lulusan yang cukup banyak. Untuk memperkaya hasil penelitian, dilakukan wawancara mendalam (Indepth Interview) terhadap beberapa informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bidang minat yang terbanyak diambil penyuluh lulusan UT adalah pertanian, dan kebanyakan dari mereka adalah penyuluh lulusan UT antara tahun 2006 hingga 2014, sebagian besar (61,2%) tergolong usia lanjut yaitu berumur sekitar 48 sampai dengan 60 tahun, mempunyai pengalaman kerja yang cukup lama yaitu antara 15 – 38 tahun (60,2%), pekerjaan sebagai penyuluh masih didominasi oleh laki-laki (73,3%), serta mempunyai motivasi belajar yang tinggi (97,2%).

Kata kunci: profil; karakteristik; penyuluh; pendidikan jarak jauh

PROFILE AND CHARACTERISTICS OF AGRICULTURAL EXTENSION WORKERS GRADUATED FROM DISTANCE EDUCATION

ABSTRACT. This article was intended to analyze the profile and individual characteristics of agricultural extension workers. The profile considered their regional centers distribution, areas of interest, work status and its type, as well as their year graduated from UT. While individual characteristics were seen from age, work experience, gender, and the motivation to learn. The study population is a graduate educator SI Agribusiness Open University. The sample was UT alumnus extension totaling 206 graduates, came from Bengkulu region, Bogor, Jakarta, Jambi, Pontianak, Samarinda, and Serang. All regions were selected in consideration of an area with a considerable number of graduates. To elaborate the research, an in-depth interviews were conducted against several key informants. The findings indicated that agricultural extension workers graduated from UT distributed in 11 regional centers throughout Indonesia, with the area of interest mostly in agriculture, and work as extension workers who were majority graduated from UT in 2006-2014. Most of them (61.2%) was categorized as 48 to 60 years old, has a long working experience between 15-38 years (60.2%), dominated by men (73.3%), and has a high learning motivation (97.2%).

Key words: profile; characteristics; agricultural extension worker; distance education

PENDAHULUAN

Belajar pada hakikatnya adalah suatu proses yang menyebabkan terjadinya atau berubahnya tingkah laku (dalam arti luas) melalui pengalaman. Belajar merupakan proses dasar dari perkembangan hidup manusia. Dengan belajar, manusia melakukan perubahan kualitatif secara individual sehingga tingkah lakunya berkembang. Semua aktivitas dan prestasi hidup manusia tidak lain adalah hasil belajar.

Karakteristik Individu merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan proses belajar seseorang, tidak terkecuali bagi seorang penyuluh. Woolfolk, (2013), menyebutkan bahwa karakteristik individu adalah ciri-ciri yang dimiliki individu sepanjang hidupnya, meliputi faktor kognitif dan karakteristik lain yang dimiliki individu, yang menentukan dalam proses belajar. Keberhasilan belajar sangat tergantung kepada keadaan individu yang melakukan kegiatan

belajar. Berkaitan dengan itu, Klausmeier dan Goodwin (1975) juga menyatakan bahwa learner characteristic (karakteristik individu) merupakan peubah terpenting yang mempengaruhi keberhasilan proses belajar.

Karakteristik individu penyuluh tersebut diantaranya meliputi umur, pengalaman kerja, jenis kelamin, dan motivasi belajar. Umur adalah faktor psikologis yang berpengaruh terhadap proses belajar dan efisiensi belajar langsung maupun tidak langsung. Umur dapat memberikan pengalaman seseorang. Pengalaman adalah sumber belajar. Orang yang lebih banyak pengalaman akan lebih mudah mempelajari sesuatu (Sitorus, 2009). Jenis kelamin adalah perbedaan fisik seseorang yang ditentukan secara biologis. Masa kerja adalah keahlian atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang pada suatu bidang pekerjaan yang diperoleh dengan belajar dalam suatu kurun waktu tertentu yang tentunya dilihat dari kemampuan intelegensi, baik pengalaman yang berasal dari luar maupun dari dalam organisasi (Sitorus, 2009). Motivasi, baik yang berasal

dari dalam diri sendiri (motivasi intrinsik) maupun yang berasal dari luar diri seseorang (motivasi ekstrinsik) juga dapat mempengaruhi keberhasilan belajar seseorang, karena motivasi merupakan usaha yang dilakukan seseorang untuk menimbulkan dorongan belajar.

Universitas Terbuka sebagai perguruan tinggi yang menerapkan sistem belajar terbuka dan jarak jauh, yang mahasiswanya terdiri dari beragam usia, jenis kelamin, pengalaman kerja, maupun motivasi tentunya harus memperhatikan faktor-faktor tersebut agar dapat memberikan layanan belajar yang optimal sesuai karakteristik individu mahasiswanya. Oleh karena itu, sejauhmana profil karakteristik individu penyuluh sebagai mahasiswa UT merupakan hal penting untuk dikaji. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan profil adalah sebuah gambaran singkat tentang penyuluh yang menjadi mahasiswa perguruan tinggi jarak jauh. Sedangkan yang dimaksud dengan karakteristik adalah ciri-ciri tertentu yang membedakan antar mahasiswa.

Tulisan ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi profil lulusan, ditinjau dari segi asal UPBJJ-UT, bidang minat, status pekerjaan, dan tahun lulus, serta (2) menganalisis karakteristik individu penyuluh dalam pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh, khususnya dalam hal umur, masa kerja, jenis kelamin, serta motivasi belajar.

METODE

Rancangan penelitian ini adalah *exploratory research*, yaitu penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik penyuluh lulusan S1 Agribisnis UT. Yang menjadi responden penelitian ini adalah penyuluh pertanian alumni UT yang berjumlah 206 lulusan, berasal dari wilayah Bogor, Jakarta, Serang, Jember, Jambi, Bengkulu, Pekanbaru, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Kupang. Semua wilayah tersebut dipilih dengan pertimbangan merupakan daerah dengan jumlah lulusan yang cukup banyak. Untuk memperkaya hasil penelitian, wawancara mendalam (*Indepth Interview*) juga dilakukan kepada beberapa informan kunci. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner melalui survei, serta wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara. Data sekunder diperoleh melalui pengumpulan dokumentasi. Data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan analisis statistika deskriptif, sedangkan informasi kualitatif dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Responden

Penyuluh yang menjadi responden penelitian tersebar di 11 wilayah Unit Program Belajar Jarak Jauh-Universitas Terbuka (UPBJJ-UT). Jumlah responden terbanyak berasal dari wilayah Samarinda yaitu 62 orang

atau 30 persen dari total responden. Hal ini dapat dimaklumi mengingat wilayah Samarinda memiliki jumlah penyuluh yang cukup banyak yang tersebar di pelosok, sedangkan jumlah responden yang paling sedikit berasal dari Kupang dan Pekanbaru, yang memang memiliki jumlah penyuluh yang relatif sedikit.

Tabel 1. Jumlah Penyuluh Pertanian menurut Wilayah UPBJJ

No.	UPBJJ	Jumlah
1.	Bengkulu	62
2.	Bogor	4
3.	Jakarta	5
4.	Jambi	16
5.	Jember	2
6.	Kupang	1
7.	Palangkaraya	2
8.	Pekanbaru	1
9.	Pontianak	26
10.	Samarinda	55
11.	Serang	30
12.	Tidak menjawab	2
Total		206

Ditinjau dari segi jenis kelamin, maka kebanyakan responden adalah laki-laki yaitu sebesar 73,3 persen, sedangkan perempuan hanya 26,7 persen. Untuk bidang minat yang dominan adalah pertanian, diikuti oleh perikanan, sedangkan peternakan adalah yang paling kecil. Adapun penyuluh yang mengambil bidang minat pertanian lebih banyak dibandingkan dengan peternakan, hal ini terkait dengan keaneka ragaman hayati yang ada di Indonesia, sebagai contoh adanya tanaman pangan, tanaman perkebunan, tanaman obat dan sebagainya, sehingga diperlukan penyuluh yang dapat memotivasi sekaligus memberi penyuluhan kepada petani dalam hal budidaya, panen dan pascapanen tanaman tersebut. Sedangkan alasan penyuluh lebih tertarik ke bidang minat perikanan, disebabkan dua pertiga luas Indonesia terdiri dari lautan atau perairan. Apalagi pada saat ini komoditas laut atau perikanan menjadi primadona, dimana hasil lautnya banyak diekspor ke manca negara. Untuk itu diperlukan seorang penyuluh yang mampu menjadi mitra nelayan untuk membuka wawasan, dan informasi tentang segala hal yang terkait dengan perikanan. Pada Tabel 2 ini juga disajikan Status pekerjaan responden. lulusan S1 Agribisnis UT, yang paling dominan adalah sebagai penyuluh yaitu lebih dari 80 persen, sedangkan sisanya adalah non penyuluh. Tingginya persentase pekerjaan responden sebagai penyuluh, karena UT merupakan perguruan tinggi yang memberikan keleluasaan dengan menerima mahasiswa dengan atau tanpa harus bertatap muka, tidak ada batasan usia dalam melakukan proses belajar. Dengan pemberian keleluasaan ini, para penyuluh

yang sebagian sudah berusia lanjut, dan masih aktif bekerja merasa sangat terbantu dengan proses pembelajaran di UT. Walaupun demikian lulusan Agribisnis UT ada yang bukan berasal dari penyuluh, biasanya bervariasi ada yang pegawai swasta, wiraswasta, ataupun mahasiswa lulusan SMA yang belum mempunyai pekerjaan. Sebaran responden berdasarkan bidang minat dan status pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Sebaran Bidang Minat Penyuluh Pertanian Status Kerja, Jenis Pekerjaan

No.	Aspek Keragaan	N	%
<i>1. Bidang minat</i>			
1.	Pertanian	176	85,4
2.	Peternakan	11	5,3
3.	Perikanan	17	8,3
4.	Tidak menjawab	2	1,0
Total		206	100,0
<i>2. Status pekerjaan</i>			
1.	Penyuluh	165	80,1
2.	Non Penyuluh	36	17,5
3.	Tidak menjawab	5	2,4
Total		206	100,0

Salah satu profil responden yang menarik adalah jenis pekerjaan yang cukup bervariasi, namun yang paling banyak adalah jenis pekerjaan sebagai penyuluh dengan berbagai jenjang jabatannya seperti yang terlihat pada Tabel 3. Pekerjaan sebagai penyuluh merupakan pekerjaan yang mulia. Keberhasilan suatu inovasi atau meningkatnya suatu usahatani, serta dalam menentukan pilihan teknologi usaha tani selain ditentukan oleh petaninya, biasanya penyuluh ikut terlibat di dalamnya, sehingga dapat dikatakan peran penyuluh tidak dapat diabaikan. Sebagaimana menurut Siata (2016), pembaharuan teknologi tidak terlepas dari kemampuan petani dalam menerapkan teknologi pertanian secara efektif dan penyuluh pertanian bertindak sebagai jembatan dan sekaligus penghantar teknologi. Sedangkan menurut Heryanto dkk (2016), peran penyuluh menjadi sangat penting bagi penentu keputusan yang bersifat pilihan dan kolektif.

Satu lagi, profil responden yang menarik untuk disimak adalah tahun responden belajar di UT dan tahun lulus mereka. Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa ada responden yang belajar di UT sejak tahun 1997, sedangkan tahun lulus yang paling awal adalah tahun 2002. Tahun lulus yang paling anyar adalah tahun 2016. Hal ini bisa dimaklumi, karena para responden belajar sambil bekerja. Jadi ada yang bisa lulus tepat waktu dengan waktu tempuh 5 tahun, ada pula yang lebih dari 5 tahun. Pada umumnya yang bisa tepat waktu adalah mahasiswa yang mempunyai kelompok belajar, dan yang rajin untuk mengakses bahan ajar baik dengan menggunakan bahan ajar cetak maupun non cetak.

Tabel 3. Jenis Pekerjaan Penyuluh Pertanian

No.	Pekerjaan	Jumlah (orang)
	Anak Buah Kapal Pengawas Perikanan	1
	Admin Agronomi	1
	Administrasi	1
	Penyuluh	154
	Honorer	1
	Honorer Dinas Pertanian dan Peternakan	1
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian	1
	Kepala bidang	1
	Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional	1
	Manager	1
	Operator Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan	1
	Pegawai Swasta	1
	Pelatih baja	1
	Penerbit Dokumen Dinas Kehutanan	1
	Pengawas benih tanaman	1
	Staf	12
	Staf Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian	1
	Staf Dinas Peternakan	1
	Staf Dinas Pertanian dan Peternakan	2
	Staf Teknis	1
	Staf Teknis Diklat Aparatur Sukamandi Jabar	1
	Staf Teknis Pertanian Tanaman Pangan	1
	Wiraswasta	1
	Tidak menjawab	19
Total		206

Tabel 4. Tahun Masuk dan Tahun Lulus Penyuluh Pertanian

Tahun	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1997	1	
1999	16	
2000	1	
2001	6	
2002	2	6
2003	4	3
2004	20	1
2005	14	
2006	28	25
2007	9	18
2008	22	7
2009	8	7
2010	19	14
2011	21	19
2012	18	21
2013		18
2014		27
2015		16
2016		18
Tidak menjawab	17	6
Total	206	206

Karakteristik Individu

Pada sebaran responden pertama berdasarkan umur tersaji bahwa penyuluh yang merupakan lulusan dari UT sebagian besar (61,2%) tergolong tua yaitu berumur sekitar 48 sampai dengan 60 tahun (Tabel 5). Hal ini sesuai dengan proses pembelajaran di UT yang mengungkap prinsip pendidikan sepanjang hayat. UT sebagai suatu lembaga pendidikan, tidak mempersyaratkan umur sebagai hambatan dalam belajar. Oleh karena UT tidak mensyaratkan usia dalam proses pembelajarannya, maka sebagian besar penyuluh yang sudah bekerja menimba ilmu di UT untuk keperluan promosi atau kenaikan jenjang karier ke tingkat yang lebih tinggi. Sebenarnya ada hubungan antara umur dan pancaindra seseorang. Semakin tua umur seseorang, maka akan semakin menurun ketajamannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Lunandi (1982), yang menyatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi orang dewasa ketika berada dalam situasi belajar yaitu mencakup faktor internal dan eksternal. Faktor internal tersebut meliputi umur, pendengaran dan penglihatan. Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Maulana (2012), umur seseorang sangat mempengaruhi faktor pengetahuan, karena di umur tersebut seseorang akan semakin mudah memanfaatkan waktu untuk mengikuti segala kegiatannya. Dalam mengantisipasi penurunan ketajaman berpikir, maka proses pembelajaran di UT dibantu dengan adanya fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh UT, diantaranya dengan penyediaan bahan ajar cetak yang juga dilengkapi dengan multimedia yang lengkap seperti misalnya adanya bahan ajar yang disampaikan dengan menarik melalui radio, video, televisi, dan sumber terbuka yang bisa diakses melalui *website* UT dengan bantuan internet.

Tabel 5. Sebaran Penyuluh Pertanian Berdasarkan Kategori Umur

Umur	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Muda (21-34)	24	11,6
Dewasa (35-47)	56	27,2
Lanjut (48-60)	126	61,2
Total	206	100,0

Untuk umur responden berdasarkan aspek keragaan umur dapat dilihat sebarannya pada Tabel 6. Umur responden yang paling muda adalah 21 tahun, sedangkan yang berusia lanjut adalah 60 tahun.

Tabel 6. Sebaran Responden Berdasarkan Aspek Keragaan Umur

Aspek Keragaan	Statistik
<i>Umur (tahun)</i>	
Min.	21
Maks.	60
Rata-rata	47,10
Std. Deviasi	9,40

Pengalaman kerja

Pengalaman kerja menunjukkan sejauh mana penguasaan seseorang terhadap bidang pekerjaan yang selama ini ditekuninya. Pada umumnya pengalaman kerja diukur dengan melihat seberapa lama waktu yang dihabiskan tenaga kerja pada suatu bidang pekerjaan tertentu (Sulaeman, 2014). Tabel 7 menyajikan data bahwa sebagian besar responden (39,8 persen) mempunyai pengalaman kerja yang rendah. Pada tahun-tahun terakhir muncul kecenderungan bahwa mahasiswa yang masuk UT berasal dari lulusan SMA atau sederajat atau baru mulai merintis kerja, sehingga tampak bahwa berdasarkan pengalaman kerja, tergolong rendah (39,8 persen). Namun, bila dihubungkan dengan umur penyuluh yang sebagian besar tergolong tua, maka diduga mahasiswa dengan umur tersebut tersebar dengan pengalaman kerja yang sedang dan tinggi.

Tabel 7. Sebaran Penyuluh Pertanian Berdasarkan Kategori Pengalaman Kerja

Pengalaman Kerja	N	
Tinggi (27 – 38)	64	31,1
Sedang (15 – 26)	60	29,1
Rendah (2 – 14)	82	39,8
Total	206	100,0

Ditinjau dari masa kerja, diketahui bahwa masa kerja yang paling rendah adalah 3 tahun, sedangkan yang paling lama adalah 38 tahun (Tabel 8). Masa kerja yang rendah diduga berasal dari mahasiswa bidikmisi yang memang belajar di UT langsung setelah lulus Sekolah Menengah Atas, sedangkan masa kerja yang cukup lama diduga berasal dari para penyuluh senior yang sudah lama bekerja di bidang penyuluhan. Pengalaman kerja yang dimiliki oleh penyuluh, memberi keuntungan bagi para penyuluh yang melakukan proses belajar di PS Agribisnis UT, karena mereka mendapatkan ilmunya di bangku kuliah sejalan dengan kegiatan, masalah, maupun solusi masalah yang dilakukan dalam pekerjaannya. Dengan demikian mereka sebenarnya tidak mengalami kesulitan dalam studinya di UT, karena secara teori didapat pada saat belajar di Program Studi S1 Agribisnis UT dan secara praktik atau lapangan dilakukan dalam pekerjaannya sehari-hari sebagai penyuluh.

Tabel 8. Sebaran Penyuluh Pertanian Berdasarkan Aspek Keragaan Pengalaman Bekerja

Aspek Keragaan	Statistik
<i>Lama bekerja (tahun)</i>	
Min.	3
Maks.	38
Rata-rata	21,7
Std. Deviasi	9,7

Jenis kelamin

Sebaran karakteristik yang ketiga adalah karakteristik penyuluh berdasarkan jenis kelamin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh pertanian lulusan UT sebagian besar berjenis kelamin laki-laki (73,3 persen) (Tabel 9). Hasil penelitian ini juga tidak begitu berbeda dengan hasil penelitian Hubeis (2007), dimana jumlah penyuluh laki-laki lebih besar dari penyuluh perempuan yaitu terdiri dari 83 persen laki-laki, dan 17 persen perempuan. Dengan adanya jumlah penyuluh laki-laki yang lebih besar dari jumlah penyuluh perempuan, mengindikasikan bahwa pekerjaan sebagai penyuluh masih didominasi oleh laki-laki dibanding dengan perempuan. Hal ini diduga, karena pekerjaan penyuluh banyak berinteraksi dengan petani yang ada di lapangan. Di samping itu pekerjaan penyuluh menghendaki aktivitas tinggi yang membawahi beberapa kelompok tani dengan lokasi yang tersebar, sehingga hal tersebut membuat penyuluh berjenis kelamin laki-laki lebih luwes dan leluasa beraktifitas dibandingkan dengan penyuluh berjenis kelamin perempuan. Namun kondisi yang seperti ini tidak menjadikan kendala bagi penyuluh di Indonesia, karena penyuluh laki-laki atau penyuluh perempuan adalah sama, bukan dibedakan karena jenis kelaminnya, namun diukur dari kompetensi dan kinerjanya. Saat ini jumlah Penyuluh Pertanian di Indonesia sebanyak 44.890 orang, terdiri dari 25.734 Penyuluh Pertanian PNS dan 19.156 THL-TBPP. Penyuluh Pertanian tersebut melayani 71.479 desa/kelurahan potensi pertanian, sehingga masih membutuhkan sebanyak 26.589 orang penyuluh pertanian. Kekurangan penyuluh pertanian tersebut antara lain dapat dipenuhi melalui penumbuhan dan pengembangan penyuluh pertanian Swadaya dan Swasta (Siaran Pers Kementerian Pertanian, 2016).

Tabel 9. Sebaran Penyuluh Pertanian Berdasarkan Kategori Jenis Kelamin

Jenis kelamin	jumlah (orang)	Persentase (%)
Laki-laki	151	73,3
Perempuan	55	26,7
Total	206	100,0

Motivasi

Yang menjadi indikator dari motivasi mahasiswa terdiri atas 2 jenis yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri mahasiswa (motivasi intrinsik) dan motivasi yang berasal dari luar diri mahasiswa (motivasi ekstrinsik). Temuan penelitian menunjukkan bahwa, penyuluh lulusan S1 Agribisnis UT (97,2 persen) memiliki tingkat motivasi belajar yang tergolong sedang sampai tinggi (Tabel 10). Hal ini berarti, walaupun usia penyuluh alumni UT rata-rata sudah lanjut, tetapi mereka mempunyai motivasi belajar yang tergolong tinggi. Bila ditelusuri lebih lanjut, tingkat motivasi tersebut mengandung motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Dari aspek motivasi intrinsik, 97,2

persen penyuluh lulusan UT tergolong sedang sampai tinggi, demikian pula halnya dengan motivasi ekstrinsik. Sebagaimana menurut Suprijanto (2007), bahwa beberapa ciri orang dewasa adalah (1) motivasi belajar berasal dari dirinya sendiri, (2) belajar bila pendapatnya dihormati, mengharapkan suasana belajar yang menyenangkan dan menantang, (3) belajar berpusat pada kehidupan nyata, (4) terjadi komunikasi timbal balik dan pertukaran pendapat, (5) mempunyai pendapat, kecerdasan dan cara belajar yang berbeda, dan (6) belajar bagi orang dewasa bersifat unik.

Terkait dengan pendapat Suprijanto (2007), proses pembelajaran di UT memang tepat untuk mahasiswa lulusan S1 Agribisnis UT. Beberapa persyaratan yang sedikit berbeda dengan di universitas konvensional lainnya, dimana dengan mahasiswa yang belajar di UT tidak dibatasi oleh umur, waktu tempuh belajar, tahun ijazah SLTA, dan lokasi tempat tinggal. Dengan demikian bisa dimaklumi bila para lulusan S1 Agribisnis, sebagian besar telah berusia lanjut, namun tetap memiliki motivasi yang tinggi untuk tetap belajar. Hal ini disebabkan karena suasana belajar yang sesuai untuk mahasiswa dan beberapa kondisi di UT yang sesuai dengan lulusan S1 Agribisnis sebagai orang dewasa. Sebagai contoh proses belajar mahasiswa yang bisa dilakukan antara mahasiswa dengan tutornya selain dengan menggunakan TTM (tutorial tatap muka) juga dapat dilakukan dengan tutorial *online* (Tuton). Khususnya dengan tuton, para mahasiswa lulusan S1 Agribisnis di pelosok dunia, bisa berkomunikasi dengan tutornya membahas dan memecahkan masalah tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat.

Pada akhirnya dengan motivasi yang tinggi untuk belajar, para responden dapat menyelesaikan S1 Agribisnis UT, yang nantinya digunakan sebagai syarat untuk kenaikan jabatan atau promosi jabatan sebelum masuk waktu pensiun.

Tabel 10. Sebaran Penyuluh Pertanian Berdasarkan Kategori Motivasi Belajar

Motivasi Belajar	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Tinggi	100	48,6
Sedang	100	48,6
Rendah	6	2,8
Total	206	100,0

Berikut ini adalah hasil wawancara mendalam terkait umur penyuluh. Responden menyatakan bahwa umur penyuluh sudah lanjut, berkisar antara 50 sampai 55 tahun. Sebentar lagi mereka pensiun. Jika kebijakan umur pensiun adalah 56 atau 58 tahun maka mereka akan pensiun antara 3 sampai 6 tahun lagi. Terkait dengan pengalaman kerja, umumnya mereka sudah senior dengan masa kerja antara 25 - 32 tahun. Mereka merupakan penyuluh di bidang pertanian dan perkebunan. Jenis kelamin penyuluh umumnya didominasi oleh laki-laki dibandingkan

perempuan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat pekerjaan sebagai penyuluh adalah pekerjaan yang banyak berada di lapangan yang umumnya lebih banyak dilakukan oleh laki-laki. Terkait dengan motivasi belajar, rupanya adalah faktor ijazah, karena ijazah yang mereka peroleh dari UT dapat dipergunakan untuk penyesuaian pangkat di tempat kerja. Untuk itu mereka merasa belajar di UT bermanfaat untuk peningkatan karir mereka.

SIMPULAN

Penyuluh lulusan UT dalam penelitian berasal dari 11 wilayah UPBJJ-UT, dengan bidang minat terbanyak adalah pertanian. Kebanyakan mereka bekerja sebagai penyuluh, dan kebanyakan lulus dari UT berkisar antara tahun 2006 hingga 2014. Sebagian besar tergolong berusia lanjut yaitu berumur sekitar 48 sampai dengan 60 tahun, artinya mereka hampir memasuki usia pensiun. Tentunya hal ini patut menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan untuk merekrut penyuluh baru sebagai pengganti mereka yang pensiun. Umur lulusan paling muda adalah 21 tahun, dan yang paling tua adalah 60 tahun., mempunyai pengalaman kerja yang cukup lama. Pengalaman kerja yang paling singkat yaitu 3 tahun dan yang paling lama adalah 38 tahun. Jenis kelamin sebagian besar responden adalah laki-laki. Selain itu penyuluh lulusan S1 Agribisnis UT cukup mempunyai motivasi belajar yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Heryanto, M.A., Sukayat, Y., & Supyandi, D. (2016). Model perilaku petani dalam adopsi system usahatani padi organik: paradoks sosial-ekonomi-lingkungan. *Sosiohumaniora*, 18 (2), 159165. <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/9951/6480>
- Hubeis, AV. (2008). Motivasi, kepuasan dan produktivitas kerja penyuluh lapangan peternakan. *Media Peternakan*, 31,(1), 71-80. Diakses melalui medipet.journal.ipb.ac.id/index.php/mediapeternakan/article/download/1120/292
- Klausmeier, H.J., dan Goodwin, W. 1975. *Learning and Human Abilities : Educational Psychology* (Edisi 4). New York : Harper & Row, Publishers, Inc.
- Lunandi, A.G. 1982. *Pendidikan Orang Dewasa: Sebuah Uraian Praktis untuk Pembimbing, Penatar, Pelatih dan Penyuluh Lapangan*. Jakarta: Gramedia.
- Maulana, R. 2012. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pengetahuan tentang pap smear pada wanita usia subur (WUS) di Pemukiman Lamnga Kecamatan mesjid raya Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. Diakses melalui http://www.ejournal.uui.ac.id/jurnal/RENGGALIS_MAUlina-8ro-jurnal_renggalis.pdf
- Siaran Pers Kementerian Pertanian. 2016. Diakses melalui <https://www.facebook.com/kementanRI/posts/1774943096122699:0> pada 13 Pebruari 2017.
- Siata, R. 2016. Faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam penerapan benih padi varietas ciherang di desa Pudak kecamatan Kumpeh Ulu. *Jurnal Sosiohumaniora*, 18(3), 240 – 247. Diakses melalui <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/12801/6506>.
- Sulaeman, A. 2014. Pengaruh Upah dan Pengalaman Kerja terhadap Produktivitas Karyawan Kerajinan Ukiran Kabupaten Subang. *Jurnal Trikonomika*, 13(1), 91-100 Diakses melalui <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=175485&val=5913&title=Pengaruh%20Upah%20dan%20Pengalaman%20Kerja%20terhadap%20Produktivitas%20Karyawan%20Kerajinan%20Ukiran%20Kabupaten%20Subang>
- Suprijanto. 2007. *Pendidikan Orang Dewasa*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Woolfolk, A.E. 2013. *Educational Psychology*. Edisi (12). Boston: Allyn and Bacon.

KESIAPAN PEMEKARAN “KABUPATEN RENAH INDOJATI” DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Astika Ummy Athahirah¹, dan Rossy Lambelanova².

¹ Asisten Dosen Fakultas Politik Pemerintahan IPDN

² Dosen Pascasarjana IPDN

Email: astikathahirah@gmail.com,

ABSTRAK. Kesulitan dalam mendapatkan akses pelayanan publik menjadi permasalahan utama yang mendasari tuntutan masyarakat di bagian selatan Kabupaten Pesisir Selatan untuk melakukan pemekaran daerah. Sebagaimana diisyaratkan desentralisasi, pemekaran daerah diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan publik yang memadai. Namun hingga saat ini, pemekaran tersebut belum dapat diwujudkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesiapan pemekaran “Kabupaten Renah Indojadi” dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemekaran tersebut dengan menggunakan teori pemekaran oleh (Fitriani, Hofman, & Kaiser, 2005) Penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan diantaranya Bupati Pesisir Selatan, anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, camat pada masing-masing kecamatan dan beberapa tokoh adat serta masyarakat. Selain itu, penulis juga melakukan observasi dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menemukan beberapa kesimpulan bahwa kesiapan pemekaran “Kabupaten Renah Indojadi” belum maksimal karena belum ada Peraturan Pemerintah sebagai aturan taktis operasional yang mengatur mengenai pemekaran daerah. Pemekaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong diantaranya faktor sosial, ekonomi dan politik sedangkan faktor budaya dan sejarah menjadi faktor penting yang mempengaruhi pemekaran “Kabupaten Renah Indojadi”.

Kata kunci: Desentralisasi; Kesiapan; Pemekaran daerah.

THE READINESS OF “RENAH INDOJATI REGENCY” PROLIFERATION IN WEST SUMATERA

ABSTRACT. Facing difficulties to deliver public service to its people in the peripheral area, the government of Pesisir Selatan, West Sumatra asked the central government to form another region from its area. As decentralization has explained it, The purpose of this is to maximize the quality of public service. However, the demand has not been fulfilled by the central government until now. This research aimed to know and analyze the “Renah Indojadi” proliferation and influenced factor of proliferation by using (Fitriani et al., 2005) 's theory. The author interviewed the regent, the representatives of local government, some residents, and stakeholders while also tried to get more information from the media and documentation data. As a result, the author found that the readiness hasn't maximized because the policy implementation had some problems that are needed to be addressed. Besides there is no regulation that could back up the policy enactment. This proliferation is not only caused by the social, economic and politics, but also historical and cultural become important factors that caused proliferation.

Key words: Decentralization; Readiness; Regional Proliferation.

PENDAHULUAN

Penerapan desentralisasi ditujukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, karena desentralisasi mampu mengurangi bertumpuknya kekuasaan pada pemerintahan pusat. (Cheema & Rondinelli, 1983) juga mendefinisikan desentralisasi sebagai “*the transfer of planning, decision-making, or administrative authority from the central government to its field organizations, local administrative units, semi-autonomous and parastatal organizations, local governmental, or nongovernmental organizations*”. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam desentralisasi, tidak semua urusan diberikan kepada daerah, tetapi terdapat beberapa urusan yang kewenangannya diberikan kepada daerah. Selanjutnya (Sulistiowati, 2014) menyatakan bahwa:

Pada perkembangan lebih lanjut dibedakan menjadi dua yaitu desentralisasi administratif dan desentralisasi politik. Desentralisasi administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di daerah. Sedangkan Desentralisasi politik menyangkut delegasi wewenang pembuatan keputusan

tertentu mengenai sumber-sumber daya yang diberikan kepada badan-badan pemerintah regional dan lokal dalam rangka mengurus kepentingannya.

Pengertian desentralisasi tersebut berkaitan dengan proses pembentukan daerah otonomi. Sebagai konsekuensi dari penerapan desentralisasi di Indonesia adalah munculnya konsep otonomi daerah. Otonomi daerah di Indonesia menyebabkan wewenang dan rentang kendali pemerintah pusat berkurang, sehingga diharapkan terciptanya percepatan pertumbuhan dan pembangunan di daerah, menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia dan mendorong terciptanya kemandirian daerah dalam upaya optimalisasi pengembangan potensi daerah.

Dampak dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menyebabkan banyaknya daerah di Indonesia yang saling berlomba-lomba melakukan pemekaran daerah. Berdasarkan data yang diperoleh melalui (Kementerian Dalam Negeri, 2016) menyatakan bahwa “jumlah provinsi di Indonesia sebanyak 34 provinsi, total kabupaten dan kota sebanyak 514 yang terdiri dari 416 kabupaten dan 98 kota”. Selain itu, menurut data yang juga dirilis Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri per Juni 2009, jumlah daerah otonom selama

peralihan pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mencapai 530 daerah atau meningkat sebesar 68,79% dibandingkan pada akhir masa orde baru. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sejak bergulirnya era otonomi daerah, semakin banyak daerah yang melakukan pemekaran daerah.

Kebutuhan untuk segera melakukan pemekaran daerah juga dirasakan oleh Kabupaten Pesisir Selatan dengan memekarkan daerahnya dan membentuk kabupaten baru dengan penamaan yang telah disepakati yaitu "Kabupaten Renah Indojati". Upaya pemekaran ini telah dimulai sejak tahun 2000, hingga saat ini pemekaran tersebut belum juga dapat diwujudkan. Pemekaran "Kabupaten Renah Indojati" merupakan hasil konsensus seluruh masyarakat di 3 (tiga) kecamatan induk bagian selatan Kabupaten Pesisir Selatan mewakili presidium yang telah ditetapkan berdasarkan hasil konsensus masyarakat. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kabupaten terluas kedua setelah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan terpanjang di Provinsi Sumatera Barat. (BPS Pesisir Selatan, 2015) menyatakan bahwa "Kabupaten Pesisir Selatan memiliki luas wilayah 5.749,89 km² dan jumlah penduduk lebih kurang 446.479 jiwa." Dengan luas wilayah dan jarak yang jauh dari ibu kota kabupaten serta kondisi geografis yang memanjang dari utara ke selatan menyebabkan masyarakat kesulitan mengakses menuju ibu kota kabupaten yang terletak di Painan sehingga dibutuhkan waktu berjam-jam untuk sampai di pusat ibu kota.

Sulitnya akses pelayanan yang memadai dan berkualitas ditingkat kecamatan menyebabkan masyarakat harus berbondong-bondong menuju pusat ibu kota kabupaten di Painan. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya penyediaan fasilitas umum seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum lainnya. Alasan tersebut menyebabkan pemekaran "Kabupaten Renah Indojati" sebagai sebuah kebutuhan yang mendesak dan harus segera direalisasikan. Jarak tempuh yang jauh menuju pusat ibukota disertai dengan keterbatasan sarana dan prasarana fasilitas umum. Berbagai fenomena yang terjadi dilapangan tersebut dapat disusun secara spesifik kedalam pertanyaan penelitian (*Research Questions*) sebagai berikut: "bagaimana kesiapan pemekaran "Kabupaten Renah Indojati" di Provinsi Sumatera Barat dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemekaran "Kabupaten Renah Indojati" di Provinsi Sumatera Barat. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesiapan pemekaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemekaran "Kabupaten Renah Indojati" tersebut.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode eksploratif. (Manerikar & Manerikar, 2014)

menyatakan bahwa *eksplorative research* dilakukan:

When a researcher has a limited amount of experience with or knowledge about a research issue, Exploratory Research is useful. It ensures that a more rigorous, more conclusive future study will begin with an inadequate understanding of the nature of the problem at hand. Usually, exploratory research provides greater understanding of a concept or crystallizes a problem. Exploratory research is initial research conducted to clarify and define the nature of a problem.

Penelitian eksplorasi sebagaimana dijelaskan, digunakan jika peneliti belum memiliki pengetahuan atau gambaran yang jelas tentang situasi masalah atau kurang memiliki informasi mengenai masalah yang terjadi. Sehingga dapat diketahui bahwa penelitian eksploratif ini bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru yang dapat berupa gejala atau fenomena baru dan fakta-fakta yang baru.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan terdiri dari wawancara *semi-structured* terhadap 23 informan yang dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling*, observasi dan dokumentasi. Dokumentasi dalam pengamatan ini penulis peroleh dari Peraturan Perundang-Undangan mengenai penataan daerah, Proposal Pembentukan Daerah Otonom Baru "Kabupaten Renah Indojati", Naskah Akademis Pemekaran "Kabupaten Renah Indojati", Peta Wilayah Pemekaran "Kabupaten Renah Indojati" dan dokumen lainnya.

Analisis data yang penulis lakukan terdiri dari penyiapan data yang akan dianalisis, analisis data dan interpretasi data sebagaimana (Marczyk, DeMatteo, & Festinger, 2005) menyatakan bahwa "*In most types of research studies, the process of data analysis involves the following three steps: (1) preparing the data for analysis, (2) analyzing the data, and (3) interpreting the data (i.e., testing the research hypotheses and drawing valid inferences).*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesiapan pemekaran "Kabupaten Renah Indojati" dilihat dari maksimal atau tidaknya kesiapan pemekaran yang telah dilakukan. Hasil wawancara dengan beberapa informan menjelaskan bahwa kesiapan pemekaran "Kabupaten Renah Indojati" dilihat dari terpenuhinya persyaratan dasar dan persyaratan administratifnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, persyaratan tersebut telah terpenuhi. Terpenuhinya persyaratan tersebut juga dilihat dari penghitungan 4 faktor utama sebagai syarat pembentukan DOB yaitu kependudukan, ekonomi, potensi daerah dan kemampuan keuangan. Penghitungan keempat faktor tersebut telah dilakukan dan telah terpenuhi

sehingga pembentukan calon DOB “Kabupaten Renah Indojati” memperoleh skor total 466 dengan kategori sangat mampu.

Beberapa persyaratannya mengalami perubahan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Dalam Undang-undang tersebut, secara teknis, persyaratan pemekaran daerah belum diatur seiring dengan belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah sebagai aturan taktis operasional dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Sehingga belum dapat diketahui persyaratan apa saja yang belum terpenuhi dan mekanisme yang harus dilalui oleh suatu daerah yang telah dan akan diusulkan menjadi sebuah DOB. Hal ini seiring dengan pemberlakuan moratorium pemekaran daerah sehingga menyebabkan pemekaran daerah terhenti.

Pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” harus melalui pentahapan pembentukan sebuah DOB. Tahapan pembentukan DOB yang telah dilaksanakan hanya sampai pada tahapan verifikasi oleh tim dari Kementerian Dalam Negeri sehingga belum seluruh tahapan dapat dilaksanakan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan harus dilengkapi berkas-berkas persyaratan yang belum terpenuhi serta pembaharuan beberapa dokumen persetujuan yang penjelasannya disesuaikan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah. Beberapa persyaratan dasar juga perlu dilakukan pemutakhiran data untuk mendapatkan data yang terbaru seperti data kependudukan, data potensi daerah, ekonomi, dan kemampuan keuangan dan data lainnya yang sangat diperlukan.

Kesiapan lainnya yang telah dilakukan adalah dengan ditetapkannya lokasi pusat pemerintahan dan ibu kota Calon DOB “Kabupaten Renah Indojati” di Nagari Bukit Buai Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dengan luas sekitar ± 200 Ha. Namun di lokasi tersebut belum dapat dibangun gedung perkantoran seiring belum diresmikannya “Kabupaten Renah Indojati” sebagai Calon Daerah Persiapan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesiapan pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” dilihat dari kesiapan administrasi berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 belum maksimal karena kesiapan administrasi merupakan faktor penting dan menjadi penilaian pertama yang mendasari pemekaran daerah.

Kesiapan ditinjau secara teori sebagaimana dijelaskan Drever dalam (Slameto, 2010a) bahwa “*Readiness is preparedness to respon or react*”. Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon/jawaban. Selanjutnya (Slameto, 2010b) juga mendefinisikan “kesiapan adalah keseluruhan kondisi yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban didalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Penyesuaian kondisi pada saat akan berpengaruh pada kecenderungan untuk memberi respon”. Sehingga kesiapan dapat diartikan sebagai kondisi yang telah dimiliki dalam mempersiapkan sesuatu secara mental dan fisik untuk mencapai tujuan tertentu. Kesiapan

pemekaran dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi fisik dan mental yang telah dimiliki dalam mempersiapkan sebuah pemekaran. Kesiapan pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” dilihat dari kondisi fisik dan mentalnya saat ini, apakah sudah siap untuk segera dimekarkan.

(Slameto, 2010b) menjelaskan bahwa “setidaknya ada 3 (tiga) aspek yang mempengaruhi kesiapan yaitu: kondisi fisik, mental dan emosional, kebutuhan/motif tujuan serta keterampilan, pengetahuan, dan pengertian lain yang telah dipelajari”. Berdasarkan teori tentang kesiapan tersebut dan hasil pengamatan penulis langsung dilapangan dapat dijelaskan bahwa kesiapan pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” belumlah memenuhi aspek tersebut, hal ini dapat dilihat dari kondisi saat ini bahwa:

- 1) Secara fisik, kesiapan pemekaran baru sebatas perencanaan seperti rencana pembangunan pusat pemerintahan dan ibukota Calon Persiapan DOB “Kabupaten Renah Indojati” yang berlokasi di Bukit Buai, Kecamatan Basa Ampek Balai dengan lahan seluas ± 200 hektar, karena lokasinya yang terletak di tengah-tengah wilayah calon DOB “Kabupaten Renah Indojati”. Selain itu, pembangunan secara fisik belum banyak dilakukan kecuali untuk pembangunan kantor kecamatan pemekaran.
- 2) Secara administrasi, kesiapan pemekaran belum dapat terpenuhi seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan belum adanya PP tentang Penataan Daerah yang menjadi aturan taktis operasional dalam penataan daerah.
- 3) Pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” merupakan sebuah kebutuhan yang sangat mendesak dengan kondisi geografis saat ini sangat menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Sehingga pemekaran ini sudah memiliki motif tujuan yang sangat jelas yaitu untuk mendapatkan pelayanan yang efektif dan efisien.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemekaran “Kabupaten Renah Indojati”

a. Faktor Pendorong

Pemekaran juga dikenal dengan istilah proliferasi. Menurut (Fitriani *et al.*, 2005) terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya proliferasi yaitu faktor sosial, faktor ekonomi dan faktor politik. Teori ini digunakan penulis dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemekaran “Kabupaten Renah Indojati”. Adapun faktor-faktor tersebut yaitu:

1. Faktor Sosial; yakni, ketika sebuah daerah yang kaya yang biasanya memiliki sumber daya keuangan serta kapasitas personal yang baik merasa tidak puas dengan layanan dan kinerja “daerah induknya”, maka mereka berusaha untuk memisahkan diri dari daerah induknya menjadi sebuah daerah otonom baru dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dengan mengurangi rentang kendali pelayanan yang disebabkan oleh terlalu luasnya wilayah daerah induk serta besarnya populasi

- penduduk, sehingga lebih efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Faktor Ekonomi; ialah dimana sebagian besar daerah miskin yang memiliki keterbatasan keuangan/dana serta keterbatasan personil akan bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Dimana ada harapan yang tinggi dari sebagian besar daerah otonom baru untuk mendapatkan tambahan anggaran dari pemerintah pusat melalui transfer dana hibah umum (Dana Alokasi Umum) untuk membayar kantor baru dan gaji pejabat publik baru.
 3. Faktor Politik; yaitu politisi dan lain-lain memiliki kesempatan besar untuk menjadi pemimpin baru dan anggota lembaga legislatif baru di daerah yang baru memekarkan diri dan bahkan birokrat akan mendapatkan promosi di daerah yang baru dimekarkan terutama bagi mereka yang mungkin gagal bersaing dan berkompetisi di daerah induknya.

Teori mengenai faktor-faktor pendorong pemekaran daerah yang dijelaskan (Fitriani *et al.*, 2005) yang menjelaskan bahwa pemekaran daerah (proliferasi) disebabkan oleh 3(tiga) faktor yaitu digunakan oleh penulis dalam menjelaskan faktor-faktor pendorong pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” yaitu:

1). Faktor Sosial

Kondisi geografis Kabupaten Pesisir Selatan memanjang dari utara ke selatan ditambah lagi dengan kondisi jalan provinsi yang menghubungkan antar daerah saat ini semakin buruk, banyak jalan berlubang dan rusak. Jauhnya jarak tempuh dari daerah yang berada di kecamatan yang terdapat pada Calon DOB “Kabupaten Renah Indojati” menuju ibukota kabupaten di Painan yaitu 106-176 Km dan ditempuh dalam waktu 3-6 jam sangat menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan teori *Span of control* (rentan kendali) yang merupakan bagian dari perkembangan teori administrasi klasik untuk menciptakan organisasi yang efisien. Organisasi yang efisien dijelaskan (Achmad, 2011) meliputi “spesifikasi tentang hubungan yang spesialis, hubungan-hubungan antara para manajer dan departemen dinyatakan secara jelas”. Dalam keterkaitannya dengan pemerintahan daerah, teori ini sangat dibutuhkan untuk menentukan jumlah ideal suatu pegawai dan atasan yang bertanggungjawab pada masing-masing bagiannya. Sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan efektif dan efisien begitupun dengan pelayanan yang diberikan tanpa melalui prosedur yang berbelit-belit. Pemekaran daerah menjadi suatu solusi untuk menciptakan *Span of control* (rentan kendali) yang baik antara pemerintah dengan staf dan masyarakat yang dilayani.

2). Faktor ekonomi

Kecamatan-kecamatan yang terletak pada daerah yang akan dimekarkan menjadi “Kabupaten Renah

Indojati” merupakan daerah yang kaya dengan Sumber Daya Alamnya (SDA), salah satunya adalah perkebunan kelapa sawit. Alasan tersebut mendasari adanya tuntunan dari masyarakat untuk melakukan pemekaran daerah yaitu supaya Hal ini sejalan dengan teori yang dijelaskan (Makagansa, 2008) Dalam teorinya, Makagansa menyebutkan faktor pendorong ini sebagai motif dalam merebut hasil kekayaan SDA bahwa:

Motif pemekaran daerah yang lainnya adalah untuk merebut kekayaan hasil sumberdaya alam lokal agar dinikmati maksimal masyarakat yang paling dekat dengan lokasi sumberdaya alam itu. Motif ini menggerakkan para penggiat untuk memekarkan daerah yang paling dekat ke lokasi sumberdaya alam itu. Tujuannya agar kekayaan sumberdaya alam itu maksimal dinikmati masyarakat yang paling lokal ke lokasi sumber daya alam itu.

3). Faktor Politik

Pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” tentunya akan ditindaklanjuti dengan pembentukan struktur kekuasaan pemerintahan daerah yang baru yaitu kekuasaan eksekutif dan legislatif. Pemekaran ini akan menjadi peluang bagi perekrutan jabatan politik terutama bagi para elit politik lokal yang juga berperan sebagai penggagas upaya pemekaran sangat berharap sekali setelah terwujudnya pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” mereka akan mendapatkan jabatan yang strategis di “Kabupaten Renah Indojati”. Perekrutan pegawai pada jabatan tertentu juga diharapkan dapat merangkul sanak saudara dari golongan elit lokal tersebut untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Selain itu, bagi mereka yang dulunya tidak mendapatkan jabatan di daerah induk Kabupaten Pesisir Selatan melihat peluang pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” ini untuk mendapatkan jabatan yang diinginkan. Hal ini telah dijelaskan (Makagansa, 2008) bahwa “Pembentukan daerah baru itu tak pelak akan melahirkan peluang perekrutan kepala daerah dan wakil serta minimal belasan kepala dinas, badan, dan lembaga teknis daerah. Belum terhitung posisi-posisi birokrasi pemerintahan lain dalam lingkup pemerintahan kabupaten/kota mekaran. Ratusan hingga ribuan orang akan direkrut dan bekerja di berbagai posisi dan formasi pemerintahan daerah baru yang dibentuk”.

Penulis menemukan faktor pendorong pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” lainnya dilapangan selain faktor sosial, ekonomi, dan politik yaitu **faktor budaya dan sejarah**. Faktor budaya dan sejarah merupakan faktor penting dalam pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” ini. Hal ini dijelaskan (Hindaryatiningsih, 2016) bahwa “Nilai budaya merupakan sesuatu yang urgen karena dijadikan sebagai seperangkat keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam berkehidupan masyarakat”. Pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” disebabkan karena adanya faktor budaya dan sejarah. Karena dahulunya Kecamatan

Pancung Soal, Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut merupakan wilayah Kerajaan Indojati yang kekuasaannya dilanjutkan dengan Kerajaan Inderapura dan dipimpin oleh *Mandeh Rubiah*.

Keenam kecamatan yang akan membentuk “Kabupaten Renah Indojati” merupakan satu kesatuan dalam ikatan adat dan sejarah yang sangat kuat. Kekuatan historis ini pun menjadi faktor yang sangat mendukung kesamaan visi dan kondisi yang mendukung upaya masyarakat dalam membentuk “Kabupaten Renah Indojati” sebagai Daerah Otonomi Baru. Faktor sejarah ini mempengaruhi penamaan Calon DOB “Kabupaten Renah Indojati” yang diambil dari asal mula Kerajaan Inderapura yaitu Kerajaan Indojati. Sehingga “Renah Indojati” berarti Ranah/wilayah/tanah Indojati. (Makagansa, 2008) menjelaskan faktor pendorong ini sebagai motif politik identitas kultural dan didasari karena adanya visi politik identitas suatu kelompok masyarakat dan latar belakang etnik yang berbeda seperti bahasa, suku dan adat istiadat lainnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan (Makagansa, 2008) bahwa” para politisi dan aktivis dari kabupaten yang terdiri dari beberapa latar kelompok etnik atau sub etnik terpanggil agar identitas etnik mereka direpresentasikan kembali dalam struktur pemerintahan baru. Alasan-alasan identitas kultural itu langsung menjadi *inner spirit* serta daya sihir dari perjuangan pemekaran mereka.”

Perbedaan bahasa dan logat yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat yang berada di daerah Calon DOB “Kabupaten Renah Indojati” sangat berbeda dengan kecamatan yang berada di daerah induk. Hal ini juga menjadi faktor pendorong pemekaran “Kabupaten Renah Indojati”. Kesamaan bahasa dan logat yang digunakan oleh masyarakat di daerah Calon DOB “Kabupaten Renah Indojati” memudahkan mereka dalam berkomunikasi sehari-hari.

Kecamatan yang akan menjadi Calon DOB “Kabupaten Renah Indojati” didalamnya terdapat Etnis Jawa yang merupakan bagian dari program transmigrasi pada tahun 1950-an dan Etnis Melayu yang berasal dari Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu. Hal ini disebabkan karena wilayah Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut merupakan daerah perbatasan terutama dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu.

Faktor-faktor di atas penulis temukan berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang kompeten pada bidangnya dan pengamatan secara langsung dilapangan. Berdasarkan gabungan dari hasil pembahasan teori dan temuan di lapangan, maka faktor-faktor pendorong pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” sebagai berikut:

- a. Faktor Sosial (Teori Proliferasi)
- b. Faktor Ekonomi (Teori Proliferasi)
- c. Faktor Politik (Teori Proliferasi)
- d. Faktor Budaya dan Sejarah (Temuan di lapangan)

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat penulis temukan berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang menyebabkan sampai saat ini belum terwujudnya pemekaran “Kabupaten Renah Indojati”. Adapun faktor-faktor penghambat pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” adalah sebagai berikut:

1). Faktor Regulasi

Belum adanya PP tentang Penataan Daerah sebagai aturan taktis operasional dalam melakukan pemekaran daerah sehingga belum ada payung hukum bagi pemerintahan daerah dalam membahas dan menindaklanjuti masalah pemekaran daerah seiring dengan pemberlakuan moratorium pemekaran daerah. Peraturan Pemerintah merupakan aktualisasi dari kebijakan pemerintah. Suatu kebijakan menurut (Winarno, 2011) adalah “arah tindakan yang mempunyai tujuan yang diambil oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan”. Oleh karena itu, sebagai aktualisasi dari kebijakan pemerintah, (Ali, 2012) menyatakan bahwa:

Peraturan pemerintah dimaksudkan dalam konteks kebijakan disebut sebagai kebijakan taktis operasional untuk kemudian ditindaklanjuti oleh kebijakan-kebijakan teknis operasional seperti keputusan menteri. Sedangkan pada tingkat pemerintahan daerah (provinsi, dan kabupaten serta kota), penyelenggaraan selain didasarkan pada keberlakuan kebijakan pada tingkat pemerintahan pusat juga didasarkan pada kebijakan-kebijakan pada tingkat yang dalam dimensi secara hirarkis. Kebijakan taktis operasional sangat berhubungan dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam waktu yang singkat serta perlu ditentukan sumber daya dalam pencapaian tujuan kebijakan tersebut yaitu untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Peraturan Pemerintah mengenai pemekaran ini sangat diperlukan dalam mengatasi persoalan pemekaran daerah sehingga pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” ini dapat diwujudkan.

2). Faktor Kepemimpinan

Transisi kepemimpinan menjadi salah satu faktor penghambat pemekaran “Kabupaten Renah Indojati”. Pergantian anggota DPRD yang diikuti dengan pergantian kepala daerah menjadi hambatan dalam menindaklanjuti usulan pemekaran daerah. Karena hingga saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai pemekaran daerah oleh DPRD maupun kepala daerah. Faktor kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam menentukan keberlanjutan upaya pemekaran “Kabupaten Renah Indojati”. Pemimpin formal seperti kepala daerah menjadi ujung tombak dalam mengambil setiap kebijakan pemekaran daerah. Karena salah satu ciri dari pemimpin formal menurut (Kartono, 2009) adalah:

Selama menjabat kepemimpinan, dia diberi kekuasaan dan wewenang, antara lain untuk menentukan *policy*, memberikan motivasi kerja kepada bawahan, menggariskan pedoman dan petunjuk, mengalokasikan jabatan dan penempatan bawahannya, melakukan komunikasi, mengadakan supervisi dan kontrol, menetapkan sasaran organisasi dan mengambil keputusan-keputusan penting lainnya.

Kekuasaan dan kewenangan diberikan kepada kepala daerah sebagai tokoh formal dalam mengupayakan pemekaran “Kabupaten Renah Indojati”. Sehingga masyarakat menaruh harapan banyak kepada kepala daerah untuk segera mengambil langkah strategis dalam upaya pemekaran daerah.

SIMPULAN

Kesiapan pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” secara umum belum maksimal karena masih terdapat beberapa pentahapan administrasi yang belum dapat dilaksanakan sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pentahapan untuk pemenuhan persyaratan dasar pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” perlu dilakukan pemuthakiran seperti data kependudukan, data potensi daerah, ekonomi, dan kemampuan keuangan dan data lainnya yang sangat diperlukan serta pembaharuan beberapa dokumen persetujuan yang penjelasannya disesuaikan dengan UU No. 23 Tahun 2014.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” terdiri dari faktor pendorong pemekaran yaitu faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, serta faktor budaya dan sejarah dan faktor penghambat pemekaran yaitu faktor regulasi dan faktor kepemimpinan.

Pemerintah daerah sebaiknya mulai melengkapi berkas-berkas persyaratan yang belum terpenuhi dan pembaharuan beberapa dokumen persetujuan yang penjelasannya disesuaikan dengan UU No. 23 Tahun 2014. Sehingga pemerintah daerah tidak terkesan hanya menunggu disahkannya Peraturan Pemerintah mengenai Penataan Daerah meskipun saat ini belum adanya upaya strategis yang dilakukan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, M. (2011). *Teori-teori Mutakhir Administrasi Publik*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Ali, F. (2012). *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: Refika Aditama.
- BPS Pesisir Selatan. (2015). *Pesisir Selatan dalam angka*. Pesisir Selatan: BPS.
- Cheema, G.S. & Rondinelli, D. (Eds.). (1983). *Decentralization and Development, Policy Implementation In Developing Countries*. California: Beverly Hills: SAGE Publications (Inc).
- Fitriani, F., Hofman, B. & Kaiser, K. (2005). Unity in diversity? The creation of new local governments in a decentralising Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 41, (1), 57–79. <https://doi.org/10.1080/00074910500072690>
- Hindaryatiningsih, N. (2016). Model Proses Pewarisan Nilai-Nilai Budaya Lokal Dalam Tradisi Masyarakat Buton. *Sosiohumaniora*, 18, (2), 108. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2%09>
- Kartono, K. (2009). *Pemimpin dan Kepemimpinan (Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Dalam Negeri. (2016). Daftar Jumlah Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi di Indonesia. Retrieved September 6, 2016, from <http://infopersada.com/nasional/pemerintahan-dan-wilayah/9-daftar-jumlah-kabupaten-kota-di-setiap-provinsi-di-indonesia.html>
- Makagansa. (2008). *Tantangan Pemekaran Daerah*. Yogyakarta: Fufad.
- Manerikar, S., & Manerikar, V. (2014). Note on Exploratory Research. A Peer Reviewed Research. *Journal AWeshkar*, XVII, (1), 95. <https://www.scribd.com/document/382975697/Research-Communication-A-Note-on-Exploratory-Research>
- Marczyk, G., DeMatteo, D. & Festinger, D. (2005). *Essentials of Research Design and Methodology*. Retrieved from [http://library.aceondo.net/ebooks/Education/Wiley_Essentials_Of_Research_Design_And_Methodology_\(2005\)_Ling_Lotb.pdf](http://library.aceondo.net/ebooks/Education/Wiley_Essentials_Of_Research_Design_And_Methodology_(2005)_Ling_Lotb.pdf)
- Slameto. (2010a). *Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Slameto. (2010b). *Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulistiowati, R. (2014). Implementasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah pada Daerah Otonomi Baru (DOB). *Sosiohumaniora*, 16(3), 270–281. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v16i3.5767>
- Winarno, B. (2011). *Kebijakan Publik (Teori, proses, dan studi kasus)*. Yogyakarta: CPAS.
- UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, diakses melalui http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_22.pdf

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diakses melalui <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diakses melalui <https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf>

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, diakses melalui http://www.gitews.org/tsunamikit/en/E6/further_resources/national_level/peraturan_pemerintah/PP%2078-2007_Pemekaran%20Daerah.pdf

RELASI GENDER PATRIARKI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREMPUAN HUBULA SUKU DANI, KABUPATEN JAYAWIJAYA, PAPUA

Yanuaris You¹, Enos H. Rusmansara², Johz Mansoben², dan Agustina Ivone Poli²

¹ Program Doktor Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih

E-mail: hubula@yahoo.com

ABSTRAK. Masyarakat tradisional Hubula Suku Dani di Lembah Baliem Kabupaten Jayawijaya, Papua, membedakan laki-laki dan perempuan di ranah domestik maupun publik. Perbedaan gender ini didasarkan pada tradisi sistem patriarki, yang berdampak terhadap perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi gender patriarki dan dampaknya terhadap perempuan Hubula Suku Dani. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus di masyarakat Hubula Suku Dani di Distrik Aso Lokobal, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan *Focus Group Discussion*—FGD), dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Data dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Hubula Suku Dani secara kolektif memandang perempuan harus berada dalam posisi subordinasi terhadap laki-laki. Peran publik laki-laki adalah menangani acara adat dan perang, dan peran domestik perempuan adalah mengurus kebun, ternak, rumah tangga serta mengasuh anak. Pembagian peran ini berbasis adat, membentuk struktur sosial fungsional dan melindungi perempuan. Namun, kini perang tidak terjadi, adat memudar, dan laki-laki tidak berfungsi sebagai pencari nafkah. Walau terjadi disfungsi struktural, laki-laki tetap ingin dilayani istri. Dominasi patriarki kian menindas, menimbulkan ketidakadilan gender, dan bermuara pada kekerasan perempuan seperti kekerasan fisik, seksual, emosional, verbal, psikologis, ekonomi, serta intimidasi dan ancaman. Kekerasan perempuan ini bervariasi, namun merata atau membudaya di banyak keluarga Hubula Suku Dani.

Kata kunci: Relasi Gender; Sistem Patriarki; Ketidakadilan Gender; Kekerasan Laki-laki atas Perempuan

PATRIARCHAL GENDER RELATION AND THE IMPACT ON HUBULA WOMEN OF DANI TRIBE, JAYAWIJAYA REGENCY, PAPUA

ABSTRACT. *Traditional Hubula society of Dani Tribe in Baliem Valley, Jayawijaya Regency, Papua differentiated men and women in domestic and public life. This gender differentiation was based on a patriarchal system with impacts on women. This study aims to analyzing the patriarchal gender relation of men and women and its impact on Hubula women of Dani Tribe. It used a descriptive qualitative method with a case study approach in Hubula society of Dani Tribe in Aso Lokobal District, Jayawijaya Regency, Papua. Data used consisted of primary data directly collected through field observation, in-depth interviews and Focus Group Discussion, and secondary data collected from documents related to the research topic. The data were analyzed by a descriptive qualitative technique. Results of the study show that Hubula society of Dani Tribe collectively viewed that women must be subordinate to men. Men's public roles were to handle customary and war affairs, while women's domestic roles were to take care of field, husbandry, domestic and children affairs. The division of roles was based on customs, establishing the social structure that functionally protected women. However, war no longer occurred, customs faded, and men is no longer able to serve as breadwinners. Despite structural disfunctionalism, men still want to be served by wife. Patriarchal domination is increasingly exploitative, causing gender inequality, and violence against women such as physical, sexual, emotional, verbal, psychological, and economic violence as well as intimidation and threats. These violences varied but are more prevalent among the Hubula families of Dani Tribe.*

Key words: *Gender Relation; Patriarchal System; Gender Inequality; Violence over Women*

PENDAHULUAN

Di era modern seperti sekarang praktik ketidakadilan gender masih sering terjadi di berbagai daerah, termasuk Papua. Berbagai bentuk ketidakadilan gender dalam masyarakat memberikan pembatasan kepada perempuan, yaitu: diskriminasi, eksploitasi, marginalisasi, subordinasi, stereotipe/pelabelan negatif, dan kekerasan terhadap perempuan serta beban kerja lebih berat dan panjang bagi perempuan (Suryadi dan Idris, 2004). Berbagai bentuk ketidakadilan gender ini saling terkait, menimbulkan kekerasan terhadap perempuan, dan mengkristal dalam budaya masyarakat sehingga sulit diluruskan.

Beberapa kisah menyedihkan mengenai nasib kaum perempuan di wilayah Kabupaten Jayawijaya dapat ditemukan dalam *Papua Nyawene: Papua Bercerita (Pergumulan Menata Hidup Menuju Papua Tanah Damai dan Adil)* (Dale et al., 2014). Paling tidak ada tiga permasalahan hidup yang mengindikasikan beratnya kekerasan yang selama ini dialami oleh banyak perempuan tradisional di wilayah Lembah Baliem Kabupaten Jayawijaya. *Pertama*, berlipat gandanya beban kerja perempuan di kebun karena laki-laki malas bekerja di kebun dan kerjanya hanya keluyuran ke kota tanpa tujuan dan hasil yang jelas. Istri terpaksa harus mengolah kebun, padahal dulu pekerjaan itu tugas laki-

laki. *Kedua*, kurang didengarnya pendapat perempuan dan jika perempuan bersuara, suami main pukul karena dia merasa tersinggung. *Ketiga*, istri takut punya anak banyak akibat beban kerjanya berlipat ganda tetapi laki-laki tidak bertanggung jawab. Suami tidak mau bekerja tetapi selalu memaksa meminta makan dan hubungan seks. Jika makanan tidak ada di rumah atau istri tidak mau melayani hubungan seks, suami main pukul tanpa merasa malu bahwa dia tidak bekerja dan tidak bertanggung jawab pada keluarga. Ketiga masalah ini menjadi akar utama munculnya kekerasan perempuan di Kabupaten Jayawijaya. Beberapa kasus kekerasan tersebut sudah dilaporkan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Kabupaten Jayawijaya dan korban kemudian diberi pendampingan untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan tersebut kepada pihak berwajib.

Salah satu lembaga yang menangani suara perempuan Papua, khususnya di Kabupaten Jayawijaya, adalah Yayasan *Humi Inane* (Suara Perempuan–*Women's Voice Foundation*). Sekarang yayasan ini merupakan lembaga yang memberikan pendampingan kepada kaum perempuan, khususnya para korban kekerasan laki-laki. Lembaga ini memiliki data mengenai berbagai praktik ketidakadilan gender dan kekerasan atas perempuan di wilayah Lembah Baliem, Kabupaten Jayawijaya. Pada tahun 2017 perempuan di wilayah Kabupaten Jayawijaya mengalami banyak kekerasan hingga mencapai 411 kasus. Direktur *Humi Inane* (Suara Perempuan), Margaretha Wetipo, mengaku bahwa data kekerasan atas perempuan setiap tahun tidak stabil, ada saatnya naik dan turun. Misalnya, kekerasan atas perempuan pada tahun 2016 mencapai 224 kasus, sedangkan pada tahun 2015 mencapai 325 kasus. Perempuan sering mengalami kekerasan seksual, kekerasan domestik, penelantaran rumah tangga dan anak, penganiayaan, dan penelantaran ekonomi. Hal ini menunjukkan banyak terjadinya praktik ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, yang bermuara pada kekerasan laki-laki atas perempuan Hubula Suku Dani, Distrik Asolokobal, Kabupaten Jayawijaya. Perempuan di wilayah tersebut sering mengalami kekerasan fisik dan psikis, dan bentuk yang paling menonjol adalah kekerasan seksual (Cepos, 28-11-2017).

Hubungan antara gender dan kekerasan itu kompleks. Peran-peran maupun perilaku berbeda dari laki-laki dan perempuan, anak-anak maupun orang dewasa, dibentuk dan diperkuat oleh norma-norma gender di dalam masyarakat (WHO, 2009). Salah satu jenis kekerasan paling serius dan dominan terhadap perempuan dalam masyarakat adalah kekerasan domestik (Hoven, 2001). Menurut Njezula (2006), kekerasan domestik terjadi apabila seseorang, dalam hal ini suami, dalam hubungan dengan istrinya, menggunakan cara yang keras dan melecehkan untuk mempertahankan kekuasaan dan kontrol atas istrinya yang tidak berdaya.

Kekerasan perempuan banyak terjadi di Papua dalam bentuk KDRT seperti a) kekerasan fisik berupa

pemukulan dan penganiayaan, anggota tubuh dilukai/dipotong dengan senjata tajam (parang/ golok), dan disiram bahan bakar dan disulut api/ dibakar; b) kekerasan psikis suami atas isteri dengan modus pembatasan ruang gerak, ancaman, caci maki, hinaan dan kekerasan seksual; c) kejahatan perkawinan berbentuk poligami dan perselingkuhan meluas dan meningkat jumlahnya; d) pembiaran alkoholisme, judi, pornografi, dan prostitusi; serta e) beban kerja berlapis, kekerasan atas nama mas kawin, dilema mekanisme bayar denda dan hak waris perempuan. Kekerasan berupa KDRT sering terjadi karena suami merasa berhak memperlakukan istri sesuai keinginan, termasuk melakukan kekerasan kepada istri (Sylvana, *et al.*, 2015).

Praktik dominasi patriarkal dan ketidakadilan gender yang bermuara pada kekerasan perempuan juga terlihat dalam kehidupan domestik dan sosial masyarakat Hubula Suku Dani, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Masyarakat Hubula adalah bagian dari Suku Dani yang dikenal sebagai masyarakat tradisional yang kuat. Karakteristik menarik masyarakat ini adalah kuatnya posisi laki-laki, yang menempatkan perempuan pada posisi subordinasi dalam keluarga dan masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis relasi gender patriarki dan dampaknya terhadap perempuan dalam kehidupan masyarakat Hubula Suku Dani.

Gender dikonstruksi secara individual, interaksional, dan struktural untuk menciptakan batasan maupun peluang lingkungan yang memberikan manfaat lebih banyak bagi laki-laki dibandingkan perempuan. Perbedaan maskulinitas dan femininitas didasarkan pada status tidak setara, di mana maskulinitas merefleksikan dorongan kuat untuk memperjuangkan otoritas dan kekuasaan yang bermuara pada agresi, sedangkan femininitas sering melibatkan pencarian harmoni dan kesejahteraan komunal (Knoblock, 2008). Dari aspek gender, maskulinitas berada dalam hierarki maskulinitas dalam struktur sosial patriarkal (Jansson, 2017).

Konsep gender melahirkan atau memunculkan dikotomi, sifat, peran, dan posisi yang beragam antara laki-laki dan perempuan (Muthali'in, 2001). Dikotomi ini meliputi sifat maskulin bagi laki-laki dan sifat feminin bagi perempuan, peran publik untuk laki-laki dan peran domestik untuk perempuan, posisi mendominasi bagi laki-laki dan posisi ter subordinasi bagi perempuan. Hal ini merefleksikan sistem patriarki yang menciptakan sistem sosial di mana perempuan seringkali mendapati diri mereka berada dalam posisi subordinat (Mtshiselwa, 2015). Sifat, peran, dan posisi ini saling berkaitan satu sama lain dan sulit dipisahkan.

Dalam fungsionalisme struktural, posisi tradisional melihat identitas antara maskulin dan feminin sebagai hasil dari sosialisasi. Sosialisasi terjadi pada masa kanak-kanak, di mana anak laki-laki dan perempuan belajar perilaku yang pantas bagi jenis kelamin mereka. Maskulinitas mengharuskan ketegasan, aktif, lincah, dan cepat mengambil

inisiatif, sedangkan femininitas mengharuskan kerja sama, pasif, lembut, dan emosional. Sosialisasi dianggap dapat menyebabkan perbedaan gender ke dalam subyek feminin dan maskulin. Keluarga, media, dan pendidikan berperan penting bagi berlangsungnya proses ini (Walby, 1990).

Menurut Alfred Adler (Rutherford, dalam Chapman dan Rutherford, 2014: 8), relasi-relasi kekuasaan dalam struktur sosial sangat penting dipahami dalam kaitannya dengan maskulinitas dan femininitas. Jika laki-laki tidak mampu mencapai kompromi dan khawatir terlihat lembek atau feminin, kompensasinya adalah agresi keunggulan kelaki-lakian yang berlebihan atas perempuan. Untuk laki-laki, persona maskulin dengan otoritas kuat dicapai dengan merepresi kerapuhan dan ketergantungan. Perempuan menjadi ancaman bagi laki-laki, yang mungkin menyingkapkan kelemahan dan meruntuhkan mitos dan ilusi yang menjadi dasar klaim laki-laki atas superioritas, membentuk ikatan kolektif maskulinitas dengan ornamen kekuasaan dan prestise laki-laki. Teori ini menjelaskan elemen psikoanalisis dari rangkaian maskulinitas yang dikonstruksi secara historis.

Praktik sosial berdasarkan gender cenderung membentuk struktur sosial yang merefleksikan dominasi patriarkal. Dalam struktur sosial ini, laki-laki lebih mendominasi perempuan dalam berbagai urusan, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun sosial. Semakin keras dominasi laki-laki terhadap perempuan, semakin kuat tendensi ketidakadilan laki-laki atas perempuan, yang berakibat terjadinya kekerasan perempuan. Dalam sistem patriarkal, perempuan ditempatkan pada posisi subordinasi karena mereka adalah perempuan dan perempuan harus berada di bawah dominasi laki-laki. Patriarki kini menjadi bentuk sentral dan sistematis kontrol laki-laki, yang menjadi penyebab subordinasi perempuan (Isran dan Isran, 2012). Intinya, patriarki bukan hanya menjelaskan bagaimana masyarakat berfungsi dengan kekuasaan dominan laki-laki, tetapi bagaimana laki-laki mengontrol perempuan dalam kehidupan masyarakat (Mashiri, 2013).

Patriarki adalah sistem di mana perempuan dijadikan tidak terlihat dan kurang berpengaruh. Laki-laki dengan kekuatan, tekanan langsung, atau melalui ritual, tradisi, hukum, bahasa, adat-istiadat, etiket, pendidikan, dan pembagian kerja menentukan peran yang seharusnya bagi perempuan, dan di mana perempuan berada di bawah posisi laki-laki (Erika, 1986). Laki-laki mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi perempuan dan mereka dirugikan di berbagai bidang kehidupan sosial.

Habiba *et al.* (2016) menjelaskan bahwa patriarki adalah kekuasaan dan kontrol yang kompleks dalam masyarakat yang didominasi oleh laki-laki. Patriarki melembagakan subordinasi, ketergantungan, atau pengan dalam perempuan kepada laki-laki dalam masyarakat (Habiba *et al.*, 2016). Sistem ini terdiri dari struktur dan praktik sosial di mana laki-laki menindas, mengeksploitasi, dan mengontrol perempuan (Walby, 1990: 21). Laki-

laki menggunakan kekuasaannya untuk mengendalikan perempuan dalam ranah publik dan domestik.

Masyarakat patriarkal menetapkan kriteria bagi posisi perempuan yang tidak setara secara struktural dalam keluarga dan masyarakat dengan menetapkan hak-hak yang berbeda di antara laki-laki dan perempuan. Patriarki diciptakan dan dipertahankan melalui norma, nilai, tradisi, dan pemisahan sosial dari peran-peran gender yang ditanamkan dalam keluarga melalui proses sosialisasi jangka panjang (Johnson, 2005). Patriarki dibentuk dalam masyarakat melalui keluarga di mana laki-laki memegang tanggung jawab keluarga sehingga ia memiliki otoritas dalam mengendalikan keluarga (Parker dan Reckdenwald, 2008). Keluarga memainkan peran penting untuk mewariskan norma patriarkal kepada generasi berikutnya.

Menurut Gheaus (2012), laki-laki dan perempuan sebenarnya sama-sama berhak mendapat perlakuan adil, sehingga orang yang mengalami ketidakadilan akibat jenis kelamin, berarti ia korban ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender terjadi jika orang bertindak tidak adil karena kebencian atau prasangka buruk terhadap perempuan, sehingga perempuan menjadi korban ketidakadilan hanya karena mereka perempuan. Dominasi patriarkal yang tidak seimbang, tidak proporsional, atau mulai lepas dari fungsi utama hierarki struktur sosial cenderung menimbulkan ketidakadilan gender, yang bermuara pada kasus kekerasan gender. Kekerasan gender adalah ekspresi maskulinitas hegemonik dan terjadi terutama dalam budaya tradisional yang tak mau berubah, di mana laki-laki terdorong oleh emosi seperti kemarahan dan kecemburuan buta (Chowdhury, 2015).

Kekerasan atas perempuan dapat mengambil bentuk seperti dominasi dan kontrol, intimidasi, tekanan dan ancaman (Ashcraft, 2000). Patriarki adalah struktur sosial yang menekan dan menjadikan korban kekerasan domestik menjadi rentan (Chaitali, 2012). Hal ini mendasari risiko perempuan mengalami kekerasan domestik. Menurut Jura dan Bukaliya (2015), kekerasan domestik adalah tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan kematian atau luka fisik, seksual atau mental. Kekerasan ini bersifat fisik, seksual, emosional, verbal, psikologis, ekonomi, serta intimidasi dan pelecehan. Kekerasan tersebut merefleksikan pola sikap dan perilaku yang digunakan untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan dan kontrol laki-laki atas istri sebagai pasangan intimnya.

Perempuan yang mengalami kekerasan fisik, emosional, atau psikologis dari suami mengalami masalah mendalam, namun jika perempuan lain mengalami masalah yang sama, masalah itu memiliki akar sebagai masalah sosial (Ostadhashemi, *et al.*, 2015). Intensitas dan perluasan kekerasan atas perempuan bervariasi di masyarakat yang berbeda. Namun, kekerasan perempuan umumnya dilakukan suami. Menurut Kagou dan Kamgno (dalam Djamba & Kimuna, 2015), banyak perempuan sering menjaga diri agar tidak melaporkan kekerasan domestik karena takut mendapat pelecehan lebih banyak

jika suami mendapati istri menuduh mereka. Dalam keadaan itu bicara tentang perilaku pelecehan suami dapat menyebabkan perceraian, kasus yang banyak dihindari perempuan dengan segala pengorbanan karena mereka tidak ingin meninggalkan anak-anak akibat cerai karena jika terjadi perceraian suami pada umumnya memiliki hak memelihara anak-anak.

Di masyarakat patriarkal, suami biasanya memukul istri yang menentang kendalinya sampai ia tunduk. Suami memukul istri untuk menunjukkan kekuasaan dan istri tidak bisa mengancam kekuasaan sebagai suami (Eng et al., 2010). Dengan nilai patriarkal, masyarakat menunjukkan dukungan kuat pada peran gender dominan laki-laki. Pemukulan istri lebih tinggi di dalam keluarga di mana suami menganut ideologi patriarki dan struktur sosial laki-laki mendukung kekerasan atas perempuan (Yodanis, 2004). Masyarakat patriarkal umumnya tidak memberi perempuan kesempatan bersuara melalui ruang diskusi publik.

METODE

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan antara November 2017 sampai April 2018 di tengah masyarakat Hubula Suku Dani (dikenal sebagai Suku Dani) yang tinggal di Kampung Megapura, Aso Tapo, Weima, Hesatun, dan Hepuba, Distrik Aso Lokobal, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Dalam pengumpulan data, instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri. Sampel penelitian diambil dengan teknik pengambilan sampel purposif (*purposive sampling*) sesuai dengan tujuan penelitian. Pemilihan informan kunci ditentukan menggunakan teknik efek bola salju (*snowball effect*), yaitu ketika bertemu informan kunci yang berpengetahuan luas dan kaya pengalaman tentang objek penelitian, informan kunci itulah yang akan memberikan informasi berikutnya tentang informan kunci lain yang mereka kenal dan berpengetahuan luas serta kaya pengalaman tentang objek penelitian. Data dalam penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam, dan *Focus Group Discussion—FGD*), dan data sekunder yang diperoleh dengan teknik dokumentasi dari berbagai dokumen yang terkait dengan topik penelitian.

Data penelitian yang terkumpul dianalisis dengan teknik kualitatif deskriptif. Menurut Miles dan Huberman (2009), analisis kualitatif dilakukan melalui tiga alur kegiatan secara bersamaan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, masing-masing sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembedaan Laki-Laki dan Perempuan

Masyarakat Hubula Suku Dani memiliki tradisi budaya atau adat yang sangat kuat, ditandai dengan

dominasi laki-laki dalam sistem sosial patriarki. Dalam sistem sosial ini pelembagaan budaya patriarki terjadi melalui pelembagaan peran gender di ranah domestik dan publik, posisi dominasi dan subordinasi serta sifat maskulin dan feminin. Pelembagaan tradisi ini membentuk struktur fungsional dan mendukung dominasi patriarkal, yang bermuara pada ketidakadilan gender dan kekerasan atas perempuan. Hal ini memperkuat sistem sosial kemasyarakatan tradisional yang terbentuk, dengan struktur sosial yang fungsional dalam mendukung sistem patriarki. Dalam hal ini, laki-laki memegang kekuasaan atas perempuan, baik di ranah domestik maupun publik.

Masyarakat Hubula Suku Dani sejak dulu melakukan pembedaan atas laki-laki dan perempuan dalam sistem sosial yang mapan. Mereka dipisah dan dikonstruksi secara sosial, sehingga akhirnya pemisahan jenis kelamin ini diterima masyarakat turun-temurun tanpa protes. Bagi mereka, pemisahan ini adalah bagian dari adat dan harus diterima sebagai kewajiban adat. Pembedaan laki-laki dan perempuan itu dikonstruksi secara sosial berdasarkan adat. Pembedaan perilaku laki-laki dan perempuan diciptakan oleh laki-laki dan perempuan melalui proses sosial budaya yang panjang berbasis adat sendiri. Hal ini sesuai pendapat Oakley (1972) (Fakih, 1996). Jadi, masyarakat Hubula Suku Dani memandang hubungan antara laki-laki dan perempuan menggunakan perspektif gender berbasis adat masyarakat tradisional.

Sejak anak Hubula lahir, mereka langsung dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Dalam tradisi fungsionalisme struktural posisi tradisional melihat identitas antara maskulin dan feminin sebagai hasil sosialisasi. Di masyarakat Hubula Suku Dani, sosialisasi terjadi terutama pada masa kanak-kanak, di mana anak laki-laki dan perempuan mulai belajar perilaku yang pantas bagi jenis kelaminnya. Maskulinitas di masyarakat Hubula Suku Dani mengharuskan anak-anak memiliki ketegasan, selalu bersikap aktif, lincah, dan cepat mengambil inisiatif, sedangkan feminitas masyarakat Hubula Suku Dani mengharuskan perempuan dapat bekerja sama, pasif, lembut, dan emosional. Bagi masyarakat Hubula Suku Dani, sosialisasi dianggap menyebabkan pembedaan gender ke dalam subyek feminin dan maskulin, yang dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik. Seperti dikemukakan oleh Walby (1990), lembaga keluarga berperan penting bagi berlangsungnya proses sosialisasi semacam itu.

Masyarakat Hubula Suku Dani melakukan pembedaan gender laki-laki dan perempuan berdasarkan harapan yang berbeda dari orangtua dan tetua adat atas anak laki-laki dan perempuan. Ada mitos yang terbentuk dan diyakini benar sejak lama terkait posisi maupun peran laki-laki dan perempuan, dan pelanggaran atas mitos itu diyakini dapat menimbulkan bencana bagi laki-laki atau perempuan maupun keluarga dan masyarakat. Jika memasuki usia dewasa, perempuan tidak boleh memasuki *honai* tempat *kaneke* karena hal itu dapat menyebabkan ibu atau anaknya

tertimpa malapetaka seperti sakit atau meninggal. Mitos ini menunjukkan bahwa peran gender perempuan dalam masyarakat Hubula Suku Dani umumnya memang sudah didefinisikan sesuai dengan keyakinan masyarakat adat tentang hal-hal yang paling membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Masyarakat Hubula Suku Dani memandang pentingnya posisi, otoritas, dan peran laki-laki pada urusan publik dibandingkan laki-laki. Di masa lalu, perspektif gender itu dibutuhkan untuk mempertahankan eksistensi masyarakat tradisional. Peran laki-laki dan perempuan perlu dibedakan, khususnya berdasarkan keras dan lembutnya pekerjaan yang harus dilaksanakan. Masyarakat Hubula Suku Dani memahami bahwa laki-laki harus mengambil bagian pekerjaan kasar karena laki-laki itu kuat dan perkasa, sedangkan pekerjaan lembut diberikan kepada perempuan karena mereka lemah dan memerlukan pertolongan. Berdasarkan pertimbangan ini, masyarakat Hubula Suku Dani menetapkan perempuan bertugas mengurus rumah tangga, merawat kebun, dan memelihara babi, sedangkan laki-laki harus bertugas mengurus adat dan perang. Pembagian kerja berbasis gender antara laki-laki dan perempuan dari masyarakat tradisional Hubula Suku Dani tersebut memberikan peluang partisipasi dan ekonomi bagi laki-laki lebih banyak dibandingkan

perempuan, demikian pula dalam pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, serta pemberdayaan politik, sebagaimana dikemukakan Giuliano (2014). Dalam masyarakat Hubula Suku Dani, kesenjangan peluang antara laki-laki dan perempuan tersebut terjadi, di mana laki-laki berspesialisasi bekerja di luar rumah, sedangkan perempuan berspesialisasi melakukan kegiatan di rumah tangga. Pembagian kerja ini menghasilkan pola dan norma yang berbeda tentang posisi, otoritas, dan peran yang tepat bagi perempuan di masyarakat. Inilah awal mula terbentuknya masyarakat patriarkal yang sejak awal menyediakan tempat alami bagi perempuan dalam rumah dan tempat alami bagi laki-laki di luar rumah.

Dilema Subordinasi Perempuan terhadap Laki-Laki Hubula Suku Dani

Dalam masyarakat Hubula Suku Dani, walau sistem patrilineal tidak adil karena subordinasi perempuan di bawah dominasi laki-laki, jika melindungi kepentingan perempuan, sistem itu ideal dalam upaya menciptakan keseimbangan dan harmoni. Namun, ketika sistem sosial tersebut mulai menimbulkan interaksi yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan, dan perempuan tidak lagi mendapat haknya dari laki-laki setelah kewajibannya terpenuhi, sistem tersebut dapat dikatakan tidak fungsional.

Tabel 1. Perbedaan Gender antara Laki-Laki dan Perempuan Hubula Suku Dani (2018)

No.	Indikator	Laki-Laki	Perempuan
		Peran Publik	Peran Domestik
1.	<u>Honai</u> Pusat acara adat, pembuatan strategi perang & pelaksanaan ritual kesuburan	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki peran, akses dan kontrol mutlak atas honai adat - Menangani urusan adat, perang dan kesuburan. - Melakukan pembicaraan rahasia dan membuat keputusan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perempuan dilarang masuk honai adat tempat <i>kaneke</i> - Menangani urusan domestik untuk keperluan di honai adat - Mengurus anak laki-laki sebelum ia inisiasi ke honai adat
2.	<u>Perang</u> Laki-laki sering perang untuk menjaga wilayah dari serangan musuh atau balas dendam	<ul style="list-style-type: none"> - Dilatih sejak kecil untuk berani berperang - Menjaga wilayah perbatasan dari serangan musuh - Terlibat dalam perang demi balas dendam 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurus rumah tangga selama terjadi perang - Mengurus kebun dan ternak selama terjadi perang - Mengurus anak selama terjadi perang
3.	<u>Kebun</u> Lahan dikelola suami dan istri sebagai sumber makanan utama berupa ubi-ubian bagi keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan ritual kesuburan kebun di honai adat - Membahas strategi peningkatan kesuburan kebun - Membuat bedeng untuk dikelola dan dirawat oleh istri 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggali, menanam, merawat, dan memanen ubi-ubian - Membawa pulang ubi-ubian dan memasaknya - Memanen dan menjual hasil kebun ke pasar
4.	<u>Ternak</u> Ternak babi dipelihara untuk keperluan adat, sumbangan saudara maupun dijual.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan ritual kesuburan ternak di honai adat - Membahas strategi peningkatan kesuburan ternak - Menyerahkan babi untuk dipelihara oleh istri 	<ul style="list-style-type: none"> - Memelihara babi untuk keperluan adat - Memelihara babi untuk sumbangan saudara - Memelihara babi untuk dijual
5.	<u>Rumah Tangga</u> Urusan perabot, perawatan rumah sampai penyiapan makanan bagi keluarga.	<ul style="list-style-type: none"> - Diskusi dan menunggu datangnya makanan di honai - Tidak mau terlibat dalam menangani urusan rumah tangga - Menurut adat, segala urusan rumah tangga ditangani istri 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurus perabot rumah - Membersihkan dan merawat rumah - Menyiapkan makanan bagi keluarga
6.	<u>Pengasuhan Anak</u> Kegiatan membesarkan dan mendidik anak agar anak-anak memahami norma dan nilai adat	<ul style="list-style-type: none"> - Menghindari <i>pamali</i> terkencingi anak sebelum haid/inisiasi - Membiarkan anak perempuan diajari ibunya - Melatih anak laki-laki untuk berani berperang - Melibatkan anak laki-laki dalam pembicaraan di honai 	<ul style="list-style-type: none"> - Merawat dan membesarkan anak perempuan jauh dari honai - Merawat dan membesarkan anak laki-laki sebelum inisiasi - Mengajari anak agar dapat membantu kerja di kebun

Sumber: Data primer diolah (2018)

Ini awal lahirnya gejala di dalam sistem sosial patrilineal yang tidak lagi bisa menciptakan keseimbangan dan harmoni. Kegagalan struktur fungsional terjadi bila ada masalah sebagai sebab kegagalan fungsi laki-laki dalam struktur yang ada, terutama dalam interaksi ideal berbasis adat terhadap perempuan.

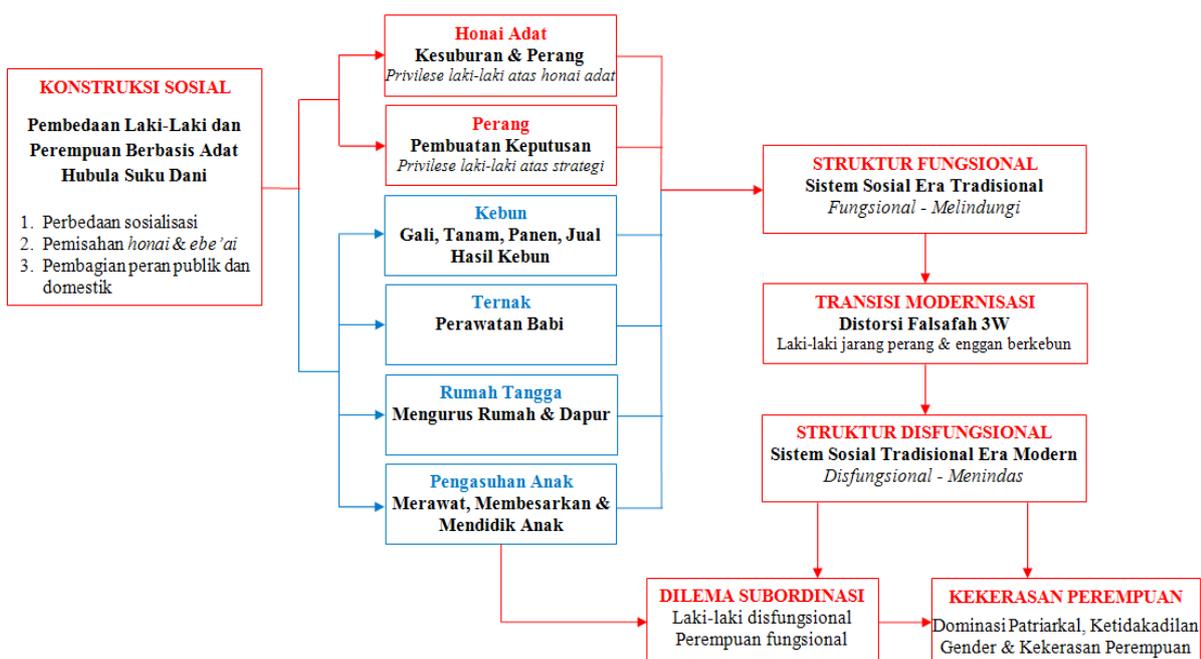
Dengan otoritas yang diberikan adat kepada laki-laki, idealnya harmoni di dalam keluarga dapat tercapai melalui pembagian tanggung jawab suami dan istri yang dapat melahirkan rasa tenang pada keduanya. Harmoni dan ketenangan dari keluarga tradisional bisa terjadi sebagai akibat dari adanya pemilahan peran dalam kehidupan berbasis jenis kelamin (Suryadi dan Idris, 2004: 51-53). Selama fungsi patrilinealisme terlaksana dengan baik sesuai dengan semangat awal tradisi, fungsi sosial dapat dipertahankan. Namun, dalam kehidupan masyarakat Hubula Suku Dani, fungsi-fungsi sosial patriarki yang ideal semakin banyak tidak terlaksana secara baik seiring dengan lunturnya tanggung jawab laki-laki dalam memenuhi kewajiban kepada istrinya, baik dalam ranah domestik maupun publik.

Hasil penelitian menunjukkan temuan menarik bahwa masyarakat Hubula Suku Dani sejak dulu sudah mengembangkan konstruksi sosial yang didasarkan pada perbedaan laki-laki dan perempuan berbasis adat. Perbedaan ini pada prinsipnya didasarkan pada sakralitas honai adat, perbedaan sosialisasi antara laki-laki dan perempuan, pemisahan honai untuk laki-laki dan ebe'ai untuk perempuan, dan pembagian peran publik untuk laki-laki dan peran domestik untuk perempuan. Di masyarakat Hubula Suku Dani, peran publik laki-laki adalah menangani perang dan kesuburan, baik kebun atau ternak, sedangkan peran domestik perempuan adalah mengelola kebun, memelihara ternak, dan mengurus

rumah tangga serta merawat, membesarkan dan mendidik anak. Di masyarakat tradisional seperti ini, konstruksi sosial dan pembagian peran era tradisional tersebut membentuk struktur sosial yang bersifat fungsional dan dominasi patriarki yang terbentuk juga bersifat melindungi perempuan.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan persentuhan dengan budaya masyarakat Barat yang lebih maju, kebiasaan perang mulai banyak berkurang dan laki-laki tidak memiliki peran dominan dalam pembuatan keputusan perang. Pada masa damai, idealnya laki-laki masih dapat melaksanakan peran bagian kesuburan untuk mengelola kebun dan memelihara ternak. Namun, dengan dorongan kuat di kalangan laki-laki untuk mencari uang, sebagian besar laki-laki semakin enggan berkebudun, khususnya untuk membuat bedeng. Akibatnya, banyak lahan terbengkalai dan tidak bisa dipelihara oleh perempuan. Pada tingkat lebih tinggi, transisi modernisasi tersebut menyebabkan terbentuknya struktur disfungsional di mana dominasi patriarki menjadi tidak relevan lagi karena makin banyak laki-laki tidak memiliki basis ekonomi yang memadai untuk membangun otoritas kepemimpinan atas istri. Jika istri menerima dominasi tersebut, sebagian besar dari mereka akan mengalami dilema: di satu sisi, mereka menurut adat harus selalu mematuhi suami, tetapi di sisi lain, suami tidak lagi berfungsi sebagai pencari nafkah. Di sini terbentuk ruang terbuka bagi terjadinya ketidakadilan gender, yang akhirnya bermuara pada berbagai bentuk kekerasan suami atas istri.

Saat ini laki-laki Hubula semakin tidak mampu melaksanakan fungsi secara optimal sebagai pencari nafkah. Dulu suami berperan menyiapkan bedeng lahan untuk ditanami dan dirawat istri. Saat ini peran tersebut tidak dapat terlaksana sama sekali karena suami malas,



Gambar 1. Hubungan Laki-Laki dan Perempuan dalam Perspektif Laki-Laki Hubula Suku Dani

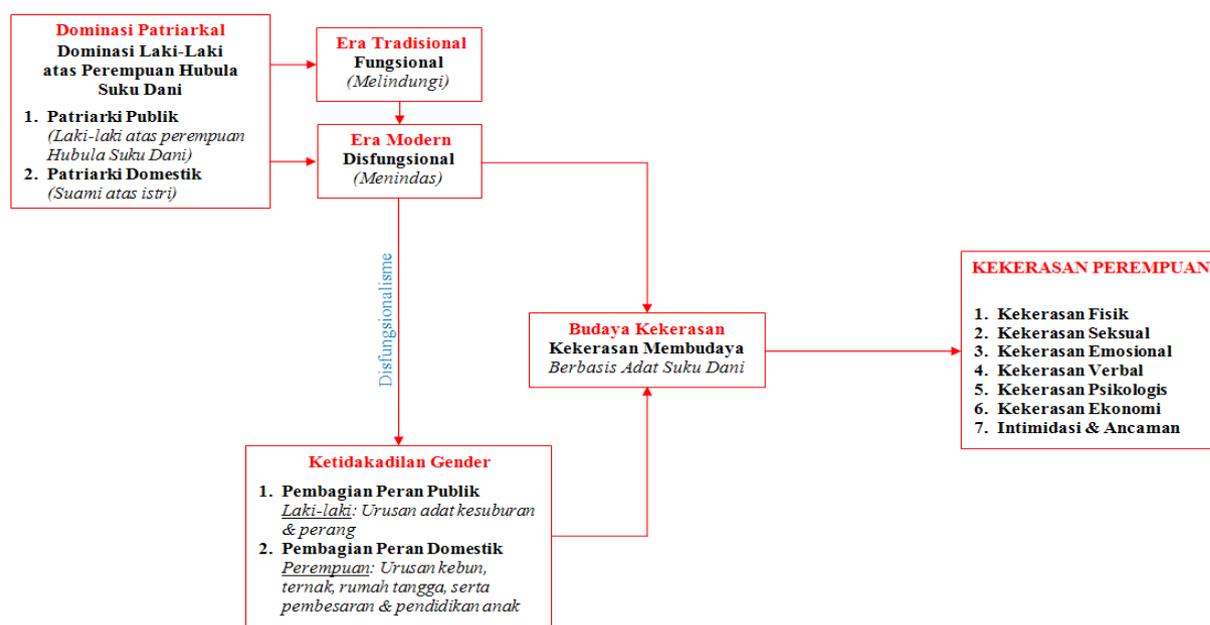
tidak bekerja, dan hidupnya mengandalkan kerja istri. Jika di rumah tidak ada makanan sama sekali, mereka menggunakan otoritas adat untuk memaksakan kehendaknya kepada istri dan makanan tetap harus terhidang. Jika dulu istri menghormati suami, saat ini mereka berani bersikap, berkata dan berbuat keras pada suami jika peran pencari nafkah tidak terlaksana dengan baik. Jadi, ada ketimpangan laki-laki dan perempuan dalam mengurus rumah tangga, kebun, dan babi. Suami tak mau membantu istri sama sekali, sedangkan istri terus ditekan dengan adat untuk selalu memenuhi keinginan suami, walau dengan kekerasan.

Hasil penelitian banyak menunjukkan kasus keluhan perempuan terhadap disfungsionalisme laki-laki dalam sistem sosial tradisional berbasis patriarki. Di satu sisi, laki-laki secara adat masih menempati posisi dominan dalam pembuatan keputusan, baik di ranah domestik maupun publik. Namun, di sisi lain, mereka tidak banyak atau bahkan tidak mau terlibat dalam fungsi tradisional, baik dalam urusan adat maupun kebun bersama istri. Hal ini terjadi karena adanya tendensi laki-laki Hubula Suku Dani mulai terpengaruhi oleh gaya kehidupan perkotaan, lalu mereka lebih sering pergi ke kota untuk bekerja atau untuk urusan lain yang tidak jelas, dan akibatnya mereka melupakan atau tidak melaksanakan fungsi pencari nafkah dalam lingkup sistem tradisional di sukunya. Patriarki sebagai sistem yang terdiri dari struktur dan praktik sosial di mana laki-laki pada umumnya bersikap menindas, mengeksploitasi dan mengontrol perempuan, seperti dikemukakan Walby (1990: 21), masih dirasakan oleh perempuan tradisional Hubula Suku Dani, yaitu: dominasi patriarkal tetap berlaku, tetapi eksistensi laki-laki dalam sistem sosial berbasis adat tidak berfungsi lagi. Dominasi patriarkal dan ketidakadilan gender ini ternyata menyebabkan banyak terjadinya kekerasan atas perempuan.

Dalam masyarakat Hubula Suku Dani, kekerasan atas perempuan terjadi ketika suami dan istri sama-sama bersikap kukuh dengan pendiriannya. Di satu sisi, laki-laki mempertahankan dominasi patriarkal berbasis adat dan melakukan praktik yang di mata istri adalah ketidakadilan gender, sedangkan di sisi lain, perempuan mulai cenderung melawan semua jenis tindakan ketidakadilan gender. Di titik konflik atau pertentangan paling tajam ini kekerasan laki-laki atas perempuan sering terjadi yang dilakukan suami pada istrinya. Akibat paling buruk kekerasan laki-laki atas perempuan ini adalah kembalinya istri ke keluarga orangtuanya akibat kekerasan yang dianggap istrinya sudah melampaui batas serta mengancam jiwa, dan ia tidak mau kembali kecuali ditebus dengan babi atau uang sebagai pertanda permintaan maaf suami atas perlakuan keras sebelumnya.

Dalam masyarakat Hubula Suku Dani, kekerasan patriarkal adalah ekspresi maskulinitas di mana laki-laki mendorong emosi seperti kemarahan dan kecemburuan buta (Chowdhury, 2015). Seperti pendapat Hossain dan Sumon (2013), kekerasan perempuan melibatkan makna sosial tertentu dan terjadi dalam hierarki sosial tradisional dan patriarkal. Kekerasan perempuan ini menjadi masalah serius dan dapat mengambil bentuk seperti dominasi, kontrol, intimidasi, tekanan atau bahkan ancaman (Ashcraft, 2000). Korban paling rentan akibat kekerasan domestik laki-laki atas perempuan adalah perempuan itu sendiri. Ketidaksetaraan gender ini mendasari risiko perempuan mengalami ketidakadilan gender yang bermuara pada kekerasan domestik. Seperti dikemukakan oleh Jura dan Bukaliya (2015), kekerasan domestik adalah tindak pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan kematian atau menimbulkan luka fisik, seksual atau mental perempuan.

Pada Gambar 2. menunjukkan bahwa dalam masyarakat Hubula Suku Dani, dominasi patriarkal



Gambar 2. Dampak Dominasi Patriarkal terhadap Ketidakadilan Gender dan Kekerasan Perempuan

menyebabkan ketidakadilan gender, yang bermuara pada terjadinya berbagai kekerasan suami atas istri, dari kekerasan fisik, seksual, emosional, verbal, psikologis, ekonomi, sampai intimidasi dan ancaman.

1) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah tindakan yang menghasilkan rasa sakit, luka, goresan tubuh, pingsan atau kematian. Di masyarakat Hubula Suku Dani, kekerasan fisik oleh suami umumnya terjadi ketika ia memukul istri dengan tangan atau kayu, menghujam dengan linggis, pisau atau senjata tajam yang lain, menendang keras istri dengan kaki, dan melukai istri dengan senjata tajam (pisau/kampak). Kekerasan fisik sering dilakukan oleh suami dengan berbagai penyebab, terutama karena suami cemburu akibat dugaan istri dekat, main mata atau selingkuh dengan laki-laki lain, ia sedang, sering, atau bahkan terlalu banyak mabuk, atau ia merasa dipermalukan akibat ia menampilkan penentangan terhadap suami, apalagi di depan umum, istri tidak mau berhubungan seks dengan suami karena kecapekan atau sedang mengalami haid, dan lain-lain. Selain itu, suami juga terbiasa mengambil uang simpanan anak sekolah dengan paksa dan jika tidak diperbolehkan oleh istri, ia main pukul. Jika semua kekerasan itu dibiarkan terus berlangsung, dikhawatirkan kelakuan suami akan mengancam nyawa istri.

2) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual mengacu pada tindakan yang membentuk seks paksa, pelecehan seks, seks abnormal dan tidak diinginkan. Bagi perempuan Hubula Suku Dani, kekerasan seksual banyak dirasakan istri karena kerenggangan hubungan seks suami dan istri akibat suami tidak memberi nafkah. Saat masih belum bertanggung jawab sebagai pencari nafkah, suami sering menuntut hubungan seks dalam kondisi istri terlalu capek setelah bekerja seharian penuh dari pagi hingga sore, bahkan malam hari. Bahkan, terjadi juga kekerasan seksual akibat suami memaksa hubungan seks istri saat ia haid. Di luar hubungan rumah tangga, kekerasan seksual bisa terjadi karena pemerkosaan atas calon istri agar perempuan menjadi istri. Akhirnya, ada pelecehan seksual seorang gadis oleh ayah kandungnya sendiri saat istri tidak di rumah. Beberapa kasus kekerasan seksual tersebut pada umumnya terjadi karena suami melihat istri berinteraksi atau berhubungan dengan laki-laki lain, suami cemburu pada istri, istri tidak mau berhubungan seks dengan suami, atau karena dorongan seks tinggi saat suami mabuk.

Jika dikaji secara lebih mendalam, banyak kekerasan suami atas istri dalam masyarakat Hubula Suku Dani berhubungan dengan masalah seksual. Jika suami tahu perselingkuhan yang diduga atau terbukti terjadi pada istri, ia sering mengambil panah dan langsung memanah laki-laki yang dianggapnya menyelingkuhi istrinya menimbulkan permusuhan yang sulit

diselesaikan. Selain itu, ada dua faktor yang paling banyak menyebabkan kekerasan suami atas istri, yaitu istri tidak mau berhubungan badan dan adanya masalah ekonomi, khususnya ketika tidak ada makanan atau perlengkapan dapur karena suami tidak bekerja dan melantarkan ekonomi keluarga. Kekerasan seksual terjadi ketika suami menuntut istri berhubungan seks padahal istri sedang sangat capek setelah baru selesai mengerjakan semua urusan rumah tangga, merawat kebun, dan memelihara babi tanpa bantuan suami sama sekali.

3) Kekerasan Emosional

Secara umum kekerasan emosional adalah tindakan yang menimbulkan kejengkelan dan kemarahan tanpa alasan yang jelas. Dalam masyarakat Hubula Suku Dani, suami dengan watak temperamental sering marah-marah terhadap istri tanpa alasan yang jelas, jika diskusi selalu ingin diikuti walau benar atau salah, pembicaraan panjang lebar dan tidak putus-putus tapi tidak jelas, dan sebagainya. Kekerasan emosional tersebut sering terjadi karena suami pulang ke rumah tidak disambut oleh istri, istri tidak menyediakan makanan, suami malu akibat kepergok makan padahal tidak bekerja, dan serupa itu. Tindakan tersebut mengindikasikan kekerasan emosional karena tindakan tersebut sering menimbulkan kejengkelan atau kemarahan istri terhadap suami, tetapi istri tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya bisa menuruti apa saja kata atau permintaan suami.

Kekerasan emosional terjadi ketika suami selalu saja marah-marah tanpa alasan yang jelas dan jika diajak berdiskusi selalu ingin diikuti, walau benar atau salah. Dalam kondisi ekonomi sulit, suami tidak mau bekerja dan istri saja yang mengurus kebun dan ternak, boleh jadi istri tetap memasak makanan, tetapi suami tidak mau menyentuh makanan itu karena malu. Namun, jika ketahuan mengambil makanan dan istrinya memergokinya, suami merasa tidak nyaman, marah-marah, bicara tidak putus-putus, dan juga tidak jelas apa yang dibicarakan. Emosi suami dan istri selalu tersulut karena apa yang dibicarakan suami selalu tidak sambung dengan apa yang ingin dibicarakan oleh istri, begitu pula sebaliknya.

4) Kekerasan Verbal

Secara umum kekerasan verbal terjadi ketika suami sering bicara keras dan membentak tanpa peduli terhadap lingkungan sekitar. Dalam masyarakat Hubula Suku Dani, kekerasan verbal yang sering dilakukan oleh suami atas memaki-maki istri dengan tuduhan istri telah selingkuh, suami membentak karena istri tidak memenuhi keinginan suami, suami berkata-kata kasar sambil marah tanpa kontrol, istri terlihat main mata atau selingkuh dengan laki-laki lain, istri tidak memenuhi keinginan suami, dan istri tidak melayani suami karena suami tidak bekerja dan akhirnya tidak dapat memberikan nafkah kepada keluarga. Beberapa

bentuk kekerasan verbal tersebut menyebabkan istri sering merasa sakit hati tetapi mereka tidak mampu berbuat apa-apa karena suami mereka selalu merasa benar dan harus dibenarkan dalam keadaan apa pun, baik benar maupun salah. Jika istri terlihat menentang, suami tidak segan-segan memukul atau menendang istrinya.

Kekerasan verbal terjadi ketika suami sering bicara keras dan membentak tanpa peduli pada lingkungan sekitar. Dalam kondisi marah, kata-katanya sering tidak terkontrol, hawanya ingin menyakiti perasaan istri saja. Jika hal ini terjadi, suami biasanya tidak memberi kesempatan kepada istri untuk bicara, intinya istri harus mendengarkan saja. Jika istri mau menyela, bahkan berani menghentikan pembicaraan suami, maka suami semakin marah, berkata-kata kasar dan bicaranya semakin tidak jelas tanpa kontrol. Apalagi jika istri juga tampil keras dan saling marah-marahan dengan kata-kata yang sama-sama keras, suami cenderung akan mudah melakukan kekerasan, terutama dengan memukul istri. Dengan watak temperamental, suami hampir tidak mungkin mau menerima sikap maupun perilaku istri yang bersifat menentang suami.

5) Kekerasan Psikologis

Secara umum, kekerasan psikologis adalah tindakan suami yang seringkali menimbulkan ketakutan, hilang kepercayaan diri, rasa tidak berdaya dalam diri, hilang kemampuan untuk mengambil tindakan, dan munculnya rasa penderitaan yang serius. Dalam masyarakat Hubula Suku Dani, suami sering sekali menyakiti perasaan istri agar keinginannya terpenuhi apa pun kondisinya, membiarkan istri mengalami dilema pengabaian dan tidak memberikan nafkah selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun tanpa ada kabar, suami selalu menuntut istri melayani tetapi ia tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah, dan suami selalu ingin kawin lagi walau ekonomi belum mencukupi tanpa peduli istri menerima atau tidak. Beberapa jenis kekerasan psikologis tersebut terjadi karena istri tidak segera memenuhi keinginan suami, suami bekerja atau sekolah dan harus pergi ke kota, ke luar daerah, bahkan ke luar pulau yang jauh dalam waktu lama, suami tidak bertanggung jawab tetapi tetap meminta dilayani, dilema karena suami tidak bekerja tetapi selalu pindah-pindah rumah, lalu kawin lagi dan lagi, dan istri harus selalu patuh karena suami sudah memberi mas kawin.

Dalam masyarakat Hubula Suku Dani, kekerasan psikologis terjadi pada saat suami dengan sengaja menyakiti istri agar kepentingannya terpenuhi tanpa mempertimbangkan perasaan istri sama sekali. Kekerasan ini terjadi jika suami membiarkan istri mengalami dilema tanpa pilihan yang jelas. Di satu sisi, suami harus selalu dituruti sesuai dengan aturan adat atau kebiasaan dominasi patriarki, sedangkan di

sisi lain, istri pada dasarnya paham bahwa sikap dan perilaku suaminya salah tanpa bisa bicara. Apalagi jika suami enggan bekerja di kebun, tidak terlibat mengurus ternak, tidak membantu mengurus rumah tangga. Dilema biasanya juga terjadi jika suami ingin kawin lagi walaupun sebenarnya kebutuhan ekonomi keluarga belum tercukupi. Kekerasan psikologis selalu menimbulkan dilema karena suami berpendapat ia telah membeli istri dengan mas kawin yang pernah diberikannya dan istri harus senantiasa patuh serta menghormati suami dalam keadaan apa pun, walau suami sering melakukan tindak kekerasan kepadanya setiap hari.

6) Kekerasan Ekonomi

Secara umum kekerasan ekonomi merupakan tindakan yang menimbulkan kerugian ekonomi, tercabutnya hak ekonomi anggota keluarga, tidak memberikan nafkah dan mengabaikan anggota keluarga. Dalam masyarakat Hubula Suku Dani, kekerasan ekonomi sering terjadi akibat suami tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, suami mengambil simpanan uang sekolah untuk mabuk, suami tidak bekerja dan tidak mampu memberikan nafkah dengan baik, suami memaksa istri memberikan makanan walaupun tidak ada, suami menghabiskan uang dalam acara-acara adat, suami memakai uang untuk mabuk atau bermain perempuan, suami melarang istri bekerja untuk mencari pendapatan tambahan, suami tidak memberikan nafkah dalam waktu lama, dan suami tidak mampu membangun rumah dan membiayai sekolah anak-anak. Beberapa masalah kekerasan ekonomi sering sekali terjadi karena pada umumnya suami tidak bekerja dan tidak memiliki pendapatan yang memadai sebagai nafkah keluarga, suami tidak mau bekerja dan melarang istri bekerja di luar rumah, suami memangkas akses dan kontrol strategis istri atas pendapatan, suami ingin mabuk-mabukan atau main perempuan atau kawin lagi dan lagi, suami pergi keluyuran ke kota tanpa ada tujuan dan hasil kerja yang jelas, dan suami mengabaikan keluarga dalam waktu lama.

Beberapa fenomena yang ditemukan di lapangan tersebut mengindikasikan bahwa kekerasan ekonomi sering terjadi pada saat kebutuhan ekonomi keluarga tidak dapat terpenuhi karena suami tidak memiliki pekerjaan dengan pendapatan yang memadai atau suami tidak mau bekerja di kebun. Dalam hal ini, suami selalu memaksakan kepada istri agar makanan selalu tersedia di rumah sewaktu-waktu ia datang, padahal di rumah tidak ada makanan dan uang akibat suami menganggur, bermalas-malasan, atau mabuk-mabukan. Lebih parah, dalam kondisi suami tidak mempunyai pekerjaan, tidak mau bekerja di kebun, dan tidak memiliki makanan, pekerjaan suami hanyalah marah-marah dan menyalahkan istri karena tidak ada makanan tersedia di rumah. Akibat terburuk

dari kekerasan yang dilakukan oleh suami seperti itu adalah kelelahan istri yang amat sangat akibat ia harus mengolah dan menanamkan kebunnya sendiri, memelihara ternak sendiri, dan mengurus rumah tangga sendiri, bahkan ia sering terpaksa harus mencuri hasil kebun milik tetangga akibat di rumahnya tidak tersedia makanan, yang berakibat suaminya memukul dirinya karena merasa malu ketahuan orang.

7) Intimidasi dan Ancaman

Secara umum intimidasi dan ancaman seringkali terjadi sebagai tindakan suami menekan istri agar ia memenuhi kebutuhan suami dan tidak menyinggung suami. Dalam masyarakat Hubula Suku Dani, intimidasi dan ancaman oleh laki-laki atas perempuan terjadi sesuai adat karena istri harus selalu patuh pada suami dalam kondisi apa pun, baik benar maupun salah. Intimidasi dan ancaman sering terjadi pula ketika suami dalam suatu konflik menekan istri agar ia tidak pulang ke rumah orangtuanya apalagi dalam waktu lama dan tidak mau kembali lagi jika suami tidak datang menjemput dengan membawa babi sebagai tebusan dan tanda permintaan maaf. Ketika terjadi kecemburuan, suami juga biasanya mengancam istri agar ia tidak banyak dan terlalu lama keluar rumah serta berhubungan dengan laki-laki lain. Suami juga biasa mengancam istri agar ia tidak menyimpan rahasia tentang pacar baru atau selingkuhan baru, walau ketika rahasia sudah dibongkar, suami menjadi marah dan memaki-maki serta memukul istri. Semua kekerasan itu umumnya terjadi karena suami merasa sudah menguasai istri lantaran dulu sudah memberikan mas kawin kepada istri. Suami juga merasa kaya sehingga ia mampu membayar apa pun dalam jumlah

berapa pun asalkan masalahnya dengan istri bisa selesai, atau suami memiliki banyak istri sehingga ia merasa bebas berbuat apa saja tanpa merasa khawatir satu atau lebih istrinya kabur atau berpisah, atau suami memiliki banyak babi untuk tebusan bila istri pulang ke rumah akibat konflik dan kekerasan oleh suami. Selain itu, kekerasan berupa intimidasi dan ancaman sering terjadi karena suami memiliki watak temperamental, yang sangat emosional, mudah marah, dan selalu curiga pada istri. Akhirnya, disadari atau tidak, istri cenderung patuh kepada suami, atau lebih tepatnya menurut saja apa kemauan suami, walaupun sudah banyak sikap dan tindakan kekerasan ia alami dari suaminya karena gereja mendorong istri patuh walaupun suami tidak bekerja, tidak memberikan nafkah, dan sering melakukan berbagai kekerasan. Intimidasi dan ancaman terjadi ketika suami menekan istrinya agar ia tidak sampai melakukan sesuatu yang menyebabkan suami sampai tersinggung.

Pembagian peran yang tidak adil, yang sering terjadi antara laki-laki dan perempuan Hubula Suku Dani dan pada akhirnya bermuara pada kekerasan perempuan, pada dasarnya tidak terlepas dari pengaruh budaya atau adat-istiadat Hubula Suku Dani, sehingga perempuan tidak bisa melawan atau pun negosiasi. Biasanya laki-laki akan berkata, "*Ini adat. Ko harus kerja, ko harus terima, ko harus pikul.*" Tradisi adat dalam masyarakat Hubula Suku Dani inilah yang pada akhirnya menjadi sumber utama terjadinya kekerasan laki-laki atas perempuan karena adat ternyata lebih banyak mengintimidasi istri supaya mereka selalu melakukan apa pun yang disuruh oleh suaminya.

Tabel 2. Ringkasan Temuan Penelitian tentang Kekerasan atas Perempuan Hubula Suku Dani Beserta Penyebab Umumnya (2018)

No.	Indikator	Tindakan Kekerasan Laki-Laki	Penyebab Umum
1.	<u>Kekerasan Fisik</u> Tindakan yang menghasilkan rasa sakit, luka, goresan tubuh, pingsan atau kematian	- Memukul istri dengan tangan atau kayu - Menghuncam dengan linggis atau pisau. - Menendang keras istri dengan kaki - Melukai istri dengan senjata tajam (pisau/kampak)	- Cemburu akibat dugaan istri selingkuh dengan laki-laki lain - Sedang, sering atau banyak mabuk - Malu akibat penentangan istri di depan umum - Istri tidak mau hubungan seks dengan suami
2.	<u>Kekerasan Seksual</u> Tindakan yang membentuk seks paksa, pelecehan seksual, seks abnormal dan tidak diinginkan	- Tuntutan hubungan seks dalam kondisi istri capek - Pemaksaan hubungan seks saat istri sedang haid - Pemerksaan calon istri agar perempuan jadi istri - Pelecehan seksual putrinya saat istri tidak di rumah	- Istri berinteraksi atau berhubungan dengan laki-laki lain - Istri tidak mau berhubungan seks dengan suami - Istri tidak menyediakan makanan di rumah - Dorongan seksual tinggi saat mabuk
3.	<u>Kekerasan Emosional</u> Tindakan yang menimbulkan kejengkelan dan kemarahan tanpa alasan yang jelas	- Marah-marah tanpa alasan yang jelas - Jika diskusi selalu ingin diikuti, benar atau salah - Pembicaraan tidak putus-putus dan tidak jelas	- Suami pulang tidak disambut - Istri tidak menyediakan makanan - Suami malu karena kepergok makan padahal tidak bekerja
4.	<u>Kekerasan Verbal</u> Bicara keras dan membentak tanpa peduli pada lingkungan sekitar	- Makian suami dengan tuduhan istri telah selingkuh - Bentakan karena istri tidak penuhi keinginan suami - Berkata-kata kasar sambil marah tanpa kontrol	- Istri terlihat main mata atau selingkuh dengan laki-laki lain - Istri tidak memenuhi keinginan suami - Istri tidak melayani suami karena suami tidak bekerja
5.	<u>Kekerasan Psikologis</u> Menimbulkan ketakutan, hilang kepercayaan, rasa tak berdaya, hilang kemampuan ambil tindakan, dan penderitaan serius	- Menyakiti perasaan istri agar keinginan terpenuhi - Membiarkan istri mengalami dilema pengabaian - Menuntut istri melayani tapi suami tidak bekerja - Ingin kawin lagi walau ekonomi belum mencukupi	- Suami kerja atau sekolah dan harus pergi jauh lama - Suami tidak bertanggung jawab tapi tetap minta dilayani - Dilema karena suami tidak bekerja tapi kawin lagi dan lagi - Istri harus patuh karena suami sudah memberi mas kawin

6. <u>Kekerasan Ekonomi</u> Tindakan yang menimbulkan kerugian ekonomi, tercabutnya hak ekonomi anggota keluarga, tidak memberikan nafkah, dan mengabaikan anggota keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga - Mengambil simpanan uang sekolah untuk mabuk - Tidak bekerja dan tidak bisa memberikan nafkah - Memaksa istri memberi makanan walau tidak ada - Menghabiskan uang dalam acara-acara adat - Memakai uang untuk mabuk atau main perempuan - Melarang istri bekerja untuk pendapatan tambahan - Tidak memberikan nafkah dalam waktu lama 	<ul style="list-style-type: none"> - Suami tidak bekerja dan tidak punya pendapatan memadai - Suami tidak mau bekerja dan melarang istri bekerja di luar - Suami memangkas akses dan kontrol atas pendapatan - Suami tetap ingin mabuk, main perempuan atau kawin lagi - Suami pergi jauh ke kota tanpa tujuan dan hasil yang jelas - Suami mengabaikan keluarga dalam waktu lama
7. <u>Intimidasi dan Ancaman</u> Tindakan menekan istri agar ia memenuhi kebutuhan suami dan tidak menyinggung suami	<ul style="list-style-type: none"> - Intimidasi adat agar istri selalu patuh pada suami - Menekan istri agar tidak pulang ke rumah orangtua - Ancam istri tidak berhubungan dengan laki-laki lain - Ancam istri agar tidak simpan rahasia pacar baru 	<ul style="list-style-type: none"> - Rasa menguasai istri karena sudah memberikan mas kawin - Merasa kaya, banyak istri, dan banyak babi untuk tebusan - Emosional, mudah marah, dan selalu curiga pada istri - Gereja mendorong istri patuh, tapi suami tidak bekerja

Sumber: Data primer diolah (2018)

Seiring berkurangnya signifikansi aturan adat bagi laki-laki Hubula Suku Dani, semakin besar kemungkinan laki-laki menyalahgunakan otoritas adat untuk melakukan kekerasan domestik. Tendensi ini seperti dikemukakan Jura dan Bukaliya (2015) bahwa kekerasan domestik terjadi karena adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan suami dan istri yang terjadi akibat pemaksaan kendali fisik, verbal, seksual, psikologis, dan emosional. Dalam masyarakat Hubula Suku Dani, sebagian besar atau hampir semua laki-laki mempunyai tendensi yang sama untuk menerapkan praktik dominasi patriarkal dan melakukan kekerasan atas perempuan. Artinya, kebiasaan atau bahkan tradisi patriarki sudah benar-benar membudaya di kalangan laki-laki tradisional Hubula Suku Dani sehingga istri-istri yang sudah merasakan sakitnya dominasi patriarki dan kekerasan laki-laki atas perempuan umumnya tidak kuasa lagi berpikir berpisah dari suami lamakarena ke mana pun mereka pergi dan mencari laki-laki lain, suami mereka cenderung akan memiliki watak, karakteristik, sikap dan perilaku yang serupa: dominan dan keras.

Dominasi patriarkal dan kekerasan suami atas istri tersebut membudaya di dalam Hubula Suku Dani. Seperti dikemukakan Jura dan Bukaliya (2015), jika perilaku kekerasan itu berulang dalam siklus tanpa intervensi apa pun, kekerasan domestik boleh jadi lepas kendali dan meluas keluar dinding rumah tangga dan membudaya dalam masyarakat lebih luas. Di masyarakat Hubula Suku Dani, kecenderungan ini kentara. Walau mengalami kekerasan verbal, seksual, psikologis, emosional dan fisik, istri sering terpaksa memilih bertahan sampai anak besar dan sudah bisa membantunya menggantikan suami sebagai pencari nafkah secara optimal.

Banyak keluarga Hubula Suku Dani memiliki satu atau paling banyak dua anak. Jika istri melahirkan anak pertama, ia enggan memiliki anak kedua. Bagi mereka, menjadi istri adalah tugas berat karena laki-laki Hubula tak mau bekerja di kebun, memelihara ternak, dan mengurus rumah tangga. Semua pekerjaan itu dilakukan istri. Kondisi paling memprihatinkan adalah saat istri hamil, suami tidak berubah, bahkan membiarkan atau mengharuskan istri tetap bekerja sendiri. Fenomena ini

menunjukkan pengabaian istri pada saat genting kehamilan sudah menjadi tradisi atau "budaya" di kalangan laki-laki Hubula Suku Dani. Inilah penyebab paling utama keengganan istri untuk beranak lebih dari satu dan suami tidak dapat memaksakan diri kepada istrinya. Anehnya, setiap kali istri menolak setiap kali suami meminta hubungan seks, ia mulai berani menolak karena mereka tidak mau lagi mengalami penderitaan berat selama hamil dan setelah anak lahir akibat beban peran ganda, bahkan peran majemuk, dalam rumah tangga tradisional Hubula Suku Dani.

Dengan terjadinya kekerasan suami atas istri selama bertahun-tahun, para istri dari masyarakat Hubula Suku Dani pada umumnya mengalami penderitaan dalam keluarga. Tidak sedikit perempuan Hubula Suku Dani yang sudah menikah mengalami kekerasan fisik yang ditandai dengan goresan atau luka dan rasa sakit yang dalam. Awalnya istri yang mulai mengalami kekerasan dari suami merasa takut, tidak percaya diri, tidak berdaya serta tidak berani mengambil sikap dan tindakan dalam menghadapi suami yang sering melakukan kekerasan. Mereka juga sering mengalami perkosaan dalam perkawinan akibat tindakan apa pun yang dilakukan oleh suami dan akhirnya menyebabkan terjadinya hubungan seks paksa dan tidak diinginkan, khususnya pada saat istri sedang terlalu capek akibat beban majemuk yang dipikulnya dan tidak ingin memiliki anak lagi.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan domestik suami atas istrinya ternyata membudaya dalam masyarakat Hubula Suku Dani. Kekerasan fisik, ekonomi, emosional, psikologis, verbal dan seksual suami atas istri menjadi masalah yang berakar mendalam sebagai masalah sosial dan budaya (Ostadhashemi, et al., 2015). Masalah ini mengancam kualitas hidup perempuan dalam rumah tangga. Kekerasan suami atas istri ini terjadi di ranah privasi (Ostadhashemi, et al., 2015). Ketidakadilan gender ini berakar dalam kondisi ketidakseimbangan kekuasaan dan hubungan struktural yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan, sedangkan istri tidak berdaya melakukan pembebasan dari subordinasi pada laki-laki Hubula Suku Dani.

SIMPULAN

Masyarakat Hubula Suku Dani menganut sistem sosial patriarki dan sejak lama membedakan posisi, otoritas dan peran laki-laki dan perempuan di ruang publik dan keluarga. Mereka menempatkan perempuan dalam subordinasi perempuan di bawah dominasi laki-laki. Pada saat suami tidak lagi berperan fungsional sebagai pencari nafkah, ketidakadilan gender terjadi. Suami tidak melaksanakan fungsi sebagai pencari nafkah tetapi ia berdasarkan adat tetap memaksakan kemauan agar istri melaksanakan kewajiban melayani, termasuk memenuhi kebutuhan seks. Berbagai kekerasan laki-laki atas perempuan dalam masyarakat Hubula Suku Dani terjadi secara merata atau membudaya di tengah kehidupan masyarakat dengan sistem dominasi patriarkal yang tidak lagi fungsional dan bermuara pada ketidakadilan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashcraft, C. (2000) Naming knowledge: A Language for Reconstructing Domestic Violence and Systemic Gender Inequity. *Women and Language*, 23, (1), 3-10
- Chaitali, D. (2012) Barriers and Supports to Divorce for Victimised British- Indian Mothers and Consequences of Divorce: Narratives of British-Indian Adult Children of Divorce. *Child Care in Practice*, 18, (2), 147-164.
- Chapman, R. & Rutherford, J. (2014) *Male Order: Mengungkap Maskulinitas*, Yogyakarta: Jalasutra
- Chowdhury, E.H. (2015) Rethinking Patriarchy, Culture and Masculinity: Transnational Narratives of Gender Violence and Human Rights Advocacy. *Journal of International Women's Studies*, 16, (2), 98-114.
- Cepos (Cenderawasih Pos), 28 Nopember 2017, Kekerasan Perempuan di Papua, hal. 1
- Djamba, Y.K. & Kimuna, S.R. (eds.) (2015) *Gender-Based Violence: Perspectives from Africa, the Middle East, and India*, Switzerland: Springer International Publishing.
- Fakih, M. (1996) *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gheaus, A. (2012) Gender Justice, *Journal of ethics & social philosophy*. 6, (1), 1-24.
- Giuliano, P. (2014) The Role of Women in Society: from Preindustrial to Modern Times, *CESifo Economic Studies*, 61, (1), 33-53
- Habiba, U., Ali, R., & Ashfaq, A. (2016) From Patriarchy to Neopatriarchy: Experiences of Women from Pakistan, *International Journal of Humanities and Social Science*. 6, (3), 212-221.
- Hossain, K.T. & Sumon, M.S.R. (2013) Violence against Women: Nature, Causes and Dimensions in Contemporary Bangladesh, *Bangladesh e-Journal of Sociology*. 10, (1), 79-91.
- Hoven (2001) Domestic violence in South Africa. *Acta Criminologica*, 14, (3), 13-25
- Isran, S. & Isran, M.A. (2012) Patriarchy And Women In Pakistan: A Critical Analysis, *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business*, 4, (6), 835-859
- Jansson, P.M. (2017) An Explorative Integration of Factors Causing Men's Violence against Women. *Journal of Psychology and Clinical Psychiatry*, 8, (2), 2-11. <https://doi.org/10.15406/jpcpy.2017.8.00475>
- Johnson, M. (1995) Patriarchal terrorism and common couple violence: two forms of violence against women. *Journal of Marriage & the Family*, 57, (2), 283-294.
- Jura, F. & Bukaliya, R. (2015) "Domestic Violence: Causes and Implications for the Education System", *International Journal of Research in Humanities and Social Studies*, 2, (4), 62-72.
- Knoblock, J. (2008) Gender and Violence: A Reflective Sociology of How Gender Ideologies and Practices Contribute to Gender Based Violence, *Human Architecture: Journal of the Sociology of Self-Knowledge*: 6, (2), 91-102.
- Mashiri, L. (2013) Conceptualisation of Gender Based Violence in Zimbabwe, *International Journal of Humanities and Social Science*, 3, (15), 94-103.
- Miles, M.B. & Huberman, M.A. (2009) *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah: Rohidi Tjetjep Rohendi, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mtshiselwa, N. (2015) 'Reconstructing a Deuteronomistic Athaliah in the (South) African context: A critique of the patriarchal perception of women', *Verbum et Ecclesia*, 36, (1), 1-8.
- Muthali'in. (2001) *Bias Gender Dalam Pendidikan*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Njezula, A.B. (2006) Investigating Domestic Violence against Women in South Africa, Dissertation, Department of Statistics, Estern Cape: University of the Western Cape.
- Ostadhashemi L, Khalvati M, Seyedsalehi M, & Emamhadi M. (2015) A Study of Domestic Violence against Women: A Qualitative Meta-Synthesis. *International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine*; 5, (3), 155-163.
- Parker, K.F. & Reckdenwald, A. (2008) Women and Crime in Context Examining the Linkages

- Between Patriarchy and Female Offending Across Space. *Feminist Criminology*, 3, (1), 5-24.
- Suryadi & Idris (2004) *Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan*, Bandung: Genesindo.
- Sylvana M.A. (Ed.), (2015), *Anyan Noken Kehidupan: Papua Tanah Damai Menurut Perempuan Penyintas Kekerasan & Pembela HAM*, Kerjasama: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Jaringan Kerja HAM Perempuan Papua Tiki, Majelis Rakyat Papua 2012-2014, Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Walby, S. (1990) *Teorizing Patriarchy*, Oxford: Basil Blackwell.
- WHO. (2009) *Violence Prevention: the Evidence (Promoting Gender Equality to Prevent Violence against Women)*, World Health Organization.
- Yodanis, C.L. (2004) Gender inequality, violence against women, and fear: a cross-national test of the feminist theory of violence against women. *Journal of Interpersonal Violence*, 19, 655–675.

ANALISIS HUBUNGAN ANTARA BUDAYA ORGANISASI DAN IMPLEMENTASI INNOVATION TYPES DAN DAMPANYA PADA KINERJA MANAJER

Muhammad Dahlan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran

E-mail: dahlanm2004@yahoo.com

ABSTRAK. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara budaya organisasi dan kinerja manajer, serta implementasi inovasi sebagai variabel perantara. Penelitian juga menguji peran BUMD berkontribusi positif dalam upaya peningkatan kepuasan pelayanan publik. Metode yang digunakan adalah *time order decision*. Analisis data menggunakan analisis regresi sederhana. Penyebaran kuesioner menggunakan jasa layanan pos dan menghasilkan 64 kuesioner siap olah. Berdasarkan hasil tes hipotesa menunjukkan: budaya organisasi berhubungan positif terhadap kinerja, melalui implementasi inovasi, serta budaya organisasi dan inovasi berhubungan positif terhadap kinerja perusahaan.

Kata kunci: Budaya Organisasi; Implementasi Inovasi; Kinerja Pelayanan Publik; Kinerja Manajer; dan Badan Usaha Milik Daerah.

ANALYSIS OF CORELATION BEETWEEN ORGANIZATION CULTURE ON IMPLEMENTATION OF INNOVATION TYPES AND ITS IMPACT ON MANAGER PERFORMANCE

ABSTRACT. To analyze the corelation among organization culture and implementation of innovation type and its impact to manager performance. That's also to measure the roles of BUMD as services providers to contributions on the increase of public service satisfaction. Data analyze were used regression analysis. Mail questionnaires were distributed than we have 64 questionnaires. Base on hypothesis testing show that: organizational culture has positive correlation with manager performance, implementation of innovation as a mediating variable; and organizational culture and implementation of innovation has positive correlation with manager performance.

Key words: Organizational Culture; Implementation of Innovation types; Public Service Performance; Manager Performace, and Distric-Owned Enterprise.

PENDAHULUAN

Wheelen dan Hunger (2015) menyarankan pelaku usaha untuk setiap entitas bisnis selayaknya menyusun berbagai strategi dan pedoman operasi yang biasanya minimal dirancang pada akhir tahun untuk dilaksanakan pada awal tahun berikutnya. Rancangan ini sebagai acuan dan target yang dapat dicapai yang merupakan ukuran kerjanya. Dewasa ini hampir tidak ada pelaku bisnis yang tidak melaksanakan tugas penting ini. Strategi bisnis dan pengawasan yang baik sangatlah dibutuhkan untuk kesuksesan dimasa akan datang (Dahlan, et al, 2007). Hal ini menjadi momok bagi manajemen di akhir tahun ketika evaluasi kinerja dilakukan. Implementasi *innovation types* merupakan salah satu strategi dan upaya manajemen dalam rangka merebut pangsa pasar dan bersaing untuk meningkatkan kinerja perusahaan serta menciptakan budaya organisasi yang kondusif agar setiap organ organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien (Tidd dan Bessant, 2014).

Tradisi ini juga berlaku bagi perusahaan pemerintah, misalnya badan usaha milik pemerintah daerah (BUMD). Tidak hanya itu, sesuai Undang-Undang Dasar RI 1945 mengamatkan semua kekayaan yang ada wajib dipergunakan yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Hal ini dapat direalisasikan melalui peningkatan peran budaya kerja dan implementasi inovasi agar perusahaan mampu mengelaborasi persaingan, peluang bisnis, perubahan lingkungan dan penciptaan inovasi layanan, produk dan jasa bagi memenangkan persaingan global sehingga kinerja meningkat (Daft (2007).

Namun, berbeda dengan hasil survey lapangan pada tahun 2018 yang menjelaskan tentang kinerja pelayanan publik badan usaha milik pemerintah daerah (BUMD) belum optimal capaiannya, sebagai contoh; penyediaan air bersih, pelayanan kesehatan harus antri yang panjang jika berobat, pasar tradisional belum tertata dengan baik, kebersihan lingkungan dan prasarana lahar parkir umum. Penulis sebagai warga Kota Bandung, dapat merasakan dimana kontribusi BUMD belum optimal kerjanya, misalnya; penyediaan air bersih dan kebersihan tempat-tempat umum.

Berdasarkan uraian dan pandangan tersebut, penulis ingin melihat secara lebih dekat melalui melakukan penelitian untuk melihat secara dekat apakah memang demikian masih ada permasalahan terkait dengan peran, kinerja layanan, kinerja manajer, penyediaan sarana dan prasaran umum oleh BUMD Kota Bandung.

Perusahaan pada umumnya termasuk juga BUMD diharapkan mampu memenangkan persaingan dan merebut pasar serta peluang bisnis untuk dapat bertahan dan sukses dikemudian hari. Daft (2007) memberikan beberapa pandangan dan saran agar perusahaan eksis pada pencatutan bisnis global melalui disiplin kerja, etos kerja tinggi, berlaku adil, layak kepada perusahaan, fokus pada bisnis yang dijalankan serta renponsif terhadap perubahan lingkungan. Kemudian Uzkuurt, et al (2013) menjelaskan tidak hanya aspek budaya, tetapi informasi dan peran inovasi juga penting yang harus dikemas dan dibangun secara kontinyu agar kemampuan bersaing dan bertahan lebih kuat serta memiliki kesiapan jangka panjang untuk

menuju kemenangan dalam pencatutan bisnis global yang terus berubah yang sulit diprediksi kemana arahnya akan bergerak. Kemudian, Kalkan, et al (2014) jika manajemen perusahaan mendapatkan informasi yang akurat dan mendukung pengambilan keputusan maka aktivitas dari keputusan tersebut dapat membantunya terciptanya arah bisnis yang lebih baik dimasa akan datang.

Inovasi merupakan *the 4Ps of innovation space* yaitu *paradigm (mental model), process, position, and product (services)* jika diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dimasa akan datang (Tidd dan Bessant, 2014).

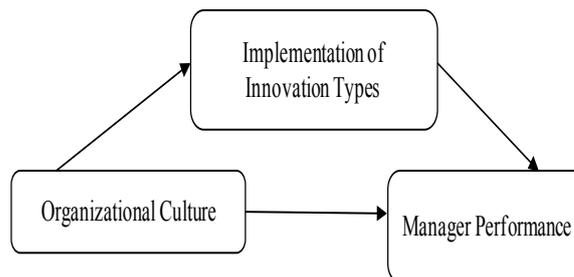
Inovasi terdiri dari kata 4P yaitu (1) *product innovation* merupakan perusahaan diharapkan selalu menghasilkan produk fisik dan non fisik untuk kebutuhan konsumen; (2) *process innovation* merupakan memiliki cara-cara baru dalam menjual produk-produk yang dihasilkan; (3) *Position innovation* merupakan perusahaan mampu memperkenalkan produk-produk baru dalam berbagai situasi yang dihadapinya, dan (4) *Paradigm innovation* merupakan semua organ organisasi memiliki mental positif dan etos kerja yang sejalan *goal congruence* perusahaan. Selanjutnya, inovasi tentunya menekankan kepada bagaimana manajer dan bawahan secara kontinyu dan konsisten menghasilkan kreativitas dan sinergi serta mampu membangun motivasi dan disiplin kerja. Sinerginitas ini menghasilkan kemampuan bersaing dan merebut pangsa pasar sehingga mendapatkan profit bagi perusahaan.

Selanjutnya, budaya organisasi adalah implementasi konsep adat istiadat dan kebiasaan manusia di daerah tertentu, seperti kebiasaan hidup, pola hidup, kebiasaan dalam berpakaian, kedisiplinan, loyal kepada perusahaan, berlaku adil sesama dan lain sebagainya (Daft, 2007). Apabila dilaksanakan secara baik dan kontinyu akan memberikan manfaat positif bagi yang menjalankannya.

Apakah konsep budaya organisasi dan *the 4Ps of innovation space* dapat memberikan manfaat positif bagi perusahaan yang menjalankannya. Berikut adalah cuplikan tentang hasil penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu menyatakan inovasi dan budaya organisasi berdampak positif terhadap kinerja perusahaan (Ahn, et al., 2015; Dahlan dan Sumaryana, 2017 dan Kalkan, et al., 2014). Bergitu juga Ting et al. (2012) dan Uz Kurt, et al., (2013) pada perusahaan UMKM, inovasi dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Namun hasil penelitian Uz Kurt, et al., (2013) dan Zafar et al., (2016) menjelaskan inovasi dan budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan UMKM jika peran manajemen tinggi dan iklim kerja kondusif. Sedangkan penelitian Ting, et al., (2012) menjelaskan bahwa implementasi inovasi dapat meningkatkan kinerja, jika dimoderasikan oleh perubahan lingkungan eksternal. Selanjutnya, Zafar et al., (2016) menyatakan inovasi dapat juga bertindak sebagai perantara dalam hubungan antara budaya organisasi dan kinerja. Artinya budaya organisasi dan implementasi inovasi yang

dilaksanakan secara baik dan konsisten diharapkan dapat mengubah kinerja perusahaan terus meningkat.

Mengacu kepada ulasan di atas, maka dapat digambarkan anak panah seperti berikut:



Gambar 1. Model Konseptual Penelitian.

Oleh karena itu, mengacu kepada *research question*, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H1: Terdapat hubungan positif dan signifikan antara budaya organisasi dan implementasi inovasi dengan kinerja manajer.

METODE

Sampel penelitian ini adalah 7 perusahaan milik Pemerintah Kota Bandung (BUMD). Pengumpulan data mengacu kepada kuesioner 5-skala Likert (Sekaran dan Bougie) yang dirancang khusus dan disesuaikan dengan BUMD. Menggunakan manajer perusahaan dan masyarakat pengguna jasa BUMD sebagai responden, sehingga penelitian ini berhasil mengumpulkan kuesioner siap diolah adalah sebanyak 64. Disamping itu, penelitian ini juga menggunakan *Time Order Decision* dari Johnson dan Onwugbuzie's (2004) dalam Shauki (2016), metode ini untuk mewawancarai beberapa responden tertentu untuk menanyakan lebih lanjut atas data yang ada dan informasi-informasi lain yang relevan dengan penelitian sebagai konfirmasi keabsahan data dan kondisi yang sesungguhnya memang demikian adanya.

Operasionalisasi variabel merupakan uraian indikator dan dimensi dari variabel penelitian yang dikaji dalam penelitian ini yaitu *implementation of innovation types* sebagaimana yang dijelaskan oleh Tidd dan Bessant (2014). Budaya organisasi yang berkaitan dengan layanan publik seperti kedisiplinan pegawai, ramah tamah, berlaku adil, loyal kepada perusahaan dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai positif (Daft, 2007). Sementara untuk kinerja perusahaan (K_Perusahaan) menggunakan dua aspek yaitu kinerja pelayanan publik dan kinerja kualitatif. Kinerja kualitatif diukur menggunakan indikator dan dimensi dari Mahoney, et al. (1963), sedangkan kinerja pelayanan publik menggunakan dan mengacu kepada UU Nomor 25 tahun 2009.

Pengujian data mengacu kepada model regresi sederhana (Sekaran and Bougie, 2010) dan model persamaan regresi seperti berikut:

$$K_Pelayanan\ (Layanan\ Publik) = C1 + b1.1INO + b1.2BO + e1 \dots\dots\dots (1)$$

$$K_Manajer\ (Kualitatif) = C2 + b2.1INO + b2.2BO + e2 \dots\dots\dots (1)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berdasarkan pada tabel 1 di atas menjelaskan bahwa hasil tes data secara statistik deskriptif dapat disimpulkan data yang dianalisis dapat memberikan hasil yang akurat dan relevan sesuai uji yang dilakukan. Karena nilai minimum terendah 10,00, nilai maksimum terendah 17,45, nilai mean tertinggi 40,97, standard deviasi terkecil 2,86, nilai KMO di atas 0,820 dan *cormbach alpha* di atas 0,870.

Analisis Korelasi

Tabel 2: Korelasi Pearson

Variabel	Correlations	BTS
Total Performance	1	446,982**
Implementation of Innovation Types	0,620**	1 236,338**
Organization Culture	0,603**	233,925**
	0,440**	1

**) Significant at the 0,01 (two-tailed)

Mengacu kepada tabel 2 di atas menunjukkan bahwa tingkat korelasi antar variabel penelitian ini berada pada posisi signifikan pada 0,01 dan hasil *bartlet's test* adalah di atas 233,920. Hasil ini semakin memperkuat bahwa hasil tes regresi akan memberikan hasil yang signifikan pula.

Analisis Pengaruh

Tabel 3: Pengaruh langsung dan tidak langsung

Dependent variable: Total Performance				
	B	t-test	F-test	R-Square
Constant	7,960	0,059	0,000	0,519
Implementation of Innovation Types	0,824	0,000		
Organizational culture	0,974	0,000		
Dependent variable: Implementation of Innovation Types				
Constant	9,683	0,000	0,000	0,194
Organizational culture	0,559	0,000		
Dependent variable: Public Service Performance				
Constant	7,452	0,002	0,000	0,381
Implementation of Innovation Types	0,387	0,000		
Organizational culture	0,352	0,000		

Tabel 1. Hasil Tes Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	SD	KMO	CA
Total Performance	64	27,00	53,00	40,97	6,81	0,853	0,908
Implementation of Innovation Types	64	11,00	25,00	19,44	3,63	0,828	0,877
Organizational Culture	64	10,00	23,00	17,45	2,86	0,822	0,915

Dependent variable: Manager Performance

Constant	0,508	0,830	0,000	0,530
Implementation of Innovation Types	0,437	0,000		
Organizational culture	0,622	0,000		

Analisis hubungan dilakukan melalui tiga model persamaan regresi yaitu analisis pengaruh terhadap total kinerja perusahaan, kinerja pelayanan publik, dan kinerja manajer. Berdasarkan tabel 3 di atas dapat disimpulkan seperti berikut:

- Hasil uji regresi sederhana menunjukkan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap implementasi inovasi badan usaha milik daerah Kota Bandung.
- Hasil uji regresi sederhana menunjukkan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajer badan usaha milik daerah Kota Bandung melalui implementasi inovasi
- Hasil uji regresi sederhana menunjukkan implementasi inovasi dan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajer perusahaan badan usaha milik daerah Kota Bandung.

Hasil uji regresi di atas dapat menjadi pertimbangan peneliti bahwa apa yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu adalah mendukung dan konsisten dengan hasil penelitian terdahulu.

Beberapa penelitian terdahulu menyatakan variabel inovasi serta budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajer perusahaan (Ahn, et al., 2015; dan Kalkan, et al., 2014). Bergitu juga Ting et al. (2012) dan Uz Kurt, et al., (2013) pada perusahaan UMKM memang implementasi inovasi sangat diharapkan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Namun penelitian Uz Kurt, et al., (2013) dan Zafar et al., (2016) menjelaskan variabel inovasi dan budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan UMKM jika peran manajemen tinggi dan iklim kerja kondusif.

Sedangkan penelitian Ting, et al., (2012) menjelaskan inovasi berdampak positif terhadap kinerja, jika dimoderasikan oleh perubahan lingkungan eksternal. Selanjutnya, Zafar et al., (2016) menyatakan variabel inovasi dapat juga bertindak sebagai mediating antara budaya organisasi dengan kinerja. Kemudian dapat diartikan H-1 dapat diterima, karena hasil uji konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya. Perbedaannya hanya lokasi penelitian dan sampel penelitian yang digunakan, sementara penelitian ini menggunakan BUMD Kota Bandung sebagai sampel dan lokasinya di Indonesia.

Penelitian ini menganalisis hubungan antara budaya organisasi, inovasi dan kinerja. Hasil tes menunjukkan terdapat hubungan positif antara budaya organisasi, inovasi dan kinerja, baik kinerja manajer, kinerja perusahaan dan kinerja pelayanan publik. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya.

Selanjutnya, hal ini bisa terjadi jika seluruh komponen yang harus selalu disiplin, berkharisma, berwibawa, transparan, menjunjung tinggi nilai-nilai positif, etos kerja, loyal kepada perusahaan serta berlaku adil untuk semua pihak yang dilayani. Disamping itu, dengan adanya nilai-nilai positif dan loyal kepada perusahaan maka pada saatnya nanti dan ditambah dengan dukungan manajemen dalam hal pendidikan berkelanjutan, program training dan workshop, sarana dan prasarana yang memadai, dapat diyakini bahwa inovasi demi inovasi dapat dihasilkan inovasi demi inovasi dapat diciptakan, misalnya; pola layanan, iklim kerja, produk baru, update perubahan global, serta kemajuan teknologi tepat guna akan terus dijangkau oleh karyawan dan manajer perusahaan, akhirnya tercapainya output dan kinerja perusahaan sebagaimana yang ditargetkan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa hasil penelitian dan upaya-upaya yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan amanat UUD tahun 1945. Akan tetapi hasil wawancara dengan beberapa responden terpilih baik dari internal perusahaan (manajer) maupun dari eksternal perusahaan (masyarakat pengguna jasa layanan perusahaan) menyatakan bahwa kinerja dan pelayanan publik yang memuaskan semua pihak belum optimal sebagaimana mestinya, masih ada sektor-sektor tertentu pelayanan publik belum kunjung datang juga, misalnya; penyediaan air bersih, aspek keamanan, kebersihan pasar dan jalan kota serta desa, pelayanan kesehatan harus mengantri jika berobat, pasilitas parkir umum dan halte bis, pasar tradisional kurang tertata, dan drainase serta saluran tersier jika musim hujan tiba dapat mengalami banjir kecil dadakan. Hal ini bisa saja terjadi karena kemampuan BUMD yang terbatas dibandingkan dengan kebutuhan layanan yang harus tersedia.

Pengumpulan data menggunakan kuesioner, maka ini sebagai bentuk bias dalam pengumpulan data penelitian, sebab bisa ini tidak bisa dikontrol oleh peneliti. Hasil penelitian mendukung hasil penelitian terdahulu dan merekonfirmasi pentingnya *the 4Ps of innovation space* yaitu *paradigm (mental model), process, position, and product (services)*, jika diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dimasa akan datang (Tidd dan Bessant, 2014).

SIMPULAN

Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara budaya organisasi dan implementasi *innovation types* dan dampaknya pada kinerja pelayanan publik dan kinerja manajer perusahaan BUMD Kota Bandung.

Kemudian budaya organisasi juga berpengaruh secara tidak langsung pada taraf positif dan signifikan terhadap kinerja pelayanan publik dan kinerja manajer perusahaan BUMD Kota Bandung dan implementasi *innovation types* sebagai pemediasi. Hal ini disebabkan oleh kedisiplinan, etos kerja, loyal, berlaku adil sesama, menjunjung tinggi nilai-nilai positif dan sebagainya. Kemudian para karyawan dan manajer selalu menciptakan pola-pola layanan terbaru, nilai-nilai positif bagi pengguna, secara berkala menghasilkan produk-produk baru dan pangsa pasar baru sehingga kinerja perusahaan terus meningkat. Namun demikian, inovasi yang dilakukan belum berdampak secara luas hingga kelingkungan masyarakat misalnya penyediaan air bersih yang mengalir sampai jauh.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya, budaya organisasi dan implementasi inovasi berpengaruh positif terhadap kinerja. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, dalam kajiannya implementasi *innovation types* sebagai variabel perantara dan *the 4Ps of innovation space* sebagai indikator dalam mengukur *innovation types*.

Pola kerja dan etos kerja serta inovasi secara kontinyu tidaklah cukup di zaman globalisasi ini, untuk itu, kami mengajak semua elemen baik karyawan dan manajer BUMD serta masyarakat haruslah selalu adanya koordinasi, harmonisasi, komunikasi dan manajer secara kontinyu melaksanakan sidak apa yang sesungguhnya sedang terjadi dilapangan, serta masyarakat tidak boleh bosan mengirimkan surat komplain dan pemberitahuan tentang apa-apa yang sedang terjadi di lapangan. Tujuannya adalah agar BUMD dapat menyediakan semua sarana dan prasarana bagi masyarakat pengguna dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahn, J.M., Minshall, T. & Mortara, L. (2015), The relationship between innovation and firm performance: an empirical evidence from Turkish automotive supplier industry. *Procedia-social and behavioral sciences* 75: 226-235.
- Daft, R.L. (2007). *Management*. 6th Edition. Singapore: Thomson Learning.
- Dahlan, M., Auzair, S. Md., & Ibrahim, W. Mzd. (2007). Tight Budgetary Control, Business Strategy, External Environment and Firm Performance. *Malaysian Accounting Review*. 6, (2), 81-97.
- Dahlan, M. & Sumaryana, A. (2017). Pengaruh penerapan good governance terhadap kinerja pelayanan publik, budaya organisasi dan lingkungan eksternal sebagai pemoderasi. *Sosiohumaniora*. 19, (1), 45-51.
- Kalkan, A., Bozkurt, O.C. & Arman, M. (2014), The impact of intellectual capital, innovation and

- organizational strategy on firm performance. *Procedia-social and behavioral sciences* 150: 700-707.
- Mahoney, T.A., Jerdee, T.H. & Carrol, S.J. (1963). *Development of Managerial Performance: a Research Approach*. Cincinnati: South western Publishing.
- Sekaran, U. & Bougie, R. (2010). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. Fifth edition. West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd.
- Shauki, E.R. (2016). Enhancing the outcome data analysis by using mixed-method research. *Handout Applied Research Method Part 2*. Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Tidd, J. & Bessant, J. (2014). *Managing Innovation: Integrating Technology, market and Organizational Change*. Fifth Edition. Italy: Printer Trento Srl.
- Ting, H.F., Wang, B.W. & Wang, D.S. (2012), The moderating role of environmental dynamism on the influence of innovation strategy and firm performance. *International Journal of innovation, management and technology*. 3, (5), 517-520.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. *Dasar Negara*. Jakarta.
- Undang-Undang RI. No. 25 Tahun 2009. *Pelayanan Publik*. Jakarta.
- Uzkurt, C., Kumar, R., Kimzan, H.S., & Eminoglu, G. (2013), Role of innovation in the relationship between organizational culture and firm performance: a study on the banking sector in Turkey. *European Journal of innovation Management*. 16 (1): 92-117.
- Wheelen, T.L. & Hunger, J.D. (2015). *Strategic Management and Business Policy: Achieving sustainability*. Thirteenth edition. Boston: Prentice Hall.
- Zafar, H., Hafeez, M.H. & Shariff, M.N.M. (2016), Relationship between market orientation, organizational learning, organizational culture and organizational: mediating impact of innovation. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*. 9, (2), 40-56.

REPRESENTASI PERUBAHAN SOSIAL DALAM DESAIN KAUS OBLONG BANYUMASAN

Sulyana Dadan

Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Jenderal Soedirman

E-mail: kangdadan_garut@yahoo.com

ABSTRAK. Kaus oblong Banyumasan sering menampilkan situasi dan isu aktual dalam setiap desainnya, seperti persoalan pendidikan, politik, budaya dan dinamika sosial kemasyarakatan yang terjadi di Banyumas. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana representasi perubahan sosial yang dapat terbaca dalam desain kaus oblong Banyumasan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan semiotik dari Roland Barthes. Data penelitian berupa desain kaus oblong Banyumasan merk *Dablongan Clothing*. Data tersebut dianalisis melalui dua tahap penafsiran, dimana penafsiran makna tataran pertama selanjutnya dijadikan pijakan dalam menafsirkan makna tataran kedua. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa sebagian besar desain kaus oblong Banyumasan merupakan representasi sekaligus kritik terhadap perubahan sosial di Banyumas. Perubahan sosial yang dimaksud antara lain tentang penataan kota yang tidak humanis; perubahan masyarakat agraris menjadi kota industri; dan gaya hidup masyarakat Banyumas yang adaptif terhadap modernitas dalam hal konsumsi makanan-makanan bergaya barat.

Kata kunci: representasi; perubahan sosial; desain kaus oblong

THE REPRESENTATION OF SOCIAL CHANGE IN BANYUMASAN T-SHIRT DESIGN

ABSTRACT. Banyumasan T-shirt often displays actual situations and issues in each design, such as issues of education, politics, culture and social dynamics that occur in Banyumas. Therefore, the purpose of this research is to see how a legible representation of social change in the Banyumasan T-shirt design. The research uses a qualitative method a semiotic approach from Roland Barthes. The form of data is Banyumasan T-shirt designed by Dablongan Clothing. The data is analyzed through two stages of interpretation, where the interpretation of the meaning of the first level is posed as a basis in interpreting the meaning of the second level. The results show that most of Banyumasan's T-shirt design was a representation and critique of social change in Banyumas. The social changes refer to, among other things, the inhumane arrangement of the city; change of agrarian society into an industrial city; and the lifestyle of the Banyumas people who are adaptive to modernity in terms of consumption of western-style foods.

Key words: representation; social change; T-shirt design

PENDAHULUAN

Kaus oblong (*T-shirt*) telah mengalami transformasi makna dalam dinamika kebudayaan kontemporer. Kaus oblong berkembang menjadi produk fashion yang memiliki ragam makna; dari simbolisasi gaya hidup, status sosial dan afiliasi identitas tertentu. Gambar dan tulisan (teks) dalam kaus oblong juga semakin variatif, tidak hanya bersifat estetis, namun mampu menampilkan realitas sosial-budaya kontemporer yang beragam. Menurut Antariksa (2009: 3) dan Bangsawan (2014: 30), saat ini kaus oblong telah menjadi wahana tanda untuk menyampaikan teks secara terbuka, dari pengalaman, gerakan politik, bisnis, relasi sosial, identitas dan bahkan yang tidak menunjukkan identitas si pemakainya.

Kaus oblong juga kerap digunakan sebagai media dalam menyebarkan ideologi dan gerakan sosial. Andrew (2014: 2) mencontohkan, pada 1960-an, kaum *hippies* di Amerika Serikat (AS) menggunakan kaus oblong sebagai media kampanye untuk mengajak masyarakat dalam menekan pemerintah AS agar segera menghentikan invasi militernya di Vietnam. Contoh lainnya adalah legenda dunia musik yaitu John Lennon yang sering menggunakan kaos bertuliskan "*Make Love Not War*". Selain itu, kaus oblong dengan desain lambang perdamaian karya Gerald Holtom juga banyak dipakai di berbagai belahan dunia.

Sebagai salah satu jenis budaya populer, peredaran kaus oblong telah merambah ke semua pelosok Indonesia, termasuk Banyumas. Di wilayah ini, bermunculan produsen kaus oblong dengan beragam corak desain yang menunjukkan budaya Banyumasan, seperti: falsafah hidup, seni-budaya, bahasa, watak masyarakatnya, tradisi, dan lain-lain. Kaus oblong Banyumasan ini sering menampilkan fenomena sosial-budaya kontemporer yang sedang jadi buah bibir masyarakat. Contohnya Malaysia yang sering mengklaim berbagai kebudayaan dan seni Indonesia, isu korupsi, dinamika politik lokal, kritik terhadap dunia pendidikan dan lain-lain.

Shodiq, dkk (2014: 23) dan Hariyadi (2016: 6) menyebutkan bahwa sampai akhir 2014, terdapat 17 (tujuh belas) produsen kaus oblong di wilayah Banyumas. Jumlah ini meningkat pesat dari yang hanya satu merk pada tahun 2006-an, yakni kaos *Dablongan*. Produsen dan merk kaus oblong Banyumasan yang saat ini eksis antara lain: *Bhineka Ceria, Kidal Kolektif, Dablongan, Kreasi Inyong, Bengkong, Ngapak, Kuda Lumping, Orange Clothing, Konveksine Inyong, Maning, Bawor, Ice Box, Baloeng Gedhe, Youth Attack, Klinik Rebel, Cablaka dan Domong*.

Beberapa contoh tulisan dalam kaus oblong Banyumasan merk *Dablongan* misalnya; "*Mendoan Banyumas, dejaga sing ngati-ngati sedulur, aja nganti diaku-aku wong*

malaysia” (*Mendoan* Banyumas harus benar-benar dijaga, jangan sampai diklaim oleh Malaysia), “*Rika tah meneng bae nglombo, apa maning ngomong*” (Kamu itu diam saja sudah bohong, apalagi (kalau sampai) ngomong), “*Burit kantor; didelah nang pedaringan jelas kesenengan*” (tikus kantor (koruptor), disimpan di tempat penyimpanan beras tentu kesenengan), dan lain-lain.

Teks (tulisan dan gambar) dalam kaus oblong Banyumasan dapat dibaca sebagai ekspresi budaya sekaligus sikap kritis masyarakat Banyumas dalam menyikapi berbagai fenomena sosial-budaya keseharian yang terjadi di sekitarnya. Artinya, berbagai desain kaus oblong Banyumasan sejatinya merupakan potret proses perubahan sosial yang terjadi pada saat kaus tersebut diproduksi. Ragam perubahan sosial tersebut dikemas dengan menggunakan bahasa Banyumasan dan gambar yang selama ini menjadi identitas budaya Banyumas, seperti sosok Bawor, Alun-alun, kopi tubruk khas Banyumas, *mendoan* dan lain-lain.

Bertolak dari latar belakang di atas, maka penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana representasi perubahan sosial dalam desain kaus oblong Banyumasan. Tujuannya adalah untuk mengetahui dinamika perubahan sosial di wilayah Banyumas yang terekspreksikan dalam salah satu budaya populer yaitu kaus oblong Banyumasan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan semiotik. Sasaran penelitiannya berupa data tekstual, baik tulisan maupun gambar yang terdapat dalam kaus oblong Banyumasan. Pengumpulan data diawali dengan menyeleksi desain-desain kaus oblong Banyumasan dari merk *Dablongan Clothing*. Pertimbangannya, merk *Dablongan Clothing* adalah merk kaus oblong Banyumasan paling populer di Banyumas dan paling banyak menampilkan isu-isu tentang perubahan sosial di Banyumas. Setelah diseleksi, desain terpilih dianalisis menggunakan pendekatan semiotik dari Roland Barthes. Semiotika yang dikembangkan Barthes (1972), lebih menekankan untuk mengungkapkan makna “lain” yang ada dalam teks yang hanya bisa dilakukan melalui metode semiotika tingkat dua atau mitos. Menurut Barthes (1972: 303), mitos berada dalam sistem semiologis tatanan kedua (*second-order semiological system*). Artinya, apa yang merupakan tanda dalam sistem yang pertama, selanjutnya hanya akan menjadi sekedar penanda dalam sistem yang kedua. Berdasarkan pemahaman tersebut, penelitian ini akan menguraikan terlebih dahulu makna-makna data tekstual di tataran pertama untuk kemudian dijadikan pijakan dalam menafsirkan makna di tataran kedua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Semiotik

Desain Alun-alun Purwokerto



sumber: dokumentasi peneliti, 2017

Gambar 1: desain kaus Alun-alun Purwokerto

Pada sistem semiotika tataran pertama (denotasi), gambar dan tulisan dalam desain kaus oblong di atas bermakna seorang tukang cukur sedang memotong rambut pelanggannya di bawah sebuah pohon besar. Di dekat tukang cukur ada seorang anak kecil yang sedang duduk dan tidak jauh dari anak kecil itu juga terdapat becak kosong yang sedang parkir. Teks verbal dalam desain kaus oblong di atas berfungsi sebagai penambat (*anchorage*) yang mengikat makna bahwa beberapa aktivitas yang terlihat di gambar merupakan aktivitas yang biasa atau pernah terjadi di bawah pohon beringin kurung di tengah alun-alun Purwokerto pada tahun 1960-an.

Pada semiotika tataran kedua, desain di atas menawarkan beberapa makna konotatif. Pertama, kegiatan usaha pangkas rambut yang bertempat di bawah pohon berkonotasi dengan jenis usaha yang biasanya dilakukan masyarakat kelas bawah, dimana para pelanggannya juga berasal dari kalangan masyarakat bawah. Kemudian, penanda visual berupa gambar becak biasanya juga berkonotasi dengan kehidupan masyarakat kecil atau bahkan kemiskinan. Jadi, teks visual di atas bermakna bahwa di masa lalu, Alun-alun Purwokerto merupakan salah satu tempat mencari nafkah bagi lapisan masyarakat kelas bawah.

Penanda visual di atas juga bermakna tentang suasana klasik Alun-alun Purwokerto, dimana kala itu terdapat pohon beringin besar yang terletak di tengah alun-alun yaitu beringin kurung yang dijadikan salah satu tempat beraktivitas oleh masyarakat. Penanda pohon beringin kurung yang dipagari tembok menawarkan makna bahwa pemerintah sangat melindungi dan menjaga pohon tersebut. Gambar pohon beringin kurung juga merupakan pesan ikonik berkode karena pohon beringin terkait dengan identitas budaya Jawa. Dalam mitologi

Jawa, beringin kurung merupakan simbol menyatunya penguasa dan masyarakat, di mana di masa lalu, di bawah pohon beringin kurung sering digunakan sebagai tempat oleh rakyat untuk bertemu dan berkeluh kesah kepada rajanya. Oleh karena itu, di beberapa daerah di Jawa Tengah, beringin kurung dijadikan cagar budaya yang dilindungi oleh undang-undang.

Pada desain di atas juga terdapat gambar kompleks bangunan tradisional berupa beberapa bangunan berbentuk joglo. Secara denotatif penanda ini bermakna sebagai kantor pemerintahan Kabupaten Banyumas pada waktu itu di mana di depan alun-alun terdapat bangunan yang bernama pendopo Si Panji yang biasa digunakan sebagai digelarnya acara-acara resmi pemerintahan dan pertemuan antara pemerintah dengan masyarakat. Penanda kantor pemerintahan ini berkonotasi dengan kekuasaan. Oleh karena itu, aktivitas keseharian masyarakat di Alun-alun Purwokerto dengan latar belakang kompleks kantor pemerintahan merupakan penanda yang memberikan petanda tentang kedekatan antara rakyat dan penguasa pada saat itu. Teks visual di atas menawarkan makna bahwa penguasa pada waktu sangat mengayomi masyarakatnya sehingga memperbolehkan masyarakat untuk mencari nafkah di tengah lapangan alun-alun. Di masa lalu, alun-alun memang merupakan pusat kegiatan masyarakat sehari-hari dari perdagangan, kerajinan sampai pendidikan bahkan pertahanan karena sering pula digunakan sebagai tempat latihan para prajurit atau militer.

Jadi, desain kaus oblong di atas merupakan representasi masyarakat Banyumas yang guyub rukun dengan pemerintahnya di masa lalu. Masyarakat kecil dijaga dan dilindungi oleh penguasa Banyumas waktu itu dalam mencari nafkah. Adanya ikon beringin kurung yang dipagar merupakan pesan bahwa pemerintah di masa lalu sangat melindungi beringin kurung yang bernilai sebagai cagar budaya. Oleh karena itu, desain di atas merupakan upaya membandingkan kondisi alun-alun di masa lalu dengan masa kini, sehingga desain di atas sebenarnya merupakan kritik terhadap pemerintah di era sekarang yang telah merombak alun-alun.

Desain Bawor Ranger



sumber: dokumentasi peneliti, 2017

Gambar 2 . Desain Bawor Ranger

Pada sistem semiotika tingkat pertama, teks visual dan verbal di atas bermakna sesosok wayang orang yang sedang berlari. Ia berlari dengan memejamkan mata dan mulut menyeringai. Teks verbal Bawor Ranger berfungsi sebagai penambat dari teks visual untuk menjelaskan bahwa sosok tersebut adalah Bawor Rangers. Jadi secara denotatif, makna desain di atas adalah Bawor Rangers yang sedang berlari.

Pada sistem semiotika tataran kedua, penanda visual dan verbal di atas menawarkan makna konotatif yang terkait dengan identitas budaya Banyumas. Sosok dalam desain di atas disebutkan sebagai Bawor Ranger. Sosok Bawor, merupakan pesan ikonik berkode karena memiliki kode budaya sebagai maskotnya *wong* Banyumas di mana beberapa karakternya dianggap mewakili masyarakat Banyumas. Seperti dikatakan Tohari (2014: 38):

“Anadene Bawor; penakawan anak mbarepe Semar, pancen dedhapuk nggo makili wateke wong penginyongan; lugu, apa anane, lan angger wicara ora basa. Kabeh kurwe mertelakna wateke masrakat sing budayane ora nganggo undha-usuk. Lan kiye lewih cocog tumrap alam siki sing dearani alam demokrasi. Mula jan-jane budaya penginyongan siang asale sekang budaya Jawa Kuna kudu dejaga, malah kudu debangun supaya lewih kuat maning?”.

[adalah Bawor, punakawan anak pertama Semar, memang didaulat mewakili watak masyarakat panginyongan (Banyumas); yang lugu, apa adanya dan jika berbicara tidak begitu memperdulikan sopan santun. Semuanya itu menggambarkan watak masyarakat yang budayanya tidak menggunakan kaidah etika sopan-santun. Dan ini lebih cocok diwujudkan di era sekarang ini yang dinamakan alam demokrasi. Oleh karena itu, budaya panginyongan yang asalnya bersumber dari budaya Jawa Kuno harus dijaga, bahkan harus dibangun supaya lebih kuat lagi (*pen.*)]

Oleh karena itu, penanda Bawor merupakan konotator bagi masyarakat Banyumas dengan berbagai kekhasan karakternya tersebut di atas. Namun, penampakan Bawor yang terdapat dalam desain di atas sangat berbeda dengan penampakan Bawor yang selama ini dikenal di Banyumas. Bawor yang dijadikan maskot orang Banyumas adalah Bawor versi wayang gagrak Banyumasan yang memiliki ciri fisik seperti Semar sebagai bapak dari Bawor. Heru Satoto (2008: 201) menyebutkan bahwa Bawor memiliki tubuh yang tambun, pendek, kepalanya *bloak*, perut bulat, pusarnya *bodong*, agak bungkuk suaranya berat dan besar. Kemiripan Bawor dan Semar menurut cerita pewayangan versi Banyumasan karena Bawor bukanlah anak biologis dari Semar, tapi merupakan jelmaan dari bayangan Semar yang sengaja diciptakan untuk menemani perjalanan Semar. Dalam desain di atas, Bawor digambarkan tidak bertubuh seperti yang dicitrakan selama ini. Hal ini bisa ditafsirkan bahwa ada perubahan dalam diri Bawor atau bisa jadi menawarkan makna tentang perubahan pada

karakter *wong* Banyumas. Meskipun demikian, berbagai aksesoris tradisional yang melekat pada tubuh Bawor dapat bermakna tentang keadaan tidak lepas (kuatnya) sifat-sifat tradisional (khas) yang dimiliki oleh Bawor. Herusatoto (2008: 202) dan Priyadi (2003: 24 dan 2013: 35) menyebutkan selain *cablaka*, Bawor memiliki sifat sabar, berjiwa ksatria dan *cancudan* (rajin dan cekatan) sehingga dihormati oleh adik-adiknya.

Petanda perubahan karakter masyarakat Banyumas, dikuatkan dengan adanya penanda lingual/ verbal yakni “Bawor Ranger”. Penanda ini secara intertekstualitas mengacu pada sebuah film animasi anak yaitu “Power Rangers”. Film ini bercerita tentang sekelompok anak muda di Amerika yang bisa berubah dari manusia biasa menjadi super hero (pahlawan). Perubahan itu biasanya dilakukan ketika ada musuh yang datang dan menyerang kota di mana mereka tinggal. Mereka juga bisa mengendalikan robot raksasa yang berasal dari gabungan kendaraan atau senjata yang mereka miliki.

Jadi, secara konotatif desain Bawor yang berubah menjadi Bawor Ranger di atas dapat dimaknai bahwa masyarakat Banyumas saat ini sedang mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan karakternya sebagai *wong panginyongan* dan bisa juga perubahan sosial yang terjadi dalam diri Bawor sebagai bagian dari masyarakat. Artinya, sosok Bawor yang berubah juga memberikan petanda bahwa saat ini sedang terjadi proses perubahan sosial di wilayah Banyumas. Oleh karena itu, aktivitas Bawor Ranger yang sedang berlari juga menawarkan makna tentang masyarakat Banyumas yang sedang berlari mengikuti laju perubahan sosial yang terjadi.

Selanjutnya, dilihat dari ekspresi wajahnya (mata yang dipejamkan dan mulut yang menyeringai), Bawor Ranger yang berlari ini seperti sedang mengalami kelelahan. Hal ini dapat dimaknai, bahwa sebagian masyarakat merasa gagap dengan perubahan yang begitu cepat tersebut sehingga merasa kelelahan. Saat ini, wilayah Banyumas telah menjelma menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial di wilayah Jawa Tengah bagian barat. Masyarakat Banyumas merasa lelah ketika menghadapi perubahan sosial. Atau dengan kata lain, telah terjadi fenomena gegar budaya pada masyarakat Banyumas akibat transformasi dalam kehidupan mereka yang begitu cepat.

Jadi, seluruh desain kaus dengan tema “Bawor Ranger” di atas merupakan representasi tentang *wong Banyu-mas* yang sedang mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi seiring laju perubahan sosial di Banyumas yang begitu cepat. Meskipun demikian, karakter khas *wong* Banyumas yang *cablaka*, sederhana, lugas dan lain-lain tetap melekat di tengah gempuran perubahan sosial yang terjadi.

Desain Clebek

Pada sistem semiotika tingkat pertama, desain di atas memiliki makna sebuah cangkir warna putih yang

berisi benda (cair) berwarna hitam. Cangkir tersebut diletakkan di atas sebuah tatakan yang juga berwarna putih. Di dekat cangkir, juga terdapat gambar biki kopi bertebaran yang terdapat dalam lingkaran berbentuk donat berwarna cokelat.



sumber: dokumentasi peneliti, 2017

Gambar 3: Desain Clebek

Pada semiotika tataran kedua, teks visual cangkir berelasi dengan teks verbal “Clebek” yang ditulis dalam huruf besar. Kata “Clebek” berfungsi sebagai penambat bagi teks visual untuk mengikat makna bahwa yang ada dalam gelas itu adalah kopi khas Banyumas yang disebut *clebek* atau kopi tubruk. *Clebek* adalah kopi pahit dengan warna hitam pekat dimana takaran kopinya lebih banyak daripada gulanya. Sementara teks verbal lainnya yakni “*bhuket kopine, padhang pikirane*” berfungsi sebagai pemancar (relay) bagi teks visual untuk menjelaskan bahwa *clebek* yang kental (*bhuket*) memiliki khasiat tertentu yakni mampu membuat pikiran *padhang* (terang).

Penanda tanda visual berupa segelas kopi yang terlihat masih berasap di atas menawarkan makna bahwa kopi *clebek* siap saji. Artinya, *Clebek* bisa dinikmati kapan pun dan bagi siapa pun yang menginginkan pikirannya terang. Pikiran terang adalah kondisi dimana pikiran seseorang yang *fresh* (segar) karena tidak punya atau terlepas dari berbagai permasalahan yang menguras kerja pikiran (mental). Sebaliknya, pikiran gelap berasosiasi dengan banyaknya atau adanya persoalan yang sulit atau belum menemukan jalan keluarnya. Jadi, berdasarkan frasa dalam teks visual di atas, maka semakin kental dan pahit secangkir *clebek*, maka akan membuat sebuah permasalahan dapat terselesaikan. Sebaliknya, semakin encer *clebeknya*, justru membuat sebuah permasalahan menjadi tidak terselesaikan dan membuat pikiran menjadi gelap (kalut). Jadi, bagi *wong Banyumas*, untuk mengatasi berbagai persoalan yang menguras pikiran, cukup dihadapi dengan santai, yakni minum *clebek* yang kental, maka segala persoalan tersebut “akan” hilang.

Teks *Clebek* juga berelasi dengan budaya minum kopi di Banyumas yang sudah berlangsung lama. Biasanya, minum kopi dilakukan ketika melakukan *ndopokan* membahas persoalan yang serius atau sekedar mengobrol.

Menurut Herusatoto (2008: 97), *ndopokan* artinya *ngudar rasa* atau mengobrol untuk mengeluarkan *unek-unek* kepada orang lain agar jika ada permasalahan bisa dibagi kepada orang lain untuk mencari solusinya sehingga pikirannya menjadi lebih rileks. *Ndopokan* dapat juga diartikan sebagai curahan hati (curhat) yang dilakukan ketika sedang berumpul bersama teman atau sanak saudara.

Jadi, desain di atas secara umum menawarkan makna tentang khasiat *clebek* yang dapat membuat siapa pun yang meminumnya terbebas dari masalah. Makna ini memproduksi makna tentang salah satu sikap masyarakat Banyumas yang nyantai ketika menghadapi sebuah persoalan. Salah satu cara penyelesaian masalah tersebut adalah dengan menikmati *clebek*. Sikap “kalem” ini merupakan fragmen ideologi dari kultur masyarakat Banyumas yang *dablongan*.

Kritik Terhadap Perubahan Sosial di Banyumas

Kaus oblong telah mengalami transformasi luar biasa dan turut andil dalam dinamika kebudayaan kontemporer. Pakaian jenis ini memiliki fungsi dan makna yang sangat beragam. Kaus oblong kadang bisa menciptakan realitas tertentu yang abstrak, menawarkan identitas, menyajikan berbagai hal tentang kearifan lokal, alat ideologis sekaligus terkena komodifikasi. Penelitian Setiawan (2004: 45) memperlihatkan bahwa di era modern, kaus oblong telah berubah menjadi wahana tanda dalam setiap praktik sosial. Teks dan gambar dalam kaus oblong dapat dilihat sebagai sebuah usaha untuk menciptakan realitas sosial secara konkret. Hal ini dapat diartikan bahwa tampilan desain kaus oblong tidak lepas dari konteks sosialnya.

Konteks sosial dari desain kaus oblong bisa dilacak dari kajian Wijana (2003: 23) yang meneliti kaus *Dagadu*. Wijana menemukan bahwa gaya plesetan yang ditampilkan dalam kaus *Dagadu* merupakan representasi kearifan lokal masyarakat Yogyakarta yang suka *guyon*. Temuan hampir serupa diungkapkan Tinarkubo (2006: 102-103) yang juga mengkaji *Dagadu*, bahwa ada representasi budaya Yogyakarta dibalik desain-desain *Dagadu*, baik karakter orang maupun ciri khas kota Yogyakarta. Sementara Ayuwuragil dan Efendy (2010), menemukan bahwa kaus oblong *Malangan* ditujukan untuk menyampaikan solidaritas dan keintiman di antara orang Malang dan Komunitas Aremania, menghibur orang, menyampaikan kritik sosial, memainkan satir untuk orang lain dan mempromosikan budaya Malang. Dadan (2010: 45) meneliti desain kaos *dablongan sothen* menemukan bahwa ada nilai-nilai budaya Banyumasan yang ingin disampaikan dalam desain kaus tersebut. Nilai-nilai tersebut sebagian besar adalah karakteristik khas yang menjadi identitas masyarakat Banyumas, antara lain nilai-nilai kejujuran yang dalam bahasa orang Banyumas disebut *cablaka*.

Teks-teks dalam desain kaus oblong Banyumasan, juga tidak terlepas dari konteks sosialnya, yakni representasi

perubahan sosial yang terjadi di wilayah ini. Perubahan yang dimaksud adalah transformasi kehidupan masyarakat di wilayah Banyumas yang saat ini telah menjelma menjadi pusat ekonomi dan perkembangan sosial di wilayah Jawa Tengah bagian barat. Hal ini dibuktikan dengan semakin maraknya pendirian pusat-pusat perbelanjaan, lembaga keuangan dan jasa, perusahaan bertaraf internasional, berbagai tempat hiburan dan lain-lain. Kondisi ini terjadi hampir di semua wilayah eks-karesidenan Banyumas yakni Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara maupun Kebumen.

Perubahan sosial di wilayah Banyumas yang signifikan terjadi di Purwokerto yang merupakan ibu kota Kabupaten Banyumas. Saat ini, Purwokerto telah berkembang menjadi salah satu kota perdagangan yang ramai dengan perputaran uang terbesar ketiga di Jateng. Keberadaan lebih dari 30 bank lokal/nasional, 15 pasar tradisional, shopping mall, dan ratusan toko/ruko dapat menjadi indikator dinamisnya aktivitas ekonomi kota Purwokerto. Puluhan hotel berbintang dan penginapan kelas melati yang ada di Purwokerto juga menunjukkan arti penting kota ini sebagai kota transit. Kemudian, keberadaan belasan kampus, baik yang berstatus negeri ataupun swasta, juga semakin menambah semarak kota ini yang dijejali kurang lebih 60 ribu mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Banyaknya jumlah mahasiswa membawa efek berantai tidak saja dalam mengembangkan perekonomian kota tapi juga potensi menumbuhkan kembangkan industri kreatif seperti kaus oblong Banyumasan.

Perkembangan kota Purwokerto banyak dipotret oleh produsen kaus Banyumasan *Dablongan Clothing* yang juga memiliki tempat usaha di tengah kota Purwokerto. Salah satunya adalah desain yang bertema Alun-alun Purwokerto. Desain ini, meskipun menampilkan *lay out* Alun-alun Purwokerto di tahun 1960-an, namun sejatinya merupakan kritik terhadap perombakan alun-alun yang dilakukan pada tahun 2008 di era kepemimpinan Bupati Mardjoko. Desain ini seolah-olah mengajak siapa pun yang melihat desain kaus ini, untuk membandingkan Alun-alun Purwokerto di masa lalu dan masa kini. Lapangan alun-alun di masa lalu terbagi menjadi dua, yakni lapangan barat dan timur yang dipisahkan dengan sebuah jalan di tengahnya. Jalan tersebut biasanya merupakan jalur keluar masuk para pejabat atau pegawai pemerintahan. Namun, *lay out* itu berubah total sejak dirombak. Jalan di tengah alun-alun ditiadakan sehingga lapangan alun-alun menjadi satu, tidak lagi terbagi menjadi dua antara lapangan barat dan timur. Kemudian, dua beringin kurung yang berada di kedua pinggir jalan tengah tersebut juga dipindahkan ke tempat lain. Selain itu, pada awal-awal perombakan, alun-alun dilengkapi dengan videotron, area *hot spot*, dan menjadi area yang harus bebas dari para Pedagang Kaki Lima (*Suara Merdeka*, 15/11/2008).

Perombakan alun-alun tersebut sempat menuai reaksi negatif masyarakat, khususnya kalangan budayawan

dan seniman yang mengkhawatirkan hilangnya aspek dan nilai-nilai budaya alun-alun Purwokerto sebagai salah satu identitas khasnya. Kekhawatiran kalangan seniman dan budayawan ini rupanya terbukti. Dalam laporan *Kompas* edisi 16 Agustus 2010, diberitakan bahwa warga Banyumas khususnya Purwokerto merasa terusik dengan penataan Alun-alun Purwokerto. Semenjak alun-alun diubah dan ditata ulang, tidak ada lagi rasa kedekatan antara masyarakat dan alun-alun itu. Semua digantikan dengan kemewahan semu. Hampir di setiap sudut alun-alun Purwokerto terpasang papan larangan; larangan menginjak rumput, larangan bermain sepak bola, larangan berjualan dan lain-lain.

Para seniman dan budayawan pada saat itu menilai, bahwa Alun-alun Purwokerto sudah tidak layak lagi disebut alun-alun, tetapi merupakan sebuah *square* atau taman kota. Menurut mereka, secara fisik proses penataan Alun-alun Purwokerto telah meninggalkan sisi tradisional sekaligus mengabaikan persoalan lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari dihilangkannya karakter khas tradisional alun-alun yakni dibuangnya dua beringin kurung dan digantikan benda lain sebagai simbol modernitas yakni adanya videotron dan area *hotspot*. Padahal, alun-alun (sebagaimana di kota-kota di Pulau Jawa lainnya) mempunyai beberapa fungsi. Selain sebagai identitas kota pemerintahan Jawa, alun-alun juga berfungsi sebagai ruang publik, paru-paru kota dan bangunan cagar budaya. Perombakan alun-alun, telah menghilangkan beberapa fungsi di atas, sehingga wajar jika ada beberapa elemen masyarakat yang kecewa terhadap penataan alun-alun.

Kondisi Alun-alun yang berubah ini pula yang menjadi konteks dalam desain dengan tema “Alun-alun Purwokerto”. Desain tersebut mengilustrasikan bagaimana kondisi Alun-alun di masa silam yang berfungsi sebagai tempat masyarakat kecil mencari nafkah. Bahkan, penguasa atau pemerintah pada waktu itu pun sangat mengayomi masyarakat kecil dengan membiarkan mereka untuk beraktivitas di Alun-alun. Sementara saat ini, masyarakat yang ingin beraktivitas di alun-alun Purwokerto terutama PKL harus kucing-kucingan dengan petugas Satpol PP. Para PKL ini terutama mereka yang direlokasi ke tempat lain, namun ternyata di tempat baru tersebut banyak dari mereka yang gulung tikar karena dagangannya tidak laku. Akhirnya, sebagian dari mereka kembali ke alun-alun meski dengan resiko harus berhadapan dengan Satpol PP.

Isu perubahan sosial di Banyumas juga dapat dipotret dari perubahan masyarakatnya yang tercermin dalam desain Bawor Rangers. Seperti diketahui, Bawor merupakan maskotnya orang Banyumas karena tokoh ini dianggap mewakili karakter masyarakat Banyumas. Bawor digambarkan hidup dalam kesederhanaan, lugu, *glogok soar* (mengemukakan apa saja yang diketahui tanpa menimbang efek positif atau negatifnya), *nrima ing pandum* dan *cablaka/blakasuta* (Priyadi, 2007: 15). Karakter Bawor tersebut bisa jadi merupakan identitas sub-etnik Banyumas sebagai bagian dari Budaya Jawa.

Menurut Snanfi (2018: 128), identitas etnik bisa muncul karena adanya kesamaan ikatan primordial, martabat dan bahasa dalam sebuah kelompok etnis.

Desain Bawor Rangers, muncul dalam konteks terjadinya perubahan karakter/ identitas etnik masyarakat Banyumas akibat terjadinya perubahan sosial. Bawor Ranger yang berelasi dengan sosok Power Rangers yang selalu bertransformasi atau berubah ketika ada musuh yang datang kepadanya, bisa jadi merupakan konteks di mana masyarakat Banyumas juga sedang mengalami perubahan karakter karena ada “musuh” yang datang. Namun, “musuh” wong Banyumas bukan alien (seperti digambarkan dalam film Power Rangers), tapi serbuan budaya luar yang coba di lawan oleh wong Banyumas. Perubahan dilakukan untuk membela diri. Dalam konteks ini, masyarakat Banyumas berupaya berubah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang sedang terjadi di lingkungan sekitarnya. Hal ini juga mengindikasikan bahwa ada nilai budaya yang ingin dipertahankan oleh masyarakat Banyumas. Hindaryatiningsih (2016: 108) menyatakan, nilai budaya merupakan seperangkat keyakinan yang berpengaruh terhadap perilaku dan sikap sebuah kelompok masyarakat. Urgensi nilai budaya ini juga tampak relevan dengan konteks desain ini, dimana nilai-nilai budaya Banyumas seperti sikap *cablaka* atau kejujuran yang melekat dalam diri Bawor sebagai perwakilan masyarakat Banyumas dipertahankan sekuat tenaga dalam dinamika perubahan sosial yang terjadi di Banyumas.

Perubahan sosial lainnya juga dapat dilihat dengan mencermati perubahan gaya hidup masyarakat. Tanto (2014: 54) menyebutkan, bahwa di masa lalu, khususnya di era tanam paksa, Banyumas merupakan masyarakat agraris dan penghasil beberapa komoditi pertanian. Namun, sekarang wilayah Banyumas seolah telah menjadi pasar dalam bagi berbagai produk budaya populer yang terkait dengan gaya hidup. Salah satunya adalah minum kopi. Saat ini, banyak sekali cafe dan kedai kopi di wilayah Banyumas. Di berbagai sudut kota Purwokerto terdapat belasan kedai kopi yang menjual berbagai produk kopi dari seluruh nusantara, seperti kopi gayo, kopi lampung, kopi papua dan lain-lain. Laporan *Suara Merdeka* (18/01/ 2017: 21) menyebutkan bahwa saat ini di wilayah Banyumas Raya bermunculan kedai kopi dengan berbagai karakteristiknya, antara lain Kabupaten Banyumas 50 kedai, Purbalingga (12), Banjarnegara (8), Cilacap (8) dan di Kebumen/ Gombong (3). Kedai-kedai kopi ini muncul sejak tahun 2000-an dengan pelanggan mulai dari masyarakat umum, mahasiswa dan para sesepuh penikmat kopi di Banyumas.

Mengonsumsi kopi tidak lagi sekedar minum kopi, tetapi berkaitan dengan gaya hidup tertentu karena menikmati kopi berelasi dengan di mana dan jenis kopi apa yang dikonsumsi serta berapa harga yang harus dibayar untuk segelas kopi. Pada Akhirnya, mengonsumsi kopi bukan lagi bicara tentang cita rasa kopi, tapi sarana

kontestasi status konsumen kopi dengan menunjukkan perbedaan selera dalam mengkonsumsi kopi. Hal inilah yang menjadi konteks desain “Clebek” yang mencoba meniru sekaligus melawan budaya populer dengan memunculkan citra visual maupun verbal tentang *Celebek*. Teks ini seolah ingin menunjukkan tentang eksistensi *Clebek* yang tidak kalah dengan kopi lainnya. Bahkan di beberapa kedai kopi, *Clebek* menjadi primadona dan pilihan konsumennya. Hal ini bisa jadi merupakan konteks politis untuk memperlihatkan bahwa clebek yang dulu hanya dikonsumsi di desa-desa oleh orang tua, kini kopi tersebut naik kelas karena dapat dikonsumsi di kedai-kedai kopi dengan harga yang tidak murah.

SIMPULAN

Berdasarkan paparan dalam pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, desain kaus oblong di atas merupakan representasi perubahan sosial yang terjadi di wilayah Banyumas di era sekarang atau antara 2008 sampai dengan 2016. Kedua, beberapa perubahan sosial yang dipotret dalam desain kaus oblong di atas adalah tentang penataan kota di wilayah Purwokerto yang dianggap kurang humanis bagi sebagian masyarakat, khususnya seniman dan budayawan. Selain itu, juga terdapat potret perubahan sosial masyarakat Banyumas yang mulai berubah dari agraris menjadi kota industri dan menyebabkan sebagian masyarakatnya mengalami gegar budaya menghadapi perubahan sosial yang begitu cepat. Terakhir, adalah perubahan sosial dalam gaya hidup masyarakat Banyumas yang cenderung menerima gaya hidup urban dalam mengkonsumsi makanan dan minuman gaya barat yang ditunjukkan dengan menjamurnya kedai-kedai kopi berharga mahal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew, T.V. (2014). Kaos Oblong: Menggugat Kemapanan dan Mengubah Masa Depan. <http://http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pid=12&jd=Kaos+Oblong%3A+Menggugat+Kemapanan+%26+Mengubah+Masa+Depan&dn=20140519134909> (akses 22 Maret 2015).
- Antariksa.(2009). Menjadi Modern dengan Kaos Oblong. *News Letter Kunci*, No. 4 Maret 2009, hal: 3-6.
- Ayuwuragil, K. & Effendy, G. (2013). Malangan T-Shirts Language Play as Malangese Identity. dalamh. https://www.academia.edu/6824506/Malangan_T_Shirt_Language_as_Malangese_Identity. (akses 28 November 2017)
- Bangsawan, A. (2014). Lokalitas Konten dalam Visual Kaus Cak-Cuk Surabaya. *Artkita*, 1, (01), 29-37.
- Barthes, R. (1972). *Mythologies*. New York: Hill and Wang.
- Dadan, S.(2010). Politik Identitas Kaos Dablongan. Laporan Penelitian Riset Pemula, Purwokerto: LPPM UNSOED.
- Hariyadi. (2007). Globalisasi dan Politik Identitas; Mencari Banyumas sebagai “Jawa yang Lain”. *Swara Politika*, 10, (01), 5-15.
- Hariyadi. (2016). Yang Muda Yang Kreatif: Perkembangan Disain Kaus di Banyumas. *News Letter Yayasan Biennale Yogyakarta*, 4, (3), 4-9.
- Herusatoto, B. (2008). Banyumas: Sejarah, Budaya, Bahasa dan Watak. Yogyakarta: LkIS.
- Hindaryatiningsih. (2016). Model Proses Pewarisan Nilai-nilai Budaya Lokal dalam Tradisi Masyarakat Buton. *Sosiohumaniora*, 18, (2): 108-115.
- Priyadi, S. (2003). Beberapa Karakter Orang Banyumas. *Bahasa dan Seni*, 31, (1), 14-35.
- Priyadi, S. (2007). Cablaka Sebagai Inti Model Karakter Manusia Banyumas. *Diksi*, 14, (1), 11-18.
- Priyadi, S. (2013). *Sejarah Mentalitas Banyumas*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Setiawan, A.H. (2004). T-Shirt Sebagai Media Tanda. Thesis pada Program Studi S2 Sosiologi FISIPOL Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: UGM.
- Shodiq, D., Restuadhi, H. dan Hariyadi. (2014). Menata Gelombang Ekonomi Keempat: Perluasan Jaringan Kerja sebagai Model Pemberdayaan dan Pengembangan Subsektor-subsektor Industri Kreatif di Banyumas dan Sekitarnya. Laporan Penelitian Riset Instiusional Jurusan Sosiologi FISIP Unsoed.
- Snanfi, F.L, Darwin, M., Setiadi & Ihkwan, H. (2018). Politik Identitas Etnik Asli Papua Berkontestasi dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Sorong. *Sosiohumaniora*, 20, (2), 122-131.
- Tohari, A. (2014). Clamit. *Majalah Ancas*, edisi 54/ tahun V/ Oktober 2014, hal: 38.
- Wijana, I.D.P. (2003). Wacana Dagadu, Permainan Bahasa dan Ilmu Bahasa. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 27 Februari 2003.

TINGKAT-TINGKATAN BICARA BAHASA BALI (DAMPAK ANGGAH-UNGGUH KRUNA)

I Nyoman Suwija, I Nyoman Rajeg Mulyawan dan Ida Ayu Iran Adhiti

Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, IKIP PGRI Bali
E-mail: inyoman.suwija63@gmail.com

ABSTRAK. Bahasa daerah Bali masih eksis sebagai muatan lokal wajib pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sistem bicara bahasa Bali yang unik dengan *angguh-ungguh basa*-nya merupakan warisan budaya Bali yang patut diselamatkan. Mengingat bahasa daerah Bali memiliki peran yang strategis sebagai wahana dan akar budaya Bali, maka bahasa daerah Bali patut dipelihara, dibina, dan dilestarikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat-tingkatan bicara bahasa Bali sebagai dampak dari adanya *angguh-ungguh kruna* bahasa Bali. Penelitian ini menggunakan teori sociolinguistik Fishman (1986). Dalam pengumpulan data digunakan metode observasi dan metode wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif analitis. Berdasarkan *angguh-ungguh kruna* sebagai pembentuknya, tingkatan bahasa Bali dibedakan atas (1) *basa kasar* (*kasar jabag dan kasar pisan*), (2) *basa andap*, (3) *basa madia*, dan (4) *basa alus* (*alus singgih, alus sor, alus mider*).

Kata kunci: bicara bahasa Bali; angguh-ungguh basa; sociolinguistik.

THE LEVELS OF BALINESE SPEAKING (AN IMPACT OF ANGGAH-UNGGUH KRUNA)

ABSTRACT. Balinese language still exists as a compulsory local content at the level of primary and secondary education. The unique system of speaking Balinese with *angguh-ungguh basa* is a Balinese cultural heritage that deserves to be saved. Considering that Balinese has a strategic role as a vehicle and cultural roots of Bali, the Balinese language should be maintained, nurtured and preserved. This study aims to describe the levels of Balinese speaking as an impact of Balinese *angguh-ungguh kruna*. This study uses sociolinguistic theory Fishman (1986). In collecting data used observation methods and interview method. The collected data was analyzed analytically descriptively. Based on *angguh-ungguh kruna* as its creator, the level of Balinese speaking divided into (1) *basa kasar* (*kasar jabag and kasar pisan*), (2) *basa andap*, (3) *basa madia*, and (4) *bas alus* (*alus singgih, alus sor, alus mider*).

Key word: Balinese speaking; *angguh-ungguh basa*; sociolinguistic.

PENDAHULUAN

Bahasa Bali merupakan salah satu bahasa daerah yang masih eksis digunakan sebagai alat komunikasi dalam pergaulan masyarakatnya. Karenanya, bahasa Bali patut dipelihara, dibina, dan dilestarikan. Pemerintah daerah Bali telah memberikan perhatian yang sangat serius terhadap pemertahanan bahasa Bali karena diyakini bahasa Bali merupakan wahana sekaligus akarnya budaya Bali, dimana budaya Bali merupakan tumpuan pariwisata daerah Bali.

Menyadari hal tersebut, ketika mulai berlaku Kurikulum 2013 yang terkesan melemahkan posisi bahasa Bali, Pemerintah Daerah Bali menerbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2013 tentang penegasan Bahasa Daerah Bali sebagai muatan lokal wajib pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Pada bulan April 2018, terbit lagi Peraturan Daerah Bali No. 1 tentang Pembinaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali. Hal ini sangat memperkuat status bahasa Bali sebagai bahasa ibu masyarakat suku Bali yang patut dilestarikan. Artinya, sebelum belajar bahasa Indonesia dan atau bahasa asing, anak-anak Bali wajib terlebih dahulu berbahasa Bali sejak lahir di keluarganya masing-masing.

Keterampilan berbicara adalah tujuan akhir yang sangat penting bagi seseorang yang mempelajari bahasa. Hal ini sesuai pendapat Tarigan (1986: 3-4) bahwa berbicara

adalah kemampuan seseorang dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan buah pikiran, gagasan, dan perasaannya.

Djiwandono (1996: 68) menambahkan bahwa di dalam berbicara seseorang berusaha mengungkap pikiran dan perasaannya kepada orang lain secara lisan. Tanpa berusaha untuk mengungkap dirinya, orang lain tidak akan mengetahui apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan. Berbicara merupakan kegiatan berbahasa yang dan memerlukan prakarsa nyata untuk dapat mengungkap diri secara lisan.

Pengertian berbicara terkait penelitian ini adalah berbicara formal yang memenuhi kaidah berbahasa lisan yang baik dan benar. Pada dasarnya setiap orang memiliki keterampilan berbahasa, namun pada saat ditunjuk untuk tampil berbicara pada forum resmi, banyak yang merasa tidak sanggup atau tidak percaya diri. Lebih parah lagi dalam berbahasa Bali karena sistem bicara bahasa Bali termasuk unik, memiliki kosakata kasar-halus yang disebut *angguh-ungguh basa* Bali atau tingkat-tingkatan bicara bahasa Bali.

Eksistensi *angguh-ungguh basa* di dalam bahasa Bali disebabkan oleh adanya *pabinayan linggih* (perbedaan kedudukan) masyarakat Bali. Keberadaan lapisan masyarakat Bali yang meliputi lapisan masyarakat Bali *purwa* (tradisional) dan masyarakat Bali *anyar* (modern), inilah yang menyebabkan sampai sekarang masyarakat

Bali berbicara sesuai *tata linggih* yang disebut *masor singgih basa* atau berbicara sesuai dengan *anggah-ungguh basa* Bali.

Penelitian ini bertujuan memberikan tingkat-tingkatan kalimat yang disebut *anggah-ungguh basa* berdasarkan unsur pembentuknya *anggah-ungguh kruna* bahasa Bali. Itulah sebabnya penelitian ini menggunakan teori sociolinguistik Fishman (1986). Menurutnya, sociolinguistik mengkaji tingkah laku yang meliputi latar, topik, dan fungsi interaksi. Dengan kata lain, kajian sociolinguistik tidak memfokuskan perhatian pada fenomena kebahasaan saja, tetapi juga memusatkan perhatian pada soal tingkah laku sikap berbahasa, tingkah laku nyata terhadap bahasa dan pemakai bahasa.

METODE

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus (Dewi, 2018:192). Pendekatan kualitatif dipandang relevan dengan masalah kebahasaan yang diteliti, yaitu mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu yang dianggap berasal dari masalah sosial kemanusiaan.

Penerapan metode kualitatif sejalan dengan pemikiran Djajasudarma (2009: 10) bahwa metode kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data secara deskriptif, baik tulis maupun lisan yang berkembang atau berada di masyarakat (dalam Sofyan, 2015: 263).

Sementara itu, metode penelitian studi kasus menurut Creswell (2012: 20) merupakan strategi penelitian dimana peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Lebih lanjut Sofyan mengatakan bahwa terkait metode ini, data dihasilkan secara deskriptif maksudnya untuk membuat gambaran, lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai data, sifat, serta kaitannya dengan fenomena-fenomena.

Metode deskriptif dilengkapi dengan tiga metode dan teknik, yaitu metode dan teknik pengumpulan data, metode dan teknik analisis data, serta metode dan teknik penyajian hasil analisis data. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode simak (Sudaryanto (2010: 133). Selanjutnya dalam metode simak digunakan teknik dasar yang meliputi teknik sadap, libat cakap, simak bebas libat cakap, rekam, dan catat (dalam Sofyan: 2015: 263).

Menurut Firdaus (2011: 226), Analisis data menggunakan metode padan, adalah metode yang dipakai untuk mengkaji atau menentukan identitas satuan diagonal dengan memakai alat penentu yang berada di luar bahasa, terlepas dari bahasa yang bersangkutan. Penyajian hasil analisis data menggunakan metode formal dan informal, dibantu dengan teknik induktif dan deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kosakata bahasa Bali sebagai unsur pembentuk tuturan yang disebut wacana ada tujuh tingkatan, yaitu:

(1) *kruna alus mider* yaitu kata-kata halus dwifungsi (bisa digunakan dalam bahasa *alus singgih* dan *alus sor*), (2) *kruna alus madia* yaitu kata-kata halus menengah untuk unsur utama bahasa *madia*, (3) *kruna alus singgih* yaitu kata-kata yang memiliki nilai rasa tinggi dan khusus untuk menghormati, (4) *kruna alus sor* yaitu kata-kata yang memiliki nilai rasa halus untuk merendahkan seseorang yang status sosialnya redahan, (5) *kruna andap* yaitu kata-kata yang nilai rasanya biasa atau lepas hormat untuk menyebut keadaan orang kebanyakan, (6) *kruna mider* yaitu kata-kata bahasa Bali yang tidak memiliki bentuk halus, dan (7) *kruna kasar* yaitu kelompok kata bahasa Bali yang nilai rasanya jelek.

Pada bagian ini akan dibahas tingkat-tingkatan bicara bahasa Bali yang di dalam pelajaran bahasa Bali disebut *anggah-ungguh basa* Bali. Yang disebut bahasa dalam kajian ini adalah pembicaraan yang dibentuk oleh kumpulan kata-kata yang lebih panjang daripada kalimat. Paling pendek satu paragraf, namun lebih dari satu kalimat sehingga umum disebut wacana, dan kemudian bisa berbentuk *satua, makalah, artikel, pidarta, puisi, lagu pop, dialog drama, buku*, dan yang lainnya.

Berbicara bahasa Bali sangat tergantung dari partisipannya, siapa berbicara, siapa mitra bicaranya, dan siapa yang dibicarakan. Berdasarkan nilai rasa bahasanya, bahasa Bali dibagi menjadi: (1) *basa kasar*: a) *basa kasar pisan*; b) *basa kasar jabag*; (2) *basa andap*; (3) *basa madia*; dan (4) *basa alus*: a) *basa alus singgih*, b) *basa alus sor*, c) *basa alus mider*, d) *basa alus rangkep*.

1. Basa Kasar

Basa kasar adalah bahasa Bali yang nilai rasanya jelek, sangat tidak sopan, sering dipakai pada saat bertengkar dan mencaci. *Basa kasar* dipakai berbicara oleh orang yang sedang dalam keadaan resah, gelisah, dan marah. Kadang kala ada masyarakat Bali yang biasa berbicara tidak menghormati orang yang harus dihormati. Harusnya berbicara bahasa halus, namun yang keluar kata-kata yang biasa atau lepas hormat. Senada dengan pendapat di atas, Suwija (2014: 57) mengatakan bahwa yang dimaksud *basa kasar* adalah sebagai berikut.

Basa kasar inggih punika basa Baliné sané wirasanipun kaon, sering kanggén marebat miwah mamisuh. Basa kasar kanggén mabaos antuk anaké sané ri sedek duka, brangti, wiroda (jengah), miwah kroda (gedeg).

Artinya,

basa kasar yaitu tingkatan bicara bahasa Bali yang mengandung nilai rasa jelek, sering dipakai pada saat berkelahi/bertengkar atau mencaci-maki. Bahasa *kasar* dipakai berbicara oleh orang yang sedang marah, dengki, jengkel, dan mangkel.

Dalam pembahasan selanjutnya *Basa Kasar* dibedakan atas (a) *Basa Kasar Pisan* dan (b) *Basa Kasar Jabag*. (Suarjana, 2011: 98-100 dan Suwija, 2014: 57-59).

1.1 Basa Kasar Pisan

Basa kasar pisan adalah bahasa Bali yang nilai rasanya benar-benar jelek, bahasa yang sering digunakan pada saat bertengkar atau mencaci-maki. *Basa kasar pisan* akan keluar dari seseorang sedang marah, resah, dan gelisah. *Basa kasar pisan* dibentuk oleh kata-kata *andap*, ditambah kata-kata *kasar* yang sering digunakan pada saat bertengkar dan mencaci-maki.

Yang merupakan tanda atau ciri seseorang mengeluarkan *basa kasar pisan* adalah penggunaan ganti ganti: *Aké, Kai, Cang* (Aku) dan *Iba, Cicing, Polonibané, Clekotokan ibané* (Kamu, Kau), *Cicingé totonan, sundelé totonan, ndas keléngé totonan, bangsaté totonan, ndas léaké* (Dia).

Contoh basa kasar pisan:

1. Bahasa seorang perempuan pada wanita lainnya:

Ih cicing, delikang matan ibané! Apa léklék iba mai ah? Awak beduda nagih nandingin geruda. Yen awak beduda, kanggoang tainé urek! Mai Iba nuké anyud, patigrépé. Dasar Iba cicing bengil, pongah ngentut. Kelik-kelik matan Ibané waluya matan buaya, matan sundel. Magedi Iba uli dini! Yen sing nyak magedi, to cicing borosan lakar nyétsét clekotokan Ibané!

Terjemahan:

Ih Anjing, blalakkan matamu! Apa kamu makan ke sini ah? Hah... bagaimana beduda mau menandingi geruda. Kalau dirimu beduda, kanggokan kotoran dinikmati! Kemari Kamu bagaimana tokek hanyut, patigrépé. Dasar Kamu anjing bengil. Tidak tahu malu. Kelik-kelik matamu bagaimana mata buaya, mata si tuna susila. Pergi Kamu dari sini! Kalau tidak mau pergi, itu anjing borosan akan mencobak-cabik tubuhmu!

2. Bahasa Tokoh Punakawan I Joblar pada Raksasa Pertunjukan Wayang Kulit Joblar Lakon Tualen Caru

I Joblar, karena jengkel dan marahnya bukan main terhadap seorang raksasa, dia berbahasa kasar, dipakai mengumpat dan mencaci si raksasa seperti ini.

01. I Joblar: “*Wih wih nas liak Iba wih. Ngudiang klianléklékIba?Kadén Iba demen san aké dadi klian? Iba sing mantet busan jumah? Nengéng matan Ibané ked dini?*”
02. Raksasa: “*Sorry kak Agus Sorry.*”
03. I Joblar: “*Jeneng polon ibané. Kadén iba aluh aké dadi klian?*”
04. Raksasa: “*Ih marah Kak Agus, kadiang paran?*”
05. I Joblar: “*Tawang Iba?Yen dadi klian nak cara nyuun bébék muaniné. Boné ngas, tainné liu, munyi dogén, maan sing taluha!*

Jeneng Ibané.”

Terjemahan:

01. I Joblar: “*Wih wih bangsat Kamu wih. Mengapa klian Iba makan? Kamu kira aku suka menjadi klian?Kamu tidak makan tadi di rumah?Memblalakatamu sampai di sini?*”
02. Raksasa: “*Sorry kak Agus Sorry.*”
03. I Joblar: “*Aah dasar Kamu. Kamu kira gampang aku menjadi klian?*”
04. Raksasa: “*Ih marah Kak Agus, kenapa?*”
05. I Joblar: “*Kamu tahu? Kalau menjadi klian, seperti memelihara bebekJantan. Bauk, beraknya banyak, suara banyak, tidak dapat telur, Rupamu*”.

Di sini, I Joblar berbahasa yang *kasar pisan* pada raksasa. I Joblar berkata begini sebagai contoh bahasa kasar (*Wih wih nas liak Iba wih. Ngudiang klian léklék Iba?Iba sing mantet busan jumah? Nengéng Iba ked dini*). Tetapi raksasanya malah berbahasa Inggris (*Sorry kak Agus Sorry*).

Juga ada bahasa Indonesianya (Ih marah Kak Agus), dan bahasa Kawi (*Kadiang paran?*). I Joblar selanjutnya menggunakan bahasa kasar (*Tawang Iba? Yen dadi klian nak cara nyuun bébék muaniné. Boné ngas, tainné liu, munyi dogén, maan sing taluha! Jeneng Ibané, nelik kén Aké*).

1.2 Basa Kasar Jabag

Basa kasar jabag adalah bahasa Bali yang dibentuk oleh kata-kata *andap*, juga kadang kala ditambah dengan kata-kata *alus madia*, tetapi dipakai berbicara dengan orang yang status sosialnya lebih tinggi atau dipakai untuk membicarakan tentang orang yang kastanya lebih tinggi. (Suwija, 2014: 59).

Jadi, bahasa Bali *andap* yang salah penggunaan itu disebut *basa kasar jabag*. Seharusnya berbicara halus pada orang yang statusnya lebih tinggi, tetapi keluar kata-kata yang *andap*. Tentunya hal ini tidak baik. Banyak masyarakat Bali menggunakan bahasa *jabag* terhadap orang yang status sosialnya lebih tinggi.

Perhatikan contoh *basa kasar jabag* di bawah!

- 1) *Ih Désak, payu malali bin mani? Yen Désak kal payu milu, ingetang liunang ngaba bekel nah! Saya sing kal ngaba apa. Désak kal cagerang. Yen sak sing ngelah pis, Aku kal meliang malu. Kala ingetang nyen Kamu nguliang nah!*
- 2) *Pak Camat, tiang sing nyidang masuk bin mani. Suraté ané baang Bapak ibi suba Luh Rai ngetik. Telung wai tiang izin. Bin petang dina, hari Senin mara men tiang masuk.*

Terjemahan:

- 1) *Ih Désak, jadi melancong sekarang? Kalau*

Désak akan ikut, ingatlah banyak bawa bekal ya! Saya tidak akan membawa apa-apa. Desak akan saya handalkan. Kalau Desak tidak punya uang, saya akan membelikan dahulu. Tapi, ingatlah Kamu mengembalikan ya!

- 2) Pak Camat, saya tidak bisa kerja besok. Surat yang Bapak kasi kemarin sudah diketik oleh Luh Rai. Tiga hari saya izin. Empat hari lagi, hari Senin saya mulau bekerja.

Berbicara dengan Desak, berbicara dengan Pak Camat, berbicara dengan Cokorda wajib hukumnya menggunakan bahasa yang halus (menghormat). Kalau seseorang salah menggunakan *basa andap*, pada hal seharusnya berbahasa halus, akhirnya keluar bahasa *andap*, inilah yang disebut berbahasa *kasar jabag*.

Contoh bahasa *kasar jabag* lainnya:

01. Maruti: “*Pejah kita mangké.*”
02. Tualén: “*Matiang Tu tiang mangkin?*”
03. Maruti: “*Yogya.*”
04. Tualen: “*Yen ba tiang matiang Atu kal éngkén bana guminé? Atuten bisabalas budi. Ingetang ja anakétiang, ampunang tiang matianga! Ten Atu éling? Dugas Pemiluné kadén tiang ané milih Tu? Miratdana Atu.*”

Terjemahan:

01. Maruti: “Mampus Kamu sekarang.”
02. Tualén: “Anda bunuh saya sekarang?”
03. Maruti: “Iya, benar.”
04. Tualen: “Kalau saya sudah mati, bagaimana negeri ini? Anda tidak bisabalas budi. Ingatlah jasa saya. Anda tidak ingat? Saat pemilu kan saya yang membantu Anda?”

Dalam dialog di atas, tokoh Tualén sebagai bawahan, menggunakan bahasa *jabag* berbicara dengan atasannya/ junjungannya Sang Anoman (Maruti). Seharusnya I Tualen berbicara menggunakan bahasa halus, ia banyak menggunakan kata-kata *andap*. Itu sebabnya kata-kata I Tualen termasuk jenis *basa kasar jabag*.

2. Basa Andap

Istilah *basa andap* dikemukakan oleh Suarjana (2011: 101). *Kruna andap* berarti *éndép* (rendah). Hal itu ditegaskan, dipakai membedakan dengan bahasa *kasar* (jelek) Dahulu bahasa yang biasa juga termasuk kategori *kasar*. Bahasa *andap* yang nilai rasanya rendah itu, berbeda dengan bahasa yang *kasar*. *Basa andap* tersebut, yang dirasakan *andap/éndép* (rendah) adalah nilai rasanya.

Dengan dasar pemikiran seperti itu, dapat dijelaskan bahwa bahasa *andap* adalah bahasa Bali yang memiliki makna biasa, tidak kasar, tidak menengah, dan tidak halus. Bahasa *andap* itu dipakai berbicara

oleh orang yang derajatnya sama atau sederajat (*sesamén wangsa*), juga dipakai oleh orang yang status sosialnya lebih tinggi dengan orang yang status sosialnya lebih rendah.

Contoh bahasa *andap*:

- 1) Bahasa I Wayan Duria terhadap pacarnya, Luh Sunari
“*Luh ... Luh Sunari. Tegarang ja tolih i padang! Liglig ia kameranan, angajap-ajap kritisan ujan ané marupa tresnan Luhé. Bedak layah ia ngulatiang sukalegan idep Luhé, apanga sida enu maurip di guminé. Tan péndah ia i tuké anyud, patigrépé ngalih paenjekan. Tulya i tabia dakep ané nyaratang tungguhan, apang enu idup di guminé.*”

Terjemahan:

“Luh ... Luh Sunari. Cobalah lihat si rumput! Liglig dia melarat, berharap banyak rintikan air hujan yang berupa cinta Kamu. Haus lapar ia mengharapkan keikhlasan hati Kamu, supaya dia masih bisa hidup di jagat ini. Tak obahnya dia si tokek hanyut, patigrépé mencari sandaran. Bagaikan si cabai rambat mencari sandaran, supa bisa bertahan hidup”

- 2) Bahasa Raja terhadap Punakawan
Nah Paman, para patih, tandamantri, kéto masi Cai-Nyai panjak gelahé ajak makejang. Sangkal ké ada gelah sarat madedauhan, mapangedih apang paman muah para panjaké makejang sida parek tangkil buka jani. Mula ada ané saratang gelah, ada ané mabuat lakar raosang gelah kapin paman ajak makejang. Né mapan gelah suba madan lingsir. Ada lantasan Gustin pamané, buka ia putran gelah I Cening Bagus Jayaningrat ané suba suud nunas ajah ring Ida Hyang Bhagawan. Suba mirib panemaya gelah nyerahang kaprabon tekén i cening bagus. To jani ané patut raosang! ...

Terjemahan:

Baiklah Paman, para patih, tandamantri, demikian juga rakyatku sekalian. Adanya saya memberitahukan, meminta supaya paman dan rakyat semua biasa menghadap pada hari ini. Memang ada yang saya pentingkan, ada yang mendesak patut dibicarakan pada kalian semua. Ini karena saya sudah berusia tua, ada junjungan kalian dia anakku Si Bagus Jayaningrat yang sudah usai menimba ilmu pada Ida Hyang Bhagawan. Sudah waktunya saya menyerahkan tahta kerajaan pada dia. Itu;lah sekarang yang patut dibicarakan! ...

3. Basa Madia

Suwija (2014: 60) mengatakan bahwa *basa madia* adalah bahasa Bali yang kelihatan/ kedengaran seperti bahasa halus, tetapi makna dan nilai rasanya masih menengah (*madia*) karena banyak dibentuk oleh kata-kata halus *madia*.

Suarjana (2011: 103) mengatakan bahwa dalam praktiknya *basa madia* tidaklah terlalu hormat dan biasanya ditandai dengan pemakaian kata-kata *madia*, membentuk kalimat *madia*, dan akhirnya membentuk *basa madia*. Bahasa *madia* banyak sekali ditemukandalam komunikasi pergaulan di masyarakat. Seharusnya mengucapkan *sampun*, diucapkan *ampun*, seharusnya mengucapkan *inggih* diucapkan *nggih*, seharusnya mengucapkan *nénten* diucapkan *ten*, dan selanjutnya. Selain itu, bahasa *madia* ini sering digunakan berkomunikasi oleh masyarakat Bali yang belum saling kenal, yang sering menyebutkan *matiang – jero*. Perhatikan contoh *basa madia* berikut.

1) Tekslagu pop Bali *Rajapala*

RAJA PALA

Aduh, kadi pituduhing Widhi wiakti, Ageté dong ja dadi uber, lacuré dong ja dadi kelidin.

I Raja Pala, juru boros katempuh liang, peluhnyané ngucur, nguber kedis, ngojog anak manjus. Widiadari Kén Sulasih, jegég, ayu, putih, mulus, tan pasanding.

Jero-jero ... anak lanang bagus genjing, wantah titing widiadari, Kén Sulasih parab titiang.

Napi wénten ... ngambil busanan titiangé, titiang nyadia mangentosin, antuk jinah mas tur mirah.

Aduh, anggon tiang napi mas pipis di alasé?

Matumbasan sing ada dagang, bungah tiang nganggo, sing ada nak nepukin.

Rajapala parab titiang truna lara, yéning suéca pakayunan makaronan,

Ratu ayu sareng titiang truna lara.

Aduh, beli beli Raja Pala.

Duaning kapelek rasa manah tiangé, Misadia tiang nagingin pangedih beliné.

Sakewala, ada, ada idih tiang kén beli.

Mangkin wénten . . .

pinunas titiang ring beli, yéning wénten putra adiri, titing mapamit ring beli.

Kalau didengar sekilas, Lagu Pop Bali "Raja Pala" sepertinya menggunakan bahasa Bali halus. Tetapi kalau diperhatikan, banyak sekali menggunakan kata-kata *basa andap*. Hal ini menyebabkan bahasanya termasuk *basa madia*. Juga seperti ciri bahasa *madia* tetapi keduanya (Bidadari Kén Sulasih dan si pemburu, I Rajapala) belum saling mengenal. Harusnya pada saat berkomunikasi keduanya menggunakan bahasa *madia* atau "matiang-jero".

Seperti itulah keberadaan bahasa Bali yang dipakai membentuk lagu di atas, kata-katanya bercampur menggunakan *kruna mider*, *kruna andap*, dan *kruna alus*. Bahasa lagu sebagai konsumsi publik hendaknya menggunakan bahasa yang baik dan benar. Lirik lagu-lagu pop Bali sangat baik sebagai sarana mempelajari tingkat-tingkatan bahasa Bali oleh anak-anak, siswa,

generasi muda, dan oleh masyarakat seluruhnya. Kalau bahasa lagu banyak mengandung kesalahan, akan berdampak negatif terhadap pemertahanan bahasa daerah Bali, karena anak-anak terbiasa mendengar bahasa yang salah.

2) *Pakenalan Ketua OSIS*

Pada acara MOS siswa Kelas VII baru, sebelum acara dilanjutkan, ada Ketua OSIS memperkenalkan diri dengan para peserta MOS. Begini katanya.

01. Ketua OSIS: "Inggih para sameton OSIS pamekas sané wawu kelas VII (pitu). Sadurung matur, titiang jagi nyinahang déwék riin nggih? Titiang mawasta I Madé Lara.

02. I Putra): "Napi mawinan mawasta Lara?"

03. Ketua OSIS: "Duaning daweg tiangé embas, mémén tiangé gelem keras tur ngraris padem".

04. Luh Rai: "O... Dadosné kak Lara anak yatim nggih?"

05. Ketua OSIS: "Nggih, tiang anak ubuh".

06. Luh Rai: "Tamat SD napi dumun Kak?"

07. Ketua OSIS: "Tiang tamatan SD Dwijendra Denpasar"

08. Luh Rai: "O... kénten? Taén ajina kén ibuk tiangé?"

09. Ketua OSIS: "Yé... Sira peséngané?"

10. Luh Rai: "Ibuk Purnama Sari"

11. Ketua OSIS: "O... nggih. Daweg Kelas IV tiang ajahina".

Terjemahan:

01. Ketua OSIS: "Baiklah teman-teman OSIS, utamanya yang baru kelas 7, sebelum berbicara, saya akan memperkenalkan diri dahulu ya? Saya bernama I Made Lara.

02. I Putra): "Apa sebabnya bernama I Lara?"

03. Ketua OSIS: "Karena pada saat saya lahir, ibu saya sakit keras, dan lanjut meninggal".

04. Luh Rai: "O... Jadi, Kak Lara anak yatim ya?"

05. Ketua OSIS: "Ya, saya anak yatim".

06. Luh Rai: "Tamat SD mana dulu, Kak?"

07. Ketua OSIS: "Saya lulusan SD Dwijendra Denpasar"

08. Luh Rai: "O... begitu? Pernah diajar oleh ibu saya?"

09. Ketua OSIS: "Yé... Siapa namanya?"

10. Luh Rai: "Ibuk Purnama Sari"

11. Ketua OSIS: "O... ya. Saat Kelas IV saya diajarnya".

4. *Basa Alus*

Bahasa halus merupakan tingkatan bahasa Bali yang tinggi atau sangat hormat dan biasanya bahasa tingkatan ini digunakan dalam situasi resmi (Suarjana, 2011: 105). Bahasa alus sangat umum dipakai menghormati orang yang status sosialnya lebih tinggi atau merendahkan orang yang status sosialnya lebih rendah. Bahasa halus

hanya digunakan oleh orang yang status sosialnya lebih rendah pada saat berbicara dengan terhormat, juga pada saat merendahkan diri atau orang lain.

Jadi, sesuai dengan etika berbicara bahasa Bali, bahasa halus digunakan berkomunikasi oleh orang golongan bawah (*sang sor*) terhadap dan tentang golongan atas (*sang singgih*) atau orang yang dihormati, seperti: (1) Bahasa *punakawan* pada *raja*, (2) Bahasa *atur murid* pada *guru*, (3) Bahasa *atur pegawai* pada *pejabat*, (4) Bahasa *atur Dé Rai* pada *Limbur/Liku*, (5) Bahasa *atur mahasiswa* pada *dosén*.

4.1 Basa Alus Singgih

Basa alus singgih adalah bahasa Bali yang maknanya halus serta dipakai menghormati orang yang derajatnya lebih tinggi. Baikorang yang derajatnya lebih tinggi yang diajak berbicara atau orang yang dibicarakan, patut dihormati, menggunakan kata-kata *alus singgih*.

Masyarakat *wangsa jaba* (orang kebanyakan) yang berbicara dengan orang *tri wangsa* atau membicarakan tentang *tri wangsa* harus menggunakan bahasa *alus singgih*. Umpama, Tokoh I Tualén pada saat berbicara dengan junjungannya, Sang Ramadéwa, membicarakan tentang keadaan dirinya, I Tualén harus menggunakan bahasa *alus sor*. Apabila ada seorang siswa, berbicara dengan bapak/ibu guru, siswa itu juga harus menggunakan bahasa *alus singgih*. Perhatikan contoh berikut.

1) Bahasa Punakawan terhadap Raja

Ratu déwa agung, dados makadi pranagata, nadak sara cokoridéwa ngeséngin sikian titiang, mangda titiang pedek tangkil rahinané mangkin. Samaliha sapamedal cokoridéwa makanten ucem remrem tatwadana druéné, tan péndah kadi sekar pucuké kaulet. Napi manawi wénten sané sungsutang cokoridéwa? Inggih durus-durus cokoridéwa mawecana, mabaos ring parapanjaké sami!

Terjemahan:

Ratu déwa agung, mengapa demikian mendadak Tuanku memanggil kami supaya bisa menghadap hari ini? Lagipula keluaranya Tuanku terlihat demikian pucat wajah Tuanku tak obahnya bagai bunga kembang sepatut diremas. Apa gerangan yang membuat Tuan bersedih? Ayolah berbicara Tuanku. Sampaikan saja pada kita semua!

2) Bahasa Pegawai Membicarakan Bapak Réktor

Titiang sampun polih tangkil ring Bapak Réktor duk Saniscara lintang. Dané sampun nerima rerepi saking panitia. Nanging duaning dane jagi lunga ka Jakarta rahina bénjang, indik pangrencana lokakarya punika durung prasida

kacumponin. Dané maosang sarauhé saking Jakarta pacang ngwéntenang paruman alit kanggén galah mligibagang indik prabéa sané patut baosang.

Terjemahan:

Saya sudah sempat menghadap Bapak Rektor pada hari Sabtu yang lalu. Beliau sudah menerima surat dari panitia. Namun, karena beliau akan berangkat ke Jakarta besok, tentang perencanaan lokakarya tersebut belum mendapatkan persetujuan. Beliau mengatakan setiba dari Jakarta akan menggelar rapat kecil dipakai membahas tentang dana yang perlu dibicarakan.

4.2 Basa Alus Sor

Basa alus sor adalah segala bentuk komunikasi berbahasa Bali yang maknanya halus, dipakai untuk merendahkan diri atau merendahkan orang yang derajatnya lebih rendah yang harus direndahkan. Siapa saja yang sedang berbicara di dalam forum resmi diwajibkan merendahkan diri menggunakan bahasa *alus sor*.

Contoh bahasa *alus sor* seperti di bawah ini.

1) Pak Suwija memperkenalkan diri

Ida dané sané wangi ang titiang, sadurung nglantur matur, lugrayang riin titiang nyinhang déwék. Mungguing wasta titiang, I Nyoman Suwija. Titiang wit saking Désa Sobangan, Kecamatan Mangwi, Kabupatén Badung. Sarahina-rahina titiang makarya ring Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Bali, Fakultas Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah, IKIP PGRI Bali. Titiang sampun makulawarga, maderbépi anak tigang diri. Mangkin, titiang jenek ring Jl. Antasura, Gang Batusari Timur, No. 26 Denpasar Utara.

Terjemahan:

Hadurun yang saya hormati, sebelum melanjutkan berbicara, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya I Nyoman Suwija. Saya berasal dari Désa Sobangan, Kecamatan Mangwi, Kabupatén Badung. Sehari-hari saya bekerja di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Bali, Fakultas Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah, IKIP PGRI Bali. Saya sudah berkeluarga, punya tiga orang anak. Sekarang saya tinggal di Jl. Antasura, Gang Batusari Timur, No. 26 Denpasar Utara.

Pada contoh di atas, saya (I Nyoman Suwija) berbicara dengan orang yang banyak, seperti peserta tuntunan berbicara bahasa Bali *alus*. Saya merendahkan diri dengan menggunakan bahasa *alus sor*. Saya tidak memperkenalkan diri *mapeséngan*, tetapi *mawasta*. Juga tidak menyebut *angga*, tetapi *déwék*. Juga tidak

menyebut *madué rabi*, tetapi *madérbé kurenan*. Juga tidak benar menyebutkan *madué oka*, tetapi kabaos *madérbé pianak*. msl.

2) Bahasa Luh Rai pada Bapak Bupati

Palungguh Bupati sané singgihin titiang, Titiang nunas ampura ping banget pisan, riantuk rahinané mangkin titiang nénten prasida nyarengin pidabdab lomba nyastra Bali sané kalaksanayang ring Wantilan Pura Lingga Bhuwana Puspem Badung. Titiang maderbé alangan sané nénten prasida katinggalin, bapak titiangé sedek sinengkaon rahat ring Rumah Sakit Sanglah. Indik rerepi sané ketik titiang dibi sampun puput saha magenah ring méjan Bapak.

Terjemahan:

Bapak Bupati yang saya hormati, saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena hari ini saya tidak bisa mengikuti kegiatan lomba nyastra Bali yang dilaksanakan di Wantilan Pura Lingga Bhuwana Puspem Badung. Saya punya halangan yang tidak dapat ditinggalkan, bapak saya sedang sakit keras di Rumah Sakit Sanglah. Tentang surat yang saya ketik kemarin sudah selesai dan ditaruh di atas meja Bapak.

4.3 Basa Alus Mider

Basa alus mider adalah tingkatan bicara bahasa Bali yang bermakna halus, sering dipakai berbicara dalam rapat, berbicara pada orang banyak. Komunikasi itu terkait dengan orang yang berbicara atau orang yang diajak berbicara. Kata ganti yang digunakan pada umumnya adalah kata saya (*tiang*) atau kata dia (*jero*).

A. Contoh bahasa *alus mider*1

Ida dané krama banjar sané wangiing titiang, duaning sampun panemaya, ngiring mangkin kawitin paruman druéné. Sadéréng nglantur, ngiring ngastiti bakti ring Ida Hyang Widhi, mangda asung ngicénin iraga karahajengan, gumantiné punapa-punapi sané jagi kabaosang malih ajebos sidaning don labdakarya. Ngiring nyakupang kara kalih, nguncarang pangastungkara, Om Swastyastu.

Terjemahan:

Saudara-saudara krama banjar yang saya hormati, karena sudah waktunya, mari kita mulai rapat ini. Sebelum lanjut, mari bersama-sama menghaturkan puja pangastuti kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya berkenan memberikan sinar sucinya untuk keselamatan, sehingga apa pun yang akan dibicarakan nanti berhasil guna sesuai harapan. Mari mengambil sikap amustikarana mengucapkan salam umat, Om Swastyastu.

Contoh bahasa di atas adalah kata-kata Kelian dengan warga banjar serta mengajak atau mengikuti warga banjar membuka atau memulai rapat dengan mengucapkan pangananji umat. Orang yang berbicara (*kelihan*) mengajak warga banjar akan melaksanakan pekerjaan, memulai rapat. Jadi kata-kata itu bersama-sama digunakan oleh orang yang berbicara dengan orang yang diajak berbicara sehingga bahasanya itu disebut bahasa alus mider.

B) Contoh bahasa *alus mider* 2

Inggih, Ida dané krama banjar sané wangiing titiang, duaning sampun akéh piragin titiang wénten usul i wawu, mangkin ngiring sareng-sareng mikayunin, sané encen minab jagi kacumponin? Ida dané mangkin tunasin titiang pamutus baos. Ngiring medalang malih pikayunan druéné gumanti wénten pacumponan anggén gegamelan nglanturang pawangunan balé banjar druéné.

Terjemahan:

Baiklah, Saudara krama banjar yang saya hormati, karena sudah banyak saya dengar ada usul dan saran, sekarang mari bersama-sama dipikirkan, yang mana kira-kira patut disetujui? Saudaralah yang sekarang saya mintai pendapat. Mari keluarkan pemikirannya supaya ada keputusan dipakai pedoman melanjutkan pembangunan bale banjar kita.

Contoh komunikasi ini juga kata dari kelian banjar dengan warga banjarnya mengajak masyarakat mengeluarkan pendapat menyetujui supaya menghasilkan keputusan atau rapat akan dipakai pedoman melanjutkan pembangunan. Komunikasi ini juga komunikasi bersamaan oleh orang yang berbicara dengan orang yang diajak berbicara, sehingga disebut bahasa *alus mider*.

SIMPULAN

Bahasa Bali dikenal rumit dan unik karena sistem bicaranya tergantung dari adanya kosakata yang memiliki bentuk kasar-halus yang disebut *sor-singgih* atau *anggah-ungguh basa*. Sebagai dampak dari unsur pembentuknya yaitu kata-kata yang memiliki *anggah-ungguh kruna* atau tingkat-tingkatan kata, tingkatan bicara bahasa Bali dibedakan atas: (1) bahasa *kasar* (bahasa *kasar pisan* dan bahasa *kasar jabag*); (2) bahasa *andap*; (3) bahasa *madia*; dan (4) bahasa *alus* (bahasa *alus singgih*, *alus sor*; dan *alus mider*).

Berdasarkan hasil pengamatan, tidak akan mungkin sebuah tingkatan bahasa dibentuk oleh kata-kata yang nilai rasanya sama. Pemunculan tingkatan kata sebagai unsur pembentuk tuturan berbentuk wacanaakan saling melengkapi. Artinya, bahasa *alus singgih* tidak mungkin

semua kata pembentuknya kata-kata *alus singgih*; bahasa *alus sor*, tidak mungkin pula semua kata pembentuknya memiliki nilai rasa *alus sor*; demikian seterusnya. Selanjutnya, jika dicermati lebih saksama, tingkatan bicara bahasa Bali sangat tergantung dari partisipannya. Artinya, sangat tergantung pada siapa yang berbicara, siapa mitra bicaranya, dan siapa yang dibicarakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J.W. (2012) *Research Desain: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, E.A.S. & Pratamawati, B.B. (2018). Komunikasi Politik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam Menyosialisasikan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). *Sosiohumaniora*, 20, (2), 188-198.
- Djajasudarma, T.F., (2009). Analisis Bahasa Sintaksis dan Semantik. Bandung: Uvula Press Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran.
- Firdaus, W. (2011) Kata-Kata Serapan Bahasa Aceh dari Bahasa Arab: Analisis Morfofonemis, *Sosiohumaniora*, 13, (2), 223-234.
- Sofyan, A.N. (2015) Frasa Direktif yang Berunsur Di, Dari, dan Untuk dalam Bahasa Indonesia: Kajian Sintaktis dan Semantis, *Sosiohumaniora*. 18, (3), 262-267.
- Suarjana, I.N.P. (2011). *Sor Singgih Basa Bali: Kebalian Manusia Bali dalam Dharma Pepadikan, Pidarta, Sambrama Wacana, dan Dharma Wcana*. Denpasar: Tohpati Grafika Utama.
- Sudaryanto, (2012). *Metode Linguistik: Kedudukan, Aneka Isinya, dan Faktor Penentu Wujudnya*. Yogyakarta: Fak. Sastra dan Kebudayaan, Universitas Gajah Mada.
- Suwija, I. N., (2014). *Tata Titi Basa Bali. Dénpasar: Pelawa Sari*.
- Suwija, I.N., (2017). Identification of Anggah-Ungguh Kruna in Balinese Language, *International Journal of Linguistics, Literature, and Culture. (IJLLC)*. 3, (6), 12-18.
- Suwija, I.N., (2018). Sistem Sapaan Bahasa Bali menurut Hubungan Kekrabatan, *Sosiohumaniora*. 20, (2), 115-121.
- Suwija, I.N., (2018). Role of Anggah-Ungguh Kruna in Balinese Language Sentence Formation *International Journal of Social Sciences and Humanities. (IJSSH)*, Vol. 2 No. 3. 21-32.

SIKAP BAHASA DAN KEMAMPUAN MEMAHAMI BACAAN BAHASA INGGRIS MAHASISWA: STUDI KASUS DI FIB UNPAD

Ida Farida Sachmadi, Lestari Manggong, dan Lia Maulia Indrayani

Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran, Bandung

E-mail: i.farida@unpad.ac.id

ABSTRAK. Telah dilakukan penelitian kepada 144 mahasiswa strata S1 dari Fakultas Ilmu Budaya mengenai sikap bahasa mereka terhadap Bahasa Inggris. Survey ini bertujuan untuk menilai sikap mahasiswa terhadap Bahasa Inggris, model pembelajaran Bahasa Inggris, dan materi serta keterampilan berbahasa Inggris. Metode penelitian yang digunakan adalah teori sikap bahasa yang diambil dari Sarnoff dan Asmah, dan angket yang menggunakan Skala Likert. Penelitian ini juga bermaksud mengukur kemampuan mahasiswa-mahasiswa ini dalam keterampilan memahami bacaan Bahasa Inggris melalui lima komponen keterampilan: (1) kosa-kata yang dimiliki, (2) menginferensi, (3) mengenali kata acuan, (4) menemukan gagasan utama, dan (5) mencari informasi pendukung, berdasarkan uraian dari Kintsch dan Grabe. Pesertanya adalah mahasiswa semester tiga: 39 mahasiswa dari Prodi Sastra Jepang, 52 dari Sastra Sunda, dan 53 dari Ilmu Sejarah. Data diperoleh dari tes kemampuan memahami bacaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan yang jelas pada level kemampuan membaca mahasiswa dari tiga prodi ini, walau mereka telah mendapatkan pembelajaran Bahasa Inggris yang sama selama satu semester. Mahasiswa-mahasiswa di satu prodi menunjukkan kemampuan yang tinggi dalam memahami bacaan dan siap membaca buku teks dan jurnal dalam Bahasa Inggris; prodi lain dapat mulai diajarkan membaca teks dengan level tinggi, namun satu prodi lainnya terlihat belum mampu menerima teks Bahasa Inggris untuk level universitas. Sementara itu, hasil dari survey angket menunjukkan perbedaan kecil pada mahasiswa-mahasiswa ini dalam memandang pembelajaran Bahasa Inggris; dan hasil ini juga dapat dijadikan dasar untuk menyusun model pembelajaran yang tepat sesuai harapan mahasiswa yang akan mendukung perkuliahan mereka di bidang ilmu masing-masing.

Kata kunci: sikap bahasa; level kemampuan membaca; mahasiswa FIB Unpad.

LANGUAGE ATTITUDES AND READING PROFICIENCY IN ENGLISH : A CASE STUDY OF STUDENTS IN FIB UNPAD

ABSTRACT. 144 undergraduates of Universitas Padjadjaran students, especially from Faculty of Cultural Sciences, are surveyed to find their attitudes towards English. This survey aims to assess the student's attitude towards English, learning model, and the materials and skills in English. The method of this research is based upon the language attitudes theory, adopted from Sarnoff and Asmah, and a series of questionnaire based on Likert Scale. This study also measures reading proficiency levels of these students using five-component skills involving measures of (1) vocabulary knowledge, (2) drawing inference, (3) identifying references, (4) identifying the main idea, and (5) identifying supporting information, based on Kintsch and Grabe. The participants are second year undergraduates: 39 from Japanese Study Program, 52 from Sundanese, and 53 from History Study Program. The data are collected through a reading comprehension test. The results of this study indicate that there is a clear difference from the students reading competency levels in these three study programs, even when students have joined the same English course for one semester. Students of one study program has high reading proficiency level and ready to read text books and journals; the other could be prepared to learn advanced English, but there is one study program which is inadequately prepared for university reading. Meanwhile, the result of the survey shows a slight difference of these students in perceiving English learning; then, it could be used to create an appropriate learning model for their further study in their field of science respectively.

Key words: language attitudes; reading proficiency level; students of FIB Unpad.

PENDAHULUAN

Pada tahun ajaran 2016/2017, Universitas Padjadjaran mengadakan program Tahap Persiapan Bersama (*HITS-Happiness and Integration for Successful Transition Studies*) selama satu semester untuk memberikan mata kuliah wajib pada mahasiswa baru. Mata kuliah Bahasa dijadikan satu, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, namun karena materi yang disampaikan berbeda—Bahasa Indonesia lebih menekankan keterampilan menulis teks ilmiah, sedangkan Bahasa Inggris menekankan keterampilan membaca teks umum, pelaksanaan pembelajaran kedua bahasa ini dibedakan. Karena itu, materi masing-masing bahasa dapat disampaikan pada mahasiswa selama setengah semester (7 pertemuan).

Mata kuliah lain pun demikian, seperti Agama, Pancasila, dan Kewarganegaraan. Untuk Olah-Raga, Kesenian, dan Kreativitas (OKK) dilaksanakan di dalam ruang kelas dan terjun ke lapangan membuat program untuk penduduk setempat.

Untuk Bahasa Inggris, materi ditekankan pada keterampilan membaca dengan pertimbangan mahasiswa membutuhkan keterampilan ini saat mereka mulai mempelajari bidang ilmu masing-masing dengan menambah pengetahuan dari sumber teks yang berbahasa Inggris, baik dari buku teks ataupun jurnal internasional yang tercetak dan digital. Mortimer J. Adler dan Charles Van Doren pada tahun 1940-an menulis buku yang berjudul *How to Read a Book*, dan menyebutkan bahwa '*reading is tools*', yang kemudian membawa masyarakat Eropa

masuk ke budaya membaca (*literate*) (Rohman, 2016: 255). Dalam penelitian tentang kemampuan mahasiswa dalam membaca buku teks, Prijana dan Asep Saiful Rohman menemukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara mahasiswa ber-IPK tinggi dengan cepat tidaknya mereka membaca; namun, simpulan yang diperoleh dari penelitian mereka adalah bahwa mahasiswa ber-IPK tinggi lebih terampil membaca sehingga mereka dapat membaca lebih cepat dan memperoleh informasi lebih banyak: “[...] yang menentukan waktu baca lebih cepat [adalah] disebabkan oleh faktor keterampilan dan keterlatihan. Semakin terampil membaca, semakin singkat waktu bacanya.” (Rohman, 2016: 259-260). Karena itu, mahasiswa harus diajarkan dan dilatih keterampilan membaca, termasuk bacaan (terutama buku teks dan jurnal) dalam Bahasa Inggris, yang jauh lebih banyak tersedia di media digital.

Pada penelitian ini, telah dievaluasi pembelajaran program *HITS* 2016 dengan memeriksa kemampuan mahasiswa semester tiga dalam memahami teks berbahasa Inggris dari tiga program studi di Fakultas Ilmu Budaya, yaitu dari prodi bahasa asing (dipilih Prodi Sastra Jepang), prodi bahasa non-asing (Prodi Sastra Sunda), dan prodi non-bahasa (Prodi Ilmu Sejarah). Mereka diberi tes keterampilan membaca, diambil dari teks level *upper-intermediate*, yang sering muncul dalam TOEFL. Tes ini mencakup uji keterampilan *finding topics, getting main ideas, scanning/finding stated information, guessing vocabulary*, dan *making inference*. Kemudian, telah diteliti juga sikap mereka terhadap pembelajaran Bahasa Inggris yang telah mereka dapatkan pada tahun ajaran sebelumnya, yaitu 2016/2017, serta kebutuhan mereka terhadap Bahasa Inggris untuk menunjang perkuliahan mereka di bidang ilmu masing-masing.

Hasil yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah gambaran yang tepat mengenai kemampuan mahasiswa FIB setelah belajar bahasa Inggris selama satu semester, juga mengenai sikap mereka terhadap pembelajaran Bahasa Inggris, dan rekomendasinya. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami teks bahasa Inggris untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka dan untuk mengetahui sikap mereka terhadap pembelajaran Bahasa Inggris yang telah mereka dapatkan pada tahun sebelumnya. Untuk mencapai tujuan ini, jenis riset deskriptif telah digunakan. Lebih lanjut lagi, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk menyusun model pembelajaran yang sesuai untuk mahasiswa dalam Program Studi yang berbeda-beda, sehingga kemudian dapat digunakan oleh dosen pengampu bahasa Inggris di Fakultas Ilmu Budaya.

Penelitian terhadap kemampuan membaca teks Bahasa Inggris mahasiswa di sebuah kampus telah dilakukan oleh peneliti-peneliti Indonesia. Veronika Unun Pratiwi dkk (2015) telah mengadakan penelitian atas peningkatan kemampuan membaca teks Bahasa Inggris

pada mahasiswa di luar Program Studi Bahasa Inggris di Universitas Veteran Bangun Nusantara di Sukoharjo, Jawa Tengah. Para peneliti mengamati adanya peningkatan kemampuan memahami teks dari mahasiswa setelah diberi intervensi pembelajaran mengenal kosa-kata dan struktur kalimat yang sulit (Pratiwi, 2015). Selain itu, peneliti lain, Muflihah (2016), juga melakukan penelitian kemampuan membaca teks Bahasa Inggris pada mahasiswa kelas bilingual di IAIN Purwokerto, Jawa Tengah, dan hasilnya menunjukkan kemampuan membaca yang rendah karena rerata nilai kemampuan membaca mereka adalah 37 dari total nilai 67 (Muflihah, 2016). Peneliti lainnya, Alvii TB Siregar dan Evangeline H. (2017) juga melakukan penelitian atas kemampuan berbahasa Inggris pada mahasiswa Prodi Ilmu Keperawatan di STIKES Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Jawa Barat. Mereka menemukan bahwa kemampuan mahasiswa masih rendah dengan rerata nilai tes 387 dari standar 535 dengan menggunakan tes yang berstandar internasional (Siregar, 2017).

Sikap bahasa mahasiswa terhadap bahasa Inggris juga telah diteliti di berbagai kampus. Indra Kusuma dan Surya Adnyani (2016) meneliti sikap bahasa mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Pendidikan Singaraja dan juga orang-tua mereka dengan memberikan kuesioner dari Gardner. Hasilnya adalah ketertarikan mahasiswa dan orang-tua yang sangat tinggi terhadap bahasa Inggris (Kusuma, 2016). Sebelumnya, Dewa Komang Tantra dkk (2014) juga meneliti motivasi dan sikap bahasa mahasiswa di universitas yang sama namun pada tahun yang berbeda. Tantra menemukan bahwa motivasi memberi pengaruh pada prestasi belajar mahasiswa di kelas sebesar 6,3% dan sikap bahasa berpengaruh 11,2% (Tantra, 2014). Lestari Manggong (2017) meneliti sikap bahasa mahasiswa di luar Prodi Bahasa Inggris terhadap metode pembelajaran yang diberikan di Universitas Padjadjaran Kampus Pangandaran. Hasilnya menunjukkan bahwa mahasiswa menyenangi metode belajar yang berfokus pada mahasiswa dan lebih menyukai belajar berbicara daripada menulis (Manggong, 2017).

Selain sikap terhadap bahasa Inggris dan metode pembelajarannya, peneliti Indonesia juga meneliti sikap bahasa mahasiswa terhadap variasi bahasa Inggris, seperti yang dilakukan Hepi Adityarini dkk (2009) pada mahasiswa Prodi Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mereka menemukan bahwa sikap mahasiswa terhadap tiga variasi bahasa, yaitu *General American, British English*, dan *Indonesia English*, terutama pada kecepaan dan pengucapan dalam berbicara, mahasiswa-mahasiswa ini berpendapat bahwa (1) versi *Indonesia English* lebih mudah diikuti dan paling jelas pengucapannya; (2) versi *American English* dianggap paling menarik penyampaiannya; dan (3) versi *British English* adalah yang paling sulit diikuti (Adityarini, 2009). Alvii TB Siregar (2016) selain meneliti kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa non-prodi Bahasa Inggris

di STIKES Cimahi, juga meneliti sikap mereka terhadap bahasa ini. Hasil yang didapatkan adalah bahwa mahasiswa memiliki kemampuan yang rendah dalam berbahasa Inggris, tapi memiliki motivasi yang tinggi dan sikap yang mendukung terhadap pembelajaran Bahasa Inggris (Siregar, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh penulis hampir sama dengan yang dilakukan oleh Siregar (2017), yaitu meneliti kemampuan mahasiswa dalam menggunakan bahasa Inggris dan sikap mereka terhadap bahasa tersebut. Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat menambah informasi mengenai kemampuan mahasiswa di kampus-kampus di Indonesia dalam berbahasa Inggris, sehingga dapat menjadi masukan untuk target capaian pembelajaran mata kuliah Bahasa Inggris dan metode pembelajarannya untuk kampus lain.

METODE

Riset ini dilakukan pada mahasiswa yang masuk Unpad pada tahun ajaran 2016/2017 di tiga prodi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran, yang berarti pada tahun ini mereka sedang berada di semester ketiga. Tahap pertama adalah mencari tahu kemampuan mahasiswa dalam memahami teks berbahasa Inggris. Cara mengetahuinya adalah memberikan tes pada mahasiswa-mahasiswa tersebut. Pertanyaan yang diberikan adalah yang dapat menggali kemampuan mereka dalam mendapatkan topik dan gagasan utama, informasi spesifik, makna kosa kata, dan pengambilan informasi dari inferensi. Tahap berikutnya, hasil data akan dianalisis sehingga diketahui jenis pertanyaan mana yang sulit. Kemudian, dicari juga metode pembelajaran yang diinginkan mahasiswa fakultas ilmu budaya ini dengan cara survey melalui angket. Dari penyebaran angket di tiga prodi tersebut di atas, akan dapat dianalisis keterampilan bahasa, materi, dan metode seperti apa yang disenangi mahasiswa. Selain evaluasi pembelajaran tahun sebelumnya, diteliti juga sikap mereka terhadap keinginan dan kebutuhan mereka untuk melanjutkan belajar Bahasa Inggris. Hasil kedua kegiatan ini dapat menjadi dasar pembuatan model pembelajaran dan buku ajar yang dapat ditawarkan pada prodi-prodi di FIB untuk diberikan pada mata kuliah lanjutan bila dibutuhkan.

Tim peneliti telah mengukur tingkat pemahaman membaca teks bahasa Inggris mahasiswa melalui analisis tingkat kesukaran dari tes yang diberikan. Penyusunan pertanyaan dalam tes difokuskan pada lima komponen kemahiran, yaitu: (1) *vocabulary knowledge*, (2) *drawing inferences*, (3) *references*, (4) *identifying the main ideas*, dan (5) *identifying supporting information*. Untuk menguji kemampuan mereka dalam memahami bacaan Bahasa Inggris, telah diberikan satu tes dalam keterampilan ini. Total jumlah soal yang dikerjakan dalam tes adalah 12 soal, dengan pembagian 6 soal untuk Teks 1 dan 6 soal untuk Teks 2. Sebarannya dalam masing-masing teks

soal adalah sebagai berikut: dua pertanyaan mengenai *supporting information*, satu pertanyaan *main ideas*, satu pertanyaan *vocabulary*, satu pertanyaan *references*, dan satu pertanyaan *inference*.

Penyusunan lima komponen kemahiran ini didasarkan pada salah satu model pemahaman bacaan (*reading comprehension*) teks Bahasa Inggris, yakni model Konstruksi-Integrasi (*Construction-Integration (CI) model*), yang dianggap model yang paling baru dan valid. Menurut Kintsch, model CI membedakan dua model membaca: model teks pemahaman pembaca dan model situasi dari penafsiran pembaca. Menurut model teks, memahami bacaan terletak pada dua level: lokal dan global. Contoh level lokal mencakup pengetahuan tentang kata benda, kata kerja, dan modifier, yang membangun pemahaman kalimat; sedangkan, di level global, membaca menggunakan pengetahuan bahasa dan hubungan antar kalimat untuk dapat memahami isi teks, misalnya teknik inferensi. Dalam memahami bacaan, diperlukan juga model situasi dari penafsiran pembaca. Di model ini, pembaca menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki dalam rangka memahami teks yang sedang dibaca, dengan cara mencari informasi eksplisit dan implisit, selain membangun penafsiran bebas pembaca (Dijk, 1978; Kintsch, 1998). Penafsiran bebas dapat dipengaruhi oleh maksud pembaca, tujuan membaca, genre teks, dan penilaian informasi penting dalam teks (Grabe, 2011). Teknik ini termasuk keterampilan membaca tingkat tinggi, sedangkan pemahaman dari mengetahui makna kata, frasa, dan formasi struktur kalimat termasuk keterampilan membaca tingkat rendah, dan kedua teknik ini menurut Kintsch dibutuhkan dalam memahami bacaan (Kintsch, 1998). Dalam penelitian ini, lima keterampilan yang akan diteliti dari dua model ini, seperti telah disebut di atas.

Definisi mengenai sikap bahasa diambil dari Sarnoff (1970), yang menjelaskan bahwa sikap bahasa adalah "*disposition to react favourably and unfavourably to a class of objects*"; dan Asmah (1990) mendefinisikan konsep sebagai "*the way an individual feels and thinks about something or someone*" (Sarnoff dan Asmah dalam Aziz, 1994: 87). M. Sallehudin Abd. Aziz, yang meneliti sikap bahasa mahasiswa Universitas Kuala Lumpur (UKM) terhadap Bahasa Inggris, menuliskan bahwa dalam meneliti sikap, kita harus juga mempertimbangkan unsur penting lain, yaitu motivasi. Ia mengutip penjelasan Gardner yang menunjukkan adanya hubungan antara sikap dan motivasi. Aziz mengatakan bahwa menurut Gardner motivasi adalah kombinasi dari usaha dan kemauan untuk mencapai tujuan pembelajaran bahasa dan sikap baik terhadap pembelajaran itu (Aziz, 1994: 87). Pada penelitian ini, akan terlihat juga motivasi mahasiswa pada prodi yang diteliti terhadap pembelajaran Bahasa Inggris.

Penyusunan angket didasarkan pada Skala Likert, yang menemukan metode untuk mengukur karakteristik dan sifat-sifat kepribadian seseorang. Skala pengukuran sikap ini terdiri atas pertanyaan-pertanyaan dengan lima

alternatif jawaban, yaitu (1) STS : Sangat Tidak Setuju, (2) TS : Tidak Setuju, (3) R : Ragu-ragu, (4) S : Setuju, dan (5) SS : Sangat Setuju (Boone, 2012). Angket yang diberikan terdiri dari empat tema: (1) Mengenai efektivitas perkuliahan Bahasa Inggris tahun ajaran 2016/2017, (2) Model perkuliahan Bahasa Inggris, (3) Kebutuhan konten dan keterampilan Bahasa Inggris, (4) Perkuliahan Bahasa Inggris lanjutan.

Angket yang sudah diisi dianalisis dengan cara menghitung jumlah pemilih masing-masing pernyataan, dan membandingkan jumlah yang Setuju dan Sangat Setuju (S + SS) dengan jumlah pemilih yang Sangat Tidak Setuju dan Tidak Setuju (STS+TS). Dari perbandingan tersebut, akan didapatkan kecenderungan masing-masing prodi dalam memandang 4 tema tersebut di atas. Tafsiran persentase pilihan jawaban diuraikan dalam tabel berikut

Tabel 1. Tafsiran Persentase Pilihan Jawaban (Wiji, 2014)

Rentang	Tafsiran
0	Tidak ada
1-25	Sedikit
26-49	Hampir setengahnya
50	Setengahnya
51-75	Sebagian besar
76-99	Hampir seluruhnya
100	Seluruhnya

Setiap poin pernyataan akan ditafsirkan berdasarkan ukuran dalam tabel di atas. Kemudian dari total jawaban, akan didapatkan penilaian atau evaluasi pembelajaran Bahasa Inggris dalam program HITS 2016/2017, dan model pembelajaran Bahasa Inggris yang diharapkan mahasiswa. Berikut ini akan diuraikan satu per satu hasil analisis dari tes dan angket yang telah diberikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemampuan Memahami Bacaan Bahasa Inggris Mahasiswa

Terdapat 39 mahasiswa Prodi Sastra Jepang, 53 dari Sastra Sunda, dan 52 dari Ilmu Sejarah yang mengikuti tes ini. Penghitungan jawaban benar dari hasil tes diuraikan dalam tabel di bawah ini

Tabel 2. Presentase Jumlah Jawaban Benar

Jenis Pertanyaan	Persentase Jawaban Benar		
	Sastra Jepang	Ilmu Sejarah	Sastra Sunda
<i>supporting information</i>	88%	86%	79%
<i>main ideas</i>	87%	61%	41%
<i>references</i>	86%	67%	53%
<i>vocabulary</i>	86%	44%	54%
<i>inference</i>	78%	70%	45%

Dari data tersebut, terlihat bahwa kecenderungan di Prodi Sastra Jepang adalah: jenis pertanyaan yang paling mudah bagi mahasiswa Prodi Sastra Jepang adalah pertanyaan *supporting information*, dengan rata-

rata jumlah jawaban benar adalah 34,4 orang dari 39 mahasiswa (88%). Sedangkan, pertanyaan yang paling sulit bagi mereka adalah jenis pertanyaan *inference*, dengan rata-rata jumlah jawaban benar 30,5 orang (78%).

Dari data itu juga, terlihat bahwa kecenderungan pada mahasiswa Prodi Ilmu Sejarah adalah: kemampuan tertinggi mahasiswa adalah dalam hal menjawab jenis pertanyaan *supporting information*, dengan jumlah benar rata-rata 45,5 orang dari 52 (86%). Sebaliknya, kemampuan terendah mahasiswa adalah dalam hal menjawab jenis pertanyaan *vocabulary*, dengan jumlah benar rata-rata 23,5 dari 52 (44%).

Dari data itu juga, dapat dilihat bahwa kecenderungan mahasiswa di Prodi Sastra Sunda adalah: kemampuan tertinggi mahasiswa adalah dalam hal menjawab jenis pertanyaan *supporting information*, dengan rata-rata jumlah jawaban benar adalah 41 orang (79%). Sebaliknya, kemampuan terendah mahasiswa adalah dalam hal menjawab jenis pertanyaan *main ideas*, dengan jumlah rata-rata jawaban benar adalah 22 orang (41%).

Tabel di atas menunjukkan perbedaan yang cukup tajam antara kemampuan mahasiswa Prodi Sastra Jepang dan Sastra Sunda, sedangkan Prodi Ilmu Sejarah berada di tengahnya. Di atas 80% dari mahasiswa Prodi Sastra Jepang mampu menjawab pertanyaan dengan benar kecuali jenis pertanyaan *inference*. Sedangkan di Prodi Ilmu Sejarah, lebih dari 60% dapat menjawab pertanyaan dengan benar untuk semua jenis pertanyaan kecuali pertanyaan tentang makna kosa kata sesuai konteks (*vocabulary*). Namun, hanya jenis pertanyaan *supporting information* secara eksplisit yang dapat dijawab lebih dari 60% mahasiswa Prodi Sastra Sunda, empat jenis lainnya dijawab dengan benar oleh kurang dari 50% mahasiswa, dengan jenis pertanyaan pencarian gagasan utama (*main ideas*) yang paling sedikit dijawab benar.

Bila melihat persentase jumlah mahasiswa yang menjawab betul di atas 60% (nilai tes di atas 60), urutannya adalah: Sastra Jepang 92%, Ilmu Sejarah 64%, dan Sastra Sunda hanya 39% dari jumlah total mahasiswa masing-masing kelas yang mengikuti tes ini. Diteliti juga tingkat kesukaran soal bagi masing-masing prodi. Secara umum, dapat terlihat bahwa persentase kesulitan tiap jenis soal adalah sebagai berikut

Tabel 3. Tingkat Kesukaran Soal

Jenis Pertanyaan	Persentase		
	Sastra Jepang	Ilmu Sejarah	Sastra Sunda
<i>inference</i>	22%	56%	59%
<i>references</i>	14%	39%	55%
<i>vocabulary</i>	14%	33%	47%
<i>main ideas</i>	13%	30%	46%
<i>supporting information</i>	12%	14%	21%

Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan mahasiswa Program Studi Sastra Jepang masih rendah dalam menginferensi atau memperoleh informasi implisit

(*inference*). Sementara itu, dari data tersebut terlihat bahwa mereka dapat dengan mudah mendapatkan informasi eksplisit dalam teks.

Tabel di atas juga ini menunjukkan bahwa kemampuan mahasiswa Program Studi Ilmu Sejarah dalam hal mengetahui makna kata atau memahami kosa kata berdasarkan konteks, masih rendah. Sementara itu, dari data tersebut terlihat bahwa mahasiswa Program Studi Ilmu Sejarah unggul dalam hal memahami informasi yang tercantum dalam teks.

Dapat diketahui juga bahwa mahasiswa Sastra Sunda mengalami kesulitan dalam menemukan gagasan utama (*main ideas*) dalam sebuah teks, lebih sulit daripada menemukan gagasan tersembunyi/implisit dalam teks, yang biasanya terlihat dari jenis pertanyaan *inference*. Sebagian mahasiswa mempunyai kemampuan yang rendah dalam mengetahui makna kosa kata sesuai konteks, seperti terlihat dari jenis pertanyaan *vocabulary* dan *references*. Sedangkan, dalam memperoleh informasi pendukung (*supporting information*), hampir semua mahasiswa Sastra Sunda yang diberi tes ini mampu menyelesaikannya.

Sikap Bahasa Mahasiswa

Terdapat empat poin pertanyaan dalam survey; berikut diuraikan satu-persatu hasilnya.

A. Efektifitas Perkuliahan Bahasa Inggris Tahun Ajaran 2016/2017.

Mengenai hal ini, hasil survey dapat dilihat pada tabel 4. Dari tabel 4 diperoleh data bahwa hampir semua mahasiswa Prodi Sastra Jepang senang belajar Bahasa Inggris dan bukan hanya untuk mendapatkan nilai bagus, serta setengahnya memprioritaskan pembelajaran Bahasa Inggris. Begitu pula dengan mahasiswa Prodi Sastra Sunda dan Ilmu Sejarah, mereka senang belajar bahasa ini

namun sebagian besar tidak mendahulukannya dari mata kuliah lain. Kemudian, hampir setengah dari mahasiswa Sastra Jepang berpendapat dapat memahami konsep Bahasa Inggris yang sulit, dan sebagian besar merasa mampu mengerjakan tes-tes Bahasa Inggris dengan baik. Berkebalikan dengan mahasiswa Sastra Sunda, sebagian besar dari mereka merasa tidak mampu memahami konsep yang sulit dan mereka juga tidak yakin apakah dapat mengerjakan tes-tesnya dengan baik. Sedikit berbeda dengan mahasiswa Ilmu Sejarah, hampir setengahnya merasa ragu apakah dapat memahami konsep Bahasa Inggris yang sulit dan sebagaian besar berpendapat bahwa mereka tidak mampu mengerjakan tes-tesnya dengan baik.

Tentang pembelajaran Bahasa Inggris yang mereka peroleh di semester satu pada tahun ajaran 2016/2017, sebagian besar mahasiswa Sastra Jepang berpartisipasi dalam perkuliahan Bahasa Inggris saat kontennya menarik dan senantiasa berubah, tapi hampir setengahnya ragu apakah perkuliahannya menantang; berbeda dengan dua prodi lainnya: hampir semua mahasiswa Sastra Sunda dan sebagian besar mahasiswa Ilmu Sejarah menganggap perkuliahan Bahasa Inggris pada program HITS cukup menantang. Mahasiswa Sastra Jepang terlihat sudah menguasai konsep-konsep Bahasa Inggris yang diberikan di perkuliahan sehingga merasa tidak tertantang mempelajarinya.

Mengenai metode pembelajaran perkuliahan mereka dalam mata kuliah Bahasa Inggris, sebagian besar mahasiswa di tiga prodi ini merasa tidak yakin apakah sudah menjadi peserta yang aktif dikelas. Hampir setengah dari mahasiswa Sastra Jepang ragu apakah dapat memahami pelajaran karena menggunakan peralatan audio-visual, sedangkan mahasiswa Sastra Sunda dan Ilmu Sejarah berpendapat mereka dapat memahami pelajaran dengan bantuan teknologi tersebut.

Tabel 4. Efektifitas Perkuliahan

No	Pernyataan	Jawaban		
		Sangat Setuju & Setuju		
A. Efektifitas Perkuliahan Bahasa Inggris tahun ajaran 2016/2017		Sastra Jepang	Ilmu Sejarah	Sastra Sunda
1	Saya senang belajar Bahasa Inggris	85%	89%	81%
2	Saya belajar Bahasa Ing-gris hanya untuk mendapatkan nilai bagus	8%	11%	6%
3	Saya dapat memahami konsep Bahasa Inggris yang sulit	44%	15%	12%
4	Saya dapat mengerjakan tes-tes Bahasa Inggris dengan baik	69%	28%	23%
5	Saya bersedia untuk berparti sipasi dalam perkuliahan Bahasa Inggris apabila kontennya menarik dan senantiasa berubah	77%	92%	81%
6	Saya adalah peserta aktif di kelas bahasa Inggris	31%	40%	21%
7	Saya dapat memahami konsep Bahasa Inggris dengan jelas karena dalam perkuliahan menggunakan peralatan au-dio visual yang memadai	28%	43%	42%
8	Lingkungan belajar mengajar sangat mendukung dan meningkatkan pembelajaran Bahasa Inggris saya	46%	51%	35%
9	Saya mengha-biskan lebih banyak waktu untuk me-ngerjakan pekerjaan rumah Bahasa Inggris dari-pada mengerjakan pekerjaan rumah dari orang lain	8%	21%	17%
10	Saya bersedia untuk berpar-tisipasi dalam perkuliahan Bahasa Inggris karena menantang	33%	58%	60%
11	Saya puas dengan kemampuan Bahasa Inggris yang didapatkan melalui perkuliahan	26%	15%	17%

Dalam pendapat mereka mengenai lingkungan belajar mengajar, hampir setengah mahasiswa Sastra Jepang dan sebagian besar mahasiswa Ilmu Sejarah setuju hal itu sangat mendukung dan meningkatkan pembelajaran Bahasa Inggris mereka, namun belum merasa puas dengan kemampuan Bahasa Inggris yang didapatkan melalui perkuliahan. Sedangkan, mahasiswa Sastra Sunda merasa lingkungan belajar di kampus tidak mendukung, namun mereka merasa puas dengan apa yang mereka dapatkan dari perkuliahan Bahasa Inggris ini.

Secara ringkas, dapat disimpulkan bahwa Efektifitas perkuliahan Bahasa Inggris di Prodi Sastra Jepang belum dapat dicapai secara maksimal, mengingat walau mahasiswa senang belajar Bahasa Inggris, mampu memahami konsep Bahasa Inggris yang sulit dan merasa mampu mengerjakan tes-tesnya dengan baik, namun mereka merasa tidak puas dan berpendapat perkuliahan Bahasa Inggris yang mereka peroleh di semester satu kurang menantang dan tidak yakin apakah mereka dapat lebih jelas memahami materi karena peralatan audio-visual. Melihat dari hasil tes mereka, terlihat kemampuan memahami bacaan Bahasa Inggris mahasiswa prodi ini sangat baik, hingga sebenarnya mereka sudah siap menerima teks-teks dari level atas (*advanced level*), yang banyak terdapat dalam buku teks berbahasa Inggris dan jurnal ilmiah internasional.

Di kelas Prodi Ilmu Sejarah, efektifitas perkuliahan Bahasa Inggris dapat dicapai secara optimal, mengingat lingkungan belajar mengajar sangat mendukung dan meningkatkan pembelajaran Bahasa Inggris. Selain itu, mahasiswa senang belajar Bahasa Inggris dan menganggap belajar bahasa Inggris adalah hal yang menantang, walau masih merasa kesulitan dengan beberapa konsep dan tes-tesnya. Mahasiswa Prodi Ilmu Sejarah masih merasa belum puas dengan kemampuan yang didapatkan dari pembelajaran di program HITS 2016/2017. Bila melihat hasil tes Bahasa Inggris, kemampuan mereka dapat dikatakan sudah mencapai level menengah ke atas (*upper-intermediate*) sehingga mereka cukup siap membaca buku teks berbahasa Inggris pada bidang ilmunya, walau perlu menambah banyak kosa-kata baru.

Di Prodi Sastra Sunda, efektifitas perkuliahan Bahasa Inggris di program HITS belum dicapai. Para mahasiswa merasa senang belajar Bahasa Inggris dan dapat memahami materi karena menggunakan peralatan audio-visual, serta menganggap pembelajaran bahasa Inggris di tahun ajaran 2016/2017 ini cukup menantang. Mereka juga merasa puas dengan kemampuan yang diperoleh dari perkuliahan ini. Namun, mereka berpendapat lingkungan belajar mengajar tidak terlalu mendukung dan tidak meningkatkan pembelajaran Bahasa Inggris mereka, serta masih merasa kesulitan untuk memahami beberapa konsep Bahasa Inggris dan belum yakin apakah dapat mengerjakan tes-tesnya. Melihat dari hasil tes mereka, kemampuan mahasiswa prodi ini dalam memahami bacaan berbahasa Inggris masih rendah, antara level dasar

dan menengah (*pre-intermediate*). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemberian materi pembelajaran mata kuliah Bahasa Inggris pada tahun ajaran 2016/2017 terlalu berat untuk mereka.

B. Model Perkuliahan Bahasa Inggris yang Diinginkan Mahasiswa

Poin kedua pada angket yang disebarakan adalah mengenai model perkuliahan. Hasil survey dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Model Perkuliahan

No	Pernyataan	Jawaban		
		Sangat Setuju & Setuju		
B. Model Perkuliahan Bahasa Inggris		Sastra Jepang	Ilmu Sejarah	Sastra Sunda
1	Metode pengajaran yang berpusat pada mahasiswa memberi lebih banyak kebebasan untuk mengeksplorasi kemampuan Bahasa Inggris saya	54%	47%	62%
2	Untuk mengembangkan kemampuan berbicara Bahasa Inggris maka mahasiswa perlu diberikan kesempatan role play atau presentasi dalam perkuliahan	74%	75%	83%
3	Dalam perkuliahan Bahasa Inggris, saya pikir amat penting untuk belajar memecahkan masalah	74%	70%	88%
4	Dalam perkuliahan Bahasa Inggris, saya pikir amat penting untuk berpartisipasi dalam aktivitas inkuiri (penemuan konsep secara mandiri)	62%	58%	67%
5	Saya bersedia untuk berpartisipasi dalam perkuliahan Bahasa Inggris apabila dosen menggunakan berbagai metode pembelajaran	77%	85%	83%
6	Saya bersedia untuk berpartisipasi dalam perkuliahan Bahasa Inggris apabila mahasiswa dilibatkan dalam diskusi	64%	85%	79%
7	Saya menikmati nyanyian bahasa Inggris di kelas	90%	85%	87%
8	Saya menikmati permainan dan tugas dalam bahasa Inggris di kelas	77%	75%	69%
9	Saya menikmati komunikasi dosen dan mahasiswa dalam Bahasa Inggris selama perkuliahan	49%	53%	33%
10	Saya senang diberikan kesempatan berkomunikasi dalam Bahasa Inggris dengan mahasiswa lain selama perkuliahan	62%	64%	54%
11	Saya lebih tertarik apabila Bahasa Inggris diajarkan dengan kreativitas	90%	96%	87%

12	Metode perkuliahan yang menyenangkan adalah ketika dosen memberikan perkuliahan melalui ceramah	13%	17%	21%
13	Dosen perlu mendatangkan native speaker minimal sekali dalam perkuliahan Bahasa Inggris	90%	91%	81%

Sebagian besar mahasiswa dari tiga prodi ini menilai bahwa pengajaran yang berpusat pada mahasiswa memberi lebih banyak kebebasan untuk mengeksplorasi kemampuan Bahasa Inggris, juga menilai bahwa untuk mengembangkan kemampuan berbicara Bahasa Inggris perlu menggunakan metode pembelajaran yang variatif: presentasi dan diskusi/bermain peran/permainan/menonton film/ penemuan konsep secara mandiri/pemecahan masalah sendiri/ mendengarkan lagu, dan sebagian besar dari mereka tidak menyukai metode ceramah. Hampir setengah dari mahasiswa Sastra Jepang dan Ilmu Sejarah menikmati komunikasi dosen dan mahasiswa, juga antar mahasiswa, dalam Bahasa Inggris selama perkuliahan, namun mahasiswa Sastra Sunda ragu apakah mereka dapat melakukan komunikasi dalam Bahasa Inggris dengan dosen. Hampir seluruh mahasiswa dari tiga prodi ini menilai bahwa dosen perlu mendatangkan penutur asli minimal sekali dalam perkuliahan Bahasa Inggris.

C. Kebutuhan Konten dan Keterampilan Bahasa Inggris
Tabel berikut menunjukkan hasil survey pada poin ketiga.

Tabel 6. Kebutuhan Konten dan Keterampilan

No	Pernyataan	Jawaban		
		Sastra Jepang	Ilmu Sejarah	Sastra Sunda
C. Kebutuhan Konten dan Keterampilan Bahasa Inggris				
1	Saya menyadari bahwa kemampuan berbahasa Inggris sangat penting mengingat peluang kerja	100%	98%	98%
2	Saya terdorong untuk membaca majalah dan surat kabar Inggris, dengarkan berita Inggris dan program menonton dalam bahasa Inggris.	92%	68%	63%
3	Belajar Bahasa Inggris penting karena saya menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari	56%	53%	48%
4	Saya pikir belajar bahasa Inggris membantu saya untuk belajar bahasa asing lainnya.	87%	87%	81%
5	Dalam perkuliahan bahasa Inggris saya lebih senang apabila Dosen menekankan empat keterampilan bahasa (mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis)	87%	92%	90%
6	Saya lebih tertarik mengikuti perkuliahan Bahasa Inggris apabila dosen menekankan pada kemampuan berbicara	69%	77%	67%
7	Saya lebih tertarik mengikuti perkuliahan Bahasa Inggris apabila dosen menekankan pada kemampuan menulis	67%	60%	60%

8	Melalui perkuliahan Bahasa Inggris, saya ingin bisa memahami film dan program TV Inggris tanpa melihat subtitle	90%	85%	81%
9	Melalui perkuliahan Bahasa Inggris, saya ingin belajar tentang gaya hidup dan kebiasaan di mancanegara seperti Inggris dan Amerika	64%	57%	57%
10	Saya ingin bisa mengucapkan bahasa Inggris seperti orang Inggris atau Amerika	74%	87%	85%

Berkaitan dengan konten materi dari pembelajaran Bahasa Inggris, hampir semua mahasiswa tiga prodi ini beranggapan bahwa dalam perkuliahan bahasa Inggris, mereka senang apabila dosen menekankan empat keterampilan bahasa (mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis). Hampir semua juga menilai bahwa melalui perkuliahan Bahasa Inggris, ingin bisa memahami film dan program TV Inggris tanpa melihat subtitle dan sebagian besar mereka ingin belajar tentang gaya hidup dan kebiasaan di mancanegara seperti Inggris dan Amerika. Sebagian besar mahasiswa baik dari Sastra Jepang, Ilmu Sejarah, maupun Sastra Sunda ingin bisa mengucapkan bahasa Inggris seperti orang Inggris atau Amerika.

D. Perkuliahan Bahasa Inggris Lanjutan

Hasil dari survey pada poin ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. Perkuliahan Lanjutan

No	Pernyataan	Jawaban		
		Sastra Jepang	Ilmu Sejarah	Sastra Sunda
D. Perkuliahan Bahasa Inggris Lanjutan				
1	Saya ingin ada mata kuliah Bahasa Inggris lanjutan agar dapat berteman dengan orang-orang yang tinggal di luar negeri dengan bertukar surat dan e-mail	59%	79%	69%
2	Menurut saya perlu ada perkuliahan Bahasa Inggris yang khusus mempersiapkan kemampuan untuk meningkatkan nilai TOEFL atau IELTS	95%	83%	98%
3	Saya ingin ada mata kuliah khusus Bahasa Inggris yang membekali kemampuan membaca buku dan jurnal berbahasa Inggris dengan mudah	74%	89%	88%
4	Menjelang akhir perkuliahan, saya ingin mendapatkan bekal Bahasa Inggris yang menunjang dunia kerja	95%	92%	100%

Pada poin ini juga, mahasiswa dari tiga prodi ini menyadari bahwa kemampuan berbahasa Inggris sangat penting mengingat peluang kerja dan hampir semuanya terdorong untuk membaca majalah dan surat kabar Inggris,

mendengarkan berita Inggris dan program menonton dalam bahasa Inggris. Sebagian besar mahasiswa Sastra Jepang dan Ilmu Sejarah menilai bahwa bahasa Inggris penting karena mereka dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, namun kurang dari setengah mahasiswa Sastra Sunda yang menyetujui hal tersebut. Hampir semua dari mahasiswa ditiga prodi ini berpendapat bahwa belajar bahasa Inggris membantunya untuk belajar bahasa asing lainnya.

Tentang perlu tidaknya perkuliahan Bahasa Inggris Lanjutan, sebagian besar mahasiswa ingin ada mata kuliah Bahasa Inggris lanjutan agar dapat berteman dengan orang-orang yang tinggal di luar negeri dengan bertukar surat dan e-mail, dan dapat membaca buku dan jurnal berbahasa Inggris dengan mudah. Hampir semua juga menilai bahwa perlu ada perkuliahan Bahasa Inggris yang khusus mempersiapkan kemampuan untuk meningkatkan nilai TOEFL atau IELTS, dan yang memberikan bekal Bahasa Inggris yang menunjang dunia kerja.

SIMPULAN

Dari penelitian terhadap tiga prodi di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran dapat terlihat tiga hal penting terkait dengan efektifitas pembelajaran Bahasa Inggris di program HITS 2016/2017. Mahasiswa Prodi Sastra Jepang mempunyai kemampuan memahami bacaan Bahasa Inggris dengan sangat baik terlihat dari rata-rata jawaban betul pada semua jenis pertanyaan dalam tes, yaitu di atas 80%. Namun, hampir setengah dari mereka tidak puas dan belum merasa tertantang dengan model pembelajarannya.

Mahasiswa Prodi Ilmu Sejarah dapat mengikuti pembelajaran Bahasa Inggris dengan cukup baik dengan melihat rata-rata jawaban betul untuk empat jenis pertanyaan dalam tes di atas 60%, dan hanya satu yang di bawahnya. Namun, sebagian besar dari mereka belum merasa puas dengan model pembelajarannya karena masih merasa kesulitan dalam memahami beberapa konsep dan dalam mengerjakan tes-tesnya. Mahasiswa Prodi Sastra Sunda masih harus banyak berlatih untuk memahami teks Bahasa Inggris karena rata-rata jawaban betul pada empat jenis pertanyaan dalam tes di bawah 60%, hanya satu yang berada di atasnya. Namun, mereka sudah merasa puas dengan pembelajarannya: materinya cukup menarik dan variatif, serta metodenya menantang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim peneliti mengucapkan terimakasih pada Universitas Padjadjaran, Bandung, atas bantuan dana yang diberikan melalui Hibah Internal Unpad (HIU) tahun 2017.

DAFTAR PUSTAKA

Adtyarini, H., Wijayanto, A. & Masykuroh, Q. (2009). Sikap Mahasiswa Program Studi Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Surakarta terhadap

Variasi Bahasa Inggris. *Jurnal Penelitian Humaniora UNY*, 10, (1), 71-80.

Aziz, M.S.A. (1994). Attitudes towards English: A Survey of UKM Undergraduates. *Jurnal Akademika Universiti Kebangsaan Malaysia*, 44, (1), 85-99.

Boone, H.N. & Boone, D.A. (2012). Analyzing Likert Data. *Journal of Extension, West Virginia University*, 50, (2), 1-5

Grabe, W.F.S. (2011). Teaching and Researching Reading. New York: Longman.

Kintsch, W. (1998). Comprehension: A Framework for Cognition. New York: Cambridge University Press.

Kintsch, W. & van Dijk, T.A. (1978). Toward a Model of Discourse Comprehension and Production. *Jurnal Psychological Review*, 85, (5), 363-394.

Kusuma, I., & Adnyani, S. (2016). Motivasi dan Sikap Bahasa Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Undiksha. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5, (1), 702-713.

Manggong, L., Sachmadi, I.F. & Indrayani, L.M. (2017). Sikap terhadap Bahasa Inggris: Survey terhadap Mahasiswa Universitas Padjadjaran Kampus Pangandaran. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1, (5), 317-321.

Manurung, R. T. (2011). Pengajaran Bahasa yang Berkarakter Kebangsaan dan Berspektif Multibudaya dalam Era Globalisasi. *Sosiohumaniora*, 13, (2), 235-242.

Muflihah. (2016). Tingkat Kemampuan Membaca Teks Bahasa Inggris: Studi Kasus Mahasiswa Kelas Bilingual IAIN Purwokerto. Yogyakarta: Paper presented at the Consortium of Linguistics and Literature: Contemporary Issues in English Linguistics, Literature, and Educations.

Pratiwi, V.U., Astuti, P.I. & Handayani. S. (2015). Kemampuan Membaca Teks Bahasa Inggris. *Magister Scientiae*, 38, (1), 132-142.

Rohman, A.S., & Prijana. (2016). Kemampuan Baca Mahasiswa pada Buku Teks. *Sosiohumaniora*, Unpad, 18, (3), 255-260.

Siregar, A.T., & Evangline, H. (2017). Kemampuan Berbahasa Inggris, Motivasi dan Sikap terhadap Bahasa Inggris Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan (S1) STIKES Jenderal Achmad Yani Cimahi. *Skolastik Keperawatan*, 3, (1), 11-18.

Tantra, D.K., Mahayanti, N.W.S. & Ratminingsih, N.M. (2014). Pengaruh Motivasi Belajar dan Sikap

Bahasa terhadap Prestasi Belajar Keterampilan Berbahasa Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Paper presented at the Seminar Nasional Riset Inovatif

Wiji. (2014). Pengembangan Desain Perkuliahan Kimia Sekolah Berbasis Model Mental untuk Meningkatkan Pemahaman Materi Subyek Mahasiswa Calon Guru Kimia. (Doctoral Degree), Universitas Pendidikan Indonesia.

POTRET MINAT LANJUTAN SEKOLAH: ANALISIS DAMPAK RENCANA PENETAPAN WILAYAH GARUT UTARA SEBAGAI KAWASAN INDUSTRI

Kurnia Muhamad Ramdhan¹, RD. Ahmad Buchari², dan D. Anisa Sunija³

¹Mahasiswa Prodi Pascasarjana Magister Kebijakan Publik, FISIP, Universitas Padjadjaran

²Dosen Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Padjadjaran

³Mahasiswa Prodi Sarjana Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Padjadjaran

E-mail: kurniamr@yahoo.com

ABSTRAK. Tulisan ini merupakan hasil penelitian terhadap dampak dari rencana ditetapkannya wilayah Garut Utara sebagai kawasan industri. Fenomena cukup maraknya golongan ekonomi lemah di Garut Utara memunculkan kecenderungan kolektif bagi mayoritas lulusan Sekolah Menengah Atas untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi. Kondisi tersebut kemudian semakin terdorong oleh ketersediaan lapangan kerja di daerahnya. Padahal jika merujuk pada PP Nomor 17 Tahun 2010 dijelaskan bahwa SMA dan MA memfasilitasi kebutuhan pembelajaran serta kompetensi yang diperlukan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Hal ini dapat berisiko menimbulkan bias penafsiran di masyarakat tentang perbedaan SMA/ MA dengan SMK/ MAK. Lebih jauh lagi, kualitas Sumber Daya Manusia yang dihasilkan tidak cukup sesuai dengan kapasitas pendidikannya. Penelitian ini menggunakan metode explanatory qualitative research yang berguna untuk membangun causal explanation. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semenjak berdirinya beberapa pabrik industri yang ada di kawasan Garut Utara menimbulkan beragam penyebab yang mempengaruhi minat lanjutan sekolah para pelajar SMA dan MA, salah satunya adalah mayoritas dari siswa SMA/ MA di wilayah Garut Utara ini memilih untuk tidak melanjutkan studinya dan cenderung memilih untuk menjadi pegawai di pabrik saja.

Kata kunci: minat; pendidikan; kawasan industri

PORTRAIT OF ADVANCED INTEREST IN STUDY: ANALYSIS OF THE IMPACT IN NORTH GARUT REGION PLAN AS AN INDUSTRIAL AREA

ABSTRACT. This paper is the result of research on the impact from the planned establishment of the Garut Utara region as an industrial area. The phenomenon of quite widespread weak economic groups in Garut Utara raises the desire for congregation for not to continue their education to higher education. This condition is further driven by the availability of employment in the area. Even if referring to PP No. 17 Tahun 2010, it is explained that SMA and MA facilitate learning needs and competencies needed by students to continue their education at the tertiary level. This can risk causing interpretation bias in the community about the difference between SMA/ MA and SMK/ MAK. Furthermore, the quality of Human Resources produced is incompetent according to their educational capacity. This research uses explanatory qualitative research method which is useful to build causal explanation. The results of the study show that there are a variety of causes that influence the continued interest in schooling of high school and MA students.

Key words: interest; education; industrial area

PENDAHULUAN

Adanya fenomena disorientasi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) menjadi suatu aksioma di masyarakat, khususnya di masyarakat pedesaan yang secara perekonomian dan latar belakang pendidikan berbeda apabila dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Disorientasi disini berupa keputusan para siswa/i SMA dan MA yang setelah lulus cenderung tidak menempuh pendidikan lanjutan, sedangkan dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pada Pasal 76 menjelaskan bahwa pendidikan menengah umum berfungsi untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi (poin c) dan meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat (poin f), kemudian dipertegas pada pasal 79 yang berbunyi penjurusan pada SMA, MA, atau bentuk lain yang sederajat berbentuk program studi yang

memfasilitasi kebutuhan pembelajaran serta kompetensi yang diperlukan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.

Hal ini kontras berbeda dengan definisi yang ada pada pasal dan poin yang sama untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) yang lebih membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, dan penjurusannya berbentuk studi keahlian. Hingga saat ini memang belum ditemukan riset yang mengarah kepada hal tersebut, terlebih untuk mengkaji dampak jangka panjang terhadap tatanan sistem pendidikan nasional, namun bukan sebuah langkah yang cermat apabila disorientasi ini hanya dianggap sebuah kewajaran, karena dengan mewajarkan hal tersebut justru dapat membiaskan pendikotomian definisi sekolah menengah umum dan sekolah menengah kejuruan pada tataran praktis, lebih

jauhnya lagi akan mempengaruhi pola pikir dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Rencana lanjutan sekolah para lulusan SMA dan MA erat kaitannya dengan minat yang dimiliki, adapun minat dapat diartikan sebagai kecenderungan hati yang menetap dalam subjek atau tingkah laku seseorang untuk merasa tertarik pada bidang tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang itu (Djaali, 2011, p. 122; Slameto, 2003, p. 57; W. S. Winkel & S.j, 1984, p.25). Pendapat tersebut diperkuat oleh Williams, K. C. (2013) bahwa "The fact is that human beings in general and students in particular are complex creatures with complex needs and desires". Crow dan Crow (1963), menyatakan ada 3 faktor yang mempengaruhi minat, yaitu sebagai berikut: a). Faktor dorongan atau keinginan dari dalam (inner urges); b). Faktor motif sosial (social motive); c). Faktor emosional (emotional motive).

Pendapat Crow dan Crow (1963) tersebut senada dengan Najafian, M. et.al, (2013) yang lebih spesifik mensegmentasikan faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi minat dalam melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, dalam hasil penelitiannya menyatakan, "Research results showed six factors which affect students' interest and direction towards higher education including individual factors, parents, friends, teachers, media and university's data," adapun dari enam faktor tersebut Penulis melakukan penelitian dalam empat lingkup faktor, yaitu faktor diri sendiri, keluarga, dan sekolah:

Faktor yang dipengaruhi dari dalam diri sendiri diantaranya motivasi, cita-cita dan keinginan, sejalan dengan pendapat tersebut dikuatkan oleh Suprpto (2007:12) bahwa "salah satu yang mempengaruhi minat adalah motivasi". Hamalik (1992:173) mengungkapkan, motivasi adalah suatu perubahan energi dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan (afektif) dan reaksi untuk mencapai tujuan. Cita-cita adalah kehendak yang selalu ada di dalam pikiran seseorang dan akan selalu berusaha mencapainya. Keinginan sama dengan harapan. Pada saat ada keinginan dari siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi maka siswa tersebut akan berusaha mencapai tujuan tersebut;

Faktor yang dipengaruhi lingkungan keluarga disebabkan beberapa hal diantaranya pendidikan keluarga dan ekonomi keluarga. Pendidikan keluarga yang tinggi akan mendukung kemauan anak bahkan akan mengarahkan potensi anak. Sedangkan kondisi ekonomi yang berkecukupan memudahkan orang tua dalam pembiayaan atau memilih perguruan tinggi yang diinginkan. Sejalan dengan Okioga, C.K. (2013), "Lower incomes families can have children who do not succeed to the levels of the middle income children have a greater sense of entitlement, more argumentative, or better prepared for adult life." Rendahnya pendapatan orang tua mempengaruhi keberhasilan anak. Diperkuat oleh Davis-Kean P.E. (2005), "Parents' years of schooling also was found to be an important socioeconomic factor to take into

consideration in both policy and research when looking at school-age children."; dan

Faktor yang mempengaruhi minat berdasarkan lingkungan sekolah terdiri dari tiga peran yaitu alumni, teman, dan guru yang mendukung dalam melanjutkan masuk perguruan tinggi. Alumni pada lingkungan sekolah berdampak pada ketertarikan pada siswa untuk memperoleh pandangan memilih perguruan tinggi. Teman dan guru merupakan pendukung dalam mencari informasi sebanyak-banyaknya.

Fenomena disorientasi ini semakin kentara di Kabupaten Garut bagian Utara, khususnya di Kecamatan Leles yang diwacanakan sebagai kawasan industri terluas yaitu 210,27 hektar. Wacana ini sudah mencuat sejak tahun 2016 di masa pemerintahan Bupati Rudy Gunawan dan Helmi Budiman ketika bermaksud untuk mengundang banyak investor menanamkan modalnya di Kabupaten Garut sebagai jalan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Kabupaten yang tercatat memiliki jumlah pengangguran sekitar 65.700 orang ini kian gencar melakukan promosi terhadap para investor lokal maupun asing agar berminat untuk menanamkan modalnya. Hal ini tidak terlepas dari keinginan Pemerintah Kabupaten Garut untuk menyediakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya yang kemudian berimplikasi terhadap turunya angka pengangguran serta menaikkan taraf perekonomian masyarakat.

Namun, maksud ini terganjal karena Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang tidak memperkenankan Kabupaten Garut memiliki kawasan industri karena berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22/2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat, dari luas wilayah Kabupaten Garut yang mencapai 307.407 hektar ditetapkan sebesar 81,39% merupakan kawasan lindung dan diarahkan menjadi daerah unggulan. Dalam hal tersebut yang diprioritaskan yakni sektor pertanian dan industri pengolahan pertanian, perikanan dan industri pengolahan perikanan, wisata alam dan minat khusus, serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non logam. Walaupun begitu, faktanya sudah berdiri beberapa pabrik berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Garut yang sudah mulai beroperasi sejak tahun 2016, guna lebih menjangkau dan mempermudah para investor menanamkan modalnya maka Pemkab Garut mengajukan permohonan perubahan RTRW.

Pada tanggal 18-19 Januari 2017 telah dilaksanakan survei dan verifikasi lapangan calon lokasi kawasan industri yang akan ditetapkan dalam Revisi RTRW (RTRW) Kabupaten Garut Tahun 2011-2031. Survei diikuti berbagai unsur dari Pemerintah Kabupaten Garut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, serta perwakilan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Tujuan survei dan verifikasi ini yaitu untuk mendapatkan fakta lapangan sebagai masukan

persetujuan substansi Menteri ATR/Kepala BPN terhadap rencana peruntukan kawasan industri dalam Revisi RTRW Kabupaten Garut Tahun 2011-2031. Adapun survei dan verifikasi ini melahirkan kesepakatan rekomendasi dalam Berita Acara tertanggal 19 Januari 2017 berdasarkan hasil fakta lapangan yaitu sekitar 510,21 hektar dari wacana semula seluas 1.313,97 hektar.

Terlepas dari hal itu, kini wilayah Garut Utara sudah mulai bertransformasi menjadi sebuah kawasan industri baru dengan segudang permasalahan, salah satunya adalah isu mengenai tenaga kerja. Tidak bisa dipungkiri bahwa adanya penyerapan tenaga kerja menjadi hal yang cukup mengundang masyarakat produktif untuk menjadi pekerja pada sektor ini. Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan juga lebih banyak pada lulusan SMA/ sederajat. Fenomena tersebut menarik peneliti untuk kemudian memotret minat lanjutan sekolah sebagai dampak dari penetapan wilayah Garut Utara sebagai kawasan industri.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini yaitu melalui pendekatan explanatory qualitative research, hal ini didasarkan pada perumusan masalah yang menuntut untuk melakukan berbagai aktivitas eksplorasi dalam rangka memahami dan menerangkan gejala-gejala tertentu yang menjadi fokus penelitian ini. Penelitian dengan pendekatan kualitatif dipilih guna lebih melihat makna, artian (meaning) dari permasalahan, yang berguna untuk membangun causal explanation. Pendekatan kualitatif bertujuan memahami suatu situasi sosial atau permasalahan sosial, yang dibentuk berdasarkan pandangan informan.

Bukan tanpa alasan mengapa penelitian kualitatif lebih dipertimbangkan, Penulis sudah berupaya menggunakan pendekatan kuantitatif namun pada saat melakukan observasi di lapangan ternyata tidak sesuai ekspektasi, sehingga dalam pemilihan informan pun dilakukan accidental sampling terhadap para siswa/i kelas XII dan lebih diarahkan kepada penelitian kualitatif. Penulis pada saat itu melakukan penelitian pada rentang 7 hari sebelum Ujian Nasional guna mendapatkan kualitas data yang lebih baik, namun kenyataannya tidak semua informan dapat ditemui. Dari 12 sekolah yang tersebar di 3 kecamatan, hanya 3 sekolah yang tersebar di 2 kecamatan saja yang dapat Penulis dapatkan datanya, yaitu SMA YKBBB yang berlokasi di Jalan Raya Tutugan Leles, Haruman Leles, MA Al Muamalah yang berlokasi di Jalan Raya Leuweungtiis, dan MAS Ma'arif yang berlokasi di Kecamatan Kadungora. Hal ini disebabkan keterbatasan ruang, waktu, dan kendala lainnya yang tidak terprediksi. Data primer Penulis dapatkan melalui wawancara terstruktur. Berikut ini Penulis sajikan perbandingan banyaknya populasi dan informan yang berhasil di wawancarai.

Tabel 1. Jumlah Informan

	SMA YKBBB Leles	MA Al Muamalah Leles	MAS Ma'arif Kadungora
Jumlah Populasi	177 orang	34 orang	117 orang
Jumlah Informan	29 orang	21 orang	55 orang

(Hasil olah Penulis, 2018)

Adapun pertanyaan kepada informan telah tersusun dalam pertanyaan terstruktur seperti berikut ini.

- Apakah kamu akan melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi?
- Apakah alasan biaya menjadi salah satu faktor penyebab?
- Apakah keinginan keluarga menjadi salah satu faktor penyebab?
- Apakah alasan untuk segera menikah menjadi salah satu faktor penyebab?
- Apakah sekolah mendorong Kamu untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi?
- Apakah sekolah mendorong Kamu untuk langsung bekerja?
- Apakah Kamu tertarik untuk bekerja menjadi karyawan pabrik?
- Apakah kamu akan bekerja di pabrik?
- Apakah obsesi Kamu untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dipengaruhi oleh lingkungan pertemanan di sekolah Kamu?
- Apakah obsesi Kamu untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di tempat tinggal Kamu?
- Apakah Kamu tahu bahwa terdapat beasiswa perkuliahan?

Data kemudian dicacah menjadi dua bagian, mengacu pada jawaban pertanyaan nomor satu, yaitu yang akan melanjutkan pendidikan dan yang tidak akan melanjutkan pendidikan. Adapun data sekunder penulis dapatkan melalui dokumen atau sumber lain yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya rencana penetapan wilayah Garut Utara sebagai kawasan industri, membawa perubahan pada masyarakat yang cukup signifikan. Salah satu unsur masyarakat yang terkena pengaruh adalah para lulusan SMA/ sederajat di wilayah sekitar. Adanya alternatif pilihan pekerjaan menjadi buruh pabrik sedikit banyak mengubah minat para pelajar ini. Penelitian dilakukan untuk memotret minat lanjutan sekolah para pelajar di wilayah sekitar Garut Utara. Penulis mencoba membagi pembahasan ke dalam dua bagian yaitu pelajar yang berminat melanjutkan pendidikan dan pelajar yang tidak berminat melanjutkan pendidikan.

Pelajar yang Berminat Melanjutkan Pendidikan Berikut ini adalah grafik yang berisikan informasi mengenai jawaban informan yang memiliki minat untuk melanjutkan pendidikan.

Dengan membaca data pada gambar 1, dari ketiga sekolah dapat disimpulkan bahwa kebanyakan dari mereka beranggapan bahwa biaya kuliah menjadi faktor penyebab melanjutkan kuliah. Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar anak karena anak yang sedang belajar harus terpenuhi kebutuhan pokok dan fasilitas belajar, hal itu hanya dapat terpenuhi jika keluarga tersebut mempunyai cukup dana. Apalagi jika dilihat dari segi biaya perguruan tinggi yang begitu cukup mahal dan dengan biaya kuliah yang beragam tidak semua orangtua memiliki pendapatan yang cukup untuk menyekolahkan anak-anaknya hingga ke jenjang perkuliahan. Informan yang menjawab faktor biaya besar kemungkinan dapat dipicu karena keluarga informan berasal dari keluarga mampu secara finansial. Kemudian, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga menjadi faktor para informan untuk melanjutkan kuliah lebih banyak dan hanya sedikit dari informan yang menjawab bahwa faktor keluarga tidak mempengaruhi keinginan para informan untuk melanjutkan kuliah. Dalam hal ini minat dalam melanjutkan studi tumbuh dari keluarga yang juga memiliki kepedulian yang tinggi pada pendidikan.

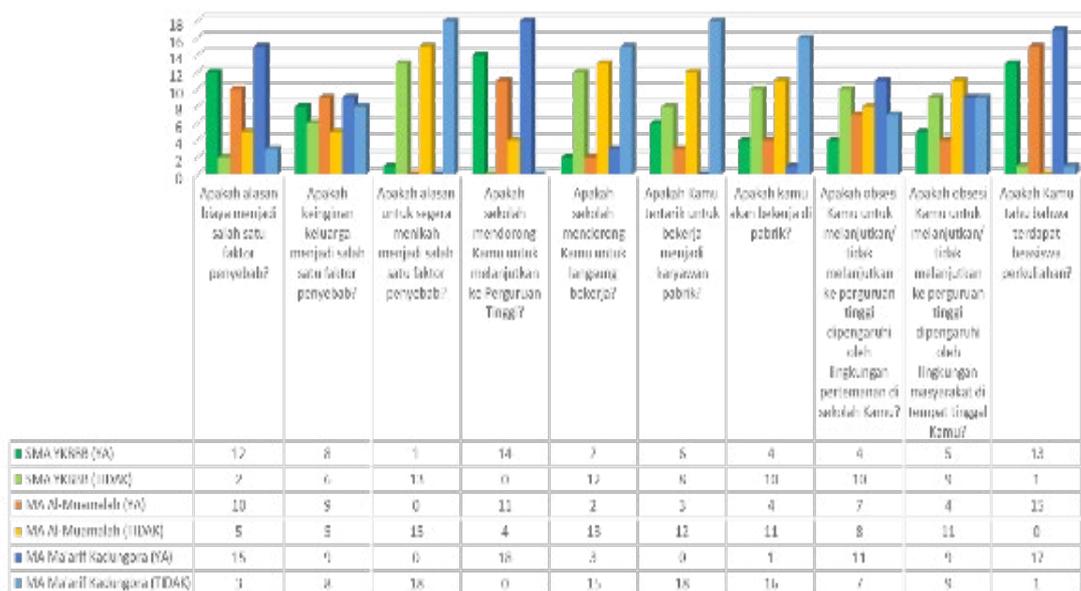
Lalu dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa sebagian besar informan yang memiliki minat melanjutkan studi menjawab bahwa pihak sekolah menjadi faktor pendorong para informan untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Kemudian, faktor lingkungan pertemanan juga rupanya menjadi salah satu pendorong minat melanjutkan studi, dan bagi mereka faktor lingkungan tempat tinggal cukup berpengaruh terhadap minat lanjutan studi. Hal ini terjadi karena kemungkinan

lingkungan tempat tinggal mereka terdapat orang-orang yang juga sedang menempuh pendidikan lanjutan.

Perihal adanya beasiswa perkuliahan, banyak informan yang ternyata sudah mengetahui adanya beasiswa tersebut. Hanya sedikit dari seluruh informan yang menjawab bahwa mereka tidak mengetahui adanya beasiswa perkuliahan. Maka, dapat disimpulkan bahwa adanya beasiswa menjadi faktor mereka untuk melanjutkan studi, meskipun mereka bukan dari keluarga yang berada tetapi keinginan dan tekad yang kuat untuk melanjutkan studi dapat dipengaruhi juga oleh adanya beasiswa perkuliahan. Informan yang Tidak Akan Melanjutkan Pendidikan. Berikut ini gambar 2. yang berisikan informasi mengenai jawaban informan yang tidak memiliki minat untuk melanjutkan pendidikan.

Dengan membaca data pada grafik tersebut, dari ketiga sekolah dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh informan menjawab bahwa alasan biaya adalah faktor yang mempengaruhi mereka untuk tidak melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Selain itu, lebih dari setengah informan menjawab bahwa faktor keinginan keluarga menjadi salah satu faktor mereka untuk tidak melanjutkan kuliah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga informan menjadi pengaruh bagi mereka untuk tidak melanjutkan studi. Jika dikorelasikan dengan poin pertama, besar kemungkinan para informan yang tidak melanjutkan studi dipengaruhi oleh keluarga yang keadaan ekonominya tidak mampu untuk membiayai para informan untuk melanjutkan studi. Adapun dari keseluruhan informan yang tidak akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi, sebagian besar tidak menjadikan alasan untuk segera menikah menjadi faktor penyebab tidak akan melanjutkan studi.

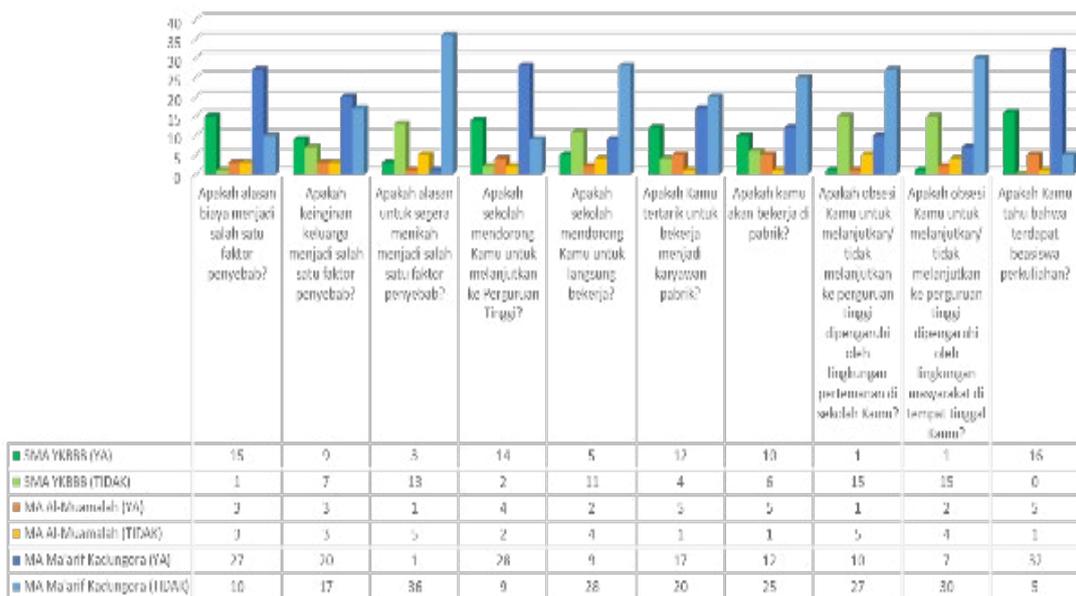
Dari hasil penelitian ditemukan bahwa meskipun sekolah-sekolah telah mendorong untuk melanjutkan



(Hasil olah Penulis, 2018)

Gambar 1. Ikhtisar Jawaban Informan yang Akan Melanjutkan Pendidikan

Potret Minat Lanjutan Sekolah: Analisis Dampak Rencana Penetapan Wilayah Garut Utara sebagai Kawasan Industri (Kurnia Muhammad Ramdhan, RD. Ahmad Buchari dan D. Anisa Sunija)



(Hasil olah Penulis, 2018)

Gambar 2. Ikhtisar Jawaban Informan yang Tidak Akan Melanjutkan Pendidikan

studi, tetapi itu tidak cukup mendorong para informan untuk melanjutkan studi. Minat dari informan yang menjawab demikian ternyata berbeda dari apa yang sudah sekolah usahakan. Ada faktor lainnya yang mungkin menyebabkan mereka tidak memiliki minat melanjutkan studi. Kemudian, sebagian besar para informan dari masing-masing sekolah menjawab bahwa mereka tertarik untuk menjadi karyawan pabrik, dan sebagian kecil lainnya tidak tertarik untuk menjadi karyawan pabrik. 92% dari 29 informan yang berasal dari SMA YKBBB menjawab bahwa mereka tertarik untuk menjadi karyawan pabrik, sedangkan 8% informan tidak tertarik. Sedangkan di MA Ma'arif menjawab bahwa hanya 17 orang informan yang tertarik untuk menjadi karyawan pabrik sedangkan sebanyak 20 orang lainnya tidak tertarik, kemudian dari MA Al Muamalah, sebanyak 5 informan menjawab bahwa mereka tertarik untuk menjadi karyawan pabrik, sedangkan 1 orang lainnya tidak tertarik untuk menjadi karyawan pabrik. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa yang paling banyak memiliki ketertarikan untuk bekerja di pabrik adalah informan dari SMA YKBBB dan MA Al Muamalah. Hal tersebut logis terjadi karena lokasi sekolah mereka yang dekat dengan pabrik.

Lalu, dari hasil penelitian ditemukan bahwa sebagian besar informan beralasan mereka tidak melanjutkan studi adalah bukan karena faktor lingkungan pertemanan. Selain itu, sebagian besar informan juga mengatakan bahwa lingkungan masyarakat di sekitar tempat tinggal bukan merupakan alasan mereka tidak melanjutkan studi. Terkait hal ini, faktor tidak adanya biaya kembali menjadi penyebab yang paling signifikan untuk mempengaruhi minat lanjutan studi. Berkaitan dengan beasiswa, sebagian besar para informan memiliki pengetahuan akan

adanya beasiswa perkuliahan. Namun, adanya beasiswa perkuliahan tetap saja tidak mempengaruhi mereka untuk tidak melanjutkan studi.

SIMPULAN

Rencana tentang penetapan wilayah Garut Utara sebagai kawasan industri membawa konsekuensi perubahan pada berbagai hal, salah satunya yaitu mengenai minat lanjutan sekolah para pelajar SMA/MA di kawasan Garut Utara. Hasil studi penelitian ini menunjukkan bahwa semenjak berdirinya beberapa pabrik industri yang ada di kawasan Garut Utara menyebabkan sebagian masyarakat terpengaruhi oleh beragam penyebab yang menimbulkan minat lanjutan sekolah minim. Sebagian masyarakat dalam hal ini pelajar yang memiliki minat untuk melanjutkan studi, mereka mendapatkan pengaruh dari keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan pertemanan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Hal ini menjadi faktor pendorong bagi mereka untuk melanjutkan studi. Kemudian, ada juga yang tidak akan melanjutkan studi, meskipun telah mendapat dorongan dari berbagai pihak seperti dari lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat agar mereka dapat melanjutkan sekolah. Alasan utama penyebab hal tersebut adalah biaya dan dukungan keluarga. Kemudian, adanya pabrik yang dekat dengan tempat tinggal ternyata mempengaruhi pemikiran mereka bahwa setelah lulus akan bekerja di pabrik. Hal yang sangat mungkin bahwa ada pelajar yang ingin melanjutkan sekolah namun terhalang berbagai hal. Adanya dorongan dari pihak sekolah dapat membantu para siswanya agar tetap melanjutkan studi dengan melakukan mediasi dengan orang tua para siswa. Hal ini juga dapat didorong dengan adanya pemahaman mengenai beasiswa perkuliahan yang akan membantu memudahkan keluarga

dalam hal biaya. Karena para informan sendiri memiliki pengetahuan akan adanya beasiswa yang mana beasiswa ini dapat dijadikan alternatif pilihan yang tepat untuk meringankan keuangan keluarga.

Persoalan yang timbul dari daerah industrialisasi baru dengan kondisi perekonomian masyarakat yang belum maju tentu perlu menjadi bagian dari perhatian dan tanggung jawab pemegang otoritas. Berkaitan dengan hal ini, pemegang otoritas perlu memberikan proteksi dan bertanggungjawab atas pembentukan Sumber Daya Manusia yang berkualitas untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dian Rahman Ramadan yang telah membantu Penulis dalam penelitian di lapangan. Serta kepada pihak SMA YKBBB Leles, MA Al Muamalah Leles, dan MAS Ma'arif Kadungora yang telah memberikan izin Penulis untuk melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Berita Acara Kesepakatan Hasil Survei dan Verifikasi Lapangan Calon Lokasi Kawasan industri dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Garut Tahun 2011-2031. (2017, Januari 19).

Crow, L.D. (1963). *Educational Psychology*. New York: American Book Company.

Davis-Kean, P. (2005). The influence of parent education and family income in child achievement: the indirect role of parental expectations and the home environment. *Journal of Family Psychology*, 19, (2), 294-304.

Djaali, H. (2011). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hamalik, O. (2004). *Proses belajar mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.

Najafian, M.d. (2013). Factors affecting increase (decrease) in interest and guiding students towards higher education. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 7, (7), 980-985.

Okioga, C.K. (2013). The impact of students's socio-economic background on academic performance in Universities, a case of students in Kisli University Collage. *American International Journal of Social Science*, 2, (2), 38-46.

PP Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. (t.thn.).

Slameto, (2003). *Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Williams, K. (2013). Five key ingredients for improving student motivation. *Research in Higher Educational Journal*, 104-122.

Winkel, S. &. (1984). *Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar*. Jakarta: Gramedia.

PETUNJUK PENULISAN:

Berikut ini adalah petunjuk penulisan dan template artikel yang telah direvisi dan mulai diberlakukan pada edisi penerbitan tahun 2019. Artikel di tulis tidak kurang dari 5000 kata dan tidak lebih dari 7000 kata

This is the revised author guidelines and article template of the Jurnal Sosiohumaniora Unpad that applied for publication year 2016 onwards. Article begins with title followed by authors' name, affiliation, and address, then abstract.

PENYERAHAN ARTIKEL:

Lakukan pendaftaran atau registrasi online pada alamat **<http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/user/register>**. di bagian akhir form, pilih Daftar sebagai: penulis. Pada tahap selanjutnya, lakukan unggah file artikel dalam bentuk .doc (Ms.Word di utamakan office 2003-2007) di link [Penyerahan Naskah Baru]. Berilah Checklist pada isian Checklist naskah untuk menunjukkan bahwa naskah yang akan diunggah sudah mengikuti templet jurnal dan panduan penulisan. Jika sudah, klik Simpan dan lanjutkan. Di tahap ini klik Browse dan pilih file artikel yang akan dikirimkan untuk Jurnal Sosiohumaniora. Klik Unggah. Klik Simpan dan lanjutkan. Selanjutnya, isi form yang ada hingga Penyerahan Selesai.

PANDUAN PENULIS

JUDUL ARTIKEL (TNR,12pt Bold)

Asep Sumaryana¹, Rd. Ahmad Buchari¹, Agus Nero² Ini namaku di sini² (TNR,10pt Bold)

¹Fakultas, Universitas/instansi, Jl. Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor, 456363 (TNR, 10pt Normal)

²Afiliasiku ditulis di sini, Ini alamat afiliasiku dituliskan lengkap di sini

E-mail: xxxxx@email.com ; penulis2@email.com ; penulis3@email.com ; penulis3@email.com

ABSTRAK (10pt Bold)

Abstrak ditulis dalam satu paragraf, spasi tunggal, berisi maksimal 250 kata, dengan menggunakan huruf Times New Roman 10pt. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang baik dan benar. Abstrak harus memuat tujuan penelitian, metode (karakteristik subjek penelitian, populasi, sampel, teknik sampling, metode pengumpulan data, serta analisis data), hasil penelitian, serta kesimpulan singkat. Jika dianggap perlu, pada bagian akhir paragraph dapat diberikan rekomendasi berdasarkan temuan penelitian. Di bawah abstrak, sertakan lima kata kunci yang masing-masing dipisahkan dengan tanda titik koma (;). Pilihlah kata kunci yang memudahkan artikel Anda ditemukan mesin penjelajah.

Kata kunci; petunjuk penulisan; jurnal sosiohumaniora; Unpad; template

ENGLISH TITLE ARTICLES (TNR,12pt Bold)

ABSTRACT (10pt Bold)

Abstract should be written in a one-space paragraph, containing max 250 words, and written in Times New Roman 10 pt. Abstract should be written in Bahasa Indonesia and English. Abstract should include study aims, methods (participant characteristics, population, sample, sampling methods, data collection, and data analysis), findings, and conclusions. If necessary, a recommendation can be given at the end of paragraph. Following the abstract, provide five keywords separated with semicolon (;). Choose keywords carefully that enable search engine to locate your article.

Key words; author guidelines; jurnal sosiohumaniora; Unpad; template

PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan, penulis harus menuliskan tujuan penelitian di bagian akhir pendahuluan. Sebelum menuliskan tujuan penelitian, penulis harus menuliskan (secara berurutan) latar belakang, kajian literatur terdahulu (state of the art) sebagai dasar “gap analysis” pernyataan kebaruan ilmiah dari artikel, permasalahan penelitian, dan hipotesis (bila ada). Di dalam pendahuluan tidak diperkenankan adanya tinjauan pustaka yang terpisah dalam sub judul tersendiri sebagaimana di laporan penelitian, tetapi dituliskan terintegrasi dengan penjelasan mengenai latar belakang penelitian sehingga kajian literatur tersebut dapat menunjukkan state of the art- atau kebaruan temuan ilmiah.

METODE

Bagian metode berisi penjelasan tentang jenis penelitian/ desain penelitian. Bagian ini menjelaskan tentang jumlah subjek dan karakteristik subjek disertai data demografi (Azwar, 2007). Pada penelitian kuantitatif, jika penelitian menggunakan alat ukur tertentu, perlu disampaikan nama alat ukur, jumlah aitem, koefisien reliabilitas, serta metode analisis data yang digunakan. Pada penelitian kualitatif, dijelaskan perspektif kualitatif yang digunakan, hingga metode pengambilan data dan analisisnya (Willig, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan berisi hasil-hasil temuan penelitian dan pembahasannya secara ilmiah. Tuliskan temuan-temuan ilmiah (scientific finding) yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan tetapi harus ditunjang oleh data-data yang memadai. Temuan ilmiah yang dimaksud di sini adalah bukan data-data hasil penelitian yang diperoleh. Temuan-temuan ilmiah tersebut harus dijelaskan secara saintifik meliputi: Apakah temuan ilmiah yang diperoleh? Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa trend variabel seperti itu? Semua pertanyaan tersebut harus dijelaskan secara ilmiah, tidak hanya deskriptif, dan ditunjang oleh data empiris yang memadai. Selain itu, harus dijelaskan juga perbandingannya dengan hasil-hasil para peneliti lain yang hampir sama topiknya. Hasil-hasil penelitian dan temuan harus bisa menjawab hipotesis dan/atau pertanyaan penelitian di bagian pendahuluan.

Tabel (maksimal 6 tabel) dan Gambar (maksimal 6 gambar) diletakkan di dalam kelompok teks sesudah tabel atau gambar tersebut dirujuk. Setiap gambar harus diberi judul gambar di sebelah bawah gambar tersebut dan bernomor urut angka diikuti dengan judul gambar. Setiap tabel harus diberi judul tabel dan bernomor urut angka di sebelah atas tabel tersebut diikuti dengan sumber tabel.

Gambar-gambar harus dijamin dapat tercetak dengan jelas (ukuran font, resolusi dan ukuran garis harus yakin tercetak jelas berupa jpeg). kelompok Gambar

terdiri dari diagram/skema, tabel dan sebaiknya diletakkan sesuai kolom diantara kelompok teks atau jika terlalu besar diletakkan di bagian tengah halaman. Tabel tidak boleh mengandung garis-garis vertikal, sedangkan garis-garis horisontal diperbolehkan tetapi hanya yang penting-penting saja.

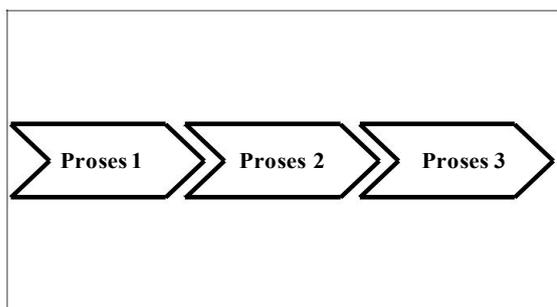
Tabel 1. Korelasi Antar Variabel

Aspek Dukungan Keluarga	Stres Kerja	
	<i>r</i>	<i>p</i>
Dukungan emosional	0,167
Dukungan penghargaan	0,255
Dukungan nasihat	0,285
Dukungan instrument

(Sumber:)

Keterangan: Tuliskan nilai *p* (bukan $p < 0,05$ atau $p < 0,001$) kecuali jika hasil analisisnya menunjukkan $p = 0,000$ maka harus dituliskan $p < 0,001$; atau jika hasilnya $p = 1,000$ maka harus dituliskan $p > 0,99$. Untuk memudahkan mengenali signifikansi, bisa ditambahkan tanda ** untuk nilai $p < 0,001$ dan * untuk nilai $p < 0,05$.

SIMPULAN



Gambar 1. Prosedur Penelitian

Bagian Simpulan terdiri dari satu paragraf saja namun menggambarkan jawaban dari hipotesis dan/atau tujuan penelitian atau temuan ilmiah yang diperoleh. Simpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil temuan seperti yang diharapkan di tujuan penelitian. Bila perlu, di bagian akhir simpulan dapat juga dituliskan hal-hal yang akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH (bila ada)

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pemberi dana penelitian atau donatur dan pihak-pihak yang membantu pelaksanaan penelitian yang kontribusinya tidak cukup signifikan untuk dimasukkan dalam kelompok penulis (authorship).

DAFTAR PUSTAKA

Semua referensi yang dikutip/disitasi dalam naskah artikel harus dicantumkan dalam bagian Daftar Pustaka. Daftar Pustaka harus berisi pustaka-pustaka acuan yang berasal

dari sumber primer (jurnal ilmiah; minimum 80%) dari keseluruhan daftar pustaka) diterbitkan 10 (sepuluh) tahun terakhir. Jumlah referensi yang disitasi minimal 15 (lima belas) sumber pustaka. Penulisan kutipan atau sitasi disarankan menggunakan program aplikasi manajemen referensi misalnya: Mendeley, grammarly, EndNote, Zotero, atau lainnya. Format penulisan yang digunakan di Jurnal Sosiohumaniora Unpad adalah APA 6th Edition (American Psychological Association, 2010).

Pustaka yang berupa majalah/jurnal ilmiah:

Agustinus. W. (2016) Kerangka Ekonomi Makro Daerah Kota Bitung di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. *Sosio-humaniora*, 18, 185-190.

Shintadewi, E.A & Sumartias S. (2017). Promosi Kesehatan Hiv-Aids dan Stigma Terhadap Penggunaan Narkoba Suntik (Penasun) di Kabupaten Sumedang. *Sosiohumaniora*, 19, (2), 129-140.

Nugrahanto, W. & Adyawardhina, R. (2018). Demokrasi Dalam Sejarah Militer Indonesia; Kajian Histois Tentang Pemilihan Panglima Tentara Pertama Tahun 1945. *Sosiohumaniora*, 20, (2), 78-85. doi: <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i1.14368>

Pustaka yang berupa judul buku:

Azwar, S. (2007). Metode penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Lunsford, A., & Ede, L. (2009). Child education: Perspective on teaching activities. Carbondale: Illinois University Press.

Willig, C. (2008). Introducing qualitative research in psychology: adventures in theory and method. (2nd ed.). London: McGraw-Hill Open University Press

Pustaka yang berupa Prosiding Seminar:

Desiningrum, D. R. (2011). Future time perspective, goal orientation, and subjective well being in elderly. The Padjadjaran International Conference on Psychology (pp.17-23). Bandung, Indonesia: Faculty of Psychology, Padjadjaran University.

Pustaka yang berupa disertasi/tesis/skripsi:

Pratama, A. G. (2009). Kontribusi kesejahteraan-an subjektif pada religiusitas Islam, persepsi tentang penyakit, dan perilaku menjaga kesehatan diri dalam model perilaku memelihara kesehatan: Suatu upaya menemukan model perilaku memelihara kesehatan dengan taraf keccokan optimal pada penderita HIV+. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung.

Pustaka yang berupa Handbook:

Albarracin, Johnson, & Zanna. (2005). The handbook of attitudes. New Jersey: Erlbaum.

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association. Sixth edition. Washington D.C.: American Psychological Association

INDEKS PENULIS

- D**
Dian Indira 34–39
Diarsi Eka Yani 52–57
- I**
Idha Farida 52–57
Ilham Junaid 22–33
Ida Ayu Iran Adhiti 90–97
I Nyoman Rajeg Mulyawan 90–97
I Nyoman Suwija 90–97, 95–97
- K**
Kantirina Rachaju 17–21
Kuswarini Kusno 11–16
- L**
Lies Sulistyowati 11–16
Lestari Manggong 98–106, 99–106
Lia Maulia Indrayani 98–106
- M**
Muhammad Dahlan 78–82
- N**
Ngusman Abdul Manaf 46–51, 51
Novia Juita 46–51, 51
Nur Syamsiyah 11–16
Nurul Huda, Ludivica E 52–57
- R**
Raden Muhammad Mulyadi 34–39
Ranti Permatasari 46–51
Riki Nasrullah 34–39
- S**
Setijorini 52–57
Sulistyodewi Nur Wiyono 11–16
Sulyana Dadan 83–89

INDEKS SUBJEK

- A**
Agrowisata 11–16, 12–16, 14–16
akulturasi budaya 34–39, 37–39, 38–39
anggah-ungguh basa 90–97, 91–97, 96–97
- B**
Badan Usaha Milik Daerah 78–82
bahasa Indonesia 46–51, 47–51, 49–51, 50–51, 51
Budaya Organisasi 78–82
bicara bahasa Bali 90–97, 91–97, 96–97, 97
- D**
desa wisata 1–10, 2–10, 3–10, 4–10, 5–10, 6–10, 7–10, 8–10, 9–10
Desa Wonoharjo 34–39, 35–39, 36–39, 37–39, 38–39, 39
desain kaus oblong 83–89, 84–89, 85–89, 87–89, 89
Desentralisasi 58–64, 63–64
- E**
Elyta 40–45, 41–45, 43–45, 45
Etnis Jawa 34–39
- F**
Frontier 40–45
- I**
Identifikasi Risiko 11–16, 14–16
Implementasi Inovasi 78–82
- K**
Kabupaten Bone 22–33, 24–33, 25–33, 26–33, 27–33, 28–33, 29–33, 30–33, 31–33, 32–33
karakteristik 52–57, 53–57, 56–57
Kekerasan Laki-laki atas Perempuan 65–77
Kesiapan 58–64, 59–64, 60–64, 63–64
Ketidakadilan Gender 65–77, 71–77
Kinerja Manajer 78–82
Kinerja Pelayanan Publik 78–82
Kota Parepare 22–33, 23–33, 24–33, 25–33, 26–33, 27–33, 28–33, 29–33, 30–33, 31–33, 32–33, 33
kawasan industri 107–112, 108–112, 109–112, 111–112
- L**
level kemampuan membaca 98–106
- M**
makna inheren perbuatan 46–51, 47–51
manajemen destinasi 22–33, 23–33, 24–33, 32–33
Mangga 11–16, 12–16, 14–16, 16
migrasi 34–39, 35–39, 36–39, 37–39
mahasiswa FIB Unpad. 98–106
minat 107–112, 108–112, 109–112, 110–112, 111–112
- N**
Nationalism 40–45, 41–45, 42–45, 43–45, 44–45, 45
nuansa makna 46–51, 47–51, 49–51, 50–51, 51
- P**
Pangandaran 34–39, 35–39, 36–39, 37–39, 38–39, 39
pariwisata 1–10, 3–10, 4–10, 7–10
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia 17–21
Pemekaran daerah 58–64, 61–64
Pemerintahan Daerah 17–21
pendidikan jarak jauh 52–57
pentaheliks pariwisata 22–33, 23–33, 24–33, 26–33, 27–33, 28–33, 29–33, 30–33, 31–33, 32–33
penyuluh 52–57, 53–57, 54–57, 55–57, 56–57, 57
perubahan sosial 83–89, 84–89, 86–89, 87–89, 88–89, 89
profil 52–57, 53–57, 54–57
pendidikan 107–112, 108–112, 109–112, 110–112
- R**
Reformasi 17–21
Relasi Gender 65–77
representasi 83–89, 84–89, 86–89, 87–89, 89
- S**
sinergi 22–33, 23–33, 24–33, 28–33, 29–33, 30–33, 32–33
sinonim 46–51, 47–51, 48–51, 49–51, 50–51, 51
Sistem Patriarki 65–77
sosiolinguistik 90–97, 91–97
sikap bahasa 98–106, 99–106, 100–106
- V**
verba transitif 46–51, 47–51, 48–51, 49–51, 50–51
- W**
Weavers' Woman 40–45
wisata pendidikan 1–10, 2–10, 3–10, 4–10, 5–10, 6–10, 9–10

UCAPAN TERIMA KASIH

Dewan Redaksi Jurnal Sosiohumaniora menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Eng. Pradono, SE., M.Ec., Dev (Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, ITB)
2. Dr. Ismail Nurdin, M.Si. (Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri)
3. Dr. Kunto Sofianto, M.Hum. (Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran)
4. Mokhammad Anwar, SE., M.Si., Ph.D. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran)
5. Prof. Dr. Ir. Hj Yosini Deliana, MS. (Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran)
6. Dr. Evie Ariadne Shinta Dewi, M.Pd. (Fakultas IKOM, Universitas Padjadjaran)
7. Prof. Dr. Ir. Yogi, MS. (Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, ITB)
8. Prof. Dr. Ir. Nandan Limakrisna, MM., CQM., CMA. (Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta)
9. Endah Djuwendah, SP., MS. (Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran)
10. Dr. Herwan Abdul Muhyi, M.Si. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran)
11. Dr. Prayoga Bestari (Universitas Pendidikan Indonesia)
12. Dr. Ramadhan Pancasilawan, M.Si. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran)
13. Dr. Dian Indira, M.Hum. (Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran)
14. Drs. Slamet Usman Ismanto, M.Si. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran)
15. Dr. Bagdja Muljarijadi, S.E., MS (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran)
16. Dr. Mas Halimah, S.IP., M.Si. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran)
17. Dr. Ir. Marina Sulistyati, MS. (Fakultas Peternakan, Universitas Padjadjaran)
18. Mokhammad Anwar, SE., M.Si., Ph.D. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran)
19. Dr. Dra. R. Nunung Nurwati, M.Si. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran)
20. Dra. Susi Machdalena, M.Hum., Ph.D (Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran)
21. Dr. Dra. Ypsi Soeria Soemantri, M.Hum (Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran)
22. Dr. Asep Agus Handaka Suryana, S.Pi., MT (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Padjadjaran)
23. Prof. Dr. Drs. Sam'un Jaja Raharja, M.Si. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran)
24. Dr. Raden Muhammad Mulyadi, SS., M.Hum. (Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran)
25. Dr. Risna Resnawaty, MP. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran)

Sebagai Mitra Bestari (*Peer Reviewer*) pada Jurnal Sosiohumaniora Volume 21 No. 2 Maret 2019. Atas kerjasama yang terjalin selama ini dalam membantu kelancaran penerbitan Jurnal Sosiohumaniora, sehingga mulai pada edisi kali ini Jurnal Sosiohumaniora masuk Peringkat Akreditasi SINTA 2. Semoga kerjasama ini berjalan lebih baik untuk masa yang akan datang.

Pemimpin/Redaksi